



**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

# **LAPORAN KINERJA |2025**





## PERNYATAAN TELAH DIREVIU



### KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112  
website : <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: [itjen@pertanian.go.id](mailto:itjen@pertanian.go.id)

#### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 11 Februari 2026



Inspektur IV

Drh. Pujo Hamadi, MP



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dapat menyelesaikan tugas dan fungsi dengan baik dalam mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, khususnya pangan asal ternak di Indonesia.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan, maka Ditjen PKH selaku instansi pemerintah telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis instansi yang dilaksanakan sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sehingga berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan, serta pencapaian tujuan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

LKj Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan.

Kami berharap, LKj Ditjen PKH Tahun 2025 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Ditjen PKH untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.



Jakarta, 06 Februari 2026

Direktur Jenderal,

Dr. drh. Agung Suganda, M.Si.  
NIP. 197611252003121001



## DAFTAR ISI

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....                                     | ii   |
| KATA PENGANTAR.....                                                | iii  |
| DAFTAR ISI .....                                                   | iv   |
| DAFTAR TABEL .....                                                 | v    |
| DAFTAR GRAFIK.....                                                 | vii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                               | ix   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                          | x    |
| I. PENDAHULUAN .....                                               | 1    |
| 1.1. Latar Belakang.....                                           | 1    |
| 1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....                             | 4    |
| 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....                      | 4    |
| 1.4. Sumber Daya Manusia .....                                     | 8    |
| 1.5. Dukungan Anggaran .....                                       | 10   |
| 1.6. Sistematisasi Penyusunan Laporan Kinerja.....                 | 11   |
| II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....                        | 13   |
| 2.1. Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 .....                  | 13   |
| 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen PKH .....                    | 20   |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....                            | 21   |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA.....                                    | 27   |
| 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program ..... | 27   |
| 3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2025 .....              | 28   |
| 3.3. Kinerja Lainnya .....                                         | 118  |
| 3.4. Akuntabilitas Keuangan .....                                  | 122  |
| 3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....                | 127  |
| IV. PENUTUP .....                                                  | 130  |





## DAFTAR TABEL

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PKH .....                                      | 15 |
| Tabel 2 Program, Sasaran Program (SP), dan Indikator Kinerja Program (IKP) .....                      | 17 |
| Tabel 3 Program, Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Target .....              | 20 |
| Tabel 4 Target Kinerja Ditjen PKH Tahun 2025 .....                                                    | 22 |
| Tabel 5 Rincian Output (RO) Ditjen PKH T.A. 2025 .....                                                | 23 |
| Tabel 6 Capaian Indikator Sasaran Program Ditjen PKH Tahun 2025 .....                                 | 28 |
| Tabel 7 Produksi Daging per Komoditas Tahun 2025 (dalam juta ton) .....                               | 32 |
| Tabel 8 Realisasi Produksi Daging Tahun 2020-2025 (dalam juta ton) .....                              | 32 |
| Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Daging Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah ..... | 33 |
| Tabel 10 Proporsi Kontribusi Per Jenis Ternak Penyumbang Produksi Daging .....                        | 34 |
| Tabel 11 Bantuan Ternak ke Masyarakat Tahun 2022-2025 .....                                           | 37 |
| Tabel 12 Distribusi Semen Beku Tahun 2021-2025 .....                                                  | 38 |
| Tabel 13 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Tahun 2025 .....                             | 43 |
| Tabel 14 Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Tahun 2025 .....                                         | 43 |
| Tabel 15 Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Tahun 2025 .....                                         | 44 |
| Tabel 16 Produksi Telur Tahun 2025 (dalam juta ton) .....                                             | 50 |
| Tabel 17 Realisasi Produksi Telur Tahun 2020-2025 (dalam juta ton) .....                              | 50 |
| Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Telur Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah ..... | 51 |
| Tabel 19 Proporsi Kontribusi Per Jenis Ternak Penyumbang Produksi Telur Tahun 2025 .....              | 52 |
| Tabel 20 Produksi Susu Tahun 2025 (dalam ribu ton) .....                                              | 56 |
| Tabel 21 Realisasi Produksi Susu Tahun 2020-2025 (dalam ribu ton) .....                               | 57 |
| Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Susu dengan Target Jangka Menengah .....             | 57 |
| Tabel 23 Produksi Bibit dan Benih Sapi Perah Tahun 2020-2024 .....                                    | 62 |
| Tabel 24 Realisasi Indikator Kinerja Program Indeks Keamanan Komoditas Peternakan Tahun 2025 .....    | 65 |



|                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Keamanan Komoditas Peternakan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah .....                                          | 66  |
| Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....                     | 71  |
| Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 ..... | 79  |
| Tabel 28 Indeks Harga yang Diterima Peternak Tahun 2024-2025 .....                                                                                                   | 83  |
| Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Harga yang Diterima Peternak Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah .....                                           | 83  |
| Tabel 30 Indeks Mutu Komoditas Peternakan Tahun 2025.....                                                                                                            | 88  |
| Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah .....                                              | 89  |
| Tabel 32 Realisasi Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2024-2025 .....                                                                                                 | 92  |
| Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Volume Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah .....                                          | 93  |
| Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan Ditjen PKH Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....                     | 100 |
| Tabel 35 Perhitungan Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 .....                                                | 104 |
| Tabel 36 Realisasi Parameter Reformasi Birokrasi Ditjen PKH Tahun 2020-2025                                                                                          | 105 |
| Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen PKH Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah .....                                       | 105 |
| Tabel 38 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025 Berdasarkan Kegiatan .....                                                                                          | 126 |
| Tabel 39 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025 Berdasarkan Kewenangan ...                                                                                          | 126 |
| Tabel 40 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025 Berdasarkan Jenis Belanja...                                                                                        | 127 |



## DAFTAR GRAFIK

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik 1 Sumber Daya Manusia Ditjen PKH Tahun 2025.....              | 9   |
| Grafik 2 Alokasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025.....                  | 10  |
| Grafik 3 Pemotongan Komoditas Peternakan Tahun 2024-2025 .....       | 36  |
| Grafik 4 Data Pemotongan Hewan Kurban Tahun 2024-2025 .....          | 36  |
| Grafik 5 Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025.....          | 46  |
| Grafik 6 Dinamika Perubahan Pagu Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025 ..... | 125 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKH .....                                                                           | 11  |
| Gambar 2 Kerangka Strategis Ditjen PKH Tahun 2025-2029 .....                                                                               | 18  |
| Gambar 3 UPT Penerima Penghargaan Pelayanan Prima dan Praktik Baik Inovasi Tahun 2025 .....                                                | 119 |
| Gambar 4 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai Peraih <i>Institution Advancing SSTC - FAO Global Technical Recognition</i> ..... | 120 |
| Gambar 5 Ditjen PKH Menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 .....                                            | 121 |
| Gambar 6 Piagam Penghargaan Juara Harapan III <i>Cashless Management System Award</i> Tingkat Eselon I .....                               | 122 |





## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 .....                                                                                             | 135 |
| Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 .....                                                                                                | 136 |
| Lampiran 3 Tabel Produksi Ternak Tahun 2024-2025 .....                                                                                                                                         | 144 |
| Lampiran 4 Perhitungan per Komponen Indeks Keamanan Komoditas Peternakan Tahun 2025 .....                                                                                                      | 146 |
| Lampiran 5 Perhitungan Indikator Kinerja Program “Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan Tahun 2025.....                                                                   | 151 |
| Lampiran 6 Perhitungan Indikator Kinerja Program “ Persentase Wilayah yang Terkendali dari <i>Zoonosis</i> dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia” Tahun 2025 ..... | 152 |
| Lampiran 7 Indeks Harga yang Diterima Peternak Tahun 2025.....                                                                                                                                 | 155 |
| Lampiran 8 Perhitungan Koefisien Bobot pada Indeks Mutu Komoditas Peternakan .....                                                                                                             | 156 |
| Lampiran 9 Data Volume dan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024-2025* (Angka Tetap s.d. November 2025).....                                                     | 158 |
| Lampiran 10 Data Dukung Indikator “Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan Tahun 2025”.....                                                                                            | 160 |
| Lampiran 11 Data Dukung Indikator “Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen PKH Tahun 2025” .....                                                                                                   | 163 |
| Lampiran 12 Perhitungan Analisis Efisiensi Sumber Daya Ditjen PKH T.A. 2025..                                                                                                                  | 175 |
| Lampiran 13 Rincian Norma Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Ditjen PKH Tahun 2025 .....                                                                                                    | 207 |
| Lampiran 14 Manual IKU Ditjen PKH Tahun 2025-2029 .....                                                                                                                                        | 210 |
| Lampiran 15 Surat Keputusan Dirjen PKH tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 .....                             | 211 |



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diwujudkan dalam tiga Sasaran Program yaitu (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta (3) Program Dukungan Manajemen.

Selanjutnya dari ketiga Sasaran Program tersebut dijabarkan dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Program (IKP) meliputi (1) Produksi Daging, (2) Produksi Telur, (3) Produksi Susu, (4) Indeks Keamanan Komoditas Peternakan, (5) Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan, (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia, (7) Indeks Harga yang Diterima Peternak, (8) Indeks Mutu Komoditas Peternakan, (9) Volume Ekspor Komoditas Peternakan, (10) Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan, dan (11) Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang berisi capaian Indikator Kinerja Program berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tahun 2025-2029 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PKH Tahun 2025 didukung dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.268.284.347.000,- dengan realisasi Rp. 1.216.548.447.400,- atau mencapai 95,92% (termasuk anggaran diblokir). Blokir anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8.239.953.000,- sehingga pagu anggaran tanpa blokir sebesar Rp. 1.260.044.394.000,- dengan realisasi serapan anggaran tanpa blokir sebesar 96,55%.

Rata-rata capaian kinerja Ditjen PKH Tahun 2025 sebesar **102,24% (Sangat Berhasil)** dengan uraian 6 (enam) capaian indikator kinerja termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yaitu: (1) Produksi Daging; (2) Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan; (3) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia; (4) Indeks Mutu Komoditas Peternakan; (5) Volume Ekspor Komoditas Peternakan; dan (6) Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, 5 (lima) capaian indikator kinerja termasuk kategori **Berhasil**, yaitu: (1) Produksi Telur; (2) Produksi Susu; (3) Indeks Keamanan Komoditas Peternakan; (4) Indeks Harga yang Diterima Peternak; dan (5) Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan. Adapun Indikator kinerja yang belum mencapai target 100%, yaitu: produksi telur, produksi susu, Indeks Keamanan Komoditas Peternakan, Indeks Harga yang Diterima Peternak.

Pada tahun 2025, Ditjen PKH menghadapi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya: 1) Fragmentasi implementasi kebijakan antar instansi dan kurangnya sinergi



regulasi antar Kementerian/ Lembaga, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum; 2) Manajemen anggaran dan program seperti *refocusing* program, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan efisiensi anggaran; 3) Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan, baik dari segi kuantitas maupun pemerataan antar wilayah; 4) Belum optimalnya sistem data dan informasi peternakan nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah secara *real time*; 5) Kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang belum merata; 6) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan; 7) Kurangnya insentif dan pembiayaan bagi pelaku usaha peternakan skala kecil-menengah; 8) Belum optimalnya pengawasan keamanan dan mutu produk hewan di seluruh rantai pasok; 9) Penurunan jumlah rumah tangga peternak; 10) Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan *zoonosis* di beberapa wilayah di Indonesia yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 11) Masih tingginya struktur ongkos pakan karena adanya alih fungsi lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak; 12) Daya saing produk peternakan lokal masih rendah; 12) Persaingan global dan tekanan pasar produk asal hewan; dan 13) Dampak perubahan iklim.

Beberapa upaya telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah dari dana APBN maupun Non APBN. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mendorong percepatan peningkatan populasi dan produksi ternak dalam rangka mewujudkan swasembada pangan asal ternak, maka Ditjen PKH pada tahun 2026 secara berkesinambungan akan terus melakukan berbagai program/kegiatan terobosan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Percepatan peningkatan produksi daging, susu dan telur: (1). peningkatan populasi dan produksi melalui Investasi dan optimalisasi reproduksi; (2). Peningkatan Kapasitas Peternak Rakyat melalui Kemitraan (akses teknologi, modal/akses pembiayaan KUR/PKBL, akses pasar).
2. Diversifikasi pakan dengan pemanfaatan bahan pakan lokal dan pengembangan hijauan pakan yang berkualitas dan adaptif terhadap pengaruh perubahan iklim, serta penguatan Cadangan pakan melalui Bank Pakan.
3. Modernisasi peternakan dan Adopsi Teknologi Digital (efisiensi, traceability, keamanan pangan)
4. Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (surveilans, biosekuriti, laboratorium, vaksin) dan Kolaborasi *One Health* (integrasi lintas sektor untuk kesehatan, lingkungan, pertanian)
5. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber, selain Rupiah Murni dan non APBN antara lain: BLU, PNBPN, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kredit perbankan, kerja sama antar negara, dan hibah luar negeri.
6. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* terkait, serta memperkuat regulasi yang mendukung percepatan peningkatan produksi daging, susu dan telur nasional.
7. Pembinaan terhadap unit pengolahan hasil peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk
8. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan, kerjasama dengan negara lain dalam bentuk pelatihan, internship program dan Pendidikan pasca sarjana.



# BAB I

## PENDAHULUAN





## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, pembangunan pertanian berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029 berfokus pada kemandirian pangan dan energi, modernisasi pertanian, hilirisasi produk, peningkatan produktivitas melalui inovasi, serta kesejahteraan petani, dengan pendekatan kawasan dan integrasi *One Health* untuk ketahanan pangan, gizi, dan ekologi, serta diversifikasi pangan lokal, menuju Indonesia lumbung pangan dunia.

Salah satu sumber pangan adalah produk peternakan. Ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan kualitas pangan dan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Rata-rata konsumsi daging penduduk Indonesia apabila disetarakan dengan protein selama periode 2021-2025 menunjukkan angka yang berfluktuasi, tetapi terjadi peningkatan selama periode tersebut. Rata-rata konsumsi daging setara protein pada tahun 2021 sebesar 4,38 gram/kapita/hari dan tahun pada 2025 meningkat menjadi 5,03 gram/kapita/hari. Namun, rata-rata konsumsi telur dan susu apabila disetarakan dengan protein mengalami penurunan dari 3,49 gram/kapita/hari pada tahun 2021 menjadi 3,34 gram/kapita/hari pada tahun 2025.

Dalam mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai amanat RPJPN maupun RPJMN, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memiliki tugas “Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Hilirisasi Hasil Peternakan” sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, kinerja Ditjen PKH diukur dari aspek teknis berupa produksi komoditas peternakan dan kinerja pendukungnya maupun aspek makro ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), serta Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) dan Nilai Tukar Usaha Petani Peternak (NTUPT).

Pada aspek teknis, capaian utama subsektor peternakan yaitu produksi komoditas strategis utama, yaitu daging, telur, dan susu. Pada periode 2021-2025 pertumbuhan produksi komoditas peternakan cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 4,03% untuk daging, 3,32% untuk telur dan -2,64% untuk susu.

Selanjutnya, pada aspek makro berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti sempit (sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian) secara kumulatif triwulan I hingga triwulan III



tahun 2025 dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 6,53% (*c to c*). Pertumbuhan positif tersebut juga merupakan hasil kontribusi subsektor peternakan. PDB subsektor peternakan secara kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2025 (Angka Sangat Sementara) sebesar Rp.157.242,60 Miliar atau meningkat 8,10% (*c to c*).

Peningkatan produksi peternakan tidak hanya diarahkan hanya pada peningkatan PDB subsektor peternakan, tetapi adanya kesinambungan dengan peningkatan pendapatan peternak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Salah satu indikator kesejahteraan peternak adalah NTPT, NTUPT, dan It. Pada tahun 2025, NTPT senilai 101,49 atau menurun 0,97% dibandingkan dengan tahun 2024, kemudian untuk NTUPT tahun 2025 senilai 104,60 atau menurun 0,17% dibandingkan dengan tahun 2024, sementara untuk It tahun 2025 sebesar 124,28 atau meningkat 1,11% dibandingkan dengan tahun 2024.

Kemudian, salah satu pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada sektor hilir, yaitu melalui pemberdayaan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi PMDN secara kumulatif triwulan I hingga triwulan III tahun 2025 sebesar Rp 3,76 triliun atau tumbuh sebesar 5,59% jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 (*c to c*). Investasi PMA secara kumulatif triwulan I hingga triwulan III tahun 2025 sebesar US\$ 47,03 juta atau tumbuh sebesar 172,82% jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 (*c to c*). Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Hal tersebut tergambar dari hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) bahwa jumlah usaha peternakan di Indonesia mencapai 12,19 juta unit.

Pelaksanaan pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang berkelanjutan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Adapun potensi yang dimiliki Ditjen PKH yang harus dimanfaatkan dengan optimal yaitu: 1) Populasi ternak di Indonesia yang beragam dan cukup besar mencerminkan pentingnya sektor peternakan dan kesehatan hewan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; 2) Eksistensi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menjamin kesejahteraan hewan, kesejahteraan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional; 3) Kekayaan sumber daya genetik ternak lokal yang adaptif, efisien dalam pakan, dan tahan terhadap penyakit endemik; 4) Kerangka regulasi dan kebijakan mendukung peternakan dan kesehatan hewan; 5) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak; 6) Penerapan praktik peternakan yang baik (*Good Breeding/ Farming Practices*); 7) Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan; 8) Edukasi dan kesadaran masyarakat; dan 9) Keamanan dan mutu produk hewan.

Namun demikian, terdapat kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis yang harus dihadapi oleh Ditjen PKH diantaranya yaitu: 1) Fragmentasi implementasi kebijakan antar instansi dan kurangnya sinergi regulasi antar Kementerian/ Lembaga





serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum; 2) Manajemen anggaran dan program seperti *refocusing* program, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan efisiensi anggaran; 3) Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan, baik dari segi kuantitas maupun pemerataan antar wilayah; 4) Belum optimalnya sistem data dan informasi peternakan nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah secara *real time*; 5) Kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang belum merata; 6) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan; 7) Kurangnya insentif dan pembiayaan bagi pelaku usaha peternakan skala kecil-menengah; 8) Belum optimalnya pengawasan keamanan dan mutu produk hewan di seluruh rantai pasok; 9) Penurunan jumlah rumah tangga peternak; 10) Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan *zoonosis* di beberapa wilayah di Indonesia yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 11) Masih tingginya struktur ongkos pakan karena adanya alih fungsi lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak; 12) Daya saing produk peternakan lokal masih rendah; 12) Persaingan global dan tekanan pasar produk asal hewan; dan 13) Dampak perubahan iklim.

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan subsektor peternakan, Ditjen PKH melaksanakan 3 (tiga) program yaitu: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan (3) Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan dengan akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelaksanaan program/kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan *stakeholder* sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Pertanian.



## **1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Struktur organisasi Ditjen PKH sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan budidaya ternak, dengan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran;



- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan produksi dan peredaran; dan
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
2. Direktorat Pakan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan, dengan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pakan.
3. Direktorat Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, dengan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;



- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan; dan
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Kesehatan Hewan.
4. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dengan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan, dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan, dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan, dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan, dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan, dan



- pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil peternakan, dengan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.
6. Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;





- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan bantuan hukum lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PKH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 1.

#### **1.4. Sumber Daya Manusia**

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi suatu organisasi merupakan aset yang sangat penting. SDM yang dikelola dengan baik dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Ditjen PKH dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 2.993 orang pegawai yang tersebar di 1 Kantor Pusat sebanyak 565 orang pegawai dan 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 2.428 orang pegawai dengan uraian sebagai berikut:

1. Distribusi Status Kepegawaian
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.679 orang pegawai dengan sebaran 356 orang pada Kantor Pusat dan 1.323 orang pada UPT.
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 159 orang pegawai dengan sebaran 46 orang pada Kantor Pusat dan 113 orang pada UPT.
  - c. Berdasarkan klasifikasi pola waktu kerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbagi menjadi dua, yaitu PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. PPPK Penuh Waktu sebanyak 486 orang pegawai dengan



sebaran 121 orang pada Kantor Pusat dan 365 orang pada UPT; dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 524 orang pegawai dengan sebaran 23 orang pada Kantor Pusat dan 501 orang pada UPT.

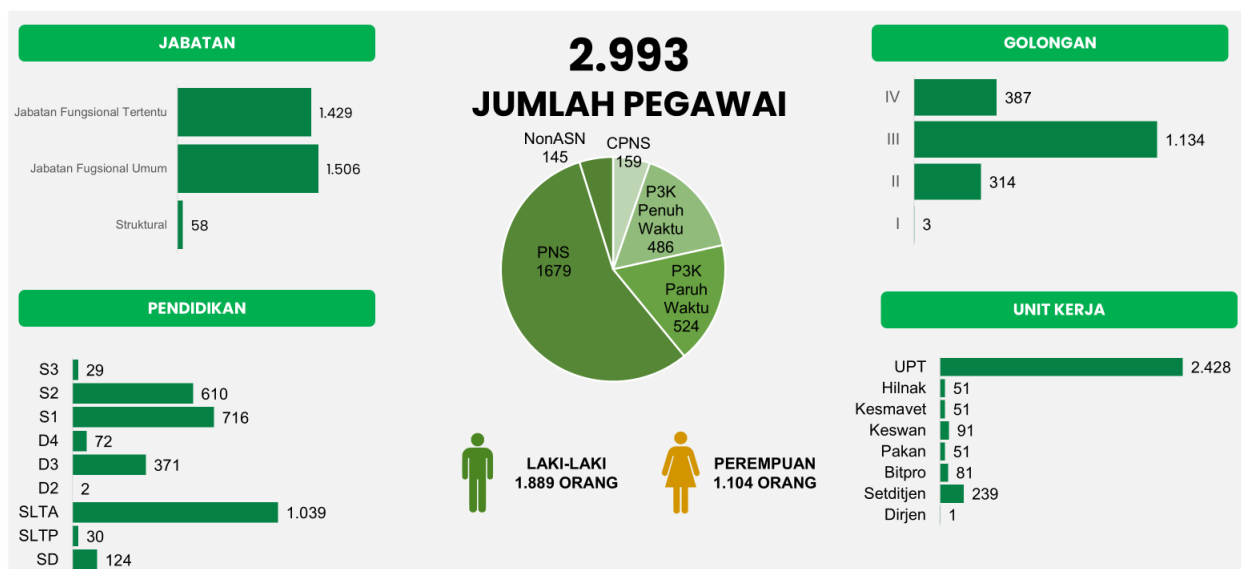
- d. *Outsourcing*/Non-ASN sebanyak 145 orang pegawai dengan sebaran 19 orang pada Kantor Pusat dan 126 orang pada UPT.

2. Distribusi per Unit Kerja

- a. Jumlah pegawai Kantor Pusat sebanyak 565 orang yang terdiri dari Direktorat Jenderal sebanyak 1 orang; Sekretariat Ditjen sebanyak 239 orang; Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 81 orang; Direktorat Pakan sebanyak 51 orang; Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 91 orang; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 51 orang, dan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebanyak 51 orang.

- b. Jumlah pegawai UPT sebanyak 2.428 orang yang tersebar pada 23 UPT.

3. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 1.889 orang dan perempuan sebanyak 1.104 orang



Sumber: Sekretariat Ditjen PKH, data diolah, 2 Januari 2026.

Grafik 1 Sumber Daya Manusia Ditjen PKH Tahun 2025

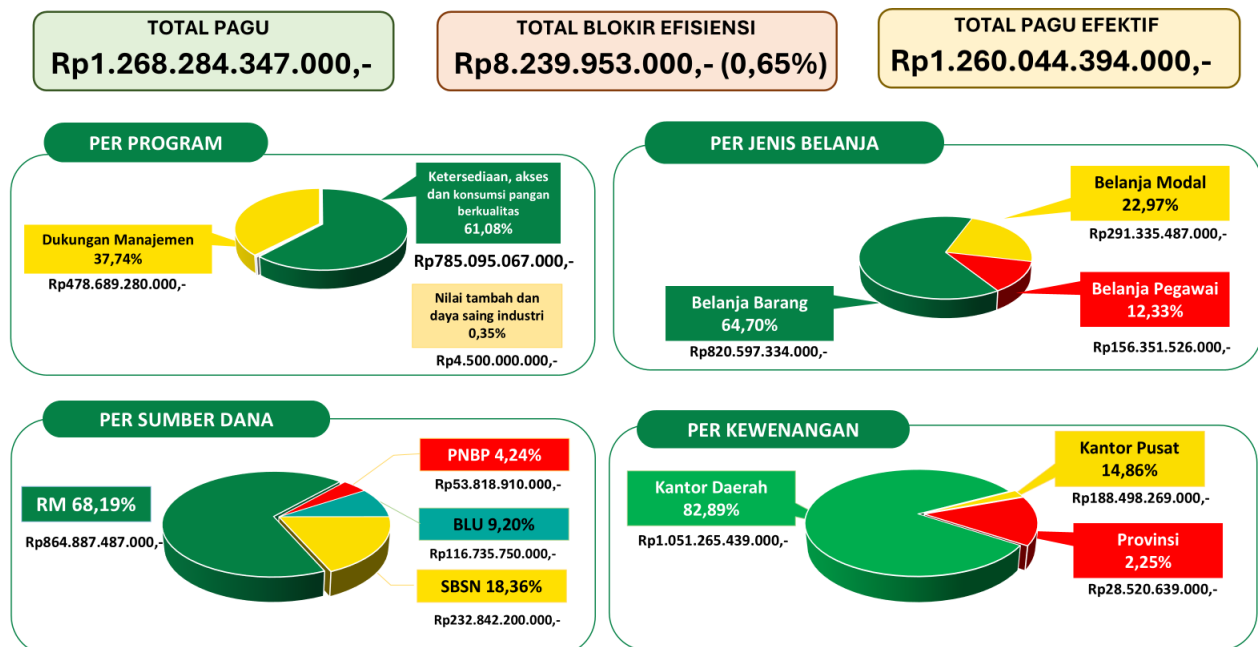
4. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 387 orang; Golongan III sebanyak 1.134 orang; Golongan II sebanyak 314 orang; dan Golongan I sebanyak 3 orang.
5. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 29 orang; S-2 sebanyak 609 orang; S-1 sebanyak 719 orang; D-4 sebanyak 73 orang; D-3 sebanyak 375 orang; D-2 sebanyak 2 orang; SLTA sebanyak 1.034 orang; SLTP sebanyak 30 orang; dan SD sebanyak 122 orang.



6. Jumlah pegawai menurut kelas jabatan: Struktural sebanyak 58 orang; Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 1.506 orang; Medik Veteriner sebanyak 411 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 316 orang; Pengawas Mutu Pakan sebanyak 175 orang; Pengawas Bibit Ternak sebanyak 216 orang; Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) lainnya sebanyak 311 orang;

Jumlah pegawai Ditjen PKH tahun 2025 sebanyak 2.993 orang jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 1.796 orang mengalami kenaikan sebanyak 1.197 orang atau 66,65%. Kenaikan jumlah pegawai disebabkan karena adanya pengangkatan PPPK Tahap I dan Tahap II, PPPK Paruh Waktu dan *outsourcing* dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan tenaga non-ASN.

### 1.5. Dukungan Anggaran



Sumber: website SATU DJA, Kementerian Keuangan, diakses pada 31 Desember 2025

Grafik 2 Alokasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2025, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Ditjen PKH memperoleh alokasi APBN sebesar Rp1.268.284.347.000,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dengan jumlah blokir anggaran sebesar Rp8.239.953.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) sehingga total pagu efektif sebesar Rp1.260.044.394.000,- (*satu triliun dua ratus enam puluh miliar empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*). Proporsi anggaran terbesar berdasarkan kewenangan terdapat pada Kantor Daerah sebesar Rp1.051.265.439.000,00 (82,89%). Selanjutnya, proporsi anggaran terbesar berdasarkan jenis belanja terdapat pada Belanja



Barang sebesar Rp820.597.334.000,00 (64,70%), dan berdasarkan kegiatan terdapat pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp478.689.280.000,00 (37,74%). Proporsi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya merupakan proporsi terbesar karena untuk pemenuhan pelayanan teknis minimal pada UPT lingkup Ditjen PKH.

### 1.6. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:



Gambar 1 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKH





## **BAB II**

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA





## II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029

Peternakan sebagai bagian dari pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selaras dengan Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen PKH periode 2025-2029. Renstra Ditjen PKH ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13718/KPTS/HK.160/F/12/2025, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang didukung dengan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas. Renstra Ditjen PKH 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi panduan pelaksanaan selama lima tahun yang selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029.

#### Visi

Selaras dengan visi Kementerian Pertanian “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Ditjen PKH merumuskan visi:

***Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia***

#### Misi

Dalam mendukung Misi Kementerian Pertanian 2025-2029 serta berkontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, upaya strategis dalam mewujudkan visi Ditjen PKH, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Ditjen PKH sebagai berikut:

#### 1. **Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**

Misi ini menekankan pada peningkatan produksi ternak dengan sistem budi daya peternakan berkelanjutan agar hasil peternakan dapat terus dinikmati hingga



generasi berikutnya. Budidaya peternakan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peningkatan produksi dimulai dari pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), budidaya ternak hingga produksi ternak dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dalam negeri.

## **2. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat**

Kesejahteraan peternak, khususnya peternak rakyat menjadi prioritas dan muara atas upaya yang dilakukan, baik dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, maupun melalui penyediaan akses terhadap pasar produk peternakan, maupun melalui penyediaan akses terhadap pasar produk peternakan. Hilirisasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat yang berkeadilan, sehingga taraf hidup peternak rakyat dapat semakin meningkat. Misi ini fokus pada meningkatkan kesejahteraan maupun keadilan peternak rakyat melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, hilirisasi produk peternakan maupun memastikan ketersediaan akses pasar produk peternakan.

## **3. Meningkatkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Misi ketiga adalah menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari pangan asal ternak maupun dari penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia. Misi ini menekankan pada pentingnya mutu dan keamanan pangan asal ternak bagi kesehatan manusia. Selain itu, misi ini juga menekankan pencegahan dan penanganan penyakit hewan, khususnya yang dapat berdampak kepada kesehatan manusia.

### **Tujuan**

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi. Berdasarkan tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, maka tujuan Ditjen PKH tahun 2025-2029 adalah:

### **1. Meningkatkan volume usaha peternakan**

Tujuan Ditjen PKH ini merupakan lingkup dipersempit dari Tujuan 1 Kementerian Pertanian, yaitu **meningkatkan volume usaha peternakan**. Peningkatan volume usaha peternakan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan ini memiliki satu Indikator Tujuan yaitu Indeks Harga yang diterima peternak.



## 2. Terpenuhinya produksi komoditas peternakan

Terwujudnya swasembada pangan asal peternakan mengindikasikan bahwa produksi pangan asal ternak prioritas, yaitu daging, telur, dan susu dapat memenuhi minimal 90% kebutuhan daging, telur, dan susu masyarakat. Tujuan ini memiliki satu Indikator Tujuan yaitu Persentase produksi pangan asal ternak prioritas.

## 3. Terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan

Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, tetapi sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki dua indikator yaitu Volume ekspor komoditas peternakan dan Indeks hilirisasi komoditas peternakan..

## 4. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan

Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak pada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti *Monkeypox*, *Anthraks*, *Avian Influenza* dan lain sebagainya, mempengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan pada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini memiliki satu Indikator Tujuan yaitu Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Tujuan dan indikatornya merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2025-2029. Penjabaran tujuan dan indikator tujuan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PKH

| Visi                                                                                    | Misi                                                                                                                                             | Tujuan                                        | Indikator Tujuan                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia | 1. Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) | 1. Terpenuhinya produksi komoditas peternakan | 1. Persentase terpenuhinya produksi pangan asal ternak prioritas (%) |
|                                                                                         | 2. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat                                                                                  | 2. Meningkatnya volume usaha peternakan       | 1. Indeks Harga yang diterima peternak (Indeks)                      |



| Visi | Misi                                                                                        | Tujuan                                                                                     | Indikator Tujuan                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                             | 3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan                              | 1. Volume ekspor komoditas peternakan (ton)<br>2. Indeks hilirisasi komoditas peternakan (Indeks) |
|      | 3. Meningkatkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 4. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan | 1. Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner (Indeks)                                                 |

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2025-2029

### Sasaran Program

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, Sasaran Program (SP) mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program. Ditjen PKH mendukung 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) program dari 5 (lima) program Kementerian Pertanian. Sasaran Strategis (SS) tersebut yaitu:

1. SS 1 : Meningkatnya pendapatan petani
2. SS 2 : Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan
3. SS 3 : Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian
4. SS 4 : Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan
5. SS 6 : Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia
6. SS 7: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi

Tahun 2025-2029, Ditjen PKH melaksanakan 3 (tiga) program yaitu i) Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, ii) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan iii) Dukungan Manajemen dengan rincian Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tersaji pada Tabel 2.



Tabel 2 Program, Sasaran Program (SP), dan Indikator Kinerja Program (IKP)  
Ditjen PKH Tahun 2025-2029

| Program                                             | Sasaran Program |                                                                                                              | Indikator |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | SP 5            | Terpenuhinya Produksi Komoditas Peternakan                                                                   | IKP 5.1   | Produksi Daging                                                                                                           |
|                                                     |                 |                                                                                                              | IKP 5.2   | Produksi Telur                                                                                                            |
|                                                     |                 |                                                                                                              | IKP 5.3   | Produksi Susu                                                                                                             |
|                                                     | SP 6            | Terjaminnya Keamanan Komoditas Peternakan                                                                    | IKP 6.1   | Indeks Keamanan Komoditas Peternakan                                                                                      |
|                                                     | SP 7            | Terkendalnya Wilayah atau Kawasan dari Penyakit Hewan                                                        | IKP 7.1   | Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan                                                                |
| Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri    | SP 8            | Terkendalnya Wilayah dari <i>Zoonosis</i> dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia  | IKP 8.1   | Persentase Wilayah yang Terkendali dari <i>Zoonosis</i> dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia |
|                                                     | SP 15           | Meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Peternak                                                             | IKP 15.1  | Indeks Harga yang Diterima Peternak                                                                                       |
|                                                     | SP 16           | Terjaminnya Mutu Komoditas Peternakan                                                                        | IKP 16.1  | Indeks Mutu Komoditas Peternakan                                                                                          |
|                                                     | SP 17           | Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                          | IKP 17.1  | Volume Ekspor Komoditas Peternakan                                                                                        |
|                                                     | SP 18           | Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Peternakan Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi                 | IKP 18.1  | Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan                                                                           |
| Dukungan Manajemen                                  | SP 6            | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Baik, Transparan, dan Akuntabel | IKP 6.1   | Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                           |

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2025-2029

### Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Ditjen PKH merupakan upaya strategis yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan Ditjen PKH guna mencapai visi dan misi Ditjen PKH tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH disusun berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH yang selaras dengan rumah strategi Kementerian Pertanian sebagaimana tersaji pada Gambar 2.



Berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029, tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen PKH yaitu “Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”. Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara yaitu: 1) Pertumbuhan volume usaha peternakan, 2) Kemandirian pangan asal peternakan berkelanjutan, 3) Nilai tambah dan daya saing produk peternakan, dan 4) Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan dan produk hewan.



Gambar 2 Kerangka Strategis Ditjen PKH Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan yaitu:

1. Pilar strategis 1: Ketersediaan akses pasar peternakan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar peternakan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk peternakan nasional. **Arah kebijakan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 adalah Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing**, dengan kegiatan 1) Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan dan 2) Perluasan pasar ekspor peternakan dalam memperluas *market share* produk peternakan Indonesia.

2. Pilar strategis 2: Budidaya ternak modern, produktif dan berkelanjutan dalam menghasilkan pangan bermutu dan aman

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya ternak berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan *Good Farming Practices*, *Good Breeding Practices* maupun regulasi terkait peternakan dan kesehatan hewan terkait ternak akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini. **Arah kebijakan yang dilakukan dalam pilar strategis 2 adalah Produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional**, dengan kegiatan 1)



Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) ternak, 2) Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas, 3) Memastikan ketersediaan pakan yang bermutu, aman, dan terjangkau, 4) Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada ternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, termasuk mengurangi susut pangan asal ternak, dan 5) Penjaminan mutu dan keamanan produk peternakan.

3. Pilar strategis 3: Pengolahan hasil peternakan

Pilar strategis hilirisasi hasil peternakan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dengan cara a) penanganan pasca panen, pengolahan dan diversifikasi produk dengan tujuan meningkatkan nilai tambah, b) integrasi hulu hilir dari penyediaan input produksi, budidaya, pasca panen pengolahan, penjaminan mutu dan pemasaran dengan tujuan memperkuat rantai nilai, c) pengembangan pasar baik domestik maupun ekspor. **Arah kebijakan yang dilakukan dalam pilar strategis 3 adalah Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing**, dengan kegiatan 1) Pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi, dan 2) Meningkatkan kualitas produk ekspor peternakan dalam memenuhi permintaan ekspor pangan asal peternakan.

4. Pilar strategis 4: Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas) adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular, *zoonosis* keamanan produk hewan serta menekan risiko penyebaran penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, produksi pangan asal hewan dan ketahanan pangan nasional. **Arah kebijakan yang dilakukan dalam pilar strategis 4 adalah Penegakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional**, dengan kegiatan 1) Kesiapsiagaan dari penularan penyakit hewan dan produk hewan, 2) Ketahanan dari penularan penyakit hewan, 3) Kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap *zoonosis*, keamanan dan kesehatan produk hewan.

5. Pondasi strategis: Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Pondasi strategis merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh pilar strategis yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi dan kelembagaan Ditjen PKH maupun tata kelola birokrasi Ditjen PKH. **Arah kebijakan yang dilakukan dengan pondasi strategis ini adalah Birokrasi Ditjen PKH yang transparan dan akuntabel**, dengan kegiatan 1) Mengembangkan modal manusia (*human capital*) SDM Ditjen PKH yang produktif, 2) Mengembangkan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang tepat fungsi dan ukuran, 3) Mendukung pelaksanaan penajaman reformasi



birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen PKH, dan 4) Memberikan layanan internal yang berkualitas dan berbasis digital.

## 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen PKH

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program serta menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Ditjen PKH dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sesuai dokumen Renstra Ditjen PKH Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Program yang ingin dicapai Ditjen PKH dalam periode 2025-2029 sesuai dengan Renstra Ditjen PKH 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Program, Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Target Ditjen PKH Tahun 2025-2029

| Program                                             | Sasaran Program |                                                                                                       | Indikator |                                                                                                                        | Target |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                     |                 |                                                                                                       |           |                                                                                                                        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | SP 5            | Terpenuhinya Produksi Komoditas Peternakan                                                            | IKP 5.1   | Produksi Daging (juta ton)                                                                                             | 4,97   | 5,12   | 5,28   | 5,44   | 5,60   |
|                                                     |                 |                                                                                                       | IKP 5.2   | Produksi Telur (juta ton)                                                                                              | 7,44   | 7,75   | 8,08   | 8,43   | 8,79   |
|                                                     |                 |                                                                                                       | IKP 5.3   | Produksi Susu (ribu ton)                                                                                               | 866,28 | 893,96 | 922,45 | 939,55 | 943,64 |
|                                                     | SP 6            | Terjaminnya Keamanan Komoditas Peternakan                                                             | IKP 6.1   | Indeks Keamanan Komoditas Peternakan (Indeks)                                                                          | 0,61   | 0,63   | 0,66   | 0,68   | 0,70   |
|                                                     | SP 7            | Terkendalinya Wilayah atau Kawasan dari Penyakit Hewan                                                | IKP 7.1   | Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan (%)                                                         | 80,00  | 80,30  | 80,60  | 85,00  | 90,00  |
|                                                     | SP 8            | Terkendalinya Wilayah dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia | IKP 8.1   | Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia (%) | 41,00  | 41,50  | 42,00  | 42,50  | 43,00  |
|                                                     |                 |                                                                                                       |           |                                                                                                                        |        |        |        |        |        |
|                                                     |                 |                                                                                                       |           |                                                                                                                        |        |        |        |        |        |



| Program                                          | Sasaran Program |                                                                                                                      | Indikator |                                                                                          | Target  |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                  |                 |                                                                                                                      |           |                                                                                          | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
| Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | SP 15           | Meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Peternak                                                                     | IKP 15.1  | Indeks Harga yang Diterima Peternak (Indeks)                                             | 124,75  | 126,62  | 128,52  | 130,45  | 132,41  |
|                                                  | SP 16           | Terjaminnya Mutu Komoditas Peternakan                                                                                | IKP 16.1  | Indeks Mutu Komoditas Peternakan (Indeks)                                                | 0,49    | 0,51    | 0,53    | 0,55    | 0,57    |
|                                                  | SP 17           | Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                  | IKP 17.1  | Volume Ekspor Komoditas Peternakan (ton)                                                 | 499.432 | 514.415 | 540.136 | 567.143 | 595.500 |
|                                                  | SP 18           | Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Peternakan Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi                         | IKP 18.1  | Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan (Indeks)                                 | 0,20    | 0,40    | 0,60    | 0,80    | 1,00    |
| Dukungan Manajemen                               | SP 6            | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Baik, Transparan, dan Akuntabel | IKP 6.1   | Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Indeks) | 0,885   | 0,887   | 0,891   | 0,895   | 0,899   |

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2025-2029

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan implementasi atas amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementerian Pertanian.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis



dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani digunakan sebagai komitmen organisasi yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan pada bulan Desember 2024, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen PKH T.A. 2025 disahkan. Seiring berjalannya waktu, selama tahun 2025 Ditjen PKH melakukan 3 (tiga) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu:

- Revisi I pada bulan Juli 2025 dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran yang semula sebesar Rp1.213.291.406.000,- menjadi Rp1.246.791.406.000,- sebagai tindak lanjut Surat Plt. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Pertanian Nomor B-1997/RC.110/A/05/2025 tanggal 8 Mei 2025 hal Permohonan Relaksasi Blokir Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Pertanian T.A. 2025.
- Revisi II pada bulan September 2025 dikarenakan adanya perubahan anggaran dan perubahan target Indikator Kinerja Program sebagai tindak lanjut Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1336/HK.230/A.1/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 hal Penyusunan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) T.A. 2025 dan sesuai Surat KemenPANRB Nomor B/638/AA.05/2024, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, bahwa penetapan target indikator dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 disesuaikan dengan capaian tahun 2024 (minimal sama dengan atau lebih besar).
- Revisi III pada bulan Desember 2025 dikarenakan adanya perubahan anggaran dan perubahan Indikator Kinerja Program sebagai tindak lanjut telah terbitnya Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2025-2029.

Dokumen rincian perubahan setiap Perjanjian Kinerja tersaji pada Lampiran 2 dan Target Kinerja Ditjen PKH yang termuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Target Kinerja Ditjen PKH Tahun 2025

| Sasaran Program                                             | Indikator Kinerja Program                                             | Target 2025 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| SP 5 Terpenuhinya Produksi Komoditas Peternakan             | IKP 5.1 Produksi Daging (juta ton)                                    | 4,97        |
|                                                             | IKP 5.2 Produksi Telur (juta ton)                                     | 7,44        |
|                                                             | IKP 5.3 Produksi Susu (ribu Ton)                                      | 866,28      |
| SP 6 Terjaminnya Keamanan Komoditas Peternakan              | IKP 6.1 Indeks Keamanan Komoditas Peternakan (Indeks)                 | 0,613       |
| SP 7 Terkendalinya Wilayah atau Kawasan dari Penyakit Hewan | IKP 7.1 Persentase Wilayah/Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan (%) | 80,00       |





| Sasaran Program                                                                                                           | Indikator Kinerja Program                                                                                                      | Target 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SP 8 Terkendalnya Wilayah dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia                 | IKP 8.1 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia (%) | 41,00       |
| SP 15 Meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Peternak                                                                    | IKP 15.1 Indeks Harga yang Diterima Peternak (Indeks)                                                                          | 124,75      |
| SP 16 Terjaminnya Mutu Komoditas Peternakan                                                                               | IKP 16.1 Indeks Mutu Komoditas Peternakan (Indeks)                                                                             | 0,49        |
| SP 17 Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                 | IKP 17.1 Volume Ekspor Komoditas Peternakan (Ton)                                                                              | 531.329     |
| SP 18 Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Peternakan Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi                        | IKP 18.1 Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan (Indeks)                                                              | 0,20        |
| SP 6 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Baik, Transparan, dan Akuntabel | IKP 6.1 Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Indeks)                               | 0,885       |

Sumber: Perjanjian Kinerja Dirjen PKH Tahun 2025 (Revisi III)

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4, Ditjen PKH menjabarkannya pada Rincian Output (RO) yang terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi dengan besaran anggaran per 31 Desember 2025 tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5 Rincian Output (RO) Ditjen PKH T.A. 2025

| No | Rincian Output (RO)                                                 | Pagu Awal       | Blokir | Pagu Efektif    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 1  | 1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan               | 1.119.011.000   | -      | 1.119.011.000   |
| 2  | 1783.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan           | 175.702.000     | -      | 175.702.000     |
| 3  | 1783.QJA.001 Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan                      | 5.398.970.000   | -      | 5.398.970.000   |
| 4  | 1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan     | 4.579.382.000   | -      | 4.579.382.000   |
| 5  | 1784.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan | 300.000.000     | -      | 300.000.000     |
| 6  | 1784.QAH.001 Layanan Kesehatan Hewan                                | 105.754.300.000 | -      | 105.754.300.000 |



| No | Rincian Output (RO)                                                                                                                             | Pagu Awal       | Blokir      | Pagu Efektif    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 7  | 1784.QJA.001 Hasil Uji Mutu Obat Hewan                                                                                                          | 7.759.175.000   | -           | 7.759.175.000   |
| 8  | 1784.QJC.001 Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi                                                                            | 49.339.198.000  | -           | 49.339.198.000  |
| 9  | 1784.RAG.001 Sarana Bidang Kesehatan Hewan                                                                                                      | 4.227.680.000   | -           | 4.227.680.000   |
| 10 | 1784.RAG.003 Obat Hewan dan Bahan Biologik yang diproduksi                                                                                      | 46.441.508.000  | -           | 46.441.508.000  |
| 11 | 1784.RAG.007 SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia                                                                          | 20.442.295.000  | -           | 20.442.295.000  |
| 12 | 1784.RAG.008 SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah    | 17.661.200.000  | -           | 17.661.200.000  |
| 13 | 1784.RBK.007 SBSN Prasarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia                                                                       | 51.557.705.000  | -           | 51.557.705.000  |
| 14 | 1784.RBK.008 SBSN Prasarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah | 35.838.800.000  | -           | 35.838.800.000  |
| 15 | 1784.RBK.009 Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia                                                      | 3.893.556.000   | -           | 3.893.556.000   |
| 16 | 1785.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak                                                                  | 1.850.000.000   | -           | 1.850.000.000   |
| 17 | 1785.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak                                                              | 500.000.000     | 165.539.000 | 334.461.000     |
| 18 | 1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul                                                                                                                | 51.953.184.000  | -           | 51.953.184.000  |
| 19 | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul                                                                                                                | 28.920.967.000  | -           | 28.920.967.000  |
| 20 | 1785.QEO.003 Bantuan Ternak Ruminansia Potong                                                                                                   | 3.060.040.000   | -           | 3.060.040.000   |
| 21 | 1785.QEO.004 Bantuan Ternak Unggas                                                                                                              | 164.862.675.000 | -           | 164.862.675.000 |
| 22 | 1785.QEO.005 Bantuan Ternak Lainnya                                                                                                             | 1.247.148.000   | -           | 1.247.148.000   |
| 23 | 1785.RAG.001 Sarana perbibitan ternak                                                                                                           | 27.568.936.000  | -           | 27.568.936.000  |
| 24 | 1785.RAG.007 SBSN Sarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari                                                                            | 26.018.600.000  | -           | 26.018.600.000  |
| 25 | 1785.RBK.001 Prasarana perbibitan ternak                                                                                                        | 19.716.030.000  | -           | 19.716.030.000  |
| 26 | 1785.RBK.007 SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari                                                                         | 81.323.600.000  | -           | 81.323.600.000  |



| No            | Rincian Output (RO)                                                                                  | Pagu Awal                | Blokir               | Pagu Efektif             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 27            | 1786.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner                       | 4.737.554.000            | -                    | 4.737.554.000            |
| 28            | 1786.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner                   | 500.000.000              | -                    | 500.000.000              |
| 29            | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                                                | 13.876.975.000           | -                    | 13.876.975.000           |
| 30            | 1786.RAG.001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                   | 4.470.876.000            | -                    | 4.470.876.000            |
| 31            | 1787.EBA.956 Layanan BMN                                                                             | 469.774.000              | 241.883.000          | 227.891.000              |
| 32            | 1787.EBA.957 Layanan Hukum                                                                           | 893.024.000              | -                    | 893.024.000              |
| 33            | 1787.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                               | 87.984.000               | -                    | 87.984.000               |
| 34            | 1787.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                             | 425.542.000              | -                    | 425.542.000              |
| 35            | 1787.EBA.962 Layanan Umum                                                                            | 15.408.543.000           | 4.517.577.000        | 10.890.966.000           |
| 36            | 1787.EBA.963 Layanan Data dan Informasi                                                              | 2.104.168.000            | 826.604.000          | 1.277.564.000            |
| 37            | 1787.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum                                                                   | 150.416.000              | -                    | 150.416.000              |
| 38            | 1787.EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                     | 444.738.377.000          | -                    | 444.738.377.000          |
| 39            | 1787.EBB.951 Layanan Sarana Internal                                                                 | 2.962.852.000            | -                    | 2.962.852.000            |
| 40            | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM                                                                   | 1.346.426.000            | 323.239.000          | 1.023.187.000            |
| 41            | 1787.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                    | 3.293.195.000            | -                    | 3.293.195.000            |
| 42            | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                         | 1.405.723.000            | 237.137.000          | 1.168.586.000            |
| 43            | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan                                                              | 5.403.256.000            | 1.927.974.000        | 3.475.282.000            |
| 44            | 5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan            | 2.276.811.000            | -                    | 2.276.811.000            |
| 45            | 5891.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | 300.000.000              | -                    | 300.000.000              |
| 46            | 5891.QDB.001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor      | 1.923.189.000            | -                    | 1.923.189.000            |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                      | <b>1.268.284.347.000</b> | <b>8.239.953.000</b> | <b>1.260.044.394.000</b> |

Sumber: <https://satudja.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 31 Desember 2025



# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS**

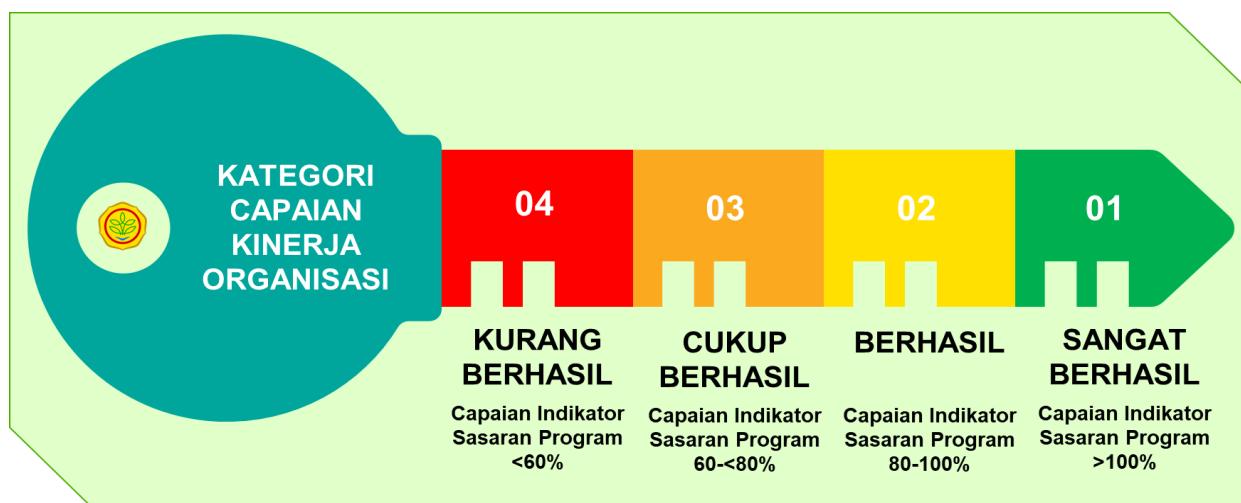
### **KINERJA**



### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

Kinerja Ditjen PKH tahun 2025 dinilai berdasarkan hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Program yaitu membandingkan realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dirjen PKH. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka evaluasi kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan kategori capaian kinerja melalui *scoring* dengan mengelompokkan capaian dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80%-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60%-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan.



Evaluasi kinerja Ditjen PKH tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, serta terhadap target Kementerian Pertanian atau standar nasional dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi target, sehingga diperoleh rekomendasi serta upaya perbaikan pada periode berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.





### 3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Ditjen PKH Tahun 2025 memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Program yaitu: 1) Produksi Daging; 2) Produksi Telur; 3) Produksi Susu; 4) Indeks Keamanan Komoditas Peternakan; 5) Persentase Wilayah/Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan; 6) Persentase Wilayah yang Terkendali dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia; 7) Indeks Harga yang Diterima Peternak; 8) Indeks Mutu Komoditas Peternakan; 9) Volume Ekspor Komoditas Peternakan; 10) Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan; serta 11) Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebelas indikator kinerja tersebut diukur melalui jenis polarisasi *maximize target* yaitu apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target, nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, capaian indikator kinerja dengan polarisasi *maximize target* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### Ketentuan persentase capaian Indikator Kinerja Program (IKP)

- Jika IKP >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%.
- Jika IKP <110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja dengan prinsip berorientasi hasil.

Pencapaian kinerja Ditjen PKH tahun 2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 6. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Ditjen PKH Tahun 2025 sebesar **102,24% (Sangat Berhasil)**. Dari 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Program, 6 (enam) indikator kinerja termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dan 5 (lima) indikator kinerja termasuk dalam kategori Berhasil. Hal ini merupakan wujud komitmen pimpinan beserta jajaran Ditjen PKH serta sinergitas dengan *stakeholder* terkait dalam peningkatan kinerja yang dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Ditjen PKH tahun 2025.

Tabel 6 Capaian Indikator Sasaran Program Ditjen PKH Tahun 2025

| Sasaran Program      | Indikator Kinerja Program          | Target | Realisasi | %       | Kategori        |
|----------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------------|
| SP 5<br>Terpenuhinya | IKP 5.1 Produksi Daging (juta ton) | 4,97   | 5,04      | 101,27% | Sangat Berhasil |





| Sasaran Program                                                                                            | Indikator Kinerja Program                                                                                                      | Target  | Realisasi | %       | Kategori        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|
| Produksi Komoditas Peternakan                                                                              | IKP 5.2 Produksi Telur (juta ton)                                                                                              | 7,44    | 6,91      | 92,90%  | Berhasil        |
|                                                                                                            | IKP 5.3 Produksi Susu (ribu Ton)                                                                                               | 866,28  | 820,87    | 94,76%  | Berhasil        |
| SP 6 Terjaminnya Keamanan Komoditas Peternakan                                                             | IKP 6.1 Indeks Keamanan Komoditas Peternakan (Indeks)                                                                          | 0,613   | 0,601     | 98,04%  | Berhasil        |
| SP 7 Terkendalinya Wilayah atau Kawasan dari Penyakit Hewan                                                | IKP 7.1 Persentase Wilayah/Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan (%)                                                          | 80,00   | 83,61     | 104,51% | Sangat Berhasil |
| SP 8 Terkendalinya Wilayah dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia | IKP 8.1 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia (%) | 41,00   | 45,53     | 110,00% | Sangat Berhasil |
| SP 15 Meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Peternak                                                     | IKP 15.1 Indeks Harga yang Diterima Peternak (Indeks)                                                                          | 124,75  | 124,28    | 99,62%  | Berhasil        |
| SP 16 Terjaminnya Mutu Komoditas Peternakan                                                                | IKP 16.1 Indeks Mutu Komoditas Peternakan (Indeks)                                                                             | 0,49    | 0,61      | 110,00% | Sangat Berhasil |
| SP 17 Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                  | IKP 17.1 Volume Ekspor Komoditas Peternakan (Ton)                                                                              | 531.329 | 599.291   | 110,00% | Sangat Berhasil |



| Sasaran Program                                                                                                              | Indikator Kinerja Program                                                                        | Target | Realisasi | %              | Kategori               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|------------------------|
| SP 18<br>Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Peternakan Unggulan yang telah Menerapkan Hilirisasi                        | IKP 18.1 Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan (Indeks)                                | 0,20   | 0,20      | 100,00%        | Berhasil               |
| SP 6<br>Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Baik, Transparan, dan Akuntabel | IKP 6.1 Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Indeks) | 0,885  | 0,916     | 103,50%        | Sangat Berhasil        |
| <b>Rata-Rata Capaian</b>                                                                                                     |                                                                                                  |        |           | <b>102,24%</b> | <b>Sangat Berhasil</b> |

Sumber: Ditjen PKH, 2026, data diolah.

Capaian indikator kinerja yang termasuk kategori **Sangat Berhasil** yaitu 1) Produksi Daging; 2) Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan; 3) Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia; 4) Indeks Mutu Komoditas Peternakan; 5) Volume Ekspor Komoditas Peternakan; dan 6) Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, capaian indikator kinerja yang termasuk kategori **Berhasil** yaitu 1) Produksi Telur; 2) Produksi Susu; 3) Indeks Keamanan Komoditas Peternakan; 4) Indeks Harga yang Diterima Peternak; dan 5) Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan. Analisis capaian indikator kinerja setiap sasaran program adalah sebagai berikut:

### Sasaran Program 5 (SP 5)

#### TERPENUHINYA PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan produksi daging, telur dan susu sebagai komoditas bahan pangan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok tersebut, maka Kementerian



Pertanian menetapkan Sasaran Strategis (SS) yaitu Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja Strategis (IKS) yaitu Persentase Komoditas Pertanian yang Mencapai Swasembada Terhadap Komoditas Pertanian Prioritas. Indikator Kinerja Strategis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Program (IKP) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan berupa Produksi Daging, Telur, dan Susu.

| SP 5 IKP 5.1<br>Produksi Daging        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Target<br>4,97 juta ton                | Realisasi<br>5,04 juta ton |
| % Capaian<br>101,27% (Sangat Berhasil) |                            |

Produksi Daging merupakan jumlah daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak dalam periode tahunan yang terdiri dari komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam ras pedaging, ayam lokal, dan itik. Untuk daging sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi dihitung dari daging murni, jeroan, dan daging variasi (bagian yang dapat dimakan di kaki bawah, kepala, dan ekor). Daging ayam ras pedaging dihasilkan dari produksi karkas, serta ayam lokal dan itik dihasilkan dari produksi karkas dan jeroan. Adapun cara perhitungan Produksi Daging adalah akumulasi produksi daging pada tahun berjalan dan dikelompokkan berdasarkan jenis komoditas dari data statistik Ditjen PKH dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Produksi Daging} = \sum Q$$

**Keterangan:**

Q : penjumlahan produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam ras pedaging, ayam lokal, dan itik pada tahun berjalan

**a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Realisasi produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam ras pedaging, ayam lokal dan itik) tahun 2025 sebesar 5,04 juta ton. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 4,97 juta ton, maka capaian Produksi Daging sebesar 101,27% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Selanjutnya, Produksi Daging per Komoditas Tahun 2025 tersaji pada Tabel 7.



Tabel 7 Produksi Daging per Komoditas Tahun 2025 (dalam juta ton)

| No            | Jenis Ternak      | Tahun 2025    |               | %             |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                   | Target        | Realisasi*)   |               |
| 1             | Sapi              | 0,4874        | 0,4991        | 102,42        |
| 2             | Kerbau            | 0,0177        | 0,0164        | 92,90         |
| 3             | Kambing           | 0,0578        | 0,0610        | 105,50        |
| 4             | Domba             | 0,0351        | 0,0297        | 84,45         |
| 5             | Babi              | 0,1317        | 0,1177        | 89,39         |
| 6             | Ayam Lokal        | 0,1583        | 0,2112        | 133,42        |
| 7             | Ayam Ras Pedaging | 4,0506        | 4,0612        | 100,26        |
| 8             | Itik              | 0,0338        | 0,0393        | 116,21        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>4,9725</b> | <b>5,0357</b> | <b>101,27</b> |

Sumber: Ditjen PKH, 2025

Keterangan: \*) Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 7, realisasi kinerja produksi daging sapi, kambing, ayam lokal, ayam ras pedaging dan itik telah mencapai target, sedangkan untuk produksi daging kerbau, domba dan babi belum memenuhi target.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi indikator kinerja Produksi Daging tahun 2025 adalah 5,04 juta ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi produksi daging tahun 2024 sebesar 4,85 juta ton, maka realisasi kinerja produksi daging meningkat 0,18 juta ton atau 3,74%.

Selanjutnya, untuk capaian kinerja produksi daging tahun 2025 sebesar 101,27% tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 karena adanya perbedaan indikator kinerja yaitu Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik) dengan target sebesar 2,86%.

Tabel 8 Realisasi Produksi Daging Tahun 2020-2025 (dalam juta ton)

| No            | Jenis Ternak      | Tahun         |               |               |               |               |               | r (%)       |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|               |                   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |             |
| 1             | Sapi              | 0,3397        | 0,3655        | 0,3744        | 0,4613        | 0,4702        | 0,4991        | 6,15        |
| 2             | Kerbau            | 0,0139        | 0,0142        | 0,0165        | 0,0162        | 0,0180        | 0,0164        | -8,67       |
| 3             | Kambing           | 0,0419        | 0,0405        | 0,0412        | 0,0563        | 0,0530        | 0,0610        | 15,09       |
| 4             | Domba             | 0,0371        | 0,0347        | 0,0357        | 0,0482        | 0,0287        | 0,0297        | 3,28        |
| 5             | Babi              | 0,1898        | 0,1760        | 0,1025        | 0,1350        | 0,1303        | 0,1177        | -9,62       |
| 6             | Ayam Buras        | 0,2702        | 0,2698        | 0,2767        | 0,1438        | 0,2107        | 0,2112        | 0,26        |
| 7             | Ayam Ras Pedaging | 3,2191        | 3,1857        | 3,6689        | 3,7216        | 3,9054        | 4,0612        | 3,99        |
| 8             | Itik              | 0,0358        | 0,0410        | 0,0446        | 0,0330        | 0,0378        | 0,0393        | 4,04        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>4,1474</b> | <b>4,1274</b> | <b>4,5606</b> | <b>4,6155</b> | <b>4,8541</b> | <b>5,0357</b> | <b>3,74</b> |

Sumber: Data Statistik PKH, 2025.

Keterangan: \*) Angka Sementara; r (%): pertumbuhan produksi tahun 2025.



Realisasi produksi daging tahun 2025 meningkat 3,74% apabila dibandingkan dengan realisasi produksi daging tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 8. Produksi komoditas peternakan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan atau permintaan terhadap komoditas. Kenaikan produksi daging pada tahun 2025, khususnya produksi daging ayam ras dipengaruhi adanya peningkatan permintaan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurunnya produksi daging pada tahun 2020-2021 disebabkan menurunnya permintaan terhadap komoditas daging sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Jika dibandingkan dengan realisasi produksi daging pada masa pandemi tahun 2021, maka terjadi kenaikan tertinggi, yaitu 10,50% pada tahun 2022. Hal ini karena pandemi berangsur pulih, sehingga kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai normal (tidak dalam kondisi pandemi *Covid-19*), sehingga terjadi kenaikan yang signifikan terhadap konsumsi daging yang berdampak terhadap peningkatan produksi daging. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat, industri makanan, Horeka (Hotel, Restoran dan Katering), penjual makanan dan minuman semakin membaik.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029**

Realisasi kinerja Produksi Daging tahun 2025 sebesar 5,036 juta ton. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 5,602 juta ton, maka realisasi kinerja produksi daging tahun 2025 telah mencapai 89,90%.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Daging Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| Uraian                   | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| Target IKP (juta ton)    | 4,972 | 5,122 | 5,277 | 5,437 | 5,602 | 89,90                                       |
| Realisasi IKP (juta ton) | 5,036 |       |       |       |       |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional**

Sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Kegiatan Prioritas “Pengembangan Pangan Hewani” dengan Sasaran “Meningkatnya Produksi Bahan Pangan Hewani”, Indikator RPJMN “Produksi Daging” tahun 2025 memiliki target 4,96 juta ton. Realisasi produksi daging tahun 2025 (Angka Sementara) sebesar 5,04 juta ton, sehingga apabila





dibandingkan dengan target produksi daging RPJMN 2025-2029 telah mencapai 101,61%.

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Realisasi produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam ras pedaging, ayam lokal dan itik) tahun 2025 sebesar 5,04 juta ton dengan capaian sebesar 101,27% dengan kategori “**Sangat Berhasil**” apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 4,97 juta ton. Sebagaimana yang tersaji pada Tabel 7, realisasi kinerja produksi daging sapi, kambing, ayam lokal, ayam ras pedaging dan itik telah mencapai target, sedangkan untuk produksi daging kerbau, domba dan babi belum memenuhi target.

Tabel 10 Proporsi Kontribusi Per Jenis Ternak Penyumbang Produksi Daging Tahun 2025

| No     | Jenis Ternak      | Realisasi Produksi (Juta Ton) | Proporsi Kontribusi (%) |
|--------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1      | Sapi              | 0,50                          | 9,91                    |
| 2      | Kerbau            | 0,02                          | 0,33                    |
| 3      | Kambing           | 0,06                          | 1,21                    |
| 4      | Domba             | 0,03                          | 0,59                    |
| 5      | Babi              | 0,12                          | 2,34                    |
| 6      | Ayam Lokal        | 0,21                          | 4,19                    |
| 7      | Ayam Ras Pedaging | 4,06                          | 80,65                   |
| 8      | Itik              | 0,04                          | 0,78                    |
| Jumlah |                   | 5,04                          | 100,00                  |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 10, pada tahun 2025, penyediaan daging ayam ras menunjukkan kinerja positif dan berperan strategis dalam menopang ketahanan pangan sumber protein hewani di Indonesia dengan kontribusi sebesar 80,65% terhadap total produksi daging nasional. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat, serta efisiensi biologis ayam ras pedaging yang memiliki siklus produksi relatif singkat dan konversi pakan yang tinggi. Capaian tersebut juga didukung oleh penguatan sistem pembibitan, ketersediaan DOC (*Day Old Chick*) komersial, serta perluasan penerapan teknologi pemeliharaan intensif, termasuk kandang tertutup (*closed house*), manajemen pakan presisi, dan pengendalian kesehatan unggas.

Selanjutnya sesuai dengan perhitungan Neraca Komoditas Tahun 2025 yang ditetapkan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tanggal 6 Januari 2026 antara Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Pertanian bahwa Angka Konsumsi Reguler untuk daging ayam ras sebesar 13,77 kg/kapita/thn, sehingga kebutuhan reguler daging ayam ras sebesar 3.917.014 ton. Jika ditambahkan dengan kebutuhan



pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 202.174 ton, maka total kebutuhan daging ayam ras sebesar 4.119.188 ton. Untuk ketersediaan daging ayam ras sebesar 4.371.507 ton yang terdiri dari stok awal sebesar 83.316 ton dan produksi nasional sebesar 4.288.191 ton, sehingga neraca daging ayam ras pada tahun 2025 mengalami surplus sebesar 252.319 ton.

Keberhasilan penyediaan daging ayam ras pada tahun 2025 tidak terlepas dari sinergi kebijakan pemerintah dengan pelaku usaha perunggasan melalui skema kemitraan usaha, stabilisasi pasokan pakan, serta penguatan biosekuriti dan pengawasan kesehatan hewan. Intervensi kebijakan di bidang perbibitan dan distribusi ternak, serta pengendalian penyakit strategis. Di sisi lain, peningkatan kapasitas produksi industri pakan, pemanfaatan bahan baku lokal, serta perbaikan rantai pasok pascapanen dan distribusi daging turut menjaga stabilitas pasokan di berbagai wilayah, sehingga mampu merespons dinamika permintaan domestik secara efektif.

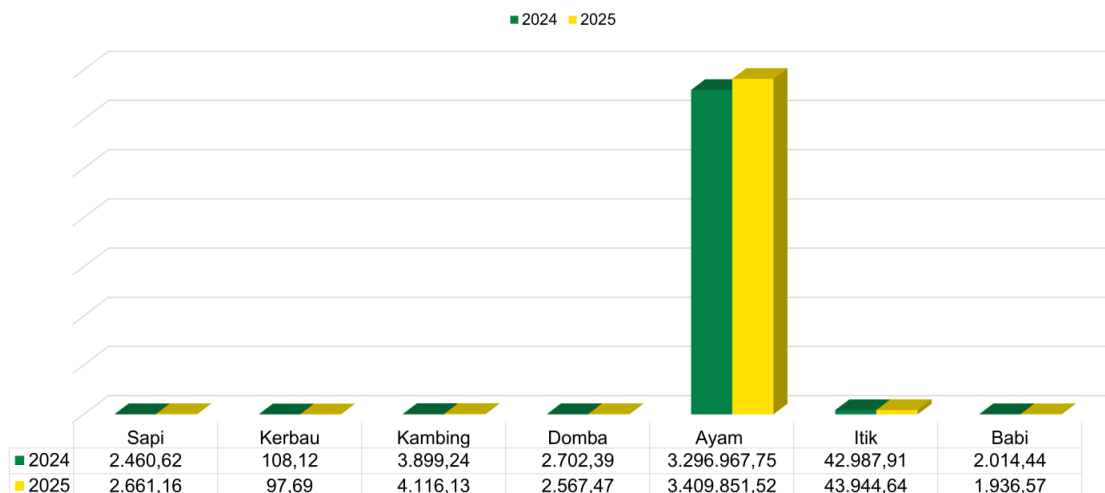
Secara keseluruhan, kinerja positif penyediaan daging ayam ras nasional pada tahun 2025 mencerminkan semakin kuatnya struktur industri perunggasan Indonesia dalam mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Keberhasilan ini berimplikasi pada meningkatnya ketersediaan daging unggas yang terjangkau, penguatan kontribusi subsektor peternakan terhadap perekonomian nasional, serta terjaganya stabilitas harga di tingkat konsumen. Dengan konsistensi kebijakan, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan risiko usaha yang berkelanjutan, sektor ayam ras pedaging diharapkan tetap menjadi tulang punggung penyediaan daging nasional pada periode pembangunan berikutnya.

Sejalan dengan capaian subsektor perunggasan tersebut, upaya penguatan penyediaan protein hewani nasional juga diarahkan pada komoditas daging sapi sebagai pelengkap utama dalam struktur konsumsi masyarakat. Berdasarkan evaluasi terhadap parameter kinerja tahun 2025, efektivitas pencapaian target produksi daging sapi dipengaruhi oleh sejumlah faktor determinan strategis, salah satunya melalui peningkatan investasi peternakan sapi oleh perusahaan swasta yang difasilitasi kebijakan pemerintah. Kemudahan perizinan, serta dukungan kebijakan impor sapi bakalan dan indukan mendorong masuknya modal, teknologi, dan manajemen produksi berskala besar, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan. Investasi ini memperkuat kontinuitas pasokan sapi siap potong dan sapi perah, yang secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi daging nasional.

Pada Grafik 3 terlihat bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan pemotongan ternak sapi, kambing, ayam dan itik di Indonesia, sedangkan untuk pemotongan kerbau, domba dan babi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Pemotongan ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan ternak untuk memenuhi keperluan keagamaan, seperti aqiqah dan Idul Adha. Pada Grafik 4, pemotongan hewan kurban pada tahun 2025 di berbagai daerah mengalami peningkatan untuk sapi, kambing dan domba, tetapi untuk pemotongan hewan kurban kerbau mengalami penurunan kerbau karena turunnya daya beli masyarakat pada komoditas tersebut. Data pemotongan hewan kurban tahun 2024 – 2025 tersaji pada Grafik 4.



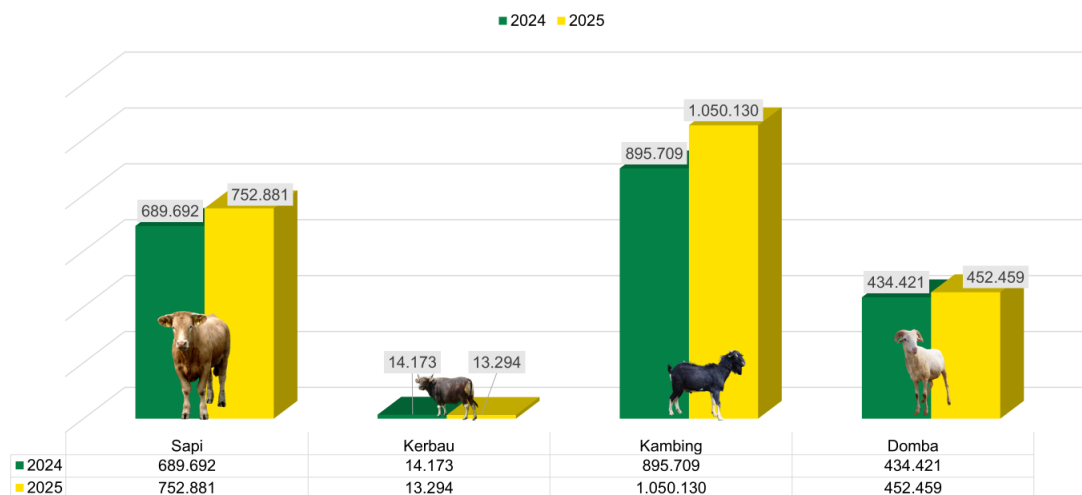
### JUMLAH PEMOTONGAN TERNAK TAHUN 2024-2025 (dalam 000 ekor)



Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, data diolah, 2025.

Grafik 3 Pemotongan Komoditas Peternakan Tahun 2024-2025

### JUMLAH PEMOTONGAN HEWAN KURBAN TAHUN 2024-2025 (dalam ekor)



Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, data diolah, 2025.

Grafik 4 Data Pemotongan Hewan Kurban Tahun 2024-2025

Selanjutnya, jumlah produksi dan pemotongan babi juga mengalami penurunan pada tahun 2025 disebabkan adanya kendala dan permasalahan dalam pengembangan ternak babi antara lain:

1. Penyakit *African Swine Fever* (ASF) di beberapa daerah sentra produksi masih berdampak terhadap penurunan populasi dan produksi.



2. Pembatasan lalu lintas ternak babi dan pemberhentian sementara ekspor babi ke beberapa negara konsumen reguler.
3. Kurangnya bibit babi berkualitas, sehingga produktivitas tidak maksimal.
4. Faktor sosial budaya dan lingkungan dalam pengembangan babi.

Keberhasilan capaian kinerja produksi daging secara nasional pada tahun 2025, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mendukung peningkatan produksi daging. Beberapa keberhasilan yang telah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

- a. Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja penyediaan daging ayam ras dilaksanakan melalui pengawalan implementasi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras serta Telur Konsumsi. Kebijakan tersebut diturunkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan koordinasi subsektor perunggasan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12813/KPTS/HK.160/F/11/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Rencana Produksi Nasional Ayam Ras. Melalui forum koordinasi tersebut, dilakukan sinkronisasi dengan para pelaku usaha pembibitan ayam ras dalam penetapan alokasi impor *Grand Parent Stock (GPS)* ayam ras pedaging guna menciptakan kepastian usaha, menjaga stabilitas pasokan bibit, serta membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan industri ayam ras pedaging nasional.
- b. Bantuan ternak ke kelompok masyarakat/peternak untuk peningkatan skala usaha.

Tabel 11 Bantuan Ternak ke Masyarakat Tahun 2022-2025

| No | Jenis Ternak      | Tahun 2022    |                 | Tahun 2023    |                 | Tahun 2024    |               | Tahun 2025    |                 |
|----|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|    |                   | Volume (ekor) | Anggaran (Rp)   | Volume (ekor) | Anggaran (Rp)   | Volume (ekor) | Anggaran (Rp) | Volume (ekor) | Anggaran (Rp)   |
| 1  | Ayam              | 333.481       | 18.093.999.454  | 185.000       | 10.285.677.915  | 4.000         | 612.900.052   | 493.800       | 151.498.161.519 |
| 2  | Itik              | 67.000        | 10.807.439.866  | 40.000        | 7.019.424.915   | 6.000         | 1.119.708.818 | -             | -               |
| 3  | Babi              | 2.010         | 19.742.743.862  | 1.300         | 17.177.379.969  | -             | -             | 100           | 1.247.148.000   |
| 3  | Kambing/<br>Domba | 13.325        | 41.021.915.910  | 14.000        | 52.389.137.652  | 800           | 2.215.294.762 | 1.000         | 3.060.000.000   |
| 4  | Sapi Potong       | 9.300         | 139.622.950.554 | 10.068        | 186.791.746.641 | -             | -             | -             | -               |
| 5  | Sapi Perah        | 190           | 4.679.488.060   | 440           | 11.671.724.616  | -             | -             | -             | -               |
| 6  | Kambing Perah     | 80            | 398.614.260     | 80            | 420.272.102     | -             | -             | -             | -               |

Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2025.

- c. Kontribusi semen beku sapi/kerbau yang didistribusikan BIB Nasional dari tahun 2021-2025 melalui program inseminasi buatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi daging nasional. Ketersediaan semen beku berkualitas memungkinkan peningkatan angka kebuntingan dan kelahiran ternak secara masif, khususnya pada peternakan rakyat yang mendominasi populasi sapi



potong di Indonesia. Dengan perbaikan mutu genetik dan peningkatan populasi ternak hasil inseminasi buatan, produktivitas daging per ekor ikut meningkat, sehingga secara agregat berkontribusi signifikan terhadap pasokan daging nasional.

Tabel 12 Distribusi Semen Beku Tahun 2021-2025

| NO | UPT                  | DISTRIBUSI       |                  |                  |                  |                  |
|----|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                      | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| 1  | BBIB SINGOSARI       | 3.922.842        | 3.315.855        | 3.019.545        | 1.964.973        | 2.567.584        |
| 2  | BIB LEMBANG          | 2.791.319        | 2.447.809        | 2.679.089        | 1.744.182        | 1.259.256        |
| 3  | BIB DAERAH (18 BIBD) | -                | -                | -                | 453.762          | 420.981          |
|    | <b>TOTAL</b>         | <b>6.714.161</b> | <b>5.763.664</b> | <b>5.698.634</b> | <b>4.162.917</b> | <b>4.247.821</b> |

Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, data diolah, 2026.

- d. Kontribusi bibit kambing/domba potong yang diimpor pada tahun 2022 sebanyak 658 ekor turut berperan dalam memenuhi kebutuhan produksi daging nasional. Kehadiran bibit impor memberikan tambahan populasi ternak potong dengan performa pertumbuhan dan produktivitas yang relatif tinggi, sehingga mampu mempercepat ketersediaan ternak siap potong di dalam negeri. Selain menambah volume produksi daging secara langsung, bibit kambing dan domba impor juga berfungsi sebagai sumber perbaikan mutu genetik yang dapat meningkatkan produktivitas ternak lokal melalui pengembangbiakan lanjutan.
- e. Penambahan jumlah varietas/galur unggul hewan untuk pangan yang dilepas pada tahun 2025 sebanyak 8 rumpun/galur, yaitu pelepasan galur ayam Lingnan Maron, alope UNHAS 1, Golden Sembawa dan Kapas Sembawa; pelepasan introduksi rumpun kambing Toggenburg, rumpun kambing British Alpine dan rumpun kambing Anglo Nubian; dan pelepasan rumpun sapi GAMA. Secara kumulatif, pelepasan rumpun/ galur selama periode 2013 sampai dengan 2025 sebanyak 46 rumpun/galur. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja antara lain dukungan regulasi yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan, koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan serta terjalannya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, UPT/UPTD, lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta pelaku usaha peternakan.
- f. Fasilitasi tata niaga ternak dan hasil ternak yang dilaksanakan, baik dengan menyelenggarakan pertemuan di pusat, maupun menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Kapal khusus angkutan ternak merupakan perwujudan tol laut yang bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Jumlah muatan kapal ternak per 31 Desember 2025 sebanyak 49.485 ekor, meningkat 12,52% jika dibandingkan dengan realisasi muatan tahun 2024.



- g. Pemanfaatan fasilitas Bank Pakan berupa Unit Pengolahan Pakan Ruminansia, Unggas, dan Babi sebanyak 457 unit di 142 kabupaten dan 29 provinsi dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024. Sampai dengan tahun 2025, jumlah Bank Pakan yang masih memproduksi sebanyak 318 unit di 73 kabupaten dan 25 provinsi dengan total produksi pada tahun 2025 sebesar 5.037,28 ton/tahun. Adapun produksi terbanyak berupa silase. Sebagai informasi, tahun 2025 tidak ada alokasi anggaran DAK Bank Pakan.
- h. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dilaksanakan secara terpadu dan berbasis risiko pada kabupaten/kota dengan populasi ternak potong. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan vaksinasi terhadap penyakit prioritas, pengobatan dan penanganan kasus penyakit hewan, penerapan pendekatan kompartementalisasi pada unit usaha tertentu, serta pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan. Pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan hewan, menekan risiko penularan PHMS, serta menjaga keberlanjutan produksi daging yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan.
- i. Pelaksanaan kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan pada tahun 2025 sebanyak 67.756 sampel teridentifikasi. Namun demikian, capaian kinerja pada beberapa wilayah belum optimal, terutama pada daerah dengan tantangan geografis, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah, khususnya pengawasan lalu lintas ternak, masih menghadapi kendala dalam implementasinya.
- j. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tahun 2025 dengan total aktivitas pelaksanaan secara nasional mencapai 145.051 kegiatan. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk intervensi, antara lain sosialisasi, desinfeksi, surveilans, pertemuan masyarakat, serta pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang tersebar di seluruh provinsi. Secara keseluruhan, pelaksanaan KIE Tahun 2025 menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi, edukasi, dan pencegahan melalui desinfeksi masih menjadi instrumen utama dalam mendukung pengendalian PHMS secara nasional.
- k. Distribusi vaksin PMK tahun 2025 terealisasi sebesar 4.000.000 dosis, sehingga pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan mampu menekan kasus penyakit. Secara nasional, realisasi vaksinasi PMK yang bersumber dari APBN hingga 31 Desember 2025 mencapai 3.670.066 dosis, atau 91,7 persen dari target 4.000.000 dosis yang ditetapkan. Pelaksanaan vaksinasi tersebut telah menjangkau wilayah yang luas, yaitu di 28 provinsi, 393 kabupaten/kota, 3.947 kecamatan, dan 17.713 desa, mencerminkan cakupan program vaksinasi yang merata dan masif.
- l. Fasilitas layanan kesehatan hewan dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dengan jumlah lokus penerima 264 Puskesmas di 17 provinsi, 48 kabupaten dan Fasilitas layanan Laboratorium Kesehatan Hewan





dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dengan jumlah lokus penerima 19 Laboratorium di 15 provinsi.

- m. Penerapan Kompartementalisasi Bebas ASF pada unit usaha yang pada tahun 2025 terdapat 2 unit usaha yang bebas ASF.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab kendala dan permasalahan terkait ketersediaan daging sapi/ kerbau, Ditjen PKH terus melakukan terobosan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam hal penguatan regulasi diantaranya Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan, dengan progres pada tahun 2025 dalam tahap meminta persetujuan Kementerian/Lembaga terkait.
- b. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
- c. Mendorong implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak (JPT) untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan optimalisasi reproduksi di lapangan, sehingga dapat mendongkrak angka kelahiran.
- d. Optimalisasi reproduksi di wilayah introduksi melalui fasilitasi semen beku sejumlah 250.000 dosis pada tahun 2026.
- e. Mendorong keberlanjutan pelaksanaan pengembangan investasi sapi pedaging tahun 2025-2029, baik melalui pola kemitraan maupun integrasi dengan PMA maupun PMDN.
- f. Pengembangan Integrasi Sapi Sawit dengan target 2026 untuk finalisasi *master plan* integrasi sawit–sapi beserta peta lokasi prioritas.

Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, penguatan sinergi pengembangan integrasi sapi-kelapa sawit menjadi pendekatan strategis dalam kebijakan pembangunan peternakan nasional. Skema ini dapat mendorong peningkatan populasi dan produktivitas sapi, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Provinsi yang dinilai siap untuk pengembangan *pilot project* antara lain Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung.

Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan produksi daging kambing/domba:

- 1. Berkolaborasi dengan pelaku usaha dengan melakukan pengembangan model usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir (*closed loop*).
- 2. Koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi peternak kambing/domba untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan dengan peternak.
- 3. Mendorong penerapan *Good Farming Practices* (GFP) pengembangan kambing/



domba.

Upaya yang dilakukan Ditjen PKH dalam menjamin produksi daging ayam lokal, ayam ras, dan itik, antara lain:

1. Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan melalui peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
2. Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi, dengan mendorong BUMN dan pelaku usaha untuk melakukan investasi. Pada tahun 2026, terdapat 5 (lima) lokasi prioritas pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi yaitu Jawa Timur, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam ras melalui sertifikasi *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP).
4. Stabilisasi produksi daging ayam ras, mengingat produksi daging ayam ras telah surplus:
  - a. Menyiapkan data terkait rencana produksi, harga komoditas peternakan, harga sarana produksi peternakan, khususnya pakan, harga DOC secara rutin dan terkini dalam upaya pemantauan kondisi harga di daerah sentra peternakan.
  - b. Menyampaikan data dan informasi untuk wilayah yang mengalami *surplus* sesuai prognosa produksi, sehingga upaya intervensi distribusi penyaluran daging ayam dan/atau telur konsumsi akan lebih tepat sasaran yaitu ditujukan ke wilayah *defisit* atau harga yang tinggi.
  - c. Bersama Badan Pangan Nasional dan K/L terkait, dalam hal penetapan kebijakan penyerapan *livebird* dan/atau telur konsumsi yang mengacu Harga Acuan Pemerintah (HAP) tingkat produsen/konsumen biaya produksi agar peternak memperoleh keuntungan yang wajar.
  - d. Bersama Badan Pangan Nasional dan K/L lain berupaya menerbitkan kebijakan terkait upaya penyerapan dengan menugaskan BUMN Pangan sehingga harga di pasaran dapat lebih stabil.
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian antara lain bersama Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, BUMN Pangan dan Satgas Pangan Dinas Pangan Provinsi serta *stakeholder* terkait pelaksanaan kegiatan penyerapan *live bird* konsumsi di tingkat produsen dan asosiasi koperasi/pelaku usaha.
  - f. Penyiapan infrastruktur di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), *Air Blast Freezer* (ABF) dan *Cold Storage*.
  - g. Pemangkasian saluran distribusi *live bird* - karkas melalui optimalisasi rantai dingin (*cold chain*) yaitu kandang-RPHU-retailer.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging babi dengan peningkatan kapasitas peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak babi dengan



pelaksanaan pelatihan inseminasi buatan babi. Selain itu, pada tahun 2026 pemerintah pusat bersama dengan perangkat daerah akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan manajemen ternak babi dalam mengatasi penyakit ASF melalui pendekatan antara lain: (1). Penyusunan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) pada babi; (2). Peningkatan penerapan standar biosekuriti yang ketat di peternakan; (3). Vaksinasi dan edukasi kepada peternak tentang pencegahan penyakit; (4) Penerapan Kompartementalisasi Bebas ASF pada unit usaha yang diharapkan akan menambah jumlah unit usaha yang bebas ASF tahun 2026.

#### **f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan capaian indikator kinerja Produksi Daging tahun 2025 ditunjang oleh beberapa Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH antara lain:

- a. Kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong, khususnya kambing dan domba, memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan populasi ternak, dan memperkuat usaha peternakan rakyat (*scaling up*). Dalam kerangka penguatan subsektor peternakan secara lebih luas, Ditjen PKH tidak hanya memfokuskan intervensi pada komoditas ayam ras pedaging, tetapi juga melaksanakan pengembangan unggas dan aneka ternak lainnya, termasuk ternak babi, melalui program bantuan kepada peternak di wilayah-wilayah potensial, terutama di daerah yang secara sosiokultural memiliki prospek pengembangan tinggi, seperti Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, dan Manokwari, sehingga setiap intervensi kebijakan memiliki peluang keberlanjutan usaha, peningkatan populasi ternak, serta penguatan kesejahteraan peternak di daerah.

- b. Aspek Pembiayaan (Realisasi Pemberian Kredit Pembibitan dan Penggemukan)

Aspek pembiayaan sangat penting dalam mewujudkan akselerasi peningkatan populasi dan produksi ternak, terutama melalui peningkatan skala usaha dan efisiensi usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha, semakin efisien usaha maka biaya produksi per satuan produk lebih rendah sehingga daya saing usaha meningkat. Fasilitasi pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.

Realisasi KUR sektor pertanian pada tahun 2025 senilai 93,30 triliun rupiah. Realisasi KUR subsektor peternakan (tidak termasuk *mixed farming*) sebesar 14,15 triliun rupiah untuk 277.678 debitur. Pada tahun 2025 penyaluran KUR sektor pertanian tidak memiliki target dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk penyaluran KUR tahun 2025. Realisasi KUR Sektor Pertanian tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 13.



Tabel 13 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Tahun 2025

| No.          | Sektor               | Realisasi<br>(triliun rupiah) | %            | Jumlah<br>Debitur |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 1            | Tanaman Pangan       | 21,531                        | 76,89        | 457.012           |
| 2            | Holtikultura         | 7,739                         | 51,60        | 164.446           |
| 3            | Perkebunan           | 36,840                        | 111,63       | 545.153           |
| 4            | Peternakan           | 14,152                        | 58,96        | 277.678           |
| 5            | Jasa Pertanian       | 1,282                         | 0,00         | 25.873            |
| 6            | <i>Mixed Farming</i> | 11,754                        | 0,00         | 270.924           |
| <b>Total</b> |                      | <b>93,301</b>                 | <b>93,30</b> | <b>1.741.086</b>  |

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan SAKURA Kementan, 2025.

Selain untuk usaha peternakan dimaksud, terdapat realisasi untuk kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (*mix-farming* yaitu minimal 60% dari akad kredit dimanfaatkan untuk usaha peternakan) sebesar 11,75 triliun rupiah untuk 270.924 *debitur*, sehingga total KUR untuk usaha peternakan sebesar 25,90 triliun rupiah untuk 548.602 *debitur*. Secara rinci, realisasi KUR subsektor peternakan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Tahun 2025

| Tahun                                                                    | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Realisasi KUR<br/>(triliun rupiah)</b>                                | <b>13,75</b>   | <b>21,12</b>   | <b>28,60</b>   | <b>20,76</b>   | <b>24,26</b>   | <b>25,90</b>   |
| Peternakan                                                               | 10,63          | 15,54          | 19,21          | 14,59          | 15,45          | 14,15          |
| Kombinasi<br>Pertanian/dengan<br>Peternakan ( <i>Mixed<br/>Farming</i> ) | 2,72           | 5,58           | 9,39           | 6,16           | 8,81           | 11,75          |
| <b>Jumlah Debitur</b>                                                    | <b>497.353</b> | <b>678.964</b> | <b>766.724</b> | <b>478.429</b> | <b>540.969</b> | <b>548.602</b> |

\* Data sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Sumber : SIKP dan SAKURA Kementan

Realisasi KUR subsektor peternakan didominasi untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya kambing domba dan pembibitan dan budidaya ternak perah. Secara rinci nilai dan jumlah *debitur* KUR untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada Tabel 15.



Tabel 15 Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Tahun 2025

| No            | Kode Sektor | Komoditas                                        | Realisasi (triliun rupiah) | Jumlah Debitur |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1             | 012110      | Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong              | 6,628                      | 135.398        |
| 2             | 012191      | Pembibitan dan Budidaya Kambing dan Domba Potong | 2,662                      | 69.455         |
| 3             | 012192      | Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah             | 1,349                      | 21.282         |
| 4             | 012210      | Pembibitan dan Budidaya Ternak Babi              | 1,333                      | 23.813         |
| 5             | 012291      | Pembibitan dan Budidaya Unggas                   | 2,178                      | 27.730         |
| <b>Jumlah</b> |             |                                                  | <b>14,152</b>              | <b>277.678</b> |

\*Data sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Sumber : SIKP, Sakura Kementan

Skema KUR belum sesuai dengan karakteristik usaha pembibitan dan pembiakan ternak, terutama usaha ternak ruminansia besar yang membutuhkan skema kredit dengan suku bunga 3% dan *grace period* sampai dengan 3 tahun. Oleh karena itu, pelaku usaha pembibitan dan pembiakan ternak belum dapat memanfaatkan KUR yang ada saat ini, dibuktikan dengan belum banyaknya pemanfaatan KUR oleh peternak. KUR saat ini sebagian besar dimanfaatkan untuk usaha penggemukan atau jual beli. Berdasarkan hal tersebut, berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan akademisi, maka telah dilakukan upaya untuk menyusun naskah akademis sebagai dasar pengusulan Kredit Usaha Peternakan dengan bunga 3% efektif per tahun dan persyaratan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha peternakan sapi dan ayam.

#### c. Investasi Bidang Usaha Peternakan

Peningkatan investasi didukung oleh upaya pendampingan dan pembinaan kepada calon investor maupun investor saat ini yang melakukan perluasan usahanya dengan fasilitasi kemudahan investasi mulai dari pendampingan pemanfaatan lahan, perizinan NIB, perizinan dasar (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, serta persetujuan lingkungan), perizinan teknis, dan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan investasi serta pengusulan skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para investor.

Peningkatan investasi bidang usaha peternakan unggas sebanyak 0,853 triliun rupiah atau sebesar 31,46%. Peningkatan tersebut berasal dari PMA sebesar 0,207 triliun rupiah (120,35%) dan PMDN sebesar 0,646 triliun rupiah (25,44%). Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa peningkatan bidang usaha peternakan unggas yang berasal dari PMDN memberikan kontribusi terbesar. Investasi baru dan perluasan yang dilakukan oleh pelaku usaha unggas dalam negeri disinyalir terjadi sebagai respon dari adanya peningkatan permintaan produk unggas terutama untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian,



program MBG menjadi stimulus yang berdampak positif bagi iklim investasi peternakan unggas nasional.

Pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau, terjadi penurunan jumlah investasi gabungan PMA dan PMDN sebanyak 0,272 triliun rupiah atau sebesar 40,29%. Investasi PMDN pada bidang usaha tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,469 triliun rupiah atau sebesar 75,16%. Namun di sisi lain, investasi PMA mengalami peningkatan sebanyak 0,197 triliun rupiah atau sebesar 386,27%.

Peningkatan investasi PMA pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau disinyalir sebagai dampak positif dari upaya peningkatan investasi sapi perah dan sapi pedaging yang bertujuan untuk mempercepat produksi susu dan daging nasional. Di sisi lain, investasi PMDN bidang usaha peternakan sapi dan kerbau mengalami penurunan diakibatkan pelaku usaha sapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena terbatasnya modal dan akses pembiayaan. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan investasi PMDN pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau, diperlukan fasilitasi akses pembiayaan yang sesuai dengan profil usaha sapi.

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Pertanian melakukan upaya peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong dengan meningkatkan investasi oleh pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mendukung percepatan penyediaan daging dan susu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membentuk Tim Pengembangan Investasi dan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging berdasarkan Keputusan Nomor 3222/Kpts/OT.050/F/03/2025.

Perkembangan investasi yang telah dilakukan pendampingan oleh Ditjen PKH oleh para pelaku usaha yang akan mendatangkan sapi indukan baik perah maupun pedaging pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- i. Komitmen pemasukan sapi perah pada tahun 2025-2029 sebanyak 998.565 ekor dari 196 pelaku usaha dan komitmen pemasukan sapi pedaging sebanyak 577.103 ekor dari 84 pelaku usaha. Komitmen pemasukan sapi perah pada tahun 2025 sebanyak 48.754 ekor dari 193 pelaku usaha dan pemasukan sapi pedaging sebanyak 52.594 ekor dari 86 pelaku usaha.
- ii. Total realisasi pemasukan sapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 33.955 ekor yang terdiri dari 13.544 ekor sapi perah oleh 72 pelaku usaha dan 20.411 ekor sapi pedaging oleh 68 pelaku usaha.
- iii. Investor, baik pendanaan yang berasal dari PMA maupun PMDN, telah berupaya untuk berkomitmen dalam mengembangkan usaha peternakan sapi, namun dalam prosesnya terkendala beberapa hal, antara lain: (1). Terbatasnya ketersediaan lahan yang *clean* dan *clear*; (2). Proses perizinan usaha yang panjang; (3). Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan; (4). Ketidaksiapan infrastruktur dasar; (5). Keterbatasan pasokan sapi di negara asal; dan (6). Tingginya harga sapi di negara asal.





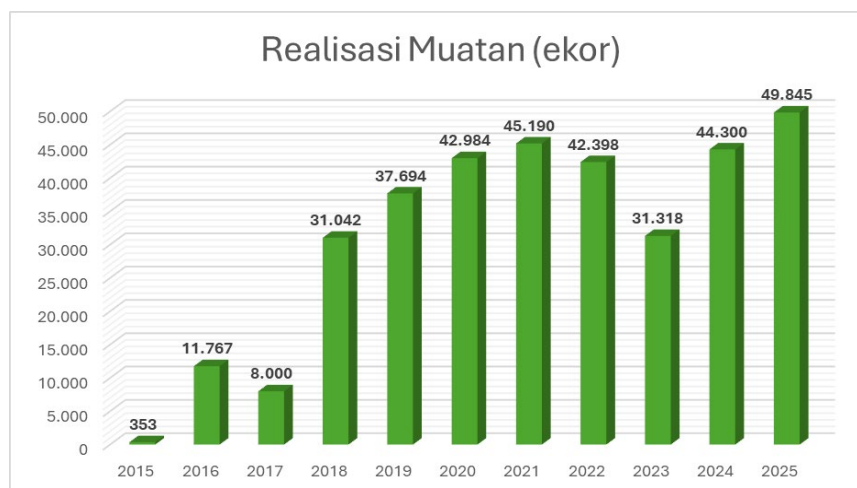
d. Kemitraan Usaha Peternakan

Kegiatan pembinaan dan koordinasi kemitraan usaha peternakan pada tahun 2025 telah dilakukan kepada 38 pelaku usaha kemitraan ayam ras pedaging melalui evaluasi kemitraan dengan rincian sebanyak 24 pelaku usaha integrator dan 14 pelaku usaha non-integrator. Evaluasi kemitraan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 8-9 Juli 2025, 21 Agustus 2025 dan 18 November 2025. Selain itu, pembinaan kemitraan juga dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Desember 2025.

e. Penguatan Sistem Logistik

Pada tahun 2025 terdapat 6 (enam) kapal khusus angkutan ternak/armada kapal Camara Nusantara (CN) yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6 untuk mengangkut ternak dari daerah produsen ternak ke daerah konsumen. Ditjen PKH berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kelancaran tata niaga ternak melalui pemanfaatan kapal ternak dan optimalisasi muatan pada trayek kapal ternak.

Daerah yang menjadi pangkalan trayek kapal khusus angkutan ternak adalah Provinsi NTT, NTB dan Gorontalo, sementara daerah penerima ternak diantara DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sejak awal beroperasi tahun 2015 hingga tahun 2025, Kapal khusus angkutan ternak telah mengangkut ternak sebanyak 344.891 ekor dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Realisasi muatan per tahun dapat dilihat pada Grafik 5.



Grafik 5 Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025

Berdasarkan Grafik 5 realisasi muatan relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah muatan menurun 32,01% jika dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan karena adanya proses *Docking* armada kapal Camara



Nusantara, setelah itu kembali mengalami peningkatan secara terus menerus hingga tahun 2021. Terjadi penurunan muatan hingga tahun 2023 dikarenakan merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga lalu lintas ternak dari produsen ke konsumen semakin terbatas untuk mengurangi penyebaran penyakit. Pemerintah Provinsi NTT juga menjadi lebih hati-hati dikarenakan NTT merupakan satu-satunya provinsi yang bebas dari penyakit PMK. Kenaikan terus menerus terjadi pada tahun 2024 hingga 2025 dikarenakan kasus PMK sudah mulai melandai dan lalu lintas ternak dari produsen ke konsumen sudah kembali normal. Upaya tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi antara lain: 1). Berkoordinasi dengan provinsi pemanfaat kapal ternak untuk mengoptimalkan penggunaan kapal khusus angkutan ternak di luar hari raya Idul Adha; 2). Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pengendalian PMK terkait dengan pembukaan lalu lintas ternak dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan hewan.

f. Regulasi dalam mendukung produksi daging adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP No. 4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak pada prinsipnya menegaskan bahwa pelayanan perkawinan ternak merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan populasi, produktivitas, dan mutu genetik ternak secara berkelanjutan. Permentan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan perkawinan ternak baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam terkontrol, yang dilaksanakan secara terstandar, terukur, dan berbasis data. Regulasi ini juga menekankan peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta sistem pencatatan dan pelaporan hasil perkawinan ternak.

3. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2025 Tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun Atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras serta Telur Konsumsi. Kebijakan tersebut diturunkan lebih lanjut ke dalam berbagai kegiatan koordinasi subsektor perunggasan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12813/KPTS/HK.160/F/11/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Rencana Produksi Nasional Ayam Ras. Melalui forum koordinasi tersebut, dilakukan sinkronisasi dengan para pelaku usaha pembibitan ayam ras dalam penetapan alokasi impor *Grand Parent Stock (GPS)* ayam ras pedaging



- guna menciptakan kepastian usaha, menjaga stabilitas pasokan bibit, serta membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan industri ayam ras pedaging nasional.
6. Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan, dengan progres dalam tahap meminta persetujuan Kementerian/Lembaga terkait.
  - g. Penerbitan sertifikat lulus pengujian dan laporan hasil pengujian mutu dan keamanan pakan yang berasal dari pengujian sampel produk pakan sebanyak 3.887 sampel yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan pada tahun 2025 dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pakan.
  - h. Pengendalian Penyakit dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan
    1. Peningkatan kapasitas gedung dan peralatan balai veteriner melalui proyek SBSN di BBV Maros, BV Medan, dan BV Bukittinggi, BV Lampung, dan BV Banjarbaru.
    2. Penguatan Puskesmas dengan memfasilitasi ketersediaan obat-obatan dan sarana lainnya di lokasi kegiatan prioritas melalui dana DAK Non Fisik Tahun 2025 yang digunakan untuk pembelian obat hewan dan bahan pendukung pengobatan, operasional pelaporan iSIKHNAS, operasional pelayanan kesehatan hewan, koordinasi, surveilans, Pengambilan, pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium, Bimtek/Pelatihan Terkait Kesehatan Hewan yang terealisasi di 48 kabupaten di 17 provinsi.
    3. Peningkatan kapasitas peralatan maupun SDM laboratorium veteriner melalui dana DAK Non Fisik di 15 provinsi, khususnya dalam mendukung pelayanan pengujian, surveilans, dan respons terhadap kejadian penyakit
    4. Kegiatan kompartementalisasi unit-unit usaha peternakan, sehingga terjamin kesehatan unit usaha tersebut dari penyakit tertentu. Sertifikat kompartemen bebas Penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) sebanyak 335 unit usaha. Sertifikat kompartemen bebas African Swine Fever (ASF) sebanyak 2 unit usaha. Sertifikat kompartemen bebas Brucellosis sebanyak 5 unit usaha.
  - i. Penjaminan Produk Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Bagi yang Dipersyaratkan
    1. Sosialisasi dan pembinaan intensif dan berkelanjutan tentang penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan, serta mendorong pelaku usaha produsen daging untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya. Tahun 2025 jumlah total unit usaha produk hewan yang telah bersertifikat NKV sebanyak 1.264 sertifikat. Khusus untuk unit usaha produsen daging terdapat 212 unit usaha (kios daging 24 sertifikat, RPH babi 3 unit, RPH Ruminansia 40 sertifikat, RPHU 47 sertifikat, usaha pengolahan daging 75, usaha pengolahan asal hewan 23 unit)



2. Meningkatkan jumlah SDM Kesmavet (Auditor NKV, Pengawas Kesmavet, Petugas Pemeriksa *Antemortem-Postmortem*, serta Petugas Kesejahteraan Hewan) dan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam upaya penjaminan keamanan produk hewan. Bimtek Auditor NKV sebanyak 2 tahap untuk menjawab hambatan proses audit NKV yang disebabkan keterbatasan jumlah auditor NKV di beberapa provinsi. Pada tahun 2025 jumlah auditor provinsi menjadi 442 orang dan auditor pusat sebanyak 39 orang dari jumlah sebelumnya 394 orang auditor provinsi dan 30 orang auditor pusat pada tahun 2024.
3. Peningkatan kapasitas laboratorium kesmavet di UPT Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan. Realisasi Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 45.514 sampel untuk pengujian aktif dan pasif, serta surveillans AMR.
4. Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan agar penyediaan daging bagi masyarakat memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan.

| SP 5 IKP 5.2<br>Produksi Telur |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Target<br>7,44 juta ton        | Realisasi<br>6,91 juta ton |
| % Capaian<br>92,90% (Berhasil) |                            |

Produksi telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan unggas petelur (ayam ras petelur, ayam lokal, itik, itik manila, dan puyuh) dalam periode tertentu. Adapun perhitungan produksi telur adalah akumulasi produksi telur pada tahun berjalan dan dikelompokkan berdasarkan jenis komoditas dari data statistik Ditjen PKH dengan rumus sebagai berikut:

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Produksi Telur} = \sum Q$ |                                                                                                             |
| <b>Keterangan:</b>               |                                                                                                             |
| Q                                | : penjumlahan produksi telur ayam ras petelur, ayam lokal, itik, itik manila, dan puyuh pada tahun berjalan |

#### a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi produksi telur (ayam lokal, ayam ras petelur, itik, itik manila, dan puyuh) tahun 2025 sebesar 6,91 juta ton. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 7,44 juta ton, maka capaian Produksi Telur sebesar 92,90% dengan kategori **"Berhasil"**. Selanjutnya, Produksi Telur per Komoditas Tahun 2025 tersaji pada Tabel 16.



Tabel 16 Produksi Telur Tahun 2025 (dalam juta ton)

| No     | Jenis Ternak     | Tahun 2025 |           |        |
|--------|------------------|------------|-----------|--------|
|        |                  | Target     | Realisasi | %      |
| 1      | Ayam Lokal       | 0,2875     | 0,2729    | 94,93  |
| 2      | Ayam Ras Petelur | 6,8352     | 6,3135    | 92,37  |
| 3      | Itik             | 0,2516     | 0,2585    | 102,75 |
| 4      | Itik Manila      | 0,0278     | 0,0315    | 110,00 |
| 5      | Puyuh            | 0,0341     | 0,0315    | 92,38  |
| Jumlah |                  | 7,4363     | 6,9080    | 92,90  |

Sumber: Statistik PKH, 2025.

Keterangan: \*) Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 16, realisasi kinerja produksi telur itik dan itik manila telah mencapai target, sedangkan untuk produksi telur ayam lokal, ayam ras petelur dan puyuh belum mencapai target.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 17 Realisasi Produksi Telur Tahun 2020-2025 (dalam juta ton)

| No     | Jenis Ternak     | Tahun  |        |        |        |        |        | r (%)  |
|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025*  |        |
| 1      | Ayam Lokal       | 0,3589 | 0,3687 | 0,3893 | 0,2147 | 0,2731 | 0,2729 | (0,07) |
| 2      | Ayam Ras Petelur | 5,1416 | 5,1560 | 5,5792 | 6,1161 | 6,1345 | 6,3135 | 2,92   |
| 3      | Itik             | 0,3170 | 0,3138 | 0,3162 | 0,2002 | 0,2489 | 0,2585 | 3,88   |
| 4      | Itik Manila      | 0,0246 | 0,0243 | 0,0220 | 0,0262 | 0,0313 | 0,0315 | 0,59   |
| 5      | Puyuh            | 0,0335 | 0,0306 | 0,0332 | 0,0283 | 0,0312 | 0,0315 | 1,04   |
| Jumlah |                  | 5,8755 | 5,8934 | 6,3399 | 6,5855 | 6,7190 | 6,9080 | 2,81   |

Sumber: Data Statistik PKH, 2025.

Keterangan: \*) Angka Sementara

Realisasi indikator kinerja Produksi Telur tahun 2025 adalah 6,91 juta ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi produksi telur tahun 2024 sebesar 6,72 juta ton, maka kinerja produksi telur meningkat 0,19 juta ton atau 2,81%. Demikian pula apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tersaji pada Tabel 17, terlihat bahwa produksi telur secara keseluruhan konsisten terus meningkat. Selanjutnya, untuk capaian kinerja produksi telur tahun 2025 sebesar 92,90% tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 karena adanya perbedaan indikator kinerja yaitu Peningkatan Produksi Telur dengan target sebesar 1,51%.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029**

Realisasi kinerja Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam lokal, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2025 sebesar 6,908 juta ton. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025- 2029 sebesar 8,795 juta ton, maka realisasi kinerja produksi telur tahun 2025 sudah mencapai 78,55%.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Telur Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| Uraian                   | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| Target IKP (juta ton)    | 7,436 | 7,753 | 8,085 | 8,432 | 8,795 | 78,55                                       |
| Realisasi IKP (juta ton) | 6,908 |       |       |       |       |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Ditjen PKH Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

Sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Kegiatan Prioritas “Pengembangan Pangan Hewani” dengan Sasaran “Meningkatnya Produksi Bahan Pangan Hewani”, Indikator RPJMN “Produksi Telur” tahun 2025 memiliki target 7,43 juta ton. Realisasi produksi telur tahun 2025 (Angka Sementara) sebesar 6,91 juta ton, sehingga apabila dibandingkan dengan target produksi telur RPJMN 2025-2029 telah mencapai 93,00%.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Realisasi produksi telur (ayam lokal, ayam ras petelur, itik, itik manila, dan puyuh) tahun 2025 sebesar 6,91 juta ton atau mencapai 92,90% dengan kategori “**Berhasil**” apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 7,44 juta ton. Berdasarkan Tabel 16 realisasi kinerja produksi telur itik dan itik manila telah mencapai target, sedangkan untuk produksi telur ayam lokal, ayam ras petelur dan puyuh belum memenuhi target.

Sesuai dengan Tabel 18, realisasi indikator kinerja Produksi Telur tahun 2025 meningkat 2,81% apabila dibandingkan dengan produksi telur tahun 2024. Peningkatan produksi telur tahun 2025 terjadi pada komoditas ayam ras petelur, itik, itik manila, dan puyuh sedangkan penurunan terjadi pada produksi telur ayam lokal. Penurunan produksi ayam lokal di Indonesia, meskipun permintaannya tinggi, utamanya disebabkan oleh manajemen budidaya yang masih tradisional, tingginya biaya pakan, serta tingginya





angka mortalitas/penyakit. Faktor ini memaksa peternak rakyat mengurangi produksi demi menghindari kerugian ekonomi.

Tabel 19 Proporsi Kontribusi Per Jenis Ternak Penyumbang Produksi Telur Tahun 2025

| No     | Jenis Ternak     | Produksi (juta ton) | Proporsi Kontribusi (%) |
|--------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1      | Ayam Lokal       | 0,2729              | 3,95                    |
| 2      | Ayam Ras Petelur | 6,3135              | 91,39                   |
| 3      | Itik             | 0,2585              | 3,74                    |
| 4      | Itik Manila      | 0,0315              | 0,46                    |
| 5      | Puyuh            | 0,0315              | 0,46                    |
| Jumlah |                  | 6,9080              | 100,00                  |

Sumber: Data Statistik PKH, 2025.

Keterangan: \*) Angka Sementara

Pada tahun 2025, meskipun realisasi kinerja produksi telur ayam ras tidak mencapai target, tetapi penyediaan telur ayam ras secara nasional menunjukkan kinerja yang positif dan berperan strategis dalam menopang ketahanan pangan sumber protein hewani di Indonesia, dengan harga yang lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan komoditas ternak lainnya. Produksi telur ayam ras menjadi kontributor utama, yaitu 91,39% terhadap total produksi telur nasional.

Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas yang ditetapkan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tanggal 6 Januari 2026 antara Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Pertanian bahwa Angka Konsumsi Reguler telur ayam ras sebesar 22,36 kg/kapita/tahun, sehingga kebutuhan reguler telur ayam ras sebesar 6.359.887 ton. Jika ditambah dengan kebutuhan pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 115.528 ton, maka total kebutuhan telur ayam ras sebesar 6.475.415 ton. Untuk ketersediaan telur ayam ras sebesar 6.568.231 ton yang terdiri dari stok awal sebesar 29.318 ton dan produksi nasional sebesar 6.538.913 ton, sehingga neraca telur ayam ras pada tahun 2025 mengalami surplus sebesar 92.816 ton.

Keberhasilan produksi telur juga dipengarungi oleh peningkatan produksi ayam ras secara nasional yang tidak terlepas dari peningkatan kapasitas populasi ayam ras petelur, serta perbaikan kinerja teknis di tingkat peternakan. Penerapan teknologi pemeliharaan modern, seperti penggunaan kandang tertutup (*closed house*), sistem ventilasi terkontrol, pencahayaan terprogram, dan manajemen pakan presisi, telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas per ekor, tingkat produksi telur harian, serta efisiensi konversi pakan. Selain itu, kemajuan genetika ayam petelur komersial yang menghasilkan potensi produksi tinggi dan umur produksi lebih panjang



turut memperkuat basis pasokan telur nasional, sehingga memungkinkan pencapaian output yang melampaui tren historis.

Dari sisi kelembagaan, keberhasilan produksi telur ayam ras didukung oleh penguatan kemitraan antara perusahaan integrator, koperasi peternak, dan peternak mandiri, yang berperan dalam menjamin ketersediaan input utama seperti DOC, pakan, obat hewan, serta akses pembiayaan. Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku pakan, memperkuat sistem kesehatan hewan, dan meningkatkan kualitas layanan teknis melalui penyuluhan serta pengawasan veteriner juga turut menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Intervensi tersebut membantu menekan risiko produksi, khususnya yang berkaitan dengan penyakit unggas dan fluktuasi biaya, sehingga keberlanjutan usaha petelur dapat terjaga.

Keberhasilan produksi telur ayam ras juga dipengaruhi oleh kuatnya permintaan domestik terhadap telur sebagai sumber protein hewani yang relatif terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan protein hewani masyarakat, maka daya beli masyarakat terhadap telur juga meningkat. Selain itu juga telur termasuk makanan yang masuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertumbuhan konsumsi ini mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi kapasitas produksi secara terukur dan berkelanjutan. Di sisi lain, perbaikan sistem distribusi, logistik dingin, serta integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir membantu meminimalkan kehilangan pascapanen dan menjaga kontinuitas pasokan antarwilayah. Kombinasi antara efisiensi produksi, dukungan kebijakan, dan stabilitas permintaan tersebut menjadi faktor kunci yang menjelaskan keberhasilan pencapaian produksi telur ayam ras nasional.

Peningkatan produksi telur juga terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi telur yang meningkat. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi produksi telur antara lain:

1. Perbaikan genetik dan kualitas bibit ayam ras petelur difokuskan menggunakan bibit dengan produktivitas tinggi.
2. Perbaikan kualitas pakan dengan menitikberatkan pada komposisi nutrisi seimbang dengan menggunakan bahan pakan lokal.
3. Kesulitan mendapatkan bahan baku pakan khususnya jagung yang berdampak pada tingginya biaya produksi.
4. Perubahan pola pemeliharaan dengan menggunakan teknologi guna meningkatkan efisiensi produksi.
5. Wabah flu burung H5N1 dan penyakit *Newcastle Disease* menjadi ancaman dan mempengaruhi produksi.

Upaya yang dilakukan Ditjen PKH terkait stabilisasi perunggasan kedepan, antara lain:

1. Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.



2. Pengembangan Hilirisasi Ayam terintegrasi, dengan mendorong BUMN, pelaku usaha untuk melakukan investasi.
3. Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
4. Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam ras melalui sertifikasi *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP).
5. Strategi stabilisasi produksi telur ayam:
  - a. Menyiapkan data terkait rencana produksi, harga Komoditas Peternakan, harga Sapronak (pakan), harga DOC secara rutin dan terupdate dalam upaya monitoring kondisi harga di daerah sentra peternakan.
  - b. Memberikan data dan informasi untuk wilayah yang mengalami *surplus* sesuai prognosa produksi, sehingga upaya intervensi distribusi penyaluran daging ayam dan/atau telur konsumsi akan lebih tepat sasaran yaitu ditujukan ke wilayah *defisit* atau harga yang tinggi.
  - c. Bersama Bapanas dan K/L terkait dalam hal penetapan kebijakan penyerapan *live bird* dan/atau telur konsumsi yang mengacu Harga Acuan Pemerintah (HAP) tingkat produsen/konsumen biaya produksi agar peternak memperoleh keuntungan yang wajar.
  - d. Bersama Bapanas dan K/L lain berupaya mengeluarkan kebijakan terkait upaya penyerapan dengan menugaskan BUMN Pangan sehingga harga di pasaran dapat lebih stabil kembali.
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian antara lain bersama Bapanas, Kemendag, BUMN Pangan dan Satgas Pangan Dinas Pangan Provinsi serta *stakeholder* terkait pelaksanaan kegiatan penyerapan telur konsumsi di tingkat produsen dan asosiasi koperasi/pelaku usaha.
  - f. Mendorong peternak mengatur *flock* pemeliharaan minimal terdapat 4 variasi umur yang berbeda sebagai *standing* populasi untuk menjaga produksi setiap minggu.
  - g. Mendorong peternak ayam petelur untuk percepatan *replacement* secara bertahap dengan memasukkan *pullet* minimal umur 16 minggu.

**f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan Ditjen PKH dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi telur ayam ras antara lain:

1. Pengawasan implementasi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras serta telur konsumsi. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui berbagai forum koordinasi subsektor perunggasan yang berpedoman pada Keputusan Menteri



Pertanian Nomor 12813/KPTS/HK.160/F/11/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Rencana Produksi Nasional Ayam Ras. Dalam pelaksanaannya, dilakukan sinkronisasi dengan para pelaku usaha pembibitan ayam ras petelur dalam penetapan alokasi impor Grand Parent Stock (GPS) ayam ras petelur guna menjamin kesinambungan pasokan bibit, meningkatkan kepastian usaha, serta memperkuat iklim investasi industri ayam ras petelur nasional.

2. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (peternak rakyat, perusahaan perunggasan *layer*, asosiasi peternak *layer*, BPS dan Badan Pangan Nasional).
3. Pemantauan pelaporan secara *online* melalui aplikasi POULTRYNESIA.
4. Koordinasi penetapan impor GPS *layer* dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.
5. Melakukan pembinaan teknis sebagai implementasi dari penerapan *Good Farming Practices* (GFP) baik di perusahaan peternakan dan asosiasi koperasi peternak.
6. Pengembangan klaster ayam petelur di luar daerah produksi ayam petelur.
7. Pelatihan peternak ayam petelur dalam penerapan peternakan yang baik melalui penerapan *biosecurity* dalam peternakan dan kandang.
8. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam mendata peternak *layer* untuk calon penerima Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
9. Kegiatan penetapan calon penerima Cadangan Jagung Pemerintah melalui skema penyaluran Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan ini sangat membantu peternak dalam menyediakan bahan baku pakan atau jagung murah pada saat jagung langka atau mahal harganya.

Selain itu, pada tahun 2025 pengembangan ayam petelur telah bertransformasi menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan pangan hewani di tingkat rumah tangga dan kelompok ternak. Keberhasilan program ini bukan sekadar angka, melainkan manifestasi dari kerja keras koordinasi lintas sektoral yang melibatkan 18 Satuan Kerja (Satker) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Program pengembangan ayam petelur (ayam merah putih) menetapkan target sebanyak 493.500 ekor ayam untuk didistribusikan ke seluruh pelosok negeri. Berkat manajemen rantai pasok yang efektif, realisasi distribusi telah mencapai 493.800 ekor yang ditujukan kepada 823 kelompok. Selanjutnya untuk kegiatan reguler juga telah didistribusikan 2.500 ekor kepada 5 kelompok, sehingga total keseluruhan untuk pengembangan ayam petelur pada tahun 2025 sebanyak 496.300 ekor.



| SP 5 IKP 5.3<br>Produksi Susu  |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Target<br>866,28 ribu ton      | Realisasi<br>820,87 ribu ton |
| % Capaian<br>94,76% (Berhasil) |                              |

Produksi susu merupakan jumlah susu segar yang dihasilkan ternak sapi perah dalam satu periode waktu tertentu, yang bersumber dari data statistik Ditjen PKH dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Produksi Susu} = \sum Q$$

**Keterangan:**

Q : jumlah kuantitas susu sapi perah pada tahun berjalan dalam ton

**a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Realisasi produksi susu tahun 2025 sebesar 820,87 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 866,28 ribu ton, maka capaian Produksi Susu sebesar 94,76% dengan kategori "**Berhasil**". Selanjutnya, Produksi Susu Tahun 2025 tersaji pada Tabel 20.

Tabel 20 Produksi Susu Tahun 2025 (dalam ribu ton)

| No | Jenis Komoditas<br>(000 ton) | Tahun 2025* |           |       |
|----|------------------------------|-------------|-----------|-------|
|    |                              | Target      | Realisasi | %     |
| 1  | Susu Sapi                    | 866,28      | 820,87    | 94,76 |

Sumber: Statistik PKH 2025.

Keterangan: \*) Angka Sementara

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja Produksi Susu tahun 2025 adalah 820,87 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi produksi susu tahun 2024 sebesar 809,04 ribu ton, maka kinerja produksi susu meningkat 11,83 ribu ton atau 1,46%. Selanjutnya, untuk capaian kinerja produksi telur tahun 2025 sebesar 94,76% tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 karena adanya perbedaan indikator kinerja yaitu Peningkatan Produksi Susu dengan target 1,51%.



Tabel 21 Realisasi Produksi Susu Tahun 2020-2025 (dalam ribu ton)

| No | Jenis Komoditas (000 ton) | Tahun  |        |        |        |        |        | r (%) |
|----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|    |                           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025*) |       |
| 1  | Susu Sapi                 | 946,91 | 946,39 | 824,27 | 787,37 | 809,04 | 820,87 | 1,46  |

Sumber: Statistik PKH 2025

Keterangan: \*) Angka Sementara

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029

Realisasi kinerja Produksi Susu tahun 2025 sebesar 820,87 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 943,637 ribu ton, maka realisasi kinerja produksi susu tahun 2025 sudah mencapai 86,99%.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Susu dengan Target Jangka Menengah

| Uraian                   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|
| Target IKP (ribu ton)    | 866,285 | 893,960 | 922,448 | 939,554 | 943,637 | 86,99                                       |
| Realisasi IKP (ribu ton) | 820,875 |         |         |         |         |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

### d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Kegiatan Prioritas “Pengembangan Pangan Hewani” dengan Sasaran “Meningkatnya Produksi Bahan Pangan Hewani”, Indikator RPJMN “Produksi Susu” tahun 2025 memiliki target 855,57 ribu ton. Realisasi produksi susu tahun 2025 (Angka Sementara) sebesar 820,87 ribu ton, sehingga apabila dibandingkan dengan target produksi telur RPJMN 2025-2029 telah mencapai 95,94%.

### e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Realisasi produksi susu tahun 2025 sebesar 820,87 ribu ton atau mencapai 94,76% dengan kategori “Berhasil” dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 866,28 ribu ton. Realisasi indikator kinerja Produksi Susu tahun 2025 meningkat 1,46% apabila





dibandingkan dengan produksi susu tahun 2024. Adapun beberapa beberapa faktor penyebab keberhasilan untuk peningkatan produksi susu antara lain:

1. Adanya perbaikan performa produksi seiring dengan keberhasilan seleksi dan *breeding program* yang mengarah pada peningkatan potensi genetik, serta lonjakan realisasi impor bibit sapi perah.
2. Kontribusi ketersediaan benih/bibit ternak sapi perah terhadap kebutuhan produksi susu dalam memenuhi kebutuhan susu nasional tahun 2025 sebesar 0,41% yang berasal dari realisasi pemasukan bibit sapi perah impor sebesar 0,39% dan sisanya 0,02% berasal dari ketersediaan bibit ternak ruminansia perah di BBPTU HPT Baturraden. Kontribusi BBPTU HPT Baturraden sebesar 0,02% dihitung berdasarkan penjumlahan potensi produksi susu dari kelahiran sapi perah betina di BBPTU HPT Baturraden pada T-2 sebesar 837,5 ton dan potensi produksi susu dari realisasi impor T-1.
3. Ketersediaan bibit/benih ternak sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden tahun 2025 yang berasal dari produksi bibit sebanyak 1.408 ekor dan pemasukan sapi perah impor sebanyak 4.919 ekor. Realisasi produksi susu tahun 2025 di BBPTU HPT Baturraden sebanyak 2.333,42 ton.
4. Kelahiran pedet sapi perah dari kegiatan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, yang dilanjutkan dengan kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri) dan kegiatan optimalisasi reproduksi yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sapi perah melalui inseminasi buatan dan teknologi reproduksi lainnya.
5. Mendorong dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi usaha sapi perah dengan cara melakukan importasi sapi perah untuk menambah populasi di Indonesia dan upaya perbaikan genetik. Rekomendasi teknis pemasukan bibit ternak perah yang diterbitkan pada periode 2016-2025 adalah sebanyak 45.181 ekor dan terealisasi 24.114 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1.250 ekor; tahun 2017 sebanyak 2.320 ekor; tahun 2018 sebanyak 3.482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4.324 ekor, tahun 2020 sebanyak 899 ekor, tahun 2021 sebanyak 1.164 ekor, tahun 2022 sebanyak 1.010 ekor, tahun 2023 sebanyak 2.563 ekor, tahun 2024 sebanyak 2.220 ekor, dan tahun 2025 sebanyak 4.919.
6. Pembinaan Kelompok dengan penerapan *Good Breeding Practices* (GBP) atau *Good Farming Practices* (GFP).
7. Pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang perbibitan dan produksi ternak.
8. Penyusunan regulasi atau NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria).
9. Pengendalian penyakit yang berpengaruh terhadap produksi susu, yaitu Penyakit *Brucellosis* dan Penyakit Mulut Kuku (PMK). Secara umum, capaian vaksinasi *Brucellosis* tahun 2025 belum menunjukkan cakupan yang luas secara nasional jika



berbasis laporan, tetapi tetap memiliki peran strategis sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit di wilayah prioritas dan sebagai langkah pencegahan untuk menekan potensi penyebaran penyakit ke daerah lain.

Sebagai informasi, realisasi vaksinasi *Brucellosis* tahun 2025 berdasarkan pelaporan iSIKHNAS sebesar 158 ekor di Prov. Jawa Timur.

Capaian realisasi kinerja produksi susu pada tahun 2025 yang belum mencapai target dipengaruhi oleh belum berjalannya program *rearing* secara efektif, yang berpengaruh pada rendahnya ketersediaan ternak betina pengganti (*replacement*), sehingga untuk pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri dibutuhkan kenaikan populasi dan produksi. Berbagai upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 agar terdapat peningkatan produksi susu adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan UPTD/UPTD yang menangani perbibitan dan produksi sapi perah.
- 2) Pembinaan kelompok peternak dengan penerapan *Good Breeding Practices* (GBP)/ *Good Farming Practices* (GFP).
- 3) Penguatan regulasi pembibitan dan produksi ternak sapi perah.
- 4) Pemasukan jenis ternak baru dari Amerika Serikat dan Brazil untuk peningkatan mutu genetik sapi perah di Indonesia.
- 5) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bekerja sama dengan Pemerintah Denmark melalui program *Strategic Sector Cooperation* (SSC) untuk peningkatan manajemen pemeliharaan ternak dan peningkatan produksi ternak.
- 6) Memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha baik PMA maupun juga PMDN untuk berinvestasi usaha sapi perah dengan cara melakukan importasi sapi perah untuk menambah populasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia, akan memberikan fasilitasi berupa: (i) kemudahan akses terhadap lahan dengan status *clear and clean* untuk investasi; (ii) penyediaan infrastuktur pendukung seperti akses jalan, listrik, fasilitas kesehatan, sekolah, dll.; dan (iii) akses pembiayaan termasuk suku bunga, bea impor, pajak, subsidi, asuransi, dll.
- 7) Melanjutkan koordinasi untuk penyelesaian Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan, dengan perkembangan saat ini dalam tahap meminta persetujuan Kementerian/Lembaga terkait.
- 8) Pembinaan dan Sosialisasi Kemitraan Usaha Peternakan Komoditas Sapi Perah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan terhadap Industri Pengolahan Susu (IPS) dan koperasi yang dinilai belum sepenuhnya mengikuti ketentuan regulasi kemitraan usaha peternakan, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai regulasi kemitraan usaha peternakan, khususnya terkait usaha sapi perah. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan menyegarkan materi kepada pelaku usaha terkait regulasi, tujuan, prinsip, perjanjian, pengawasan, dan pelaporan kemitraan. Selain itu juga pelaku usaha juga diberikan informasi terkait pengawasan pelaksanaan kemitraan yang disampaikan oleh Komisi Pengawas



Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa GKSI yang memiliki koperasi anggota sapi perah sebanyak 16 koperasi di Jawa Barat, 14 koperasi di Jawa Tengah, dan 28 koperasi di Jawa Timur, sebagian koperasi belum memiliki perjanjian kerjasama tertulis yang memperjelas hak dan kewajiban serta menjadi acuan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah koperasi akan menyampaikan perjanjian kemitraan untuk direviu dan diberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- 9) Pengendalian dan penanggulangan *Brucellosis* merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan hewan nasional, mengingat penyakit ini bersifat *zoonosis*, berdampak langsung terhadap produktivitas ternak sapi perah, serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengendalian *Brucellosis* dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk melindungi unit usaha peternakan, mempertahankan wilayah bebas penyakit, serta mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Pengendalian *Brucellosis* dilaksanakan melalui pendekatan zonasi berbasis risiko, dengan penetapan wilayah ke dalam zona pemberantasan dan zona pencegahan. Zona pemberantasan diprioritaskan di Pulau Jawa, mengingat wilayah ini merupakan sentra utama sapi perah nasional dengan kepadatan populasi ternak yang tinggi serta intensitas lalu lintas ternak dan produk hewan antarpulau yang signifikan. Intervensi di zona pemberantasan diarahkan untuk menekan sumber penularan dan mencegah penyebaran penyakit ke wilayah lain.

Sementara itu, zona pencegahan mencakup wilayah yang saat ini bebas *Brucellosis*, dengan fokus pada perlindungan status bebas melalui penguatan surveilans, pengawasan lalu lintas ternak, dan penerapan biosekuriti secara konsisten. Strategi pengendalian *Brucellosis* dilaksanakan melalui serangkaian intervensi yang saling terintegrasi, meliputi:

- a. Penerapan sistem kompartemen bebas *Brucellosis* pada unit usaha peternakan sapi, khususnya sapi perah, melalui pemenuhan persyaratan biosekuriti, manajemen kesehatan ternak, dan surveilans berkala.
- b. Penguatan surveilans aktif dan pasif untuk mendeteksi dini kasus *Brucellosis* serta memantau status kesehatan ternak.
- c. Pengendalian lalu lintas ternak dan produk hewan berbasis risiko, terutama dari wilayah tertular menuju wilayah bebas.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelibatan dokter hewan dan paramedik veteriner dalam pemeriksaan, pengambilan sampel, dan pendampingan unit usaha peternakan.
- e. Edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha peternakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan hewan dan biosekuriti.



- 9). Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan hewan nasional karena dampaknya yang signifikan terhadap produktivitas ternak, keberlanjutan usaha peternakan, stabilitas pasokan pangan asal hewan, serta perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengendalian PMK dirancang secara komprehensif, bertahap, dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian dan risiko penyakit secara progresif di wilayah tertular, sekaligus melindungi wilayah yang telah bebas PMK.

Pendekatan pengendalian dan penanggulangan PMK dilaksanakan secara tertarget, berbasis zonasi risiko, dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Wilayah dibagi ke dalam zona pemberantasan, zona pengendalian, dan zona pencegahan, dengan intervensi yang berbeda sesuai tingkat risiko dan peran wilayah dalam sistem produksi peternakan nasional.

Strategi pengendalian PMK dilaksanakan melalui kombinasi beberapa intervensi utama yang saling melengkapi, yaitu:

- a. Vaksinasi PMK berkelanjutan sebagai upaya utama dalam membentuk dan mempertahankan kekebalan kelompok (*herd immunity*).
- b. Surveilans aktif dan pasif untuk mendeteksi dini kejadian penyakit, memantau tren penularan, serta mengevaluasi efektivitas pengendalian.
- c. Pengobatan dan penanganan ternak sakit untuk menurunkan tingkat keparahan penyakit dan mengurangi sumber penularan.
- d. Pengendalian lalu lintas ternak dan media pembawa penyakit hewan lainnya guna mencegah penyebaran penyakit antarwilayah dan antarpulau.
- e. Penerapan dan penguatan biosekuriti di tingkat peternakan, pasar hewan, sarana transportasi, dan unit usaha peternakan.

#### **f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan populasi dan produksi sapi perah pada tahun 2025 yaitu:

- a. Impor sapi perah dilakukan dalam upaya perbaikan genetik di UPT perbibitan dan perusahaan sapi perah. Realisasi pemasukan bibit ternak perah pada periode 2016-2025 adalah sebanyak 24.114 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1.250 ekor; tahun 2017 sebanyak 2.320 ekor; tahun 2018 sebanyak 3.482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4.324 ekor, tahun 2020 sebanyak 899 ekor, tahun 2021 sebanyak 1.164 ekor, tahun 2022 sebanyak 1.010 ekor, tahun 2023 sebanyak 2.563 ekor, tahun 2024 sebanyak 2.220 ekor, dan tahun 2025 sebanyak 4.919 ekor.
- b. Penyediaan/produksi benih (semen beku dan embrio) dan bibit unggul yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH sebagaimana tercantum pada Tabel 24. Upaya peningkatan kontribusi ketersediaan benih/bibit ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu pada tahun 2025 dilaksanakan melalui seleksi



performa dan breeding program yang mengarah pada peningkatan potensi genetik di UPT perbibitan.

Tabel 23 Produksi Bibit dan Benih Sapi Perah Tahun 2020-2024

| UPT                                  | Tahun   |         |         |         |         |         | Jumlah    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |           |
| BBIB Singosari<br>(dosis semen beku) | 259.130 | 236.374 | 315.530 | 354.755 | 530.636 | 279.339 | 1.696.425 |
| BIB Lembang<br>(dosis semen beku)    | 339.135 | 319.313 | 217.139 | 213.258 | 156.222 | 64.211  | 1.245.067 |
| BET Cipelang<br>(dosis embrio)       | 0       | 69      | 75      | 96      | 0       | 167     | 240       |

Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2025.

- c. Pemasukan jenis ternak baru untuk peningkatan mutu genetik sapi perah di Indonesia melalui penerbitan rekomendasi pemasukan/impor benih ternak berupa semen beku sapi perah yang diterbitkan tahun 2024 sebanyak 75.000 dosis, yang terdiri dari rumpun *Jersey* sebanyak 7.300 dosis dan *Friesian Holstein* (FH) sebanyak 67.700 dosis. Pemasukan semen beku berasal dari Amerika Serikat dan Kanada. Pemasukan sapi FH *Cross Jersey* dari Australia pada tahun 2025 sebanyak 1.088 dan *Brown Swiss* sebanyak 30 ekor yang diimpor oleh pelaku usaha.
- d. Pembinaan peternak mitra dalam penerapan *Good Breeding Practices* (GBP) / *Good Farming Practices* (GFP);
- e. Pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang perbibitan dan produksi ternak dan menambah alternatif negara sumber ternak.
- f. Pengendalian dan penanggulangan penyakit yang menyebabkan penurunan produksi susu pada sapi perah, diantaranya:
  - 1). Pengendalian dan penanggulangan penyakit *Brucellosis*, melalui kegiatan vaksinasi, dimana realisasi vaksinasi *Brucellosis* tahun 2025, jumlah ternak yang telah divaksinasi tercatat sebanyak 159 ekor, yang seluruhnya berada di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2025 terdapat sertifikat kompartemen bebas *Brucellosis* sebanyak 5 unit usaha.
  - 2). Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui vaksinasi. Distribusi vaksin PMK Sumber APBN TA. 2025 sebanyak 4.000.000 dosis telah 100% terdistribusi ke 28 provinsi dan 10 UPT Pusat. Realisasi Vaksinasi PMK (APBN dan non APBN) mencapai 4.437.390 dosis, terdiri dari: vaksinasi sumber APBN sebanyak 3.670.066 Dosis (91,7%) dan vaksinasi non APBN (Pemerintah Daerah/APBD, CSR dan Mandiri) sebanyak 767.324 dosis.



Kegiatan vaksinasi tersebut telah dilaksanakan secara luas di 29 provinsi, 402 kabupaten/kota, 4.005 kecamatan, dan 18.337 desa, yang mencerminkan sinergi pendanaan pusat dan daerah serta partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan PMK secara berkelanjutan.

g. Regulasi dalam mendukung peningkatan populasi dan produksi susu adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP No. 4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak. Permentan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan perkawinan ternak baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam terkontrol, yang dilaksanakan secara terstandar, terukur, dan berbasis data. Regulasi ini juga menekankan peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta sistem pencatatan dan pelaporan hasil perkawinan ternak.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2025 Tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun Atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan.
- 4) Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
- 5) Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan, dengan progres dalam tahap meminta persetujuan Kementerian/Lembaga terkait.

## **Sasaran Program 6 (SP 6)**

### **TERJAMINNYA KEAMANAN KOMODITAS PETERNAKAN**

Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktik-praktik penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sehingga meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen.

Untuk menjamin keamanan pangan maka diperlukan upaya untuk mencegah dan mengendalikan pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga keseluruhan





mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.

Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Di samping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

| SP 6 IKP 6.1                         |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Indeks Keamanan Komoditas Peternakan |              |
| Target                               | Realisasi    |
| 0,613 Indeks                         | 0,601 Indeks |
| % Capaian                            |              |
| 98,04% (Berhasil)                    |              |

Indeks keamanan komoditas peternakan adalah hasil perhitungan dari beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kondisi keamanan pangan komoditas peternakan yaitu daging, susu dan telur, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Keamanan Komoditas Peternakan} = (0,25a) + (0,20b) + (0,20c) + (0,15d) + (0,1e) + (0,1f)$$

#### Keterangan:

- a = Persentase unit usaha produk hewan ber-NKV terhadap total unit usaha produk hewan yang dibina dan unit usaha produk hewan yang mengajukan NKV.
- b = Persentase penerbitan nomor registrasi produk hewan segar berkemasan terhadap total pengajuan nomor registrasi produk hewan segar berkemasan.
- c = Persentase unit usaha produk hewan yang produknya memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan terhadap total unit usaha produk hewan yang diuji produknya.
- d = Persentase RPH yang melaksanakan pemeriksaan AMPM terhadap total RPH.
- e = Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan sanitari negara tujuan ekspor terhadap total unit usaha yang dibina.
- f = Persentase pengajuan rekomendasi pemasukan produk hewan yang memenuhi persyaratan sanitari terhadap total rekomendasi pemasukan produk hewan yang diterbitkan.



Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner pada tahun 2025 didapatkan data sebagai berikut (rincian perhitungan setiap indikator tersaji pada Lampiran 4).

Tabel 24 Realisasi Indikator Kinerja Program Indeks Keamanan Komoditas Peternakan Tahun 2025

| Kode                                                 | Uraian                                                                                                                                                                            | 2025  |           |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                   | Bobot | Realisasi | Indeks       |
| a                                                    | Persentase unit usaha produk hewan berNKV/dalam pembinaan terhadap total unit usaha produk hewan yang dibina (0,25)                                                               | 0,25  | 56,09%    | 0,140        |
| b                                                    | Persentase produk hewan berkemasan yang teregistrasi terhadap total produk segar berkemasan dari unit usaha (0,20)                                                                | 0,20  | 66,73%    | 0,133        |
| c                                                    | Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan produk hewan terhadap total produk hewan yang diuji (0,20)                                               | 0,20  | 46,81%    | 0,094        |
| d                                                    | Persentase RPH yang melaksanakan pemeriksaan AMPM terhadap total RPH (0,15)                                                                                                       | 0,15  | 22,43%    | 0,033        |
| e                                                    | Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan sanitari negara tujuan ekspor terhadap total unit usaha yang dibina (0,10)                                           | 0,10  | 100,00%   | 0,100        |
| f                                                    | Persentase unit usaha produk hewan yang melakukan pemasukan pangan asal hewan dan memiliki rekomendasi pemasukan terhadap unit usaha produk hewan yang melakukan pemasukan (0,10) | 0,10  | 100,00%   | 0,100        |
| <b>Indeks Keamanan Komoditas Peternakan (Indeks)</b> |                                                                                                                                                                                   |       |           | <b>0,601</b> |

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, data diolah, 2026.

#### a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja Indeks Keamanan Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 0,601 indeks. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2025 sebesar 0,613 indeks, maka diperoleh capaian indikator kinerja sebesar 98,04% dengan kategori “**Berhasil**”.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Indeks Keamanan Komoditas Peternakan Tahun 2025 merupakan Indikator Kinerja Program baru pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator Kinerja tahun 2024 yaitu Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan dengan target 91,94%..Namun demikian, terdapat angka *baseline* tahun 2024 sebesar 0,488 indeks. Jika realisasi tahun 2025 sebesar 0,601 indeks dibandingkan dengan angka *baseline* tahun 2024 sebesar 0,488 indeks, maka capaiannya sebesar 110%.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029**

Realisasi indikator kinerja Indeks Keamanan Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 0,601 indeks. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana yang terdapat pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 0,695, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 86,47%.

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Keamanan Komoditas Peternakan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| Uraian                 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| Target IKP (indeks)    | 0,613 | 0,634 | 0,656 | 0,678 | 0,695 | 86,47                                       |
| Realisasi IKP (indeks) | 0,601 |       |       |       |       |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

Realisasi indikator kinerja Indeks Keamanan Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 0,601 indeks tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat indikator kinerja strategis pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029 maupun standar nasional yang ditetapkan.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan capaian kinerja Indeks Keamanan Komoditas Peternakan disebabkan oleh:



1. Meningkatnya jumlah auditor NKV yang semula berjumlah 394 auditor provinsi dan 30 orang auditor pusat menjadi 442 orang auditor provinsi dan 39 orang auditor pusat, sebagai hasil dari pelaksanaan bimbingan teknis Auditor NKV sebanyak 2 tahap.
2. Memprakarsai penyusunan Petunjuk Teknis Tata Cara Audit dan Surveilans Nomor Kontrol Veteriner Dalam Bentuk Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor 9996/KPTS/HK.160/F/09/2025 untuk menindaklanjuti keterbatasan sumber daya Auditor Nomor Kontrol veteriner, terbatasnya anggaran pelaksanaan Audit/Surveilans Nomor Kontrol Veteriner, dan jarak lokasi Unit Usaha jauh dari Dinas Daerah Provinsi.
3. Akselerasi pemeriksaan pengajuan registrasi produk hewan di semua level pemeriksaan, penderasan informasi akan pentingnya registrasi produk hewan melalui media sosial, dan optimalisasi komunikasi terhadap kendala pengajuan registrasi produk hewan.
4. Peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dilakukan untuk memastikan kemampuan laboratorium dalam melayani pengujian keamanan produk hewan secara andal dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penjaminan mutu pengujian sesuai standar yang berlaku. Selain itu, dilakukan pengembangan aplikasi sistem informasi laboratorium yang terintegrasi guna mengakomodasi kebutuhan pengawasan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengujian, serta mendukung pengelolaan dan analisis data secara akurat.
5. Memaksimalkan pelaporan pemeriksaan AMPM melalui aplikasi AMPM iSIKHNAS yaitu dengan: a) Identifikasi awal RPH yang telah melaporkan hasil pemeriksaan Antemortem Postmortem di AMPM iSIKHNAS; b) Koordinasi dengan Dinas terkait Pelaksanaan Bimtek Pelaporan AMPM iSIKHNAS; c) Rekapitulasi Data jumlah RPH yang telah melaporkan hasil pemeriksaan Antemortem Postmortem di AMPM iSIKHNAS Januari-Desember 2025; dan d) Bimbingan Teknis Pelaporan Antemortem Postmortem (AMPM) melalui Aplikasi AMPM iSIKHNAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jambi Provinsi Aceh dan Provinsi Bengkulu.
6. Pembinaan persyaratan sanitari sesuai jenis produk dan negara tujuan ekspor produk hewan.
7. Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025, dan karena adanya perubahan ketentuan World Organisation for Animal Health (WOAH), maka dilakukan penyesuaian terhadap hal tersebut dengan melakukan penyusunan Permentan 19/2025. Dengan terbitnya Permentan tersebut, maka Permentan Permentan No. 17 Tahun 2022 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan dinyatakan tidak berlaku.



#### **f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan produk hewan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2025 antara lain: meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada unit usaha produk hewan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin keamanannya, serta meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

Selain itu, pada tahun 2025 juga telah dilakukan penguatan regulasi yang mendukung keamanan komoditas peternakan yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9996/KPTS/HK.160/F/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Audit dan Surveilans Nomor Kontrol Veteriner.
- c. Standar Operasi Prosedur Penanganan Bahan Baku Pangan Asal Hewan Makan Bergizi Gratis.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan.
- e. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis dan Kriteria Hewan Potong serta Persyaratan Cara yang Baik dan Pengawasan di Rumah Potong Hewan.

Adapun upaya-upaya tindak lanjut pada tahun 2026 antara lain:

- a. Memfokuskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan.
- b. Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.
- c. Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT maupun UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk hewan.
- d. Mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan



sertifikasi NKV, registrasi produk hewan serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan.

- e. Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terkait dengan penjaminan keamanan produk hewan yang menjadi bahan baku harus menjadi prioritas untuk pembinaan unit usaha dan pengawasan keamanan produk hewannya.

### Sasaran Program 7 (SP 7)

#### TERKENDALINYA WILAYAH/ KAWASAN DARI PENYAKIT HEWAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selaras dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular yang menjadi prioritas. Penyakit Hewan tersebut meliputi 11 (sebelas) penyakit yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD), *Anthraks*, *Brucellosis*, *Surra*, *Jembrana*, *Septicaemia Epizootica* (SE), *Rabies*, *African Swine Fever*, *Classical Swine Fever*, dan *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI).

| SP 7 IKP 7.1                                               |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan |           |
| Target                                                     | Realisasi |
| 80,00%                                                     | 83,61%    |
| % Capaian                                                  |           |
| 104,51% (Sangat Berhasil)                                  |           |

Persentase Wilayah/Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan merupakan rata-rata dari persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan persentase kawasan yang terkendali dari penyakit hewan. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan adalah kabupaten/kota yang dapat mempertahankan status bebas penyakit hewan, status terduga penyakit hewan, dan/atau yang tidak mengalami kenaikan signifikan kejadian penyakit hewan secara epidemiologi dibandingkan dengan jumlah total kabupaten/kota. Selanjutnya, persentase kawasan yang terkendali dari penyakit hewan adalah jumlah unit kompartemen bebas penyakit hewan dibandingkan dengan total pengajuan kompartemen bebas penyakit hewan. Formula indikator kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan sebagai berikut:





$$\text{Persentase Wilayah atau Kawasan yang Terkendali dari Penyakit Hewan} = \frac{\text{Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan} + \text{Persentase Kawasan yang Terkendali dari Penyakit Hewan}}{2} \times 100\%$$

dengan langkah perhitungan:

$$\text{Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan} = \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kawasan yang Terkendali dari Penyakit Hewan} = \frac{\text{Jumlah Kompartemen Bebas Penyakit Hewan}^*)}{\text{Total Pengajuan Kompartemen Bebas Penyakit Hewan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a = Jumlah kabupaten/kota yang dapat mempertahankan status bebas Penyakit Hewan
- b = Jumlah kabupaten/kota status terduga Penyakit Hewan
- c = Jumlah kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan signifikan kejadian Penyakit Hewan secara epidemiologi
- d = Jumlah kabupaten/ kota di Indonesia (416 kabupaten dan 98 kota)
- \*) = Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis

Hasil perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali Penyakit Hewan tahun 2025 sebesar 83,61% tersaji pada Lampiran 5.

#### a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan pada tahun 2025 adalah 83,61%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 80,00%, maka diperoleh capaian indikator kinerja tersebut sebesar 104,51% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan tahun 2025 sebesar 83,61% dan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 104,51% tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja dan perubahan cara perhitungan yaitu adanya penambahan komponen perhitungan pada indikator kinerja tersebut. Indikator Kinerja tahun 2024 yaitu Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dengan target 80%. Namun demikian, terdapat angka *baseline* tahun 2024 sebesar 80,00%, Jika realisasi tahun 2025 sebesar 83,61% dibandingkan dengan angka *baseline* tahun 2024 sebesar 80,00%, maka capaiannya sebesar 104,51%.



### c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan tahun 2025 sebesar 83,61%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana yang terdapat pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 90,00%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 92,90%.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| Uraian            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| Target IKP (%)    | 80,00 | 80,30 | 80,60 | 85,00 | 90,00 | 92,90                                       |
| Realisasi IKP (%) | 83,61 |       |       |       |       |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

### d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Kegiatan Prioritas “Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan” dengan Sasaran “Terkendalnya penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan”, Indikator RPJMN “Persentase wilayah/ kawasan terkendali dari penyakit hewan” tahun 2025 memiliki target 70,00%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 70%, maka realisasi Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan tahun 2025 sebesar 83,61% telah mencapai 110%.

### e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan diantaranya disebabkan oleh:

1. Penguatan layanan aktif melalui surveilans dan layanan pasif pengujian PHMS pada UPT Veteriner dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS tahun 2025 sebesar 100,78%.
2. Penerbitan sertifikasi lalu lintas ternak yang bertujuan menjamin bahwa ternak yang dilalulintaskan sehat, mencegah penyebaran penyakit hewan menular serta menjamin ketersediaan bahan pangan asal hewan yang aman. Selama periode Kalimantan sampai dengan Desember 2025 terdapat 36.381 dokumen sertifikat lalu lintas ternak



ruminansia besar dengan jumlah total ternak sebanyak 631.508 ekor. Peningkatan lalu lintas meningkat mulai terjadi pada trimester pertama 2025, dengan puncak dibulan Mei sebanyak 101.906 ekor, hal ini disebabkan karena menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk lalu lintas unggas terdapat 73.966 dokumen sertifikat dengan total ternak sebanyak 34.149.624 ekor, proses penerbitan sertifikat dilakukan melalui <https://lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id/>.

3. Fasilitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 sebesar Rp194.400.000,- untuk operasional puskesmas yang tersebar di 48 kab./kota dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 47,77%. Selanjutnya, untuk DAK Non Fisik Operasional Laboratorium Tahun 2025 sebesar Rp2,798 miliar yang tersebar di 15 provinsi sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi anggaran mencapai 49,16%.
4. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pemangku kepentingan terkait dengan total kegiatan pada tahun 2025 sebanyak 145.051 kegiatan. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk intervensi, antara lain sosialisasi/KIE, disinfeksi, surveilans, pertemuan masyarakat, serta pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang tersebar di seluruh provinsi. Secara umum, kegiatan disinfeksi dan KIE pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), khususnya PMK, ASF, Rabies, dan PHMS lainnya, mendominasi pelaksanaan kegiatan nasional. Kontribusi terbesar berasal dari Daerah Istimewa Kalimantan, dengan total 105.267 kegiatan, terutama pada kegiatan disinfeksi kandang dan KIE pengendalian PMK dan PHMS, yang mencerminkan intensitas intervensi yang tinggi di wilayah tersebut.
5. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
  - a. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Secara nasional, pelaksanaan vaksinasi PMK Tahun 2025 yang bersumber dari APBN dan non-APBN mencapai total 4.437.390 dosis. Kegiatan vaksinasi tersebut telah dilaksanakan secara luas di 29 provinsi, 402 kabupaten/kota, 4.005 kecamatan, dan 18.337 desa, yang mencerminkan sinergi pendanaan pusat dan daerah serta partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan PMK secara berkelanjutan

Realisasi vaksinasi PMK yang bersumber dari APBN hingga 31 Desember 2025 mencapai 3.670.066 dosis, atau 91,7 persen dari target 4.000.000 dosis yang ditetapkan. Pelaksanaan vaksinasi tersebut telah menjangkau wilayah yang luas, yaitu di 28 provinsi, 393 kabupaten/kota, 3.947 kecamatan, dan 17.713 desa, mencerminkan cakupan program vaksinasi yang merata dan masif.

Selain vaksin yang bersumber dari APBN, pelaksanaan vaksinasi PMK Tahun 2025 juga didukung oleh sumber non-APBN, yang meliputi APBD, sumber mandiri, dan CSR. Realisasi vaksinasi yang bersumber dari APBD tercatat sebanyak 542.546,5 dosis, dari sumber mandiri sebanyak 204.904,5 dosis, serta dari CSR sebanyak 19.873 dosis. Pelaksanaan vaksinasi non-APBN tersebut telah dilaksanakan di 26 provinsi, 196 kabupaten/kota, 1.158 kecamatan, dan 4.026



desa, yang menunjukkan kontribusi signifikan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra swasta dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan PMK secara nasional

b. Pengendalian Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD)

Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) merupakan penyakit kulit pada ruminansia sapi dan kerbau, namun banyak dilaporkan pada sapi dan tidak bersifat *zoonosis*. Realisasi vaksinasi *Lumpy Skin Disease* (LSD) Tahun 2025 tercatat sebanyak 8.977 ekor, yang terdiri atas sapi sebanyak 8.639 ekor, kerbau 313 ekor, domba 14 ekor, dan kambing 9 ekor. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi LSD pada tahun 2025 masih difokuskan pada ternak sapi sebagai komoditas utama yang paling rentan dan memiliki dampak ekonomi signifikan.

c. Pengendalian Penyakit *Anthrax*

Penyakit *Anthrax* merupakan penyakit yang secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, penyakit *Anthrax* merupakan salah satu penyakit yang diprioritaskan pengendaliannya. Langkah pengendalian penyakit *Anthrax* antara lain dengan pengobatan, vaksinasi, surveilans, pengawasan lalu lintas antar daerah, bimtek, sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

Vaksinasi *Anthrax* tahun 2025 tercatat sebanyak 4.002 ekor, yang terdiri atas domba 51 ekor, kambing 302 ekor, kerbau 411 ekor, dan sapi 4.002 ekor yang tersebar di 5 (lima) provinsi yaitu Prov. Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, DKI Kalimantan, Jawa Tengah, dan D.I. Kalimantan.

d. Pengendalian Penyakit *Brucellosis*

Penyakit *Brucellosis* atau penyakit keluron merupakan salah satu penyakit prioritas yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan populasi ternak di wilayah tertular. *Roadmap* Pengendalian dan Penanggulangan *Brucellosis* telah disusun dengan pola pengendalian penyakit dengan vaksinasi, pembebasan wilayah, sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan penyusunan NSPK pengendalian *Brucellosis*. Pada tahun 2025, kegiatan Pengendalian *Brucellosis* dilaksanakan melalui pembebasan kompartemen bebas dari *Brucellosis* sebanyak 5 unit.

e. Pengendalian Penyakit *Surra*

Pengendalian dan penanggulangan *Surra* merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan keberlanjutan usaha peternakan, mengingat *Surra* (*Trypanosomiasis*) merupakan penyakit hewan menular strategis yang menyerang berbagai jenis ternak, khususnya kuda, sapi, kerbau, dan unta, serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Strategi pengendalian dan penanggulangan *Surra* dilaksanakan melalui serangkaian strategi operasional yang saling terintegrasi, meliputi surveilans aktif dan pasif;



pengobatan dan penanganan ternak terinfeksi; pengendalian vektor dan lalu lintas ternak; serta penerapan biosekuriti dan manajemen pemeliharaan.

f. Pengendalian Penyakit Jembrana

Pengendalian Penyakit Jembrana dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan kekhususan spesies, mengingat penyakit ini terutama menyerang sapi Bali. Penetapan wilayah prioritas pengendalian didasarkan pada riwayat kejadian penyakit, sebaran populasi sapi Bali, serta intensitas lalu lintas ternak dari dan menuju wilayah endemis. Realisasi vaksinasi penyakit Jembrana tahun 2025 tercatat sebanyak 9.453 ekor, yang terdiri atas 9.431 ekor sapi, 21 ekor babi, dan 1 ekor kerbau yang tersebar di sembilan provinsi.

g. Pengendalian Penyakit *Septicaemia Epizootica* (SE)

Pengendalian dan penanggulangan *Septicaemia Epizootica* (SE) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan keberlanjutan usaha peternakan, khususnya pada ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau. SE bersifat akut, dapat menyebabkan kematian cepat, serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Realisasi vaksinasi *Septicaemia Epizootica* (SE) Tahun 2025, jumlah ternak yang telah divaksin tercatat sebanyak 10.082 ekor, yang terdiri atas 1.847 ekor kerbau dan 8.235 ekor sapi yang tersebar di sembilan provinsi.

h. Pengendalian Penyakit *Rabies*

Pengendalian rabies dilaksanakan melalui strategi JAWARA (Jawa Bebas Rabies 2029) sebagai kerangka kebijakan utama, dengan fokus pada percepatan eliminasi rabies di Pulau Jawa sekaligus memperkuat pencegahan di wilayah lain. Strategi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Realisasi vaksinasi rabies tahun 2025 tercatat sebanyak 25.015 ekor yang tersebar di 15 provinsi. Vaksinasi didominasi oleh anjing sebanyak 14.095 ekor (56,3%) dan kucing sebanyak 10.809 ekor (43,2%), sementara sisanya merupakan vaksinasi pada hewan lain seperti primata, sapi, linsang, domba, kambing, kerbau, serta kucing ras *British Short Hair* dalam jumlah terbatas.

Secara wilayah, capaian vaksinasi tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total 7.499 ekor, diikuti oleh Provinsi Lampung sebesar 3.638 ekor, Sulawesi Selatan sebanyak 3.575 ekor, dan Kalimantan Timur sebesar 2.162 ekor. Provinsi-provinsi tersebut merupakan wilayah dengan populasi hewan penular rabies (HPR) yang relatif tinggi dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, provinsi lainnya mencatat capaian yang bervariasi sesuai dengan kondisi populasi HPR dan kapasitas pelaksanaan di masing-masing daerah.

i. Pengendalian Penyakit *African Swine Fever* (ASF)

Tantangan penanganan penyakit ASF yaitu tidak adanya vaksin ASF yang tersedia di dunia, jadi hanya mengandalkan penerapan biosekuriti dimana tipikal sistem



pemeliharaan di Kalimantan peternakan rakyat dengan berbagai level biosekuriti, serta pengendalian lalu lintas babi. Oleh karena itu dilakukan upaya pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan wilayah dengan pendekatan kompartemen. Kompartemen yang berhasil ditetapkan status bebas dari penyakit ASF pada tahun 2025 sebanyak 2 kompartemen.

Selanjutnya, realisasi vaksinasi ASF tahun 2025 tercatat sebanyak 498 ekor ternak babi yang seluruhnya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi ASF masih terfokus pada wilayah tertentu sesuai dengan tingkat risiko, kondisi epidemiologi, serta kesiapan daerah dalam pelaksanaan vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi ASF di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran ASF pada ternak babi, khususnya di wilayah yang memiliki populasi babi dan potensi risiko penularan penyakit. Fokus vaksinasi pada satu provinsi mencerminkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mempertimbangkan situasi penyakit, kapasitas layanan kesehatan hewan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

j. Pengendalian Penyakit *Classical Swine Fever*

Pengendalian dan penanggulangan *Hog Cholera* (HC)/*Classical Swine Fever* (CSF) adalah melalui vaksinasi di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Sampai dengan saat ini, wilayah yang bebas HC sebanyak 2 provinsi yaitu Sumatera Barat (2014) dan Kalimantan Barat (2021).

k. Pengendalian Penyakit *Avian Influenza* (AI)

Pengendalian dan penanggulangan High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, mengingat HPAI bersifat sangat menular, menyebabkan tingkat kematian tinggi pada unggas, serta berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan dan risiko zoonosis. Strategi Pengendalian dan penanggulangan HPAI melalui penguatan biosekuriti perunggasan, surveilans aktif dan pasif, vaksinasi unggas berbasis risiko, respon cepat dan penanganan wabah, pengendalian lalu lintas unggas dan produk unggas, dan koordinasi lintas sektor dan pendekatan *one health*. Pada tahun 2025 tercatat 335 unit usaha perunggasan telah mendapat sertifikat kompartemen bebas dari *Avian Influenza* dari 365 unit usaha yang mengajukan kompartemen bebas *Avian Influenza*.

Adapun kendala dalam pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah/Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan yaitu koordinasi lintas sektor, perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, dukungan regulasi daerah, penegakan hukum, serta mekanisme pembiayaan bersama pada beberapa wilayah mengalami keterlambatan pelaksanaan atau penyesuaian target.





**f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan, antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring dan investigasi tertarget oleh UPT Veteriner pada tahun 2025 dengan sampel teridentifikasi sebanyak 67.756 sampel dari target 67.172 sampel.
2. Produksi obat dan vaksin tahun 2025 oleh Pusvetma sejumlah 10.354.092 dosis dari target 7.175.075 dosis.
3. Pengujian dan sertifikasi obat hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan tahun 2025 sejumlah 3.185 sampel dari target 2.314 dosis.
4. Pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, dan media pembawa (HPM) melalui penerbitan regulasi lalu lintas HPM, pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas HPM serta penerapan biosekuriti pada unit kompartemen.
5. Pengawasan obat hewan melalui pengawasan mutu dan peredaran obat hewan dengan kegiatan penerapan CPOHB, registrasi obat hewan, pelatihan pengawas obat hewan, dan pengawasan peredaran obat hewan oleh pengawas obat hewan.
6. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
7. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan melalui dan kapasitas laboratorium veteriner pada 11 UPT veteriner.
8. Penguatan regulasi melalui penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) tahun 2025 yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pelarangan dan Pembatasan Penggunaan Antimikroba, dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).

**Sasaran Program 8 (SP 8)**

**TERKENDALINYA WILAYAH DARI ZOONOSIS DAN PENYIMPANGAN  
PRODUK HEWAN YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN MANUSIA**

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit



pada manusia yang ditularkan melalui hewan (*zoonosis*) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sehubungan dengan upaya pengelolaan risiko *zoonosis* dan pengendalian penyimpangan produk hewan, dilakukan perhitungan indikator kinerja “Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia”. Indikator tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pencegahan dan pengendalian *zoonosis* serta peningkatan keamanan produk hewan di setiap kabupaten/kota.

Ruang lingkup terkendalinya *zoonosis* yaitu *Rabies*, *Anthraks*, *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) dan/atau penyakit hewan menular lainnya yang berpotensi berdampak pada manusia. Dan penyimpangan produk hewan berupa bahaya fisik, biologi dan kimiawi yang dibawa oleh produk hewan yang berpotensi berdampak pada kesehatan manusia.

| SP 8 IKP 8.1                                                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Persentase Wilayah yang Terkendali dari <i>Zoonosis</i> dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia |           |
| Target                                                                                                                    | Realisasi |
| 41,00%                                                                                                                    | 45,53%    |
| 110,00% Capaian<br>( Sangat Berhasil)                                                                                     |           |

Pengukuran indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia tahun 2025 menggunakan formula sebagai berikut:

$$a = \frac{b + c}{2}$$

Keterangan:

- a = Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia
- b = Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*



- c = Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia

Persentase wilayah yang terkendali *zoonosis* merupakan perbandingan kabupaten/ kota yang terkendali dari *zoonosis* dengan total kabupaten/kota nasional. Dan persentase wilayah yang terkendali dari penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia merupakan perbandingan kabupaten/ kota yang terkendali dari penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia dengan total kabupaten/ kota nasional. Adapun perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia tahun 2025 yaitu (rincian perhitungan tersaji pada Lampiran 6).

$$\begin{aligned} &= \frac{\left(\frac{246}{514} \times 100\%\right) + \left(\frac{222}{514} \times 100\%\right)}{2} \\ &= \frac{47,86\% + 43,19\%}{2} \\ &= 45,53\% \end{aligned}$$

#### a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia tahun 2025 sebesar 45,53%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 41,00%, maka capaian indikator kinerja ini mencapai 110,00% atau dalam kategori **"Sangat Berhasil"**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia tahun 2025 merupakan Indikator Kinerja Program baru pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator Kinerja tahun 2024 yaitu Presentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* dengan target 76%. Namun demikian, terdapat angka *baseline* tahun 2024 sebesar 40,50%. Jika realisasi tahun 2025 sebesar 45,53% dibandingkan dengan angka *baseline* tahun 2024 sebesar 40,50%, maka capaiannya sebesar 110%.



### c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia tahun 2025 adalah 45,53%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana yang terdapat pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 43,00%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 105,88%.

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029

| Uraian            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | % Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| Target IKP (%)    | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,50 | 43,00 | 105,88                                           |
| Realisasi IKP (%) | 45,53 |       |       |       |       |                                                  |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

### d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia tahun 2025 adalah 45,53%. Indikator Kinerja Program tersebut tidak terdapat standar nasional sebagai rujukan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja.

### e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia disebabkan oleh:

1. Pengendalian *zoonosis* dari hewan ke manusia dilakukan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan target pada populasi masyarakat di daerah endemis atau risiko tinggi tertular *zoonosis*, mengingat sebagian besar penularan penyakit zoonotik berkaitan erat dengan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan hewan dan lingkungan. Dengan demikian, KIE *zoonosis* menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian *zoonosis* yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi aktif masyarakat di Indonesia. Kegiatan KIE *zoonosis* pada tahun 2025 antara lain:
  - a. Pelaksanaan KIE *zoonosis* oleh 274 dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota se Indonesia. Materi KIE yang diberikan terkait Rabies, HPAI dan *Anthraks*, baik dalam bentuk pertemuan, penyuluhan



- pada saat akan dilaksanakan vaksinasi, perayaan Hari Rabies Sedunia, penyebarluasan informasi baik melalui media cetak (leaflet, poster) maupun media sosial (Instagram, Facebook, Tiktok).
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui Pembentukan Kader *Zoonosis* oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Pembentukan Fasilitator Kader *Zoonosis* oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 bekerja sama dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Pengawasan pemeriksaan hewan kurban merupakan upaya penting untuk menjamin kesehatan hewan, keamanan pangan asal hewan, serta perlindungan kesehatan masyarakat pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum pemotongan (*ante mortem*) hingga sebelum pemotongan (*post mortem*). Melalui pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* oleh petugas berwenang, risiko penularan penyakit hewan menular strategis dan *zoonosis* dapat dicegah, sehingga daging kurban yang dihasilkan memenuhi prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Kegiatan yang mendukung pengawasan pemeriksaan hewan kurban tahun 2025 antara lain:
- a. Penerbitan Surat Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Nomor 0203/PK.430/F5/06/2025 tentang Pelaksanaan Kurban dalam Rangka Idul Adha 1446 H kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi terkait pedoman pelaksanaan teknis dalam rangka pemotongan hewan kurban.
  - b. Koordinasi Tim Pendampingan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Sapi Kurban Tahun 2025. Dalam rangka monitoring dan pelaporan kegiatan ini, seluruh pendampingan terhadap bantuan sapi kurban Presiden dilaporkan melalui formulir Google yang sudah tersedia.
  - c. Pemantauan Pemotongan Hewan Kurban Pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2025/1446 H dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Telah dilakukan pelaporan hasil pemeriksaan hewan kurban di 15.208 lokasi di 301 kabupaten kota.
3. Pelaksanaan pemeriksaan AMPM di Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan tahapan krusial dalam menjamin keamanan dan mutu pangan asal hewan serta melindungi kesehatan masyarakat. Pemeriksaan *ante mortem* dilakukan untuk memastikan hewan yang akan dipotong berada dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit hewan menular dan *zoonosis*, serta layak potong, sedangkan pemeriksaan *post mortem* bertujuan mendeteksi kelainan atau penyakit pada karkas dan organ dalam setelah pemotongan. Pelaporan hasil pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* (AMPM) melalui aplikasi AMPM iSIKHNAS memiliki peran penting dalam mendukung sistem pengawasan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan secara nasional. Melalui pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, data hasil pemeriksaan di Rumah Potong Hewan (RPH) dapat dihimpun secara cepat, akurat, dan real time, sehingga memudahkan pemantauan kondisi kesehatan hewan



potong, deteksi dini penyakit hewan menular dan *zoonosis*, serta pengambilan keputusan yang tepat oleh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, strategi guna mendukung wilayah yang terkendali penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia adalah sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan optimalisasi pengawasan.
2. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan keamanan produk hewan.
3. Kolaborasi dari berbagai lintas sektor meliputi pemerintah, akademisi, swasta, asosiasi masyarakat/profesi/usaha dalam kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.
4. Penguatan kapasitas laboratorium kesmavet.

#### **f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Dalam upaya pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* serta penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia dilakukan strategi melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

##### **1. Penilaian Risiko Bersama**

Penilaian risiko bersama ini dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antar kementerian dan pemangku kebijakan terkait yang bertanggungjawab dalam aspek kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan. Pelibatan ahli lintas sektor dan berbagi informasi akan menghasilkan penilaian risiko bersama dalam penanggulangan *zoonosis* dalam hal pilihan manajemen dan komunikasi risiko terhadap ancaman *zoonosis*.

##### **2. Pemeriksaan kesehatan hewan (*ante-mortem*/AM) dan pemeriksaan kesehatan jeroan serta karkas (*post-mortem*/PM).**

Pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan jeroan serta daging, berperan penting dari pemantauan *zoonosis* dan penyakit hewan menular, karena sebagian besar hewan ternak dipotong di RPH. Pemeriksaan AMPM merupakan elemen yang signifikan dalam rantai pangan asal hewan, sehingga data klinis, patologi, kontaminasi kimia dapat tersedia dan terukur. Pemeriksaan ini juga berkontribusi dalam deteksi dini *hazard* (bahaya) yang berdampak pada kesehatan manusia, maupun kesehatan dan kesejahteraan hewan.

##### **3. Pemetaan *Zoonosis***

Pemetaan *zoonosis* dalam menjamin keamanan pangan untuk memahami konsentrasi bahaya (*hazard*) pada tahapan rantai pangan asal hewan yang berdampak pada risiko kesehatan manusia. Bahaya pada pemetaan ini meliputi *Zoonotik-Tuberculosis* (zTB) yang disebabkan oleh *Mycobacterium Bovis* melalui pengujian sampel susu sapi di peternakan dan lesi pada organ (paru), *limfonodus* (*mediastinalis*, *mammary submandibula*, *intestinal* ada perkejuan), *extrapulmonary* (hati, limpa) yang diambil di RPH serta *Toksoplasmosis* yang disebabkan oleh





*Toxoplasma gondii* pada kambing melalui pengujian sampel susu di peternakan dan organ jantung yang diambil di RPH.

#### 4. Komunikasi Risiko

Pencegahan dan pengurangan risiko *zoonosis* dapat dilakukan melalui komunikasi risiko dalam bentuk advokasi kepada pemangku kepentingan dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang risiko *zoonosis*, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sasaran utama advokasi adalah pemerintah daerah dan instansi terkait sedangkan sasaran utama KIE adalah masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

### **Sasaran Program 15 (SP 15)** **MENINGKATNYA INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETERNAK**

Indeks harga yang diterima peternak menggambarkan fluktuasi harga komoditas peternakan yang dihasilkan peternak terhadap tahun dasar. Tahun 2025 menggunakan tahun dasar 2018. Jika indeks meningkat, harga yang diterima peternak mengalami kenaikan dibandingkan tahun dasar, dan sebaliknya. Indikator ini mencerminkan perubahan harga jual ternak dan produk peternakan yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak. Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa peternak menerima harga yang lebih baik untuk komoditas tersebut.

| SP15 IKP 15.1<br>Indeks Harga yang Diterima Peternak |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Target<br>124,75 Indeks                              | Realisasi<br>124,28 Indeks |
| % Capaian<br>99,62% (Berhasil)                       |                            |

Cakupan Indeks Harga yang Diterima Peternak hanya berfokus pada harga yang diterima oleh peternak bukan perusahaan besar. Komoditas yang dihitung dalamnya adalah ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak sesuai dengan kuisioner Badan Pusat Statistik. Angka indeks harga yang diterima peternak (It) tahunan diperoleh dari website <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcyMCMY/indeks-harga-yang-diterima-petani--it---indeks-harga-yang-dibayar-petani--ib---dan-nilai-tukar-petani-subsektor-peternakan--ntpt--serta-perubahannya--2018-100-.html> untuk ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak (detail data Indeks Harga yang Diterima Peternak pada Lampiran 7).

**a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Realisasi indikator kinerja Indeks Harga yang Diterima Peternak tahun 2025 sebesar 124,28 indeks. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 124,75 indeks, maka capaian indikator ini mencapai 99,62% dengan kategori **Berhasil**.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja Indeks Harga yang Diterima Peternak tahun 2025 sebesar 124,28 indeks merupakan Indikator Kinerja Program baru pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat angka *baseline* tahun 2024 sebesar 122,91 indeks, sehingga perbandingan realisasi tahun 2025 dengan angka *baseline* tahun 2024 sebesar 101,11%.

Tabel 28 Indeks Harga yang Diterima Peternak Tahun 2024-2025

| Kelompok                                        | Tahunan       |               | %           |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                 | 2024          | 2025          |             |
| <b>Indeks Harga Yang Diterima Peternak (It)</b> | <b>122,91</b> | <b>124,28</b> | <b>1,11</b> |
| Ternak Besar                                    | 123,44        | 124,41        | 0,79        |
| Ternak Kecil                                    | 122,78        | 121,40        | (1,12)      |
| Unggas                                          | 120,30        | 122,59        | 1,90        |
| Hasil Ternak                                    | 127,11        | 130,31        | 2,52        |

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/query-builder>, data diolah, 2026.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029**

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Harga yang Diterima Peternak Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| Uraian                 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|
| Target IKP (indeks)    | 124,75 | 126,62 | 128,52 | 130,45 | 132,41 | 93,86                                       |
| Realisasi IKP (indeks) | 124,28 |        |        |        |        |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

Realisasi indikator kinerja Indeks Harga yang Diterima Peternak tahun 2025 adalah 124,28 indeks. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana



yang terdapat pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 132,41 indeks, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 93,86%.

#### **d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional**

Indikator Kinerja Indeks Harga yang Diterima Peternak tidak terdapat standar nasional sebagai rujukan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja.

.

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Kenaikan Indeks Harga yang Diterima Peternak tahun 2025 disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas pada tiga kelompok penyusun Indeks Harga yang Diterima Peternak (It) yaitu kelompok ternak besar sebesar 0,79%; kelompok unggas sebesar 1,90%; dan kelompok hasil ternak sebesar 2,52%. Sementara itu, harga pada kelompok ternak kecil mengalami penurunan sebesar 1,12%. Komoditas yang menyebabkan kenaikan It terbesar adalah ayam ras pedaging dan telur ayam ras.

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Harga yang Diterima Peternak, antara lain

1. Peningkatan permintaan produk peternakan seperti daging dan telur ayam ras seperti melalui program Makan Bergizi Gratis mendorong permintaan langsung ke peternak yang menaikkan harga daging dan telur ayam ras.
2. Stabilisasi harga dan kebijakan pemerintah seperti penyaluran bantuan jagung pakan pada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang memungkinkan harga jual produk peternak lebih menguntungkan.
3. Perbaikan efisiensi dan produktivitas melalui *Good Farming Practices* meliputi penerapan teknologi dalam beternak, penggunaan bibit unggul, dan manajemen pakan yang baik meningkatkan kualitas dan jumlah produksi, yang seringkali diikuti dengan peningkatan harga jual.
4. Peningkatan sinergi antar *stakeholder* yaitu konsolidasi pelaku usaha budidaya ayam ras terintegrasi di daerah sentra produksi untuk intervensi pasokan daging dan telur.
5. Pengembangan jejaring pemasaran, *business matching* peternak/koperasi dengan *buyer*, peningkatan ekspor, penguatan data dan informasi harga serta peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi hasil ternak dan pendampingan sertifikasi mutu.

#### **f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kontribusi Ditjen PKH dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu intervensi dari sisi harga dan dari sisi produksi, berikut adalah kebijakan dan program utama yang berhubungan dengan indeks harga yang diterima peternak (It):



## 1. Intervensi dari Sisi Harga (*price intervention*)

Ditjen PKH berupaya menjaga stabilitas dan penguatan harga jual ternak/produk ternak melalui:

### a. Stabilisasi harga di tingkat produsen

Stabilisasi harga dilaksanakan melalui fasilitasi penyerapan ternak siap potong melalui kemitraan dengan offtaker, BUMN pangan dan stakeholder terkait lainnya, melaksanakan koordinasi pengaturan distribusi dan pasokan antarwilayah serta monitoring harga harian/mingguan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pengendalian pasokan. Pemerintah berupaya menciptakan kepastian pasar agar harga di tingkat peternak tidak jatuh saat produksi melimpah.

### b. Penguatan akses pasar dan pemasaran

Optimalisasi penyerapan produk rakyat dengan menghubungkan sentra produksi peternak dengan sentra distribusi seperti Sentra Pelayanan Pertanian Gizi (SPPG) di daerah-daerah agar terintegrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional bersama-sama menjadikan produk peternak lokal (daging ayam, telur, susu) sebagai pasokan utama program MBG, guna menciptakan permintaan baru (new emerging market).

Selain itu pembukaan dan perluasan akses pasar ekspor produk peternakan dapat menyeimbangkan kelebihan produksi domestik, Ditjen PKH melaksanakan promosi dagang, bisnis matching dan fasilitasi ekspor kepada pelaku usaha peternakan Indonesia.

### c. Penguatan kelembagaan peternak

Ditjen PKH melakukan pengawasan kemitraan inti-plasma untuk meningkatkan posisi tawar peternak terhadap pembeli serta mengembangkan koperasi/kelompok peternak sebagai agregator pemasaran, serta memperkuat struktur kelembagaan peternakan rakyat. Program kemitraan (close loop) yang mengintegrasikan peternakan rakyat dengan sistem keuangan formal untuk memudahkan akses modal bagi peternak kecil seperti KUR.

### d. Pengembangan hilirisasi dan nilai tambah

Pembangunan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan karkas untuk membantu Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) menjaga harga livebird agar tetap mendekati Harga Acuan Pemerintah (HAP). Ditjen PKH melakukan Bimtek nilai tambah produk olahan, kemasan dan mutu.

### e. Stabilisasi Harga Melalui Pengaturan Pasokan

Penetapan Harga Acuan Pemerintah (HAP), Pemerintah mengatur batas bawah harga beli di tingkat peternak dan batas atas di tingkat konsumen untuk menjaga keseimbangan ekonomi.



Ditjen PKH dan Bapanas menjalankan program SPHP Jagung Pakan dengan memberikan subsidi harga jagung pakan yang dikelola oleh Perum Bulog bertujuan menekan biaya produksi peternak unggas, sehingga margin keuntungan (harga yang diterima dikurangi biaya) tetap terjaga.

- f. Program Swasembada Susu dan Daging: Sebagai bagian dari RPJMN 2025-2029, program ini mencakup peningkatan populasi ternak dan produktivitas melalui inseminasi buatan dan penyediaan bibit unggul.
- g. Bantuan sarana prasarana budidaya, pakan dan peralatan produksi
- h. Pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak
- i. Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PMK, LSD, AI, ASF)
- j. Vaksinasi, surveilans, biosekuriti, dan penguatan layanan kesehatan hewan.

Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan dan intervensi tersebut berkontribusi langsung terhadap terbentuknya harga jual yang lebih stabil, peningkatan margin usaha peternak, serta penguatan akses pasar. Dengan demikian, Ditjen PKH berperan nyata dalam mendorong perbaikan kesejahteraan peternak yang tercermin pada capaian Indeks Harga yang Diterima Peternak (It). Keterkaitan antara pelaksanaan program, output kegiatan, dan outcome peningkatan harga di tingkat produsen menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini merupakan hasil dari intervensi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

### **Sasaran Program 16 (SP 16)** **TERJAMINNYA MUTU KOMODITAS PETERNAKAN**

| <b>SP 16 IKP 16.1</b><br><b>Indeks Mutu Komoditas Peternakan</b> |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Target</b><br><b>0,49 Indeks</b>                              | <b>Realisasi</b><br><b>0,61 Indeks</b> |
| <b>% Capaian</b><br><b>110% (Berhasil)</b>                       |                                        |

Sasaran Program Terjaminnya Mutu Komoditas Peternakan bertujuan untuk mewujudkan jaminan mutu terhadap komoditas peternakan melalui pendampingan penerapan dan pengawasan standar mutu hasil peternakan secara konsisten di seluruh rantai pasok. Pelaksanaan program difokuskan pada peningkatan kesesuaian produk hasil peternakan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Teknis Minimal (PTM) serta ketentuan atau standar mutu yang berlaku lainnya.

Sasaran Program ini diukur melalui “Indeks Mutu Komoditas Peternakan” yang merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kualitas produk peternakan



berdasarkan parameter mutu kuantitatif non keamanan pangan yang relevan, meliputi aspek fisik, kimia, dan biologis sesuai dengan ketentuan dalam standar yang berlaku. Perhitungan Indeks Mutu dilakukan dengan membandingkan nilai karakteristik produk terhadap standar mutu acuan, sehingga mencerminkan tingkat kesesuaian mutu produk dengan kriteria yang ditetapkan, disertai pembobotan berdasarkan kepentingannya.

Standar mutu yang digunakan sebagai acuan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) : a) SNI 9226:2023 Karkas dan Daging Sapi/Kerbau; b) SNI 3924:2023 Karkas dan Daging Ayam Ras; c) SNI 3926:2023 Telur Ayam Konsumsi, dan d) SNI 3141:2024 Susu Mentah-Sapi. Penetapan jenis komoditas peternakan yang termasuk dalam ruang lingkup penghitungan Indeks Mutu ini berdasarkan pada ketersediaan standar mutu dan komoditas prioritas untuk mendukung Program Pemerintah (khususnya Makan Bergizi Gratis) yaitu daging sapi, daging ayam ras, telur ayam konsumsi, dan susu mentah.

Pada tahun 2025, komoditas peternakan unggulan prioritas hilirisasi adalah komoditas susu, sejalan dengan upaya percepatan peningkatan populasi melalui investasi sapi perah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Komoditas susu memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas SDM nasional, khususnya anak-anak, karena sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan, menuju Indonesia Emas 2045.

Peningkatan mutu susu sangat penting agar seluruh nutrisi penting pada susu, baik asam amino esensial, kalsium, vitamin dan mineral dapat terserap dan bermanfaat secara optimal untuk konsumen. Mutu susu yang baik, sesuai standar, dapat mendukung pertumbuhan, kesehatan tulang, serta fungsi tubuh secara optimal, dan memenuhi kebutuhan gizi dan protein hewani masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Data yang digunakan bersumber dari standar SNI/PTM produk peternakan, hasil uji mutu produk peternakan binaan Ditjen PKH (UPH, Poktan/Gapoktan, Kelompok Peternak, UMKM, Koperasi, dll) dan/atau hasil pengawasan *pre-market* atau *post-market* terhadap mutu produk peternakan yang termasuk dalam ruang lingkup Indeks Mutu. Pada tahun 2025, sampel pelaku usaha yaitu 34 koperasi susu di wilayah sentra susu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta, sebagai tindak lanjut monitoring pengawasan serap dan mutu susu yang telah dilaksanakan Ditjen PKH bersama Satgas Pangan pada bulan Desember 2024.

Formula pengukuran Indeks Mutu Komoditas Peternakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Mutu Komoditas Peternakan} = \frac{\sum \text{Total Skor Parameter}}{\text{Jumlah Parameter}} \times \text{Koefisien Bobot Indeks Mutu}$$

1. Menentukan parameter mutu nonkeamanan pangan yang bersifat kuantitatif. Parameter ditetapkan berdasarkan SNI yang digunakan dalam ruang lingkup Indeks Mutu untuk seluruh produk yang tercantum dalam ruang lingkup (karkas dan daging sapi/kerbau, karkas dan daging ayam ras, telur ayam konsumsi, dan susu mentah – sapi). Hasil perhitungan parameter mutu nonkeamanan pangan kuantitatif tersebut





berupa koefisien bobot indeks sebesar 0,58 untuk komoditas susu (detail perhitungan tersaji pada Lampiran 8).

2. Mengukur nilai aktual parameter pada sampel produk yang diperoleh dari hasil uji mutu produk dan atau hasil pengawasan *pre market* dan/atau *post market* terhadap mutu produk peternakan, dalam hal ini adalah susu mentah-sapi.
3. Menetapkan nilai acuan standar yang mengacu pada SNI 3141 2024 Susu Mentah – Sapi.
4. Menghitung skor parameter berdasarkan perbandingan antara hasil uji dengan nilai acuan standar.
5. Menghitung Indeks Mutu Keamanan Komoditas Peternakan (Susu Mentah – Sapi) yaitu nilai rata rata dari seluruh skor parameter kuantitatif dikalikan dengan koefisien bobot.

Tabel 30 Indeks Mutu Komoditas Peternakan Tahun 2025

| No.                                                  | Parameter Mutu                             | Skor Parameter Standar | Skor Hasil Uji Parameter | Skor Parameter |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                                                    | 2                                          | 3                      | 4                        | 5=4/3          |
| a.                                                   | Berat jenis (g/cm <sup>3</sup> )           | 1,027                  | 1,03                     | 1,00           |
| b.                                                   | Kadar lemak minimum (%)                    | 3,000                  | 3,73                     | 1,24           |
| c.                                                   | Kadar protein minimum (%)                  | 2,800                  | 2,95                     | 1,05           |
| d.                                                   | Kadar bahan kering minimum (%) (TS)        | 10,800                 | 11,90                    | 1,10           |
| e.                                                   | Kadar bahan kering tanpa lemak minimum (%) | 7,800                  | 7,94                     | 1,02           |
| f.                                                   | <i>Total Plate Count</i>                   | 1,000                  | 1,00                     | 1,00           |
| g.                                                   | pH                                         | 1,000                  | 1,00                     | 1,00           |
| Jumlah Total Skor Parameter (6)                      |                                            |                        |                          | 7,42           |
| Jumlah Parameter (7)                                 |                                            |                        |                          | 7              |
| Koefisien Bobot Indeks Mutu Komoditas Peternakan (8) |                                            |                        |                          | 0,58           |
| Indeks Mutu Komoditas Peternakan (9 = 6/7*8)         |                                            |                        |                          | 0,61           |

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, data diolah, 2026.

#### a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 0,61 indeks. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 0,49 indeks, maka



capaian indikator kinerja program ini sebesar 110% atau dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi Indeks Mutu Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 0,61 indeks tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator kinerja program ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029**

Realisasi indikator kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 0,61 indeks. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 0,57 indeks, maka capaian indikator kinerja program ini telah mencapai 107,83%.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| Uraian                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|
| Target IKP (indeks)    | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 107,83                                      |
| Realisasi IKP (indeks) | 0,61 |      |      |      |      |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kementerian Pertanian**

Realisasi indikator kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 0,50 indeks tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat indikator kinerja strategis pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Capaian kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 101,63% dengan kategori Sangat Berhasil disebabkan oleh:

- 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha (koperasi susu) terhadap penerapan standar mutu yang berlaku. Pemenuhan standar mutu komoditas peternakan, baik SNI maupun



PTM, umumnya masih bersifat sukarela (*voluntary*). Pendampingan dilakukan terhadap 34 koperasi susu di Jawa Barat, Jawa Tengah D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur sebagai tindak lanjut *monitoring* penyerapan susu segar oleh Industri Pengolah Susu (IPS).

- 2) Penguatan laboratorium pengujian mutu, peningkatan sistem sertifikasi mutu dan pengembangan sistem jaminan mutu dan ketertelusuran (*traceability*) produk hasil peternakan. Standar mutu untuk susu mentah, selain SNI, umumnya juga menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, khususnya untuk koperasi susu yang memasok ke industri pengolahan susu (IPS).

Namun demikian dalam pencapaian kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan tahun 2025 terdapat beberapa kendala yaitu:

- 1) Keterbatasan data hasil uji mutu dari pelaku usaha atau Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan.
- 2) Masih terbatasnya pelaksanaan uji mutu di tingkat koperasi secara konsisten dan kontinu.
- 3) Terbatasnya sarana uji mutu di koperasi dan uji profisiensi hasil antara koperasi dan IPS.
- 4) Kurangnya koordinasi, pendampingan penerapan, dan pengawasan standar mutu hasil peternakan kepada pelaku usaha.

Dengan tercapainya kinerja sasaran program ini, diharapkan mutu komoditas peternakan nasional dapat terjamin, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk peternakan Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional.

#### **f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan ditunjang oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan mutu komoditas peternakan di sepanjang rantai pasok.
- 2) Penguatan pengujian mutu produk peternakan, baik melalui uji cepat maupun pengujian komprehensif laboratorium.
- 3) Sosialisasi regulasi dan standar mutu produk peternakan kepada *stakeholders* terkait.
- 4) Koordinasi dan sinergitas dengan *stakeholder* terkait, khususnya dengan industri sebagai *offtaker* produk peternakan.

Selanjutnya, untuk dapat lebih merepresentasikan indikator kinerja Indeks Mutu Komoditas Peternakan pada periode selanjutnya, beberapa upaya tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan jumlah unit usaha atau Unit Pengolahan Hasil (UPH) sebagai sampel pengumpulan data hasil uji mutu.



- 2) Meningkatkan *awareness* pelaku usaha peternakan untuk melaksanakan uji mutu sesuai dengan parameter mutu secara berkelanjutan.
- 3) Mendorong pelaksanaan uji profisiensi dan kalibrasi sarana uji mutu para pelaku usaha atau Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan.
- 4) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkala bagi petugas mutu hasil peternakan di daerah guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis.

### Sasaran Program 17 (SP 17)

## MENINGKATNYA VOLUME EKSPOR KOMODITAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam era globalisasi saat ini, hampir semua negara di dunia berlomba-lomba meningkatkan ekspor dari berbagai sektor untuk menyumbang devisa negara. Sektor pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu komoditas yang terus didorong untuk dapat meningkatkan neraca perdagangan di Indonesia. Beberapa komoditas peternakan dan kesehatan hewan telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti obat hewan dan produk unggas. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan agar mampu mendorong peningkatan nilai ekspor untuk menyumbang devisa negara.

| SP 17 IKP 17.1<br>Volume Ekspor Komoditas Peternakan |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Target<br>531.329 ton                                | Realisasi<br>599.291 ton |
| % Capaian<br>110,00% ( Sangat Berhasil)              |                          |

Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan peningkatan jumlah komoditas peternakan yang berhasil diekspor ke negara tujuan. Indikator ini mencerminkan keberhasilan peran pemerintah dan *stakeholder* dalam membuka akses pasar, memenuhi persyaratan negara tujuan dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan kontribusi subsektor peternakan terhadap nilai perdagangan internasional semakin meningkat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok produk peternakan yang berdaya saing.

Indikator Kinerja Program “Volume Ekspor Komoditas Peternakan” menggambarkan total volume komoditas peternakan yang berhasil diekspor dalam periode tertentu yaitu



kelompok komoditas i) Hewan hidup; ii) Produk pangan; iii) Produk non pangan; iv) Obat hewan; dan v) Benih dan bibit ternak. Kelompok komoditas ini sesuai dengan standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan teknis negara tujuan. Secara strategis, indikator Volume Ekspor Komoditas Peternakan berkontribusi langsung terhadap peningkatan devisa negara sekaligus mendukung pengembangan produk peternakan berdaya saing global.

Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian dan diolah oleh Ditjen PKH. Cara perhitungan indikator Volume Ekspor Komoditas Peternakan adalah dengan mencari data ekspor peternakan dan kesehatan hewan selama tahun berjalan di *website* Badan Pusat Statistik dan kelompokkan berdasarkan jenis komoditas, kemudian jumlahkan angka dari masing-masing kelompok komoditas sebagai angka rata-rata volume ekspor. dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Volume Ekspor Komoditas Peternakan} = \sum Q$$

**Keterangan:**

Q = jumlah kuantitas produk yang diekspor (dalam ton)

Secara rinci hasil perhitungan IKP Volume Ekspor Komoditas Peternakan dapat dilihat pada Lampiran 9.

**a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Realisasi Volume Ekspor Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 599.291 ton (angka tetap bulan November 2025), jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 531.329 ton, maka capaian indikator mencapai 110,00% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja Volume Ekspor Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 599.291 ton atau meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 489.640 jika dilihat pada Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024.

Tabel 32 Realisasi Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2024-2025

| KELOMPOK KOMODITAS | REALISASI 2024 |                 | REALISASI 2025* |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    | VOLUME (TON)   | NILAI (USD 000) | VOLUME (TON)    | NILAI (USD 000) |
| Hewan Hidup        | 250            | 5.414           | 394             | 7.976           |
| Produk Pangan      | 279.233        | 1.074.988       | 309.142         | 983.698         |



| KELOMPOK KOMODITAS | REALISASI 2024 |                  | REALISASI 2025* |                  |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                    | VOLUME (TON)   | NILAI (USD 000)  | VOLUME (TON)    | NILAI (USD 000)  |
| Produk Non Pangan  | 162.896        | 205.151          | 75.244          | 131.077          |
| Obat Hewan         | 46.216         | 65.673           | 213.271         | 236.066          |
| Bibit Dan Benih    | 1.045          | 3.030            | 1.240           | 4.136            |
| <b>TOTAL</b>       | <b>489.640</b> | <b>1.354.256</b> | <b>599.291</b>  | <b>1.362.953</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah Pusdatin Kementan, 2025

\*) Angka Tetap November 2025

#### c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029

Realisasi indikator kinerja Volume Ekspor Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 599.291 ton, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 595.500 ton, maka realisasi kinerja tersebut terhadap target jangka menengah telah mencapai 100,64%.

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Volume Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

| Uraian              | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|
| Target IKP (ton)    | 499.432 | 514.415 | 540.136 | 567.143 | 595.500 | 100,64                                      |
| Realisasi IKP (ton) | 599.291 |         |         |         |         |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.

#### d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Realisasi indikator kinerja Volume Ekspor Komoditas Peternakan tahun 2025 sebesar 599.291 ton atau mencapai 110,00% dari target, sehingga berada dalam kategori “Sangat Berhasil”. Indikator Kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak terdapatnya rujukan standar kinerja tersebut.





#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan Tabel 32 Realisasi Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2024-2025 dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar yang menyumbang capaian kinerja berasal dari produk pangan dan obat hewan. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan ekspor produk peternakan diantaranya:

- a) Peningkatan ekspor obat hewan tahun 2025 yang didukung oleh 77 produsen obat hewan yang tersebar di tujuh provinsi, dengan berbagai jenis produk mulai dari produk biologik (vaksin), farmasetik, premiks, hingga obat alami.
- b) Peningkatan ekspor produk biologik (vaksin), farmasetik (antibakteri dan antiprotozoa), premiks (asam amino dan mineral), dan obat hewan lainnya ke 95 negara dengan nilai ekspor mencapai USD 2,14 miliar atau sekitar Rp 32,60 triliun selama 2017–2025.
- c) Adanya potensi ekspor produk pangan antara lain produksi Sarang Burung Walet (SBW) mencapai 1.340 ton, dengan realisasi ekspor sebesar 1.218 ton, sehingga persentase produk komoditas peternakan yang siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan mencapai 90,89 persen. Sementara itu, produksi unggas tercatat sebesar 10,83 juta ton, dengan tingkat konsumsi domestik sebesar 10,63 juta ton, sehingga persentase produk komoditas peternakan yang siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan berada pada angka 1,85 persen.
- d) Penerbitan sertifikat kompartemen bebas penyakit pada tahun 2025 sebanyak 335 unit usaha bebas *Avian Influenza*, 5 unit usaha bebas *Brucellosis*, dan 2 unit usaha bebas *African Swine Fever*.
- e) Pemenuhan standar mutu produk yang memenuhi standar kesehatan hewan dan keamanan pangan serta persyaratan *sanitary and phytosanitary* (SPS) negara tujuan lebih siap untuk diekspor. Selama tahun 2025 telah terdapat penambahan unit usaha daging, susu, dan telur sebanyak 949 unit usaha ber-NKV dari 1.692 unit usaha yang mengajukan NKV.
- f) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara.
- g) Harmonisasi regulasi dengan standar internasional.
- h) Kemudahan perizinan ekspor.
- i) Perjanjian dagang bilateral/multilateral yang menurunkan hambatan tarif dan non tarif.
- j) Penerapan Cara Pembutan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) secara konsisten.



- k) Harga yang kompetitif dibanding produk negara pesaing. Kemampuan formulasi sesuai kebutuhan spesifik negara tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan ekspor, maka upaya tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PKH antara lain:

- 1) Mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi, khususnya biologik dan farmasetik, melalui penguatan industri hilir.
- 2) Diversifikasi pasar ekspor obat hewan, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan produk tertentu.
- 3) Penguatan daya saing produk nasional, melalui peningkatan mutu, sertifikasi, dan pemenuhan standar internasional.
- 4) Peningkatan sinergi dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan, dalam rangka memperluas akses pasar global.
- 5) Pemantauan tren ekspor secara berkala, sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan strategi pengembangan ekspor.
- 6) Dukungan regulasi, perizinan, diplomasi perdagangan, serta promosi ekspor mempercepat kesiapan produk peternakan untuk ekspor.
- 7) Perluasan akses pasar dengan upaya pembukaan negara tujuan ekspor baru seperti negara Irak untuk potensi ekspor vaksin dan obat hewan ke Irak untuk *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- 8) Mendorong pasar ekspor komoditas peternakan seperti unggas dan daging olahan dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama bidang pertanian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki.

#### **f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH dalam meningkatkan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan yaitu:

- a) Pada tahun 2025, Ditjen PKH telah menerbitkan sertifikat kompartemen bebas AI sebanyak 335 unit usaha, kompartemen bebas *Brucellosis* sebanyak 5 unit usaha dan kompartemen bebas ASF sebanyak 2 unit usaha yang dapat diakses melalui <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/informasi/kompartemen-bebas-phm>.
- b) Pendampingan pelaku usaha ekspor dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan provinsi dan UPT lingkup Ditjen PKH. Melalui kegiatan pendampingan pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditi di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor.



- c) Peningkatan investasi melalui pemanfaatan KUR untuk usaha budidaya maupun pasca panen dan pengolahan. Realisasi KUR subsektor peternakan (tidak termasuk *mixed farming*) sebesar 14,15 triliun rupiah untuk 277.678 debitur.
- d) Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral.
- e) Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para stakeholder termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K).
- f) Percepatan layanan perizinan rekomendasi bagi pelaku usaha yang akan ekspor.

### Sasaran Program 18 (SP 18)

#### **MENINGKATNYA HASIL PENGOLAHAN KOMODITAS PETERNAKAN UNGGULAN YANG TELAH MENERAPKAN HILIRISASI**

| SP 18 IKP 18<br>Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Target<br>0,20 Indeks                                           | Realisasi<br>0,20 Indeks |
| % Capaian<br>100% (Berhasil)                                    |                          |

Sasaran program meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk ternak dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah melalui pengolahan, diversifikasi, dan/atau penguatan rantai pasok, dengan tujuan utama menyejahterakan peternak, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor atau mengurangi ketergantungan impor.

Keberhasilan sasaran program meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi ditunjukkan dengan meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi produk olahan hasil peternakan sehingga komoditas tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah tetapi telah diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga mempunyai nilai tambah dan daya saing. Daya saing ini salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya ekspor dan/atau substitusi impor.



Sasaran program ini diukur melalui indikator **Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan**. Indikator ini mengukur indeks kinerja jumlah komoditas peternakan unggulan prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan parameter adanya peningkatan ketersediaan komoditas unggulan prioritas hasil hilirisasi (volume dan/atau jenis produk), nilai tambah yang didapat pasca hilirisasi komoditas unggulan prioritas, dan rasio komoditas peternakan hasil hilirisasi yang diekspor terhadap total komoditas peternakan unggulan hasil hilirisasi; dibandingkan total komoditas peternakan unggulan. Komoditas peternakan unggulan meliputi daging sapi, daging ayam, susu, telur, dan sarang burung walet (SBW).

Peran pemerintah dalam hal ini sebagai regulator dan fasilitator dalam mendorong penerapan hilirisasi komoditas peternakan unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan melalui: a) perumusan/penyusunan kebijakan, regulasi, dan standar yang mendukung pengembangan hilirisasi hasil peternakan; b) penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui bimbingan teknis, pendampingan, pelatihan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan dan unit pengolahan hasil peternakan.

Pada tahun 2025, komoditas peternakan unggulan prioritas hilirisasi adalah komoditas susu. Hal ini selaras dengan upaya akselerasi investasi sapi perah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mendorong pelaku usaha swasta untuk berinvestasi pada peternakan sapi perah terintegrasi dan/atau melakukan kemitraan dengan para peternak. Komoditas susu juga memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting serta peningkatan kesehatan dan kecerdasan bangsa. Susu merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi yang mudah dicerna serta mengandung asam amino esensial yang lengkap, kalsium, vitamin, dan mineral yang mendukung pertumbuhan, kesehatan tulang, serta fungsi tubuh secara optimal. Peningkatan ketersediaan dan keberagaman produk olahan susu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi dan protein hewani masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, serta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pengolahan susu segar menjadi produk olahan susu tidak hanya memperpanjang umur simpan produk, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, meningkatkan cita rasa serta meningkatkan preferensi konsumen. Pengolahan susu segar juga memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi peternak dan pelaku usaha pengolahan melalui nilai tambah yang didapatkan, memperkuat daya saing produk susu lokal serta mendukung pengembangan industri persusuan nasional yang berkelanjutan.

Formula pengukuran kinerja Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan sebagai berikut:

|                                                                                               |   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skor parameter komoditas peternakan unggulan prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing | = | Jumlah skor parameter komoditas peternakan unggulan <u>prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing</u> |
|                                                                                               |   | 3                                                                                                           |



**Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan**

**=**

**Skor parameter komoditas peternakan unggulan prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing**

**Jumlah komoditas peternakan unggulan**

Hasil pengukuran kinerja pada unit pengolahan susu yang dilakukan pembinaan, diperoleh gambaran perhitungan skor untuk masing-masing parameter sebagai berikut (detail perhitungan tersaji pada Lampiran 10):

- a. Peningkatan ketersediaan komoditas unggulan prioritas hasil hilirisasi (volume dan/atau jenis produk): harus bernilai positif untuk mendapat skor 1 (satu).

Pada tahun 2025 dari pembinaan dan pendampingan 16 unit usaha pengolahan, baik yang baru maupun yang sudah ada, terdapat peningkatan ketersediaan susu pasteurisasi sebesar 4,7 juta liter. Ragam jenis produk yang diolah atau diversifikasi produk olahan susu juga meningkat. Sebelumnya susu segar hanya diolah menjadi susu pasteurisasi dan yoghurt. Pada tahun 2025 terjadi penambahan diversifikasi/ragam jenis produk olahan susu berupa keju dan es krim di 5 unit usaha.

- b. Nilai tambah yang didapat pasca hilirisasi komoditas unggulan prioritas: harus bernilai positif untuk mendapat skor 1 (satu).

Dari 16 unit usaha pengolahan, baik yang baru maupun yang sudah ada, semuanya memproduksi susu pasteurisasi, untuk itu nilai tambah diukur pada peningkatan nilai tambah pada produk susu pasteurisasi, yaitu rata-rata sebesar Rp13.843/liter atau senilai Rp65.919.743.055 pada tahun 2025, sehingga parameter ini mendapatkan skor 1 (satu).

- c. Rasio komoditas peternakan hasil hilirisasi yang diekspor terhadap total komoditas peternakan unggulan hasil hilirisasi: harus bernilai positif untuk mendapat skor 1 (satu).

Untuk mendapatkan rasio positif, maka realisasi ekspor untuk produk susu harus ada yang diekspor. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian yang diolah dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025 secara nasional terjadi peningkatan volume ekspor produk olahan susu sebesar 5.539.515,18 kg dan peningkatan nilai ekspor sebesar USD6.908.222,36. Hal ini berarti parameter rasio ini mendapat skor 1 (satu).

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja pada unit pengolahan susu yang dilakukan pembinaan, diperoleh gambaran dari indikator kinerja sebagai berikut:



- a. Skor parameter komoditas peternakan unggulan prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing

|                                                                                               |   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skor parameter komoditas peternakan unggulan prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing | = | Jumlah skor parameter komoditas peternakan unggulan <u>prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing</u> |
|                                                                                               |   | 3                                                                                                           |
|                                                                                               | = | $\frac{(1 + 1 + 1)}{3}$                                                                                     |
|                                                                                               | = | 1                                                                                                           |

- b. Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan

|                                                 |   |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan | = | Skor parameter komoditas peternakan unggulan <u>prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing</u> |
|                                                 |   | Jumlah komoditas peternakan unggulan                                                                 |
|                                                 | = | $\frac{1}{5}$                                                                                        |
|                                                 | = | 0,20                                                                                                 |

Realisasi Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan tahun 2025 sebesar 0,20 mencerminkan keberhasilan penerapan hilirisasi hasil peternakan melalui pascapanen dan pengolahan susu. Pemanfaatan susu segar dalam negeri diolah menggunakan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri baik untuk program Makan Bergizi Gratis maupun konsumsi masyarakat, meningkatkan pendapatan peternak melalui peningkatan nilai tambah, serta meningkatkan ekspor.

Pada tahun 2025 secara nasional terjadi peningkatan volume ekspor produk olahan susu sebesar 5.539.515,18 kg dan peningkatan nilai ekspor sebesar USD6.908.222,36. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya saing produk olahan susu nasional di pasar internasional, seiring dengan perbaikan kualitas produk, pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, serta penguatan kapasitas industri pengolahan susu dalam negeri. Peningkatan ekspor tersebut juga mencerminkan keberhasilan upaya hilirisasi sektor persusuan yang mampu memberikan nilai tambah, memperluas akses pasar global, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

#### a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan tahun 2025 adalah 0,20 indeks dari target sebesar 0,20 indeks atau mencapai 100% dengan kategori **Berhasil**.



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan Tahun 2025 merupakan Indikator Kinerja Program baru pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029**

Realisasi Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan tahun 2025 sebesar 0,20 indeks, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah periode 2025-2029 sebesar 1,00 indeks, maka mencapai 20%.

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan Ditjen PKH Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| Uraian                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|
| Target IKP (indeks)    | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 20,00                                       |
| Realisasi IKP (indeks) | 0,20 |      |      |      |      |                                             |

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, data diolah, 2026.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional**

Indikator Kinerja Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan tidak ada standar nasional sebagai rujukan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja. Namun demikian, Pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian periode 2025-2029, Sasaran Strategis 4 (SS 4), yaitu Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan dengan indikator kinerja IKS 4.1, yaitu Indeks Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan dengan target tahun 2025 sebesar 0,23 indeks.

Capaian kinerja Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 sebesar 0,20 indeks, apabila dibandingkan dengan target Indeks Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan di tingkat Kementerian Pertanian tahun 2025, yaitu sebesar 0,23 indeks, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkontribusi sebesar 86,96%.



#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Secara umum keberhasilan dari hilirisasi hasil peternakan susu pada tahun 2025 ini sebagai cerminan dari beberapa upaya dan kondisi yang dicapai dalam persusuan nasional seperti:

- 1) Ketersediaan Bahan Baku yang Berkelanjutan
  - Peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu.
  - Perbaikan manajemen budidaya dan pakan ternak.
  - Penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi susu.
- 2) Penguatan Industri Pengolahan Susu
  - Bertambahnya unit pengolahan susu skala UMKM.
  - Diversifikasi produk olahan susu (susu UHT, pasteurisasi, yogurt, keju, es krim).
  - Penerapan teknologi pengolahan yang meningkatkan efisiensi dan mutu produk.
  - Peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah produk.
- 3) Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan
  - Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
  - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
  - Penerapan sistem jaminan mutu (SNI, HACCP, ISO 22000).
  - Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap standar ekspor.
- 4) Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah
  - Kebijakan hilirisasi sektor peternakan dan persusuan.
  - Fasilitasi perizinan berusaha dan sertifikasi.
  - Dukungan pembiayaan melalui KUR dan skema pembiayaan lainnya.
  - Program pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
- 5) Peningkatan Daya Saing Produk
  - Perbaikan kualitas produk sesuai preferensi pasar domestik dan global.
  - Inovasi kemasan dan branding produk olahan susu.
  - Peningkatan umur simpan produk melalui teknologi pengolahan dan *cold chain*.
  - Efisiensi biaya produksi yang meningkatkan daya saing harga.
- 6) Penguatan Rantai Pasok dan Logistik
  - Pengembangan sistem rantai dingin (cold chain).
  - Perbaikan distribusi dari hulu ke hilir.
  - Integrasi peternak, koperasi, dan industri pengolahan.
  - Kepastian pasokan dan kualitas bahan baku.



7) Akses Pasar dan Promosi Ekspor

- Pembukaan dan perluasan akses pasar ekspor.
- Partisipasi dalam pameran dan promosi dagang internasional.
- Dukungan diplomasi perdagangan dan kerja sama antarnegara.
- Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk.

8) Sinergi Multipihak

- Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Kemitraan industri, koperasi, UMKM, dan peternak rakyat.
- Keterlibatan lembaga riset dan perguruan tinggi
- Peran swasta dalam investasi dan inovasi produk

**f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan utamanya hilirisasi hasil peternakan susu pada tahun 2025 di dukung kebijakan pemerintah dalam akselerasi produksi susu dengan peningkatan peran swasta termasuk peternak UMKM dan koperasi melalui investasi dan kemitraan usaha peternakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembinaan dan pendampingan pascapanen dan pengolahan hasil peternakan. Pendampingan juga dilaksanakan melalui pengawalan penyerapan susu untuk program MBG dan dalam proses memperoleh sertifikasi dan izin edar produk susu.

Secara nasional dampak positif dari keberhasilan dalam hilirisasi hasil peternakan dapat dilihat dari meningkatnya unit pengolahan susu (UPH) yang mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, pada tahun 2025, UPH Susu yang mendapat sertifikat NKV (berbagai level) sebanyak 38 unit, sedangkan pelaku usaha produk susu (utamanya susu pasteurisasi dan UHT) yang mendapatkan izin edar MD dari BPOM sebanyak 26 pelaku usaha.

**Sasaran Program 6 (SP 6)**

**TERWUJUDNYA TAT KELOLA BIROKRASI LINGKUP DITJEN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN YANG BAIK,  
TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL**

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan tugas



dan fungsi organisasi dikelola secara profesional serta berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Kementerian Pertanian, Ditjen PKH secara berkelanjutan melakukan penguatan tata kelola birokrasi guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian. Penguatan tata kelola birokrasi tidak hanya difokuskan pada pemenuhan aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manajemen internal, akuntabilitas keuangan, efektivitas pengawasan, serta kepuasan para pemangku kepentingan, baik masyarakat sebagai pengguna layanan publik maupun unit kerja internal sebagai penerima layanan dukungan manajemen.

| SP 6 IKP 6.1                                                                    |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan |                           |
| Target<br>0,885 Indeks                                                          | Realisasi<br>0,916 Indeks |
| % Capaian<br>103,50% (Sangat Berhasil)                                          |                           |

Untuk mengukur tingkat kematangan dan efektivitas tata kelola birokrasi tersebut, Ditjen PKH menetapkan Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen PKH sebagai salah satu indikator kinerja program. Indeks ini merepresentasikan kondisi tata kelola birokrasi di lingkungan Ditjen PKH yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian secara menyeluruh dengan menilai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) telah diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH.

Pengukuran Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan 5 (lima) parameter utama dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Tata Kelola Birokrasi} = (W \times \frac{TLI}{100}) + (W \times \frac{TLB}{100}) + (W \times \frac{IKPA}{100}) + (W \times \frac{IKM}{4}) + (W \times \frac{Kepuasan}{4})$$

**Keterangan:**

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W    | : 20 %                                                                                                  |
| TLI  | : Persentase tindak lanjut hasil pengawasan intern tugas dan fungsi Ditjen PKH                          |
| TLB  | : Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tugas dan fungsi Ditjen PKH |
| IKPA | : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH                                        |
| IKM  | : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH                                        |



**Kepuasan** : Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH

Kelima parameter tersebut mencerminkan aspek pengawasan, akuntabilitas keuangan, kinerja anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kualitas layanan manajemen internal yang secara bersama-sama membentuk kualitas tata kelola birokrasi Ditjen PKH.

#### a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 adalah 0,916 dari target 0,885 atau mencapai 103,50% dengan kategori **Sangat Berhasil** dengan data dukung setiap parameter sebagaimana tersaji pada Lampiran 11.

Tabel 35 Perhitungan Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

| No.                                 | Parameter                                                                          | REALISASI 2025 |       |           |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|--------------|
|                                     |                                                                                    | Range Nilai    | Bobot | Realisasi | Indeks       |
| a                                   | b                                                                                  | c              | d     | e         | f=d*(e/c)    |
| 1                                   | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern                                              | 100            | 20%   | 90,89     | 0,182        |
| 2                                   | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK                                                | 100            | 20%   | 100,00    | 0,200        |
| 3                                   | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                      | 100            | 20%   | 91,83     | 0,184        |
| 4                                   | Survei Kepuasan Masyarakat                                                         | 4              | 20%   | 3,73      | 0,187        |
| 5                                   | Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen PKH | 4              | 20%   | 3,28      | 0,164        |
| <b>Indeks Tata Kelola Birokrasi</b> |                                                                                    |                |       |           | <b>0,916</b> |

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, data diolah, 2026.

#### b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 merupakan Indikator Kinerja Program baru pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat realisasi parameter Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen PKH tahun 2020-2025 sebagaimana tersaji pada Tabel 36.



Tabel 36 Realisasi Parameter Reformasi Birokrasi Ditjen PKH Tahun 2020-2025

| No. | Parameter                                                                                                 | REALISASI |       |       |        |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|
|     |                                                                                                           | 2020      | 2021  | 2022  | 2023   | 2024  | 2025   |
| 1   | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern (%)                                                                 | -         | 91,47 | 95,88 | 90,57  | 94,15 | 90,89  |
| 2   | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (%)                                                                   | -         | 84,62 | 81,82 | 100,00 | -     | 100,00 |
| 3   | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai)                                                     | 87,47     | 89,79 | 84,56 | 87,93  | 90,67 | 91,83  |
| 4   | Survei Kepuasan Masyarakat (Skala Likert)                                                                 | -         | 3,86  | 3,47  | 3,55   | 3,63  | 3,73   |
| 5   | Tingkat Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen PKH (Skala Likert) | -         | 3,24  | 3,45  | 3,24   | 3,28  | 3,28   |

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2026.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029

Realisasi kinerja Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 sebesar 0,916 indeks. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum pada Rencana Strategis Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 0,899 indeks, maka ketercapaian tahun 2025 terhadap jangka menengah sebesar 101,88%.

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen PKH Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

| Uraian                 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | % Realisasi terhadap Target Jangka Menengah |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| Target IKP (indeks)    | 0,885 | 0,887 | 0,891 | 0,895 | 0,899 | 101,88                                      |
| Realisasi IKP (indeks) | 0,916 |       |       |       |       |                                             |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2026.





#### **d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional**

Realisasi indikator kinerja Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 sebesar 0,916 indeks. Indikator Kinerja tersebut tidak memiliki rujukan standar nasional, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja..

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 mencakup: i) Tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH; ii) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH; iii) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH; iv) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH; dan v) Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH.

Capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen PKH yang melebihi target merupakan upaya optimal dalam mengimplementasikan setiap parameter Indeks Tata Kelola Birokrasi yang berpedoman pada peraturan yang berlaku diikuti dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut serta koordinasi dengan unit kerja dan *stakeholder* terkait. Adapun upaya-upaya penyebab keberhasilan capaian Indeks Tata Kelola Reformasi Birokrasi Ditjen PKH adalah sebagai berikut:

##### **1. *Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen PKH***

Keberhasilan pencapaian kinerja persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal dapat dilihat dari jumlah rekomendasi sebanyak 911 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebanyak 828 rekomendasi. Keberhasilan ini dapat dilihat dari tindaklanjut Ditjen PKH berupa tindaklanjut administrasi maupun teknis terhadap beberapa aspek pengawasan yaitu laporan keuangan, PMK 526, daftar hitam, audit kinerja, evaluasi SAKIP, reviu PIPK, reviu RKAKL, reviu BMN, pengawalan, dan pengawasan lainnya. Usulan tindak lanjut yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan telaah dan validasi untuk ditetapkan status kesesuaian tindak lanjut.

Peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen seluruh jajaran lingkup Ditjen PKH mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai terhadap penyelesaian rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal IV Kementerian Pertanian baik dari aspek laporan keuangan, PMK 526, daftar hitam, audit kinerja, evaluasi SAKIP, reviu PIPK, reviu RKAKL, reviu BMN, pengawalan, dan pengawasan lainnya.

Selain itu, keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:



- 1) Penyelesaian Laporan Pelaksanaan anggaran/LPJ Bendahara Pengeluaran/bulan Bendahara Pengeluaran.
- 2) Penyelesaian Laporan Penatausahaan PNBP/LPJ Bendahara Penerima/bulan.
- 3) Penyelesaian Laporan Penyelesaian KN/triwulan dan Semester.
- 4) Penggunaan aplikasi ePerjadin.
- 5) Penerapan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran perjalanan dinas.
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Ditjen PKH Semester 2 TA.2024, Semester 1 dan Triwulan 3 TA.2025.
- 7) Pencapaian Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Satker UPT dan TP Tahun 2024 berdasarkan hasil revidi Itjen pada Ditjen PKH mendapatkan kategori tidak terdapat kelemahan material (Efektif).
- 8) Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Satker UPT dan TP proses penyelesaian kelengkapan Eviden Dokumen dan pelaksanaan revidi itjen akan dilaksanakan bulan Januari 2026.
- 9) Input BAST BANPEM 2023 bantuan barang telah diinput sebesar 100% dan telah selesai direvidi Itjen sebesar 98,5% sedangkan bantuan uang telah diinput 100% dan telah selesai direvidi Itjen sebesar 100%
- 10) Sertifikasi Lahan luasan 7.773.663.092.390 m<sup>2</sup> dan telah sertifikasi luasan 31.154.327 m<sup>2</sup> atau 92%.
- 11) Penyelesaian Laporan Penetapan Status Penggunaan tahun 2025.

2. *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen PKH*

Keberhasilan pencapaian kinerja persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dilihat dari jumlah rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebanyak 5 rekomendasi. Usulan tindak lanjut yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan telah dilakukan telaah dan validasi untuk ditetapkan status kesesuaian tindak lanjut. Adapun yang menyebabkan keberhasilan diantaranya:

- 1) Satker penanggungjawab kegiatan telah menindaklanjuti temuan secara tuntas.
- 2) Adanya penguatan Sistem Pengendalian Internal melalui pembentukan Satlak PI di Ditjen PKH dan penyelenggaraan Forum SPIP yang melibatkan semua Satker lingkup Ditjen PKH.



- 3) Melaksanakan penertiban Administrasi dan Dokumentasi dengan memastikan semua bukti pertanggungjawaban keuangan lengkap, tertata, dan didigitalisasi untuk mempermudah pencarian dan pencocokan data.

3. *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH*

Keberhasilan parameter Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH tahun 2025 didukung oleh beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

- a. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran sebesar 91,28 yang terdiri dari 2 (dua) indikator:
  - i. Revisi DIPA dengan nilai 9,97 dari bobot maksimal 10.
  - ii. Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 12,44 dari bobot maksimal 15.
- b. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran sebesar 93,27 yang terdiri dari 5 (lima) indikator:
  - i. Penyerapan Anggaran dengan nilai 17,10 dari bobot maksimal 20.
  - ii. Belanja Kontraktual dengan nilai 9,05 dari bobot maksimal 10.
  - iii. Penyelesaian Tagihan dengan nilai 9,99 dari bobot maksimal 10.
  - iv. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan nilai 9,72 dari bobot maksimal 10.
  - v. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pengurang Nilai IKPA dengan nilai 0,75.
- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 94,22 dengan 1 (satu) indikator: Capaian Output dengan nilai 24,32 dari bobot maksimal 25.

Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran mendapatkan nilai paling rendah dibandingkan dengan dua aspek lainnya, yang disebabkan oleh:

- i. Realisasi anggaran per bulan kurang konsisten terhadap Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan. Hal ini secara umum diakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana yang telah disusun per bulannya
- ii. Satker tidak melakukan revisi/ pemutakhiran Halaman III DIPA.
- iii. Terdapat kegiatan Satker yang bersifat insidental sehingga tidak dapat diprediksi.

Selanjutnya, rendahnya nilai penyerapan anggaran disebabkan oleh realisasi anggaran satker sebagian besar masih menumpuk di akhir tahun anggaran dan adanya kegiatan yang tidak terealisasi dengan optimal. Rendahnya nilai capaian output disebabkan oleh satuan kerja tidak melakukan penginputan pada aplikasi SAKTI dan/atau Satker terlambat dalam menginput.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja, antara lain:



- 1) Membangun koordinasi yang efektif dengan membuat sarana komunikasi dengan seluruh Satker Ditjen PKH, baik di Satker UPT (kantor daerah) maupun juga OPD yang menangani Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, dan Monev dimana setiap awal bulan menjadi media untuk menginformasikan kepada seluruh Satker Ditjen PKH untuk melakukan pengisian capaian output secara tepat waktu,
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (triwulanan) terkait pelaksanaan anggaran dengan Biro Perencanaan Kementan dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, yang hasilnya berupa rekomendasi untuk dilakukan perbaikan oleh satuan kerja dibawah Ditjen PKH (UPT dan OPD).

#### 4. *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen PKH*

Keberhasilan peningkatan nilai IKM Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dikarenakan saat ini semua unit pelayanan di lingkup Ditjen PKH baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib menyusun indeks kepuasan masyarakat secara periodik di lingkungan masing-masing dalam upaya peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Dampak dari keberhasilan capaian target nilai IKM adalah peningkatan pelayanan publik di lingkup Ditjen PKH, serta terciptanya budaya pelayanan prima yang berintegritas.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH untuk mendukung keberhasilan pelayanan publik, sehingga memperoleh nilai IKM terbaik, diantaranya:

- 1) Membuat inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 2) Mengevaluasi Standar Pelayanan Publik.
- 3) Melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan terkait pelayanan dari penerima layanan atau stakeholder terkait.
- 4) Memperbaiki sarana prasarana pelayanan publik baik melalui SBSN (BPMSB Bekasi, BPTUHPT Siborong-borong, BPTUHPT Baturaden, BVet Medan, BPTUHPT Padang Mangatas, BVet Lampung, BVet Bukittinggi, BBIB Singosari, BVet Maros) maupun swakelola mandiri.

Terkait implementasi penerapan inovasi, terdapat 3 (tiga) UPT yang meraih penghargaan Praktik Baik Inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2025 yaitu: 1) Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, 2) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikat Produk Hewan, dan 3) Balai Embrio Ternak Cipelang.

Pusvetma mendapatkan penghargaan sebagai Inovator dalam Pelayanan Publik melalui karya unggulan: “Vaksin Aphthovet PMK: Inovasi Anak Negeri dalam Pencegahan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Menuju Swasembada Pangan Nasional”. Inovasi ini menjadi bukti nyata kemampuan anak bangsa dalam mendukung ketahanan dan kemandirian vaksin hewan nasional. Berikutnya,



BPMSPH berinovasi melalui “SpesieSure” yang merupakan inovasi pengujian untuk mengenali perbedaan spesies babi hutan dan babi budidaya dengan metode cepat dan akurat. SpesieSure mendukung peningkatan daya saing produk di pasar global terhadap produk hewan yang telah lulus uji halal. BET berinovasi melalui “SAPA BETI (Swasembada Pangan Benih dan Bibit Ternak Unggul Dengan Transfer Embrio)”.

5. *Tingkat Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen PKH*

Berdasarkan hasil penilaian melalui kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai yang menjadi responden dari Direktorat lingkup Ditjen PKH sangat puas dengan layanan yang diberikan Sekretariat Ditjen PKH. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan yakni:

- 1) Budaya pelayanan yang ramah (hospitality), banyak pegawai secara spesifik menyebutkan bahwa petugas di sekretariat memiliki sikap yang sangat baik. petugas dinilai sudah menunjukkan keramahan, kesopanan, dan sikap melayani yang humanis.
- 2) Kepercayaan pegawai terhadap arah kebijakan, terdapat sentimen positif bahwa organisasi saat ini sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan kepemimpinan di Sekretariat Ditjen PKH berhasil memberikan perubahan yang dirasakan oleh pegawai, sehingga ada persepsi bahwa perbaikan layanan di Sekretariat Ditjen PKH sudah terlihat nyata.
- 3) Kepuasan umum terhadap operasional harian terlihat bahwa dukungan operasional yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen PKH dianggap sudah mampu menunjang kinerja unit kerja baik di bawahnya maupun terhadap unit kerja lainnya, sehingga kelancaran operasional harian dan administrasi internal dinilai sudah stabil.
- 4) Konsistensi dalam pelayanan internal, dimana terlihat dari banyaknya masukan yang meminta untuk "mempertahankan" kinerja saat ini yang menandakan bahwa standar pelayanan yang ada sekarang sudah memenuhi ekspektasi dasar pegawai, sehingga mampu menjaga konsistensi kualitas layanan dan menjadi standar baru yang diharapkan tetap bertahan.

**f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Pelaksanaan Tata Kelola Reformasi Birokrasi (RB) pada Ditjen PKH telah mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi dengan bentuk kegiatan antara lain:

1. *Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen PKH*

Dalam menyelesaikan rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal IV Kementerian Pertanian, dilakukan berbagai macam upaya untuk menunjang



keberhasilan pencapaian kinerja atas tindak lanjut yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan dan penyusunan matriks untuk tindak lanjut rekomendasi atas setiap buku merah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Menyusun surat keluar kepada satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan yang tertera dalam buku merah;
- 3) Berkoordinasi dengan satker, Direktorat lingkup Ditjen PKH baik melalui surat, komunikasi telekomunikasi jarak jauh, serta pertemuan;
- 4) Berkoordinasi dengan Tim Itjen selaku pengawas intern dan pihak terkait untuk melakukan pengawalan tindaklanjut;
- 5) Adanya komitmen dan alokasi anggaran dalam penyelesaian temuan; dan
- 6) Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga pelaksanaan tindak lanjut dapat terpantau dan terkendali;
- 7) Melakukan rekonsiliasi dengan Tim Inspektorat Jenderal atas temuan dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Upaya tindak lanjut agar tidak ada temuan audit berulang meliputi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi SDM, perbaikan administrasi/dokumentasi, serta tindak lanjut rekomendasi audit sebelumnya secara konsisten. Evaluasi internal rutin menggunakan checklist standar juga krusial untuk mendeteksi masalah lebih dini. Berikut adalah upaya tindak lanjut untuk mencegah temuan berulang:

- 1) Menindaklanjuti temuan sebelumnya secara tuntas dengan menyusun timeline perbaikan yang jelas dengan penanggung jawab yang bertanggung jawab atas temuan tahun lalu. Mamastikan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementan ditindaklanjuti untuk menghindari temuan yang sama terulang.
- 2) Penguatan Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan SOP yang jelas dan terstruktur, serta menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi (seperti SIPD-RI) untuk meminimalisir kesalahan manual.
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pelatihan teknis, workshop, dan bimbingan teknis (Bimtek) terkait regulasi terbaru bagi bendahara dan pengelola keuangan.
- 4) Evaluasi Internal Rutin (Audit Internal) dengan melakukan audit internal secara berkala sebelum audit eksternal dan menggunakan checkpoint untuk memastikan kepatuhan.





- 5) Membangun komunikasi yang efektif antara auditor dan auditee untuk memahami akar masalah temuan.

## 2. *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen PKH*

Dalam menyelesaikan rekomendasi hasil audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dilakukan berbagai macam upaya untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas tindak lanjut yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan dan penyusunan matriks untuk tindak lanjut rekomendasi yang diterima oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Menyusun surat keluar kepada satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menindaklanjuti rekomendasi;
- 3) Berkoordinasi dengan satker, Direktorat lingkup Ditjen PKH baik melalui surat, komunikasi telekomunikasi jarak jauh, serta pertemuan;
- 4) Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga pelaksanaan tindak lanjut dapat terpantau dan terkendali;
- 5) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi namun harus dilakukan rekonsiliasi dengan BPK RI untuk mendapatkan status telah sesuai atau belum sesuai;
- 6) Berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI bahwa status yang telah sesuai sebanyak 1 rekomendasi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan penginputan usulan tindak lanjut atas 33 rekomendasi pada aplikasi dimaksud dan masih menunggu telaah dari pihak BPK RI.

Upaya tindak lanjut agar tidak ada temuan audit berulang meliputi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi SDM, perbaikan administrasi/dokumentasi, serta tindak lanjut rekomendasi audit sebelumnya secara konsisten. Evaluasi internal rutin menggunakan checklist standar juga krusial untuk mendeteksi masalah lebih dini. Berikut adalah upaya tindak lanjut untuk mencegah temuan berulang:

- 1) Memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti untuk menghindari temuan yang sama terulang.
- 2) Penguatan Sistem Pengendalian Internal: Terapkan SOP yang jelas dan terstruktur, serta gunakan sistem informasi keuangan terintegrasi (seperti SIPD-RI) untuk meminimalisir kesalahan manual.
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM: menyelenggarakan pelatihan teknis, workshop, dan bimbingan teknis (Bimtek) terkait regulasi terbaru bagi bendahara dan pengelola keuangan.



- 4) Evaluasi Internal Rutin (Audit Internal): melakukan audit internal secara berkala sebelum audit eksternal dan menggunakan checkpoint untuk memastikan kepatuhan.
- 5) Komunikasi Efektif: Membangun komunikasi yang efektif antara auditor dan auditee untuk memahami akar masalah temuan.

### 3. *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH*

Beberapa upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai IKPA Ditjen PKH diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengakselerasi belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan target penyerapan anggaran triwulanan;
- b. Meningkatkan sinergi internal, komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran setiap bulan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang telah disusun. Seluruh Satker agar mengajukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA setiap triwulan;
- c. Memastikan pelaporan data capaian output tepat waktu dengan memperhatikan validasi data serta ketercapaian target output dan outcome;
- d. Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data kontrak;
- e. Mendorong Penyedia Barang/Jasa untuk segera mengajukan tagihan setelah hak tagih muncul;
- f. Melakukan revolving dan mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu, dengan memperhatikan besaran dan rentang waktu revolving serta memitigasi pengajuan pertanggungjawaban GUP dan TUP di hari terakhir jatuh tempo;
- g. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri;
- h. Memastikan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual; dan
- i. Menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berkenaan merupakan upaya perwujudan peningkatan Nilai IKPA Ditjen PKH.

### 4. *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen PKH*

Komitmen pimpinan dan pejabat pelayanan publik, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kemajuan teknologi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan pelayanan publik di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 khususnya pada layanan perizinan/rekomendasi Ditjen PKH, diantaranya:



- 1) Mendorong penanggungjawab layanan setiap komoditas untuk meningkatkan kecepatan waktu pelayanannya, diantaranya dengan melakukan pemantauan dan evaluasi lamanya waktu proses layanan perizinan/rekomendasi secara periodik/bulanan;
- 2) Melakukan pengembangan, penyesuaian, dan pemeliharaan sistem layanan perizinan/rekomendasi untuk memudahkan pelaku usaha dalam perizinan bidang PKH, antara lain a) pengembangan sistem untuk pengajuan permohonan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) pada SIMPOL PKH, b) penambahan menu pelaporan Registrasi Produk Hewan pada SIMPOL PKH, c) penyesuaian aplikasi SIMPOL PKH dengan terbitnya revisi regulasi terkait perizinan berusaha yaitu PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terutama untuk Pendaftaran Pakan dan Pendaftaran Obat Hewan, d) integrasi sistem SIMPOL PKH dengan sistem berbagi pakai PPVTPP untuk pengajuan permohonan pergantian Penanggungjawab Teknis Obat Hewan, e) penyesuaian database negara dan unit usaha asal untuk pemasukan beberapa komoditas pada SIMREK PKH, f) penyesuaian SIMREK PKH dengan SINAS NK LNSW untuk pengajuan permohonan Rencana Kebutuhan daging lembu dalam hal tertentu;
- 3) Peningkatan layanan konsultasi dan komunikasi timbal balik dengan masyarakat/pengguna layanan secara offline/tatap muka maupun secara online melalui fasilitas email dan WA Center Ditjen PKH.

Dalam hal mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan publik pada tahun 2026 akan dilakukan berbagai macam upaya diantaranya:

- 1) Tiap unit kerja pelayanan wajib melaksanakan IKM sesuai dengan peraturan berlaku
- 2) Melakukan reviu terpadu terhadap laporan IKM seluruh UPT;
- 3) Melakukan pendampingan penyusunan IKM;
- 4) Pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP),
- 5) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SKM sesuai peraturan yang berlaku kepada OPP;
- 6) Melakukan pelatihan/bimtek terkait “Pelayanan Prima & Etika Publik” (pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis bagi petugas pelaksana layanan pada semua unit kerja);
- 7) Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan masing-masing komoditas;
- 8) Menyempurnakan aplikasi/Website untuk pemberitahuan layanan yang sudah selesai; dan
- 9) Meningkatkan prasarana dan sarana terkait pelayanan terhadap masyarakat.



Adapun rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah agar para pengguna jasa layanan publik dapat dengan sukarela menjadi responden dan mengisi SKM.

#### 5. *Tingkat Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen PKH*

Keberhasilan kinerja Sekretariat Ditjen PKH saat ini merupakan hasil dari kombinasi perbaikan perilaku (*soft skill*) staf dan modernisasi sistem (*hard skill*). Kunci keberhasilan utama terletak pada kemampuan Sekretariat Ditjen PKH memposisikan diri bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai mitra strategis bagi Direktorat Teknis.

Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Ditjen PKH tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh dua syarat utama, yaitu komitmen para pimpinan atau pejabat pada unit kerja Sekretariat Ditjen PKH dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai dengan kemajuan teknologi. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

- 1) Pelayanan dari tim kerja Peraturan Perundang-Undangan mendapatkan nilai tertinggi pada hasil survei menggambarkan mekanisme, informasi/konsultasi, totalitas pegawai, maupun ketepatan waktu yang diberikan oleh tim kerja Peraturan Perundang-Undangan diwujudkan dalam penyelesaian beberapa regulasi, diantaranya:
  - a. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP No. 4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
  - b. Permentan No. 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak.
  - c. Permentan No. 13 Tahun 2025 Tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun Atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan
  - d. Permentan No. 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
  - e. Permentan No. 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
  - f. Permentan No. 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
  - g. Permentan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan.
  - h. Permentan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.



- i. Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan, progresnya sedang dalam tahap meminta paraf Kementerian/Lembaga terkait, sehingga belum bisa ditetapkan pada tahun 2025.
- 2) Penyediaan layanan data, evaluasi, pelaporan kinerja, tindaklanjut TLHP dan Pengendalian Intern dengan melaksanakan koordinasi lintas K/L secara berkala untuk menyediakan data yang akuntabel, menilai keberhasilan sebuah kegiatan/program. Penguatan akuntabilitas, dimana pada tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk semua unit kerja eselon II dan UPT Ditjen PKH. Nilai evaluasi AKIP Ditjen PKH Tahun 2024 oleh Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar 82,44 dengan kategori A atau berpredikat Memuaskan. Nilai 82,44 tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja lingkup Ditjen PKH tahun 2024. Nilai ini naik 2,63 poin apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun sebelumnya yang mencapai 80,33. Hal ini menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen PKH. Selain itu juga untuk pengendalian intern telah dilakukan mitigasi resiko terhadap semua program dan kegiatan Ditjen PKH (mitigasi risiko menjadi lampiran Renstra dan pengusulan TOR RAB kegiatan Ditjen PKH).
- 3) Alokasi anggaran untuk perbaikan sarana pra sarana Ditjen PKH, Dimana pada tahun 2025 dilakukan renovasi ruang rapat Utama 2, Sekretariat 1, Sekretariat 2 dan semua ruang rapat direktorat teknis, serta mushola lantai 6 dan 7. Renovasi ruang kerja kelompok hukum dan layanan perizinan, kelompok pemberitaan dan humas, ruang perpustakaan, ruang arsiparis.
- 4) Kebersihan ruangan kerja sama dengan penyedia layanan kebersihan (*outsourcing*) untuk berkomitmen selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 5) Pengadaan laptop sebanyak 51 unit sebagai sarana pendukung kinerja staf/pegawai lingkup Ditjen PKH.
- 6) Pada Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ditujukan bagi pegawai lingkup Bagian Umum maupun seluruh pegawai sekretariat. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan teknis dan sosial kultural, pelatihan coaching dan mentoring, pelatihan hospitality dalam pelayanan publik, penguatan budaya kerja melalui kegiatan pemberdayaan perempuan, sosialisasi anti narkoba, pelatihan bahasa Inggris (*English Course*) dalam dua batch, pelatihan pengolahan data dan pembuatan dashboard menggunakan Excel, serta pelatihan *leadership coaching* bekerja sama dengan *Bettermind Coaching*. Seluruh rangkaian



kegiatan dilaksanakan pada periode Agustus hingga Desember 2025 sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan aparatur Sekretariat Ditjen PKH.

- 7) Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan berbagai penugasan dan pelatihan internasional bagi pegawainya sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan, *workshop*, dan *short course* yang diselenggarakan di berbagai negara, antara lain Denmark, New Zealand, Thailand, Australia, Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, Austria, Belanda, dan Swiss, dengan fokus pada isu epidemiologi veteriner, keamanan pangan, manajemen perubahan organisasi, kesehatan hewan dan zoonosis, resistensi antimikroba, manajemen risiko, kepemimpinan, laboratorium diagnostik, hingga pertanian cerdas dan energi alternatif. Penugasan ini diikuti oleh satu hingga beberapa pegawai Ditjen PKH dan didukung oleh berbagai lembaga internasional seperti FAO, WOA, Danida Fellowship Centre, pemerintah negara mitra, serta organisasi internasional lainnya, dan dilaksanakan sepanjang periode Januari hingga November 2025 guna memperkuat kapasitas teknis, manajerial, dan jejaring kerja sama internasional Ditjen PKH.
- 8) Rekapitulasi publikasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa hingga periode pelaporan tercatat sebanyak 526 rilis pemberitaan, serta 614 konten publikasi yang terdiri atas 121 konten infografis dan 493 konten video, sebagai bagian dari upaya diseminasi informasi dan komunikasi publik Ditjen PKH kepada masyarakat.

Adapun rekomendasi untuk keberhasilan ini agar terus berlanjut di tahun 2026, maka kegiatan di atas perlu didukung dengan Penyusunan Katalog Layanan Digital (sebuah dokumen atau *platform* daring/online) yang merinci secara sistematis seluruh jenis pelayanan yang disediakan oleh Sekretariat Ditjen PKH kepada para pegawai (internal) maupun pihak luar (eksternal)) yang lebih terperinci agar setiap pegawai tahu persis estimasi waktu (*Service Level Agreement*) untuk setiap layanan yang diberikan.

Adapun beberapa saran perbaikan dari hasil penilaian yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dalam memberikan layanan akan selalu ditingkatkan agar menghasilkan pelayanan yang lebih memuaskan untuk mendukung kinerja internal pada tahun 2026, diantaranya:

- 1) Akselerasi Digitalisasi Pelayanan
  - a. Membangun sistem monitoring persuratan dan administrasi secara real-time agar setiap unit tahu posisi dokumen mereka.
  - b. Melakukan kalibrasi rutin mesin absen dan menambah unit di titik strategis (Lantai 1) untuk efisiensi waktu pegawai.





2) Standarisasi Fasilitas (*Equal Treatment*)

Melakukan audit fasilitas di seluruh Direktorat Teknis untuk memastikan standar ruang kerja, komputer, dan alat penunjang lainnya setara dengan Sekretariat.

3) Pemeliharaan Rutin

Membuat jadwal pemeriksaan rutin untuk kebersihan toilet dan pengendalian hama di area kantor.

4) Penguatan Sosialisasi SOP

Menyusun panduan digital (e-SOP) yang mudah diakses terkait hak-hak pegawai (kenaikan pangkat, jabatan, dll.) agar prosesnya lebih transparan dan tidak membingungkan.

5) Peningkatan Komunikasi Internal

Mengadakan kegiatan "*Town Hall*" atau program social bonding lintas direktorat secara berkala untuk meningkatkan kekompakan dan menghilangkan ego sektoral.

6) *Service Level Agreement* (SLA)

Menetapkan standar waktu penyelesaian untuk setiap layanan internal (misalnya: tanda tangan dokumen maksimal 1x24 jam).

Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Ditjen PKH tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh dua syarat utama, yaitu komitmen para pimpinan atau pejabat pada unit kerja Sekretariat Ditjen PKH dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai dengan kemajuan teknologi.

### 3.3. Kinerja Lainnya

#### a. Penghargaan Pelayanan Prima dan Praktik Baik Inovasi Tahun 2025

Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH menerima penghargaan dengan kategori Pelayanan Prima pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Kementerian Pertanian sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Unit Kerja dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. UPT yang meraih penghargaan Pelayanan Prima 2025 yaitu 1) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, 2) Balai Embrio Ternak Cipelang, 3) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, 4) Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, 5) Balai Besar Veteriner Wates, dan Balai Inseminasi Buatan Lembang.

UPT yang meraih penghargaan Praktik Baik Inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025 yaitu 1) Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, 2) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, dan 3) Balai Embrio Ternak Cipelang. Pusvetma mendapatkan penghargaan sebagai Inovator dalam Pelayanan Publik melalui karya unggulan: "Vaksin

Aphthovet PMK: Inovasi Anak Negeri dalam Pencegahan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Menuju Swasembada Pangan Nasional”. Inovasi ini menjadi bukti nyata kemampuan anak bangsa dalam mendukung ketahanan dan kemandirian vaksin hewan nasional. Berikutnya, BPMSPH berinovasi melalui “SpesieSure” yang merupakan inovasi pengujian untuk mengenali perbedaan spesies babi hutan dan babi budidaya dengan metode cepat dan akurat. SpesieSure mendukung peningkatan daya saing produk di pasar global terhadap produk hewan yang telah lulus uji halal.



Gambar 3 UPT Penerima Penghargaan Pelayanan Prima dan Praktik Baik Inovasi Tahun 2025

**b. *Institution Advancing South-South and Triangular Cooperation Category (SSTC) - FAO Global Technical Recognition 2025***

Dalam ajang FAO Global Technical Recognition 2025 yang digelar oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari menerima penghargaan bergengsi sebagai *Institution Advancing South-South and Triangular Cooperation (SSTC)* dalam kategori *South-South and Triangular Cooperation*. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi FAO terhadap kontribusi BBIB Singosari sebagai lembaga teknis yang berperan aktif dalam memperkuat kerja sama antarnegara berkembang melalui transfer teknologi, inovasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan.

Sebagai *Technical Provider*, BBIB Singosari telah berbagi teknologi dan keahlian di bidang peternakan, khususnya teknologi Inseminasi Buatan (IB), kepada berbagai negara mitra. Melalui pelatihan, pengiriman tenaga ahli, serta penyediaan semen beku unggul berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional dan mendukung pengembangan peternakan di negara-negara di Asia, Afrika, dan kawasan Pasifik.



Gambar 4 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai Peraih *Institution Advancing SSTC - FAO Global Technical Recognition*

### c. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Kementerian Pertanian kembali menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menilai kinerja keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat peran komunikasi publik sebagai jembatan antara hasil kerja pemerintah dan kebutuhan informasi masyarakat.

Adapun Ditjen PKH mendapatkan prestasi yang membanggakan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yaitu mendapatkan Peringkat 1 dalam Kategori Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan sejumlah UPT juga menempati peringkat teratas pada kategori Eselon II dan Eselon III. Prestasi ini menjadi bukti nyata atas dedikasi Ditjen PKH dalam mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuju Indonesia Emas 2045.

Daftar kategori pemeringkatan yang diraih Ditjen PKH:

- a. **Eselon I:** Peringkat 1 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. **Eselon II:** Peringkat 1: BBVF Pusvetma; Peringkat 2: BBPTU HPT Baturraden; Peringkat 7: BBV Denpasar; Peringkat 8 : BBV Wates.
- c. **Eselon III:** Peringkat 1 : BPMSPH Bogor; Peringkat 2 : BPTU HPT Sembawa.



Gambar 5 Ditjen PKH Menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

**d. *Cashless Award* Kementerian Pertanian Kategori Eselon I**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meraih juara Harapan III *Cashless Award* Kategori Eselon I Tahun 2025 lingkup Kementerian Pertanian. Penghargaan ini merupakan apresiasi Menteri Pertanian kepada Eselon I yang melaksanakan kebijakan pelaksanaan anggaran dengan melakukan optimalisasi penggunaan *Cash Management System* (CMS) untuk meminimalkan transaksi tunai Bendahara Pengeluaran serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan





Gambar 6 Piagam Penghargaan Juara Harapan III *Cashless Management System Award* Tingkat Eselon I

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk tahun 2025 sebesar Rp1.213.291.406.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah*). Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat perubahan pagu anggaran, yaitu:

1. Pagu Ditjen PKH pada DIPA Awal yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar sebesar Rp1.213.291.406.000,00.
2. Revisi I dalam rangka penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) karena kenaikan kejadian kasus PMK sejak bulan November 2024 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi I sebesar Rp1.213.291.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-12/AG/AG.3/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-1).
3. Revisi II yaitu revisi dalam rangka penyesuaian komponen penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berupa operasional pelaporan vaksinasi menjadi insentif operasional vaksinasi serta implementasi blokir perjadiin sesuai hasil penelaahan RKA-K/L sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi II sebesar Rp1.213.291.406.000,00. Revisi DIPA Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-30/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Januari



- 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-2).
4. Revisi III yaitu dalam rangka i) Efisiensi Belanja K/L dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2025 sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2025, dan ii) Buka blokir terkait pemenuhan dokumen Persetujuan DPR dan RBA BLU pada Satker BLU dan Satker Pelaksana SBSN T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi III sebesar Rp1.213.291.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-63/AG/AG.3/2025 tanggal 19 Februari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-3).
  5. Revisi IV yaitu Revisi Buka Blokir dan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual pada RO Layanan Kesehatan Hewan senilai Rp6.400.000.00000 digunakan untuk pemenuhan kekurangan anggaran insentif vaksinasi PMK, obat dan vitamin serta petugas pelaporan sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi IV sebesar Rp1.246.791.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-258/AG/AG.3/2025 tanggal 14 Maret 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-4).
  6. Revisi V yaitu Revisi sebagai tindak lanjut Surat Bapak Menteri Pertanian Nomor B-134/RC.110/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Usulan Revisi Pembukaan Blokir Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi V sebesar Rp1.246.791.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-320/AG/AG.3/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-5).
  7. Revisi VI yaitu Buka Blokir Anggaran sebagai tindak lanjut Surat Bapak Menteri Pertanian Nomor B-134/RC.110/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Usulan Revisi Pembukaan Blokir Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VI menjadi Rp1.246.791.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-434/AG/AG.3/2025 tanggal 6 Mei 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-6).
  8. Revisi VII yaitu Revisi sebagai tindak lanjut surat Plt. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Pertanian Nomor B-1997/RC.110/A/05/2025 tanggal 8 Mei 2025 hal Permohonan Relaksasi Blokir Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Pertanian T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VII sebesar Rp1.246.791.406.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-542/AG/AG.3/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran

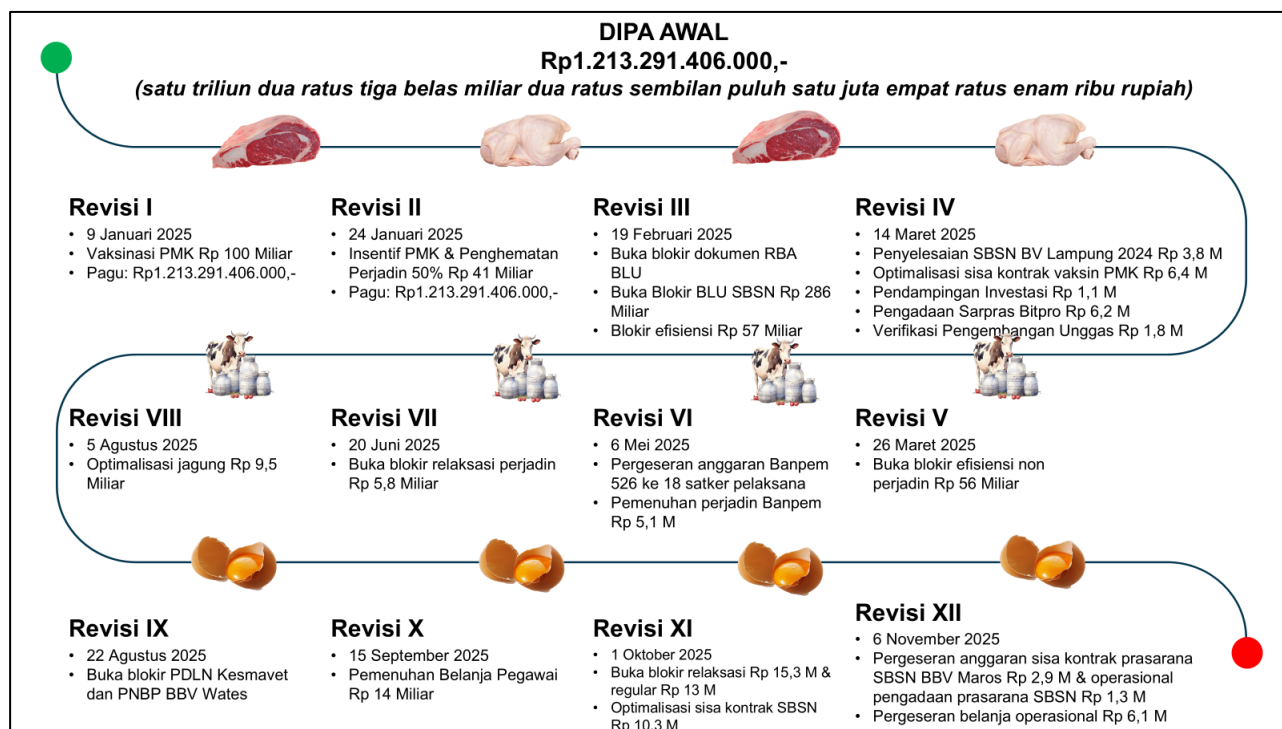




- Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-7).
9. Revisi VIII yaitu Revisi sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Nomor B-3270/RC.110/A/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 hal Revisi/ Realokasi Anggaran untuk Peningkatan Produksi Jagung T.A. 2025 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VIII sebesar Rp1.239.992.348.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-659/AG/AG.3/2025 tanggal 5 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-8).
  10. Revisi IX yaitu Revisi sebagai tindak lanjut surat Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri a.n. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-008528/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.08/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 hal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi IX sebesar Rp1.239.992.348.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-728/AG/AG.3/2025 tanggal 22 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-9).
  11. Revisi X yaitu Revisi sebagai pemenuhan belanja operasional sesuai dengan kebutuhan satker untuk memenuhi kekurangan belanja operasional pegawai sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi X sebesar Rp1.245.513.069.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-791/AG/AG.3/2025 tanggal 18 September 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-10).
  12. Revisi XI yaitu Revisi dalam rangka pemanfaatan sisa anggaran kontraktual RO SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari senilai Rp10.320.200.000,00 dimanfaatkan untuk pengadaan sarana mendukung kelengkapan kegiatan utama senilai Rp4.010.400.000,00 dan pengadaan prasarana pendukung senilai Rp6.309.800.000,00 sesuai surat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-15795/D.09.04/PD.05/09/2025 tanggal 15 September 2025 hal Pemanfaatan Sisa Anggaran SBSN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi XI sebesar Rp1.257.359.602.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-820/AG/AG.3/2025 tanggal 1 Oktober 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-11).
  13. Revisi XII yaitu Revisi dalam rangka buka blokir anggaran, pergeseran anggaran belanja operasional, dan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan operasional RO SBSN, serta pergeseran anggaran insentif PMK untuk mendukung rencana pembebasan PMK di Pulau Madura sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi XII



sebesar Rp1.267.235.228.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-950/AG/AG.3/2025 tanggal 6 November 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 ( Revisi ke-12).



Grafik 6 Dinamika Perubahan Pagu Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun 2025, pagu Ditjen PKH sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.268.284.347.000,00 atau meningkat 4,53% dari pagu awal dengan jumlah pagu blokir sebesar Rp8.239.953.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 62 (enam puluh dua) satuan kerja, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Kantor Pusat, 23 (dua puluh tiga) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan 38 (tiga puluh delapan) Satker Tugas Pembantuan (TP).

Pada tahun 2025, realisasi anggaran Ditjen PKH sebesar Rp1.216.548.447.400,00 atau setara dengan 95,92% terhadap total pagu anggaran akhir sebesar Rp1.268.284.347.000,00. Jika tanpa memperhitungkan blokir anggaran, pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp1.260.044.394.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 96,55%.



Tabel 38 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025 Berdasarkan Kegiatan

| KEGIATAN                                                         | PAGU                     | BLOKIR               | PAGU TANPA BLOKIR        | REALISASI SP2D           | % SP2D       | % SP2D TANPA BLOKIR |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1                                                                | 2                        | 3                    | 4=2-3                    | 5                        | 6=5/2        | 8=7/4               |
| Peningkatan Produksi Pakan Ternak                                | 6.693.683.000            | -                    | 6.693.683.000            | 6.678.502.247            | 99,77        | 99,77               |
| Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan                   | 347.794.799.000          | -                    | 347.794.799.000          | 339.265.321.792          | 97,55        | 97,55               |
| Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak     | 407.021.180.000          | 165.539.000          | 406.855.641.000          | 381.765.856.470          | 93,80        | 93,83               |
| Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner                       | 23.585.405.000           | -                    | 23.585.405.000           | 23.202.401.689           | 98,38        | 98,38               |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan | 478.689.280.000          | 8.074.414.000        | 470.614.866.000          | 461.139.014.832          | 96,33        | 97,99               |
| Hilirisasi Hasil Peternakan                                      | 4.500.000.000            | -                    | 4.500.000.000            | 4.497.350.370            | 99,94        | 99,94               |
| <b>JUMLAH</b>                                                    | <b>1.268.284.347.000</b> | <b>8.239.953.000</b> | <b>1.260.044.394.000</b> | <b>1.216.548.447.400</b> | <b>95,92</b> | <b>96,55</b>        |

Sumber: OMSPAN, 2026

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Kantor Pusat sebesar Rp180,31 miliar atau 95,66% dari pagu anggaran Rp188,50 miliar; (ii) Kantor Daerah (UPT) sebesar Rp1,01 triliun atau 96,16% dari pagu anggaran Rp1,05 triliun; dan (iii) Tugas Pembantuan (Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi) sebesar Rp25,30 miliar atau 88,71% dari pagu anggaran Rp28,52 miliar.

Tabel 39 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025 Berdasarkan Kewenangan

| KEWENANGAN       | PAGU                     | BLOKIR               | PAGU TANPA BLOKIR        | REALISASI SP2D           | % SP2D       | % SP2D TANPA BLOKIR |
|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1                | 2                        | 3                    | 4=2-3                    | 5                        | 6=5/2        | 8=7/4               |
| Pusat            | 188.498.269.000          | 4.167.691.000        | 184.330.578.000          | 180.308.049.873          | 95,66        | 97,82               |
| Kantor Daerah    | 1.051.265.439.000        | 1.581.504.000        | 1.049.683.935.000        | 1.010.939.530.743        | 96,16        | 96,31               |
| Tugas Pembantuan | 28.520.639.000           | 2.490.758.000        | 26.029.881.000           | 25.300.866.784           | 88,71        | 97,20               |
| <b>JUMLAH</b>    | <b>1.268.284.347.000</b> | <b>8.239.953.000</b> | <b>1.260.044.394.000</b> | <b>1.216.548.447.400</b> | <b>95,92</b> | <b>96,55</b>        |

Sumber: OMSPAN, 2026.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu (i) Belanja Pegawai sebesar Rp155,31 miliar atau 99,32% dari pagu anggaran Rp156,39 miliar; (ii) Belanja Barang sebesar Rp780,78 miliar atau 95,15% dari pagu anggaran Rp820,56 miliar; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp280,45 miliar atau 96,26% dari pagu Rp291,34 miliar.



Tabel 40 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

| JENIS BELANJA   | PAGU                     | BLOKIR               | PAGU TANPA BLOKIR        | REALISASI SP2D           | % SP2D       | % SP2D TANPA BLOKIR |
|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1               | 2                        | 3                    | 4=2-3                    | 5                        | 6=5/2        | 8=7/4               |
| Belanja Pegawai | 156.393.232.000          | -                    | 156.393.232.000          | 155.324.278.505          | 99,32        | 99,32               |
| Belanja Barang  | 820.555.628.000          | 8.239.953.000        | 812.315.675.000          | 780.778.971.355          | 95,15        | 96,12               |
| Belanja Modal   | 291.335.487.000          | -                    | 291.335.487.000          | 280.445.197.540          | 96,26        | 96,26               |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>1.268.284.347.000</b> | <b>8.239.953.000</b> | <b>1.260.044.394.000</b> | <b>1.216.548.447.400</b> | <b>95,92</b> | <b>96,55</b>        |

Sumber: OMSPAN, 2026.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, antara lain: i) adanya blokir anggaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025; ii) anggaran Pengembangan Ayam Petelur baru disetujui pada bulan Juni 2025 yang berdampak pada keterbatasan waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan secara optimal; iii) SBSN pada BBV Maros, BV Bukittinggi, dan BBIB Singosari belum terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sehingga penyelesaian pembayaran pekerjaan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang dapat berpotensi mengurangi realisasi anggaran jika sisa pekerjaan tidak dapat terselesaikan.

Dalam rangka mendukung kelancaran dan sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan, pada tahun 2025 Ditjen PKH telah menyusun sebanyak 20 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pada kegiatan: a) Peningkatan Produksi Pakan Ternak; b) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; c) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak; d) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan e) Hilirisasi Hasil Peternakan (rincian NSPK tercantum pada Lampiran 13).

### 3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran program Ditjen PKH tahun 2025 berpedoman pada hasil perhitungan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Efisiensi Ditjen PKH sebagai Unit Kerja Eselon I diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Rincian Output (RO)



dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Ditjen PKH. Pengukuran Nilai Efisiensi Ditjen PKH dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Kementerian Keuangan telah memfasilitasi sistem informasi Aplikasi Monev Kemenkeu (<https://monev.kemenkeu.go.id/>) sebagai sumber data Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK untuk menghitung Nilai Efisiensi Unit Kerja Eselon I. Berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu, nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK sebagaimana tersaji pada Lampiran 12 sehingga dapat diperoleh Nilai Efisiensi Ditjen PKH T.A. 2025 adalah:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK}) \\ &= (40\% \times 93,04\%) + (60\% \times 86,43\%) \\ &= 37,22\% + 51,86\% \\ &= \mathbf{89,07\%}\end{aligned}$$

**Catatan:**

$$\begin{aligned}\text{Penggunaan SBK} &= \frac{\text{RO yang Memenuhi SBK}}{\text{Total RO yang Menggunakan SBK}} \times 100\% \\ &= \frac{214}{240} \times 100\% \\ &= 93,04\% \\ \text{Efisiensi SBK} &= \frac{\text{Rata – rata Efisiensi per RO}}{20\%} \times 100\% \\ &= \frac{17,29\%}{20\%} \times 100\% \\ &= 86,43\%\end{aligned}$$





## BAB IV

## PENUTUP





## IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Ditjen PKH tahun 2025 dari 9 (sembilan) sasaran program yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) indikator kinerja program sebesar **102,24% (Sangat Berhasil)**.

Enam capaian indikator kinerja termasuk kategori **Sangat Berhasil** yaitu (1) Produksi Daging; (2) Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan; (3) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia; (4) Indeks Mutu Komoditas Peternakan; (5) Volume Ekspor Komoditas Peternakan; dan (6) Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, 5 (lima) capaian indikator kinerja termasuk kategori **Berhasil** yaitu (1) Produksi Telur; (2) Produksi Susu; (3) Indeks Keamanan Komoditas Peternakan; (4) Indeks Harga yang Diterima Peternak; dan (5) Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan. Adapun Indikator kinerja yang belum mencapai target 100%, yaitu: produksi telur, produksi susu, Indeks Keamanan Komoditas Peternakan, Indeks Harga yang Diterima Peternak.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2025, Ditjen PKH per 31 Desember 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.216.548.447.400,- atau mencapai 95,92% (termasuk anggaran diblokir). Blokir anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8.239.953.000,- sehingga pagu anggaran tanpa blokir sebesar Rp. 1.260.044.394.000,- dengan realisasi serapan anggaran tanpa blokir sebesar 96,55%.

Keberhasilan yang telah dicapai Ditjen PKH dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2025 yang tercermin melalui capaian 11 (sebelas) indikator kinerja program tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Ditjen PKH, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 11 (sebelas) indikator kinerja program, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Ditjen PKH. Selain itu, juga dukungan pengendalian internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Ditjen PKH yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, terdapat kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis yang harus dihadapi oleh Ditjen PKH diantaranya yaitu: 1) Fragmentasi implementasi kebijakan antar instansi dan kurangnya sinergi regulasi antar Kementerian/ Lembaga serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum; 2) Manajemen anggaran dan program seperti *refocusing* program, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan



efisiensi anggaran; 3) Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan, baik dari segi kuantitas maupun pemerataan antar wilayah; 4) Belum optimalnya sistem data dan informasi peternakan nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah secara *real time*; 5) Kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang belum merata; 6) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan; 7) Kurangnya insentif dan pembiayaan bagi pelaku usaha peternakan skala kecil-menengah; 8) Belum optimalnya pengawasan keamanan dan mutu produk hewan di seluruh rantai pasok; 9) Penurunan jumlah rumah tangga peternak; 10) Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan *zoonosis* di beberapa wilayah di Indonesia yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 11) Masih tingginya struktur ongkos pakan karena adanya alih fungsi lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak; 12) Daya saing produk peternakan lokal masih rendah; 13) Persaingan global dan tekanan pasar produk asal hewan; dan 14) Dampak perubahan iklim.

Beberapa upaya telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah dari dana APBN maupun Non APBN. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mendorong percepatan peningkatan populasi dan produksi ternak dalam rangka mewujudkan swasembada pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, maka Ditjen PKH pada tahun 2026 secara berkesinambungan akan terus melakukan berbagai program/kegiatan terobosan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ketersediaan dan kebutuhan (*supply-demand*) daging ayam ras dan telur ayam ras: (a). melakukan pengawalan implementasi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras serta telur konsumsi; (b). Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi; (c). Pengembangan ayam petelur (ayam merah putih).
2. Meningkatkan produksi daging dan susu: (a). Mendorong implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak (JPT) untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan optimalisasi reproduksi di lapangan, sehingga dapat meningkatkan produksi daging sapi, melalui penambahan angka kelahiran ternak; (b). mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional; (c). Memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi usaha sapi perah dengan cara melakukan importasi sapi perah untuk menambah populasi di Indonesia; (d) Memperkuat regulasi yang mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional (rancangan Inpres P2SDN).



3. Meningkatkan kesejahteraan peternak melalui peningkatan harga yang diterima peternak dilakukan dengan mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak, baik untuk pengembangan sapi pedaging/sapi perah maupun juga untuk pengembangan ayam ras petelur dan pedaging
4. Meningkatkan produksi kambing/domba dengan melakukan kerja sama dengan asosiasi peternak kambing/domba untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan dengan peternak, serta mendorong pengembangan model usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir (*Closed Loop*).
5. Meningkatkan *scaling up* usaha peternakan skala kecil-menengah melalui kemudahan akses pembiayaan kredit perbankan (KUR dan PKBL)
6. Strategi di bidang pakan dalam menghadapi kondisi alam, yaitu melalui penguatan kemandirian dan diversifikasi sumber bahan pakan, dengan tidak lagi terlalu bergantung pada satu atau dua komoditas dengan mendorong pemanfaatan bahan lokal dan alternatif (by-product pertanian, sumber protein nonkonvensional), penguatan riset dan inovasi formulasi pakan agar lebih adaptif terhadap fluktuasi kualitas dan ketersediaan bahan pakan dan peningkatan efisiensi penggunaan pakan. Selain itu juga, penguatan sistem cadangan pakan dan bahan pakan yang dikelola secara lebih sistematis untuk kesiapan logistik dan distribusi ketika terjadi kondisi darurat. Peningkatan ketersediaan hijauan pakan melalui penyediaan data potensi lahan untuk penanaman hijauan pakan pada Sistem Informasi Hijauan Pakan (SIHIJAP) yang dapat diakses oleh pelaku usaha peternakan.
7. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber, selain Rupiah Murni dan non APBN antara lain: BLU, PNBP, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kerja sama investasi antar negara, dan hibah luar negeri.
8. Pengendalian PHMS yang dilaksanakan secara terpadu dan berbasis risiko pada kabupaten/kota. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan vaksinasi terhadap penyakit prioritas, pengobatan dan penanganan kasus penyakit hewan, penguatan kegiatan KIE kepada peternak dan pelaku usaha, penerapan pendekatan kompartementalisasi pada unit usaha tertentu, serta pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, khususnya dalam penanganan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.
9. Penguatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, baik dari sisi peralatan diagnostik, sistem jaminan mutu, maupun jejaring laboratorium, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk penguatan UPT lingkup Ditjen PKH melalui proyek SBSN
10. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* terkait untuk sinergitas implementasi kebijakan dan regulasi antar Kementerian/ Lembaga serta koordinasi untuk pengawasan dan penegakan hukum.
11. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan intensif dan berkelanjutan tentang penerapan cara yang



baik pada unit usaha produk hewan, serta mendorong pelaku usaha produsen untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

12. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan melalui pembinaan kepada unit usaha pengolahan produk peternakan
13. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan, kerjasama dengan negara lain dalam bentuk pelatihan, internship program dan Pendidikan pasca sarjana.
14. Modernisasi peternakan dan Adopsi Teknologi Digital (efisiensi, traceability, keamanan pangan).

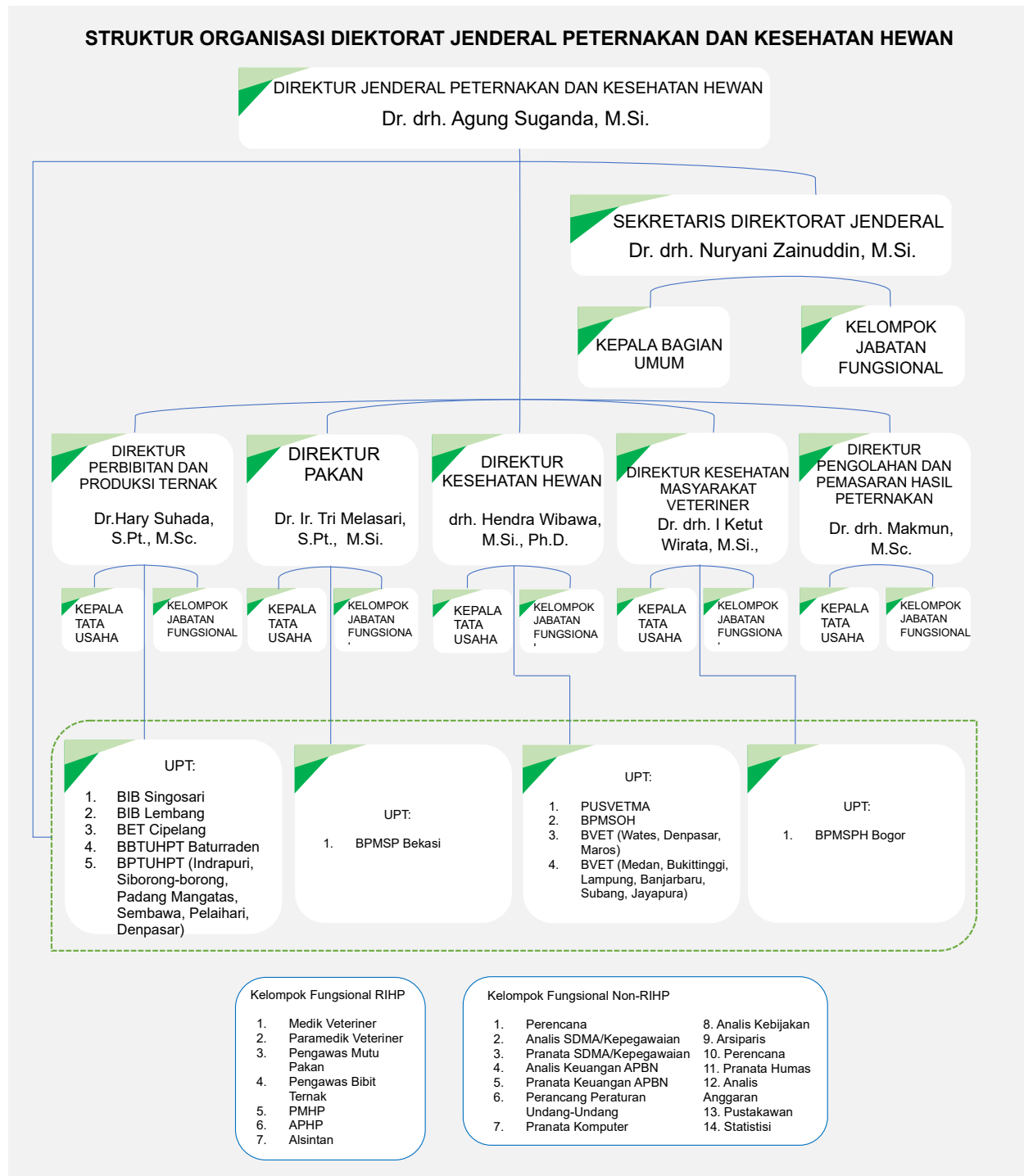


**LAMPIRAN**





## Lampiran 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025



Sumber: Ditjen PKH, 2025





## Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

- Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 – **Awal**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011  
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 785581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id  
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Suganda  
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman  
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama,



Agung Suganda



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

| NO | SASARAN PROGRAM                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | TARGET        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya Komoditas Peternakan dalam Negeri yang Tersedia               | Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)                                       | 4,71 Juta Ton |
|    |                                                                            | Jumlah Produksi Susu                                                                                          | 0,84 Juta Ton |
|    |                                                                            | Jumlah Produksi Telur                                                                                         | 6,89 Juta Ton |
| 2  | Meningkatnya Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan  | Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan                              | 89,5 %        |
| 3  | Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis                    | Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis                                                                   | 76,70 %       |
| 4  | Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis | Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis                                      | 80,50 %       |
| 5  | Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan         | Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan                                            | 94,50 %       |
| 6  | Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah                      | Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan                                          | 95 %          |
| 7  | Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Berdaya Saing                        | Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan                                          | 1 %           |
| 8  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien      | Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 80 %          |
| 9  | Terwujudnya Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel      | Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                 | 87,30 %       |

| No           | Program                                                     | Anggaran                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.           | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                | Rp. 4.500.000.000            |
| 2.           | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | Rp. 728.079.417.000          |
| 3.           | Program Dukungan Manajemen                                  | Rp. 480.711.989.000          |
| <b>Total</b> |                                                             | <b>Rp. 1.213.291.406.000</b> |

Menteri Pertanian,  
  
Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2024  
Direktur Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan  
  
Agung Suganda



- Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 – **Revisi I** (bulan Juli 2025)



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011  
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Suganda  
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman  
Jabatan : Menteri Pertanian

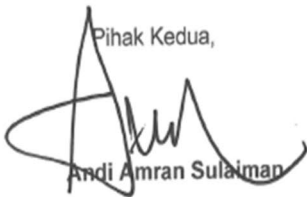
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

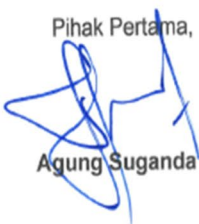
Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama,



Agung Suganda



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

| NO | SASARAN PROGRAM                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | TARGET        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya Komoditas Peternakan dalam Negeri yang Tersedia               | Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)                                       | 4,71 Juta Ton |
|    |                                                                            | Jumlah Produksi Susu                                                                                          | 0,84 Juta Ton |
|    |                                                                            | Jumlah Produksi Telur                                                                                         | 6,89 Juta Ton |
| 2  | Meningkatnya Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan  | Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan                              | 89,50 %       |
| 3  | Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis                    | Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis                                                                   | 76,70 %       |
| 4  | Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis | Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis                                      | 80,50 %       |
| 5  | Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan         | Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan                                            | 94,50 %       |
| 6  | Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah                      | Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan                                          | 95 %          |
| 7  | Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Berdaya Saing                        | Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan                                          | 1 %           |
| 8  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien      | Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 80 %          |
| 9  | Terwujudnya Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel      | Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                 | 87,30 %       |

| No           | Program                                                     | Anggaran                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.           | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                | Rp. 4.500.000.000            |
| 2.           | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | Rp. 761.579.417.000          |
| 3.           | Program Dukungan Manajemen                                  | Rp. 480.711.989.000          |
| <b>Total</b> |                                                             | <b>Rp. 1.246.791.406.000</b> |

Jakarta, Juli 2025

Menteri Pertanian,

  
 Andi Amran Sulaiman

Direktur Jenderal  
 Peternakan dan Kesehatan Hewan

  
 Agung Suganda



- Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 – **Revisi II** (bulan September 2025)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011  
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Suganda  
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman  
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2025

Pihak Kedua,



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama,



Agung Suganda



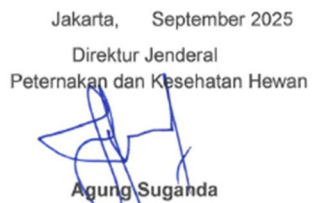


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

| NO | SASARAN PROGRAM                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | TARGET        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya Komoditas Peternakan dalam Negeri yang Tersedia               | Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)                                       | 4,74 Juta Ton |
|    |                                                                            | Jumlah Produksi Susu                                                                                          | 0,81 Juta Ton |
|    |                                                                            | Jumlah Produksi Telur                                                                                         | 6,88 Juta Ton |
| 2  | Meningkatnya Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan  | Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan                              | 92,55 %       |
| 3  | Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis                    | Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis                                                                   | 92,11 %       |
| 4  | Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis | Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis                                      | 80,65 %       |
| 5  | Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan         | Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan                                            | 99,50 %       |
| 6  | Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah                      | Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan                                          | 100 %         |
| 7  | Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Berdaya Saing                        | Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan                                          | 1,2 %         |
| 8  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien      | Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 78,87 %       |
| 9  | Terwujudnya Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel      | Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                 | 90,70 %       |

| No           | Program                                                     | Anggaran                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.           | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                | Rp. 4.500.000.000            |
| 2.           | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | Rp. 754.780.359.000          |
| 3.           | Program Dukungan Manajemen                                  | Rp. 486.232.710.000          |
| <b>Total</b> |                                                             | <b>Rp. 1.245.513.069.000</b> |

Menteri Pertanian,  
  
Andi Amran Sulaiman

Jakarta, September 2025  
Direktur Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan  
  
Agung Suganda





- Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 – **Revisi III** (bulan Desember 2025)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011  
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : https://ditjenpkh.pertanian.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Suganda  
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman  
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama,



Agung Suganda



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

| NO | SASARAN PROGRAM                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                  | TARGET  |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1  | Terpenuhinya Produksi Komoditas Peternakan                                                                   | Produksi Daging                                                                                                    | 4,97    | Juta Ton |
|    |                                                                                                              | Produksi Telur                                                                                                     | 7,43    | Juta Ton |
|    |                                                                                                              | Produksi Susu                                                                                                      | 866,28  | Ribu Ton |
| 2  | Terjaminnya Keamanan Komoditas Peternakan                                                                    | Indeks Keamanan Komoditas Peternakan                                                                               | 0,613   | Indeks   |
| 3  | Terkendalinya Wilayah atau Kawasan dari Penyakit Hewan                                                       | Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan                                                         | 80      | %        |
| 4  | Terkendalinya Wilayah dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia        | Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia | 41      | %        |
| 5  | Meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Peternak                                                             | Indeks Harga yang Diterima Peternak                                                                                | 124,75  | Indeks   |
| 6  | Terjaminnya Mutu Komoditas Peternakan                                                                        | Indeks Mutu Komoditas Peternakan                                                                                   | 0,49    | Indeks   |
| 7  | Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                          | Volume Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                             | 531.329 | Ton      |
| 8  | Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Peternakan Unggulan yang Telah Menerapkan Hilirisasi                 | Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan                                                                    | 0,20    | Indeks   |
| 9  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Baik, Transparan, dan Akuntabel | Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                    | 0,885   | Indeks   |

| No           | Program                                                     | Anggaran                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.           | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                | Rp. 4.500.000.000            |
| 2.           | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | Rp. 785.095.067.000          |
| 3.           | Program Dukungan Manajemen                                  | Rp. 478.689.280.000          |
| <b>Total</b> |                                                             | <b>Rp. 1.268.284.347.000</b> |

Jakarta, 31 Desember 2025

Menteri Pertanian,

  
Andi Amran Sulaiman

Direktur Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan

  
Agung Suganda



## Lampiran 3 Tabel Produksi Ternak Tahun 2024-2025

ISSN 2964 1047, Volume 4 Tahun 2025

Produksi/Production

Tabel 10.1 Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil Tahun 2024 - 2025\*)  
Table 10.1 Meat Production of Large and Small Livestock 2024 - 2025\*)

(000 ton)

| No  | Jenis/<br>Species                           | Karkas |        | Daging Murni/<br>Skeletal |        | Jeroan |        | Daging Variasi |        | Karkas, Jeroan,<br>dan Daging Variasi |        | Daging Murni/<br>Skeletal, Jeroan,<br>dan Daging Variasi |        |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
|     |                                             | 2024   | 2025*) | 2024                      | 2025*) | 2024   | 2025*) | 2024           | 2025*) | 2024                                  | 2025*) | 2024                                                     | 2025*) |
| (1) | (2)                                         | (3)    | (4)    | (5)                       | (6)    | (7)    | (8)    | (9)            | (10)   | (11)                                  | (12)   | (13)                                                     | (14)   |
| 1   | Sapi/Beef Cattle                            | 470,21 | 501,57 | 354,52                    | 375,55 | 89,88  | 95,92  | 25,81          | 27,68  | 585,90                                | 625,17 | 470,21                                                   | 499,15 |
|     | a. Sapi Potong Lokal/ Local Cattle          | 383,05 | 404,89 | 289,26                    | 302,80 | 73,14  | 77,32  | 21,72          | 23,13  | 477,90                                | 505,34 | 384,11                                                   | 403,25 |
|     | b. Sapi Potong Ex-Import/Ex-Imported Cattle | 78,52  | 86,25  | 57,48                     | 65,15  | 14,59  | 16,41  | 3,57           | 4,03   | 94,69                                 | 106,69 | 75,64                                                    | 85,59  |
|     | c. Sapi Perah/Dairy Cattle                  | 10,84  | 10,44  | 7,78                      | 7,60   | 2,15   | 2,19   | 0,52           | 0,52   | 13,32                                 | 13,15  | 10,46                                                    | 10,31  |
| 2   | Kerbau/ Buffalo                             | 18,10  | 16,54  | 13,60                     | 12,34  | 3,57   | 3,30   | 0,84           | 0,80   | 22,51                                 | 20,65  | 18,01                                                    | 16,45  |
| 3   | Kuda/ Horse                                 | 1,09   | 1,11   | 0,82                      | 0,81   | 0,20   | 0,20   | 0,08           | 0,08   | 1,36                                  | 1,37   | 1,08                                                     | 1,07   |
| 4   | Kambing/ Mutton                             | 52,00  | 61,31  | 39,34                     | 45,54  | 10,68  | 11,61  | 2,97           | 3,83   | 65,65                                 | 76,76  | 52,99                                                    | 60,99  |
| 5   | Domba/ Lamb                                 | 28,58  | 29,97  | 21,44                     | 22,08  | 5,88   | 5,34   | 1,62           | 2,28   | 35,86                                 | 37,57  | 28,74                                                    | 29,68  |
| 6   | Babi/ Pork                                  | 128,55 | 118,86 | 97,74                     | 87,74  | 25,21  | 23,24  | 7,33           | 6,76   | 161,09                                | 148,85 | 130,28                                                   | 117,74 |
|     | Total                                       | 698,52 | 729,37 | 527,45                    | 544,08 | 135,22 | 139,61 | 38,63          | 41,40  | 872,37                                | 910,37 | 701,31                                                   | 725,08 |

Keterangan/Note : \*) Angka sementara/Preliminary figures

Tabel 10.2 Produksi Daging Unggas dan Aneka Ternak, Telur, dan Susu Tahun 2024 - 2025\*)  
Table 10.2 Meat for Poultry and Various Livestock, Egg, and Milk Production 2025 - 2025\*)

(000 ton)

| No  | Jenis/<br>Species         | Tahun/Year |          |
|-----|---------------------------|------------|----------|
|     |                           | 2024       | 2025 *)  |
| (1) | (2)                       | (3)        | (4)      |
| I   | DAGING/MEAT               | 4.393,20   | 4.556,36 |
| 1   | Ayam Buras/Native Chicken | 210,68     | 211,24   |
| 2   | Ayam Ras Petelur/Layer    | 230,50     | 235,58   |
| 3   | Ayam Ras Pedaging/Broiler | 3.905,40   | 4.061,17 |
| 4   | Itik/Duck                 | 37,78      | 39,31    |
| 5   | Itik Manila/Muscovy Duck  | 5,05       | 5,25     |
| 6   | Kelinci/Rabbit            | 0,35       | 0,36     |
| 7   | Puyuh/Quail               | 3,43       | 3,47     |
| II  | TELUR/EGG                 | 6.719,00   | 6.907,98 |
| 1   | Ayam Buras/Native Chicken | 273,09     | 272,90   |
| 2   | Ayam Ras Petelur/Layer    | 6.134,54   | 6.313,54 |
| 3   | Itik/Duck                 | 248,88     | 258,54   |
| 4   | Itik Manila/Muscovy Duck  | 31,28      | 31,46    |
| 5   | Puyuh/Quail               | 31,21      | 31,53    |
| III | SUSU/MILK                 | 809,04     | 820,87   |

Keterangan/Note : \*) Angka sementara/Preliminary figures



Tabel Populasi Ternak Tahun 2024-2025

(000 Ekor/000 Head)

| No         | Jenis/<br>Species                     | Tahun/Year |             |
|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
|            |                                       | 2024       | 2025 *)     |
| (1)        | (2)                                   | (3)        | (4)         |
| <b>I</b>   | <b>TERNAK BESAR/LARGE LIVESTOCK</b>   |            |             |
| 1          | Sapi Potong/ <i>Beef Cattle</i>       | 13.268     | 13.549,9    |
| 2          | Sapi Perah/ <i>Dairy Cattle</i>       | 491        | 499,4       |
| 3          | Kerbau/ <i>Buffalo</i>                | 731        | 755,5       |
| 4          | Kuda/ <i>Horse</i>                    | 140        | 142,0       |
| <b>II</b>  | <b>TERNAK KECIL/SMALL LIVESTOCK</b>   |            |             |
| 1          | Kambing/ <i>Goat</i>                  | 15.439     | 15.824,3    |
| 2          | Domba/ <i>Sheep</i>                   | 9.035      | 9.148,9     |
| 3          | Babi/ <i>Pig</i>                      | 3.650      | 3.773,6     |
| <b>III</b> | <b>TERNAK UNGGAS/POULTRIES</b>        |            |             |
| 1          | Ayam Buras/ <i>Native Chicken</i>     | 169.203    | 171.085,5   |
| 2          | Ayam Ras Petelur/ <i>Layer</i>        | 415.330    | 426.122,2   |
| 3          | Ayam Ras Pedaging/ <i>Broiler</i>     | 3.205.417  | 3.323.003,8 |
| 4          | Itik/ <i>Duck</i>                     | 36.587     | 37.913,4    |
| 5          | Itik Manila/ <i>Muscovy Duck</i>      | 7.315      | 7.416,8     |
| <b>IV</b>  | <b>ANEKA TERNAK/VARIOUS LIVESTOCK</b> |            |             |
| 1          | Kelinci/ <i>Rabbit</i>                | 619        | 629,9       |
| 2          | Puyuh/ <i>Quail</i>                   | 19.927     | 20.210,0    |

Sumber: Statistik Ditjen PKH, 2025



## Lampiran 4 Perhitungan per Komponen Indeks Keamanan Komoditas Peternakan Tahun 2025

| No                                                                                                                                                 | Jenis Unit Usaha | Pembinaan (Unit) | Capaian (Unit) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| a                                                                                                                                                  | b                | c                | d              |
| 1                                                                                                                                                  | Daging           | 1.204            | 673            |
| 2                                                                                                                                                  | Susu             | 128              | 75             |
| 3                                                                                                                                                  | Telur            | 360              | 201            |
|                                                                                                                                                    | <b>Total</b>     | <b>1.692</b>     | <b>949</b>     |
| Persentase unit usaha produk hewan berNKV terhadap total unit usaha produk hewan yang dibina dan unit usaha produk hewan yang mengajukan NKV (d/c) |                  |                  | <b>56,09%</b>  |

| No                                                                                                                                                                                    | Jenis Produk | Proses Registrasi Produk Hewan |              |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|
|                                                                                                                                                                                       |              | Terbit                         | Dalam Proses | Draft     | Total         |
| a                                                                                                                                                                                     | b            | c                              | d            | e         | f=c+d+e       |
| 1                                                                                                                                                                                     | Daging       | 333                            | 94           | 60        | 487           |
| 2                                                                                                                                                                                     | Telur        | 4                              | 7            | 7         | 18            |
|                                                                                                                                                                                       | <b>Total</b> | <b>337</b>                     | <b>101</b>   | <b>67</b> | <b>505</b>    |
| Persentase jumlah penerbitan nomor registrasi penerbitan nomor registrasi produk hewan segar berkemasan terhadap total pengajuan nomor registrasi produk hewan segar berkemasan (c/f) |              |                                |              |           | <b>66,73%</b> |



| No | Jenis Unit Usaha                                                        | Jumlah Sampel Unit Usaha Produk Hewan yang Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Sampel Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Syarat | Jumlah Sampel Unit Usaha Produk Hewan | % Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Syarat |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| a  | b                                                                       | c                                                                | d                                                          | e=c+d                                 | f=d/e                                          |
| 1  | Rumah Potong Hewan/Gudang/Kios Daging/Swalayan/Tempat Pengolahan Daging | 285                                                              | 172                                                        | 457                                   | 37,64%                                         |
| 2  | Tempat Penampungan Susu                                                 | 43                                                               | 27                                                         | 70                                    | 38,57%                                         |
| 3  | Peternakan/Pengumpul/Pengemas Telur Konsumsi/Tempat Pengolahan Telur    | 30                                                               | 116                                                        | 146                                   | 79,45%                                         |
|    | <b>Total</b>                                                            | <b>358</b>                                                       | <b>315</b>                                                 | <b>673</b>                            | <b>46,81%</b>                                  |

| No | Provinsi         | Jumlah RPH | Jumlah RPH yang Melaporkan |
|----|------------------|------------|----------------------------|
| a  | b                | c          | d                          |
| 1  | Aceh             | 15         | 8                          |
| 2  | Sumatera Utara   | 21         | -                          |
| 3  | Sumatera Barat   | 13         | 2                          |
| 4  | Jambi            | 11         | 1                          |
| 5  | Lampung          | 9          | 1                          |
| 6  | Bengkulu         | 8          | 5                          |
| 7  | Riau             | 7          | 2                          |
| 8  | Sumatera Selatan | 8          | -                          |
| 9  | Kepulauan Riau   | 2          | 2                          |
| 10 | Bangka Belitung  | 5          | 1                          |





| No | Provinsi            | Jumlah RPH | Jumlah RPH yang Melaporkan |
|----|---------------------|------------|----------------------------|
| a  | b                   | c          | d                          |
| 11 | DKI Jakarta         | 3          | 2                          |
| 12 | Jawa Barat          | 55         | 15                         |
| 13 | Jawa Tengah         | 74         | 8                          |
| 14 | DI Yogyakarta       | 5          | 3                          |
| 15 | Jawa Timur          | 131        | 13                         |
| 16 | Banten              | 11         | 3                          |
| 17 | Kalimantan Barat    | 2          | 2                          |
| 18 | Kalimantan Selatan  | 11         | 2                          |
| 19 | Kalimantan Timur    | 10         | 5                          |
| 20 | Kalimantan Tengah   | 8          | 1                          |
| 21 | Kalimantan Utara    | 3          | 2                          |
| 22 | Bali                | 8          | 5                          |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 33         | 15                         |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 22         | 9                          |
| 25 | Sulawesi Utara      | 1          | -                          |
| 26 | Sulawesi Tengah     | 14         | -                          |
| 27 | Sulawesi Barat      | 2          | 1                          |
| 28 | Gorontalo           | 2          | 1                          |
| 29 | Sulawesi Selatan    | 17         | 5                          |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | 6          | 1                          |
| 31 | Maluku              | 2          | 1                          |
| 32 | Maluku Utara        | 1          | -                          |
| 33 | Papua               | 1          | -                          |



| No                                                                                | Provinsi         | Jumlah RPH | Jumlah RPH yang Melaporkan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|
| a                                                                                 | b                | c          | d                          |
| 34                                                                                | Papua Barat      | -          | -                          |
| 35                                                                                | Papua Barat Daya | 2          | -                          |
| 36                                                                                | Papua Tengah     | 1          | -                          |
| 37                                                                                | Papua Pegunungan | -          | -                          |
| 38                                                                                | Papua Selatan    | 2          | 2                          |
|                                                                                   | <b>TOTAL</b>     | <b>526</b> | <b>118</b>                 |
| <b>Persentase RPH yang melaksanakan pemeriksaan AMPM terhadap total RPH (d/c)</b> |                  |            | <b>22,43%</b>              |

| No                                                                                                                                      | Negara Tujuan Ekspor | Jenis Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Dibina | Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| a                                                                                                                                       | b                    | c                | d                             | e                               |
| 1                                                                                                                                       | Malaysia             | Produk Susu      | 5                             | 5                               |
| 2                                                                                                                                       | Malaysia             | Produk Unggas    | 7                             | 7                               |
| 3                                                                                                                                       | Singapura            | Produk Unggas    | 2                             | 2                               |
| 4                                                                                                                                       | Filipina             | Produk Unggas    | 6                             | 6                               |
|                                                                                                                                         | <b>Total</b>         |                  | <b>20</b>                     | <b>20</b>                       |
| <b>Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan sanitari negara tujuan ekspor terhadap total unit usaha yang dibina</b> |                      |                  |                               | <b>100,00%</b>                  |

| No | Jenis Rekomendasi Pemasukan               | Jumlah Pengajuan Rekomendasi | Jumlah Rekomendasi Terbit |
|----|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| a  | b                                         | c                            | d                         |
| 1  | Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya | 108                          | 108                       |



| No                                                                                                                                                                         | Jenis Rekomendasi Pemasukan             | Jumlah Pengajuan Rekomendasi | Jumlah Rekomendasi Terbit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| a                                                                                                                                                                          | b                                       | c                            | d                         |
| 2                                                                                                                                                                          | Daging Lembu melalui Ketentuan RK SINAS | 184                          | 184                       |
| 3                                                                                                                                                                          | Tepung Telur                            | 58                           | 58                        |
| 4                                                                                                                                                                          | Produk Susu                             | 2.685                        | 2.685                     |
|                                                                                                                                                                            | <b>Total</b>                            | <b>3.035</b>                 | <b>3.035</b>              |
| <b>Persentase pengajuan rekomendasi pemasukan produk hewan yang memenuhi persyaratan sanitari terhadap total rekomendasi pemasukan produk hewan yang diterbitkan (d/c)</b> |                                         |                              | <b>100,00%</b>            |

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, 2026



Lampiran 5 Perhitungan Indikator Kinerja Program “Persentase Wilayah/ Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan Tahun 2025

| No                                                     | Penyakit Hewan                    | Mempertahankan Status Bebas (kab/kota) | Terduga (kab/kota) | Tidak Mengalami Kenaikan Signifikan Kejadian (kab/kota) | Jumlah    | Total Kab/Kota | Angka Kesehatan Hewan |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| a                                                      | b                                 | c                                      | d                  | e                                                       | f=(c+d+e) | g              | h=f/g                 |
| 1                                                      | Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)     | 85                                     | 21                 | 211                                                     | 317       | 514            | 61,67%                |
| 2                                                      | Lumpy Skin Disease (LSD)          | 182                                    | 45                 | 137                                                     | 364       | 514            | 70,82%                |
| 3                                                      | Anthrax                           | 80                                     | 380                | 13                                                      | 473       | 514            | 92,02%                |
| 4                                                      | Brucellosis                       | 230                                    | 219                | 19                                                      | 468       | 514            | 91,05%                |
| 5                                                      | Surra                             | 67                                     | 331                | 30                                                      | 428       | 514            | 83,27%                |
| 6                                                      | Jembrana                          | 214                                    | 184                | 64                                                      | 462       | 514            | 89,88%                |
| 7                                                      | Septicaemia Epizootica            | 63                                     | 349                | 44                                                      | 456       | 514            | 88,72%                |
| 8                                                      | Rabies                            | 156                                    | 0                  | 141                                                     | 297       | 514            | 57,78%                |
| 9                                                      | African Swine Fever               | 25                                     | 308                | 55                                                      | 388       | 514            | 75,49%                |
| 10                                                     | Classical Swine Fever             | 59                                     | 346                | 23                                                      | 428       | 514            | 83,27%                |
| 11                                                     | Highly Pathogenic Avian Influenza | 58                                     | 93                 | 38                                                      | 189       | 514            | 36,77%                |
| Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan |                                   |                                        |                    |                                                         |           |                | 75,52%                |

| No                                                | Kompartemen Bebas Penyakit | Jumlah Kompartemen Bebas Penyakit | Pengajuan Kompartemen Bebas Penyakit | % Kawasan Bebas Penyakit Hewan |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| a                                                 | b                          | c                                 | d                                    | e=c/d                          |
| 1                                                 | Avian Influenza            | 335                               | 365                                  | 91,78%                         |
| 2                                                 | Brucellosis                | 5                                 | 6                                    | 83,33%                         |
| 3                                                 | African Swine Fever        | 2                                 | 2                                    | 100,00%                        |
| Persentase Kawasan yang Terkendali Penyakit Hewan |                            |                                   |                                      | 91,70%                         |

$$\text{Persentase Wilayah/ Kawasan yang Terkendali Penyakit Hewan} = \frac{75,52\% + 91,70\%}{2} = 83,61\%$$



Lampiran 6 Perhitungan Indikator Kinerja Program “Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia” Tahun 2025

**Tabel Data Kab./ Kota yang Terkendali Zoonosis Tahun 2025**

| No | Provinsi                   | Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Nilai Tidak Baik | Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Nilai Baik | Jumlah Kabupaten/Kota |
|----|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| a  | B                          | c                                              | d                                        | e                     |
| 1  | Aceh                       | 21                                             | 2                                        | 23                    |
| 2  | Bali                       | 0                                              | 9                                        | 9                     |
| 3  | Banten                     | 3                                              | 5                                        | 8                     |
| 4  | Bengkulu                   | 1                                              | 9                                        | 10                    |
| 5  | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0                                              | 5                                        | 5                     |
| 6  | DKI Jakarta                | 0                                              | 6                                        | 6                     |
| 7  | Gorontalo                  | 6                                              | 0                                        | 6                     |
| 8  | Jambi                      | 11                                             | 0                                        | 11                    |
| 9  | Jawa Barat                 | 6                                              | 21                                       | 27                    |
| 10 | Jawa Tengah                | 10                                             | 25                                       | 35                    |
| 11 | Jawa Timur                 | 20                                             | 18                                       | 38                    |
| 12 | Kalimantan Barat           | 2                                              | 12                                       | 14                    |
| 13 | Kalimantan Selatan         | 5                                              | 8                                        | 13                    |
| 14 | Kalimantan Tengah          | 7                                              | 7                                        | 14                    |
| 15 | Kalimantan Timur           | 3                                              | 7                                        | 10                    |
| 16 | Kalimantan Utara           | 2                                              | 3                                        | 5                     |
| 17 | Kepulauan Bangka Belitung  | 0                                              | 7                                        | 7                     |
| 18 | Kepulauan Riau             | 1                                              | 6                                        | 7                     |
| 19 | Lampung                    | 5                                              | 10                                       | 15                    |
| 20 | Maluku                     | 2                                              | 9                                        | 11                    |
| 21 | Maluku Utara               | 6                                              | 4                                        | 10                    |
| 22 | Nusa Tenggara Barat        | 7                                              | 3                                        | 10                    |
| 23 | Nusa Tenggara Timur        | 14                                             | 8                                        | 22                    |
| 24 | Papua                      | 0                                              | 9                                        | 9                     |
| 25 | Papua Barat                | 0                                              | 7                                        | 7                     |
| 26 | Papua Barat Daya           | 0                                              | 6                                        | 6                     |
| 27 | Papua Pegunungan           | 0                                              | 8                                        | 8                     |
| 28 | Papua Selatan              | 0                                              | 4                                        | 4                     |
| 29 | Papua Tengah               | 0                                              | 8                                        | 8                     |
| 30 | Riau                       | 10                                             | 2                                        | 12                    |
| 31 | Sulawesi Barat             | 6                                              | 0                                        | 6                     |



| No                                                             | Provinsi          | Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Nilai Tidak Baik | Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Nilai Baik | Jumlah Kabupaten/Kota |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| a                                                              | B                 | c                                              | d                                        | e                     |
| 32                                                             | Sulawesi Selatan  | 23                                             | 1                                        | 24                    |
| 33                                                             | Sulawesi Tengah   | 11                                             | 2                                        | 13                    |
| 34                                                             | Sulawesi Tenggara | 14                                             | 3                                        | 17                    |
| 35                                                             | Sulawesi Utara    | 15                                             | 0                                        | 15                    |
| 36                                                             | Sumatera Barat    | 18                                             | 1                                        | 19                    |
| 37                                                             | Sumatera Selatan  | 6                                              | 11                                       | 17                    |
| 38                                                             | Sumatera Utara    | 33                                             | 0                                        | 33                    |
| <b>Total</b>                                                   |                   | <b>268</b>                                     | <b>246</b>                               | <b>514</b>            |
| <b>Persentase Kab./Kota yang Terkendali Zoonosis (% = d/e)</b> |                   | <b>47,86%</b>                                  |                                          |                       |

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2026.

**Tabel Data Kab./ Kota yang Terkendali dari Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia Tahun 2025**

| No | Provinsi                   | Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Nilai Tidak Baik | Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Nilai Baik | Jumlah Kabupaten/Kota |
|----|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| a  | B                          | c                                              | d                                        | e                     |
| 1  | Aceh                       | 18                                             | 5                                        | 23                    |
| 2  | Bali                       | 6                                              | 3                                        | 9                     |
| 3  | Banten                     | 3                                              | 5                                        | 8                     |
| 4  | Bengkulu                   | 5                                              | 5                                        | 10                    |
| 5  | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1                                              | 4                                        | 5                     |
| 6  | DKI Jakarta                | 4                                              | 2                                        | 6                     |
| 7  | Gorontalo                  | 2                                              | 4                                        | 6                     |
| 8  | Jambi                      | 6                                              | 5                                        | 11                    |
| 9  | Jawa Barat                 | 18                                             | 9                                        | 27                    |
| 10 | Jawa Tengah                | 9                                              | 26                                       | 35                    |
| 11 | Jawa Timur                 | 10                                             | 28                                       | 38                    |
| 12 | Kalimantan Barat           | 5                                              | 9                                        | 14                    |
| 13 | Kalimantan Selatan         | 10                                             | 3                                        | 13                    |
| 14 | Kalimantan Tengah          | 7                                              | 7                                        | 14                    |
| 15 | Kalimantan Timur           | 4                                              | 6                                        | 10                    |
| 16 | Kalimantan Utara           | 3                                              | 2                                        | 5                     |





| No                                                                                                                       | Provinsi                  | Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Nilai Tidak Baik | Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Nilai Baik | Jumlah Kabupaten/Kota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| a                                                                                                                        | B                         | c                                              | d                                        | e                     |
| 17                                                                                                                       | Kepulauan Bangka Belitung | 1                                              | 6                                        | 7                     |
| 18                                                                                                                       | Kepulauan Riau            | 4                                              | 3                                        | 7                     |
| 19                                                                                                                       | Lampung                   | 6                                              | 9                                        | 15                    |
| 20                                                                                                                       | Maluku                    | 11                                             |                                          | 11                    |
| 21                                                                                                                       | Maluku Utara              | 8                                              | 2                                        | 10                    |
| 22                                                                                                                       | Nusa Tenggara Barat       | 3                                              | 7                                        | 10                    |
| 23                                                                                                                       | Nusa Tenggara Timur       | 14                                             | 8                                        | 22                    |
| 24                                                                                                                       | Papua                     | 6                                              | 3                                        | 9                     |
| 25                                                                                                                       | Papua Barat               | 7                                              |                                          | 7                     |
| 26                                                                                                                       | Papua Barat Daya          | 3                                              | 3                                        | 6                     |
| 27                                                                                                                       | Papua Pegunungan          | 8                                              |                                          | 8                     |
| 28                                                                                                                       | Papua Selatan             | 3                                              | 1                                        | 4                     |
| 29                                                                                                                       | Papua Tengah              | 8                                              |                                          | 8                     |
| 30                                                                                                                       | Riau                      | 7                                              | 5                                        | 12                    |
| 31                                                                                                                       | Sulawesi Barat            | 5                                              | 1                                        | 6                     |
| 32                                                                                                                       | Sulawesi Selatan          | 19                                             | 5                                        | 24                    |
| 33                                                                                                                       | Sulawesi Tengah           | 5                                              | 8                                        | 13                    |
| 34                                                                                                                       | Sulawesi Tenggara         | 14                                             | 3                                        | 17                    |
| 35                                                                                                                       | Sulawesi Utara            | 4                                              | 11                                       | 15                    |
| 36                                                                                                                       | Sumatera Barat            | 9                                              | 10                                       | 19                    |
| 37                                                                                                                       | Sumatera Selatan          | 9                                              | 8                                        | 17                    |
| 38                                                                                                                       | Sumatera Utara            | 27                                             | 6                                        | 33                    |
| <b>Total</b>                                                                                                             |                           | <b>292</b>                                     | <b>222</b>                               | <b>514</b>            |
| <b>Persentase Kab./Kota yang Terkendali dari Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia (% = d/e)</b> |                           | <b>43,19%</b>                                  |                                          |                       |

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2026.

|                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis dan Penyimpangan Produk Hewan yang Mempengaruhi Kesehatan Manusia</b> | <b>45,53%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|



## Lampiran 7 Indeks Harga yang Diterima Peternak Tahun 2025

bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcyMCMY/indexes-harga-yang-diterima-petani---it---index-harga-yang-dibayar-petani--ib---dan-nilai-tukar...

Badan Pusat Statistik

Statistik Demografi dan Sosial  
Statistik Ekonomi  
Statistik Makroekonomi  
Neraca Ekonomi  
Statistik Bisnis  
Statistik sektoral  
Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik  
Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran  
**Harga-Harga**  
Biaya Tenaga Kerja  
Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi  
Pertanian, Kehutanan, Perikanan  
Energi  
Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi  
Transportasi  
Pariwisata  
Perbankan, Asuransi dan Finansial

### Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani Subsektor (NTPPT) serta Perubahannya (2018=100), 2025

Terakhir Diperbarui : 2 Februari 2026

[← Kembali](#) [Unduh](#) [JSON](#) [Bagikan](#)

2025

☐ Freeze judul kolom

| Sektor NTPPT<br>(2018=100)           | Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani Subsektor (NTPPT) serta Perubahannya (2018=100), 2025 |          |        |        |        |        |        |         |           |         |          |          |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|----------|----------|---------|
|                                      | Indeks                                                                                                                                                      |          |        |        |        |        |        |         |           |         |          |          |         |
|                                      | 2025                                                                                                                                                        |          |        |        |        |        |        |         |           |         |          |          |         |
|                                      | Januari                                                                                                                                                     | Februari | Maret  | April  | Mei    | Juni   | Juli   | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan |
| 1. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI | 122,34                                                                                                                                                      | 121,31   | 122,99 | 122,41 | 124,09 | 124,13 | 124,09 | 123,61  | 125,62    | 126,62  | 126,10   | 128,05   | 124,28  |
| 1.1. Ternak Besar                    | 121,43                                                                                                                                                      | 120,24   | 121,80 | 123,04 | 126,39 | 126,45 | 125,43 | 125,36  | 125,37    | 125,57  | 125,80   | 126,00   | 124,41  |
| 1.2. Ternak Kecil                    | 121,54                                                                                                                                                      | 121,51   | 120,96 | 122,19 | 126,62 | 126,08 | 123,36 | 121,37  | 119,69    | 119,04  | 117,70   | 116,71   | 121,40  |
| 1.3. Unggas                          | 120,58                                                                                                                                                      | 119,80   | 122,53 | 120,39 | 120,14 | 119,60 | 120,41 | 119,95  | 126,02    | 126,61  | 125,37   | 129,68   | 122,59  |
| 1.4. Hasil Ternak                    | 128,56                                                                                                                                                      | 128,54   | 130,17 | 127,49 | 127,04 | 128,08 | 129,64 | 129,23  | 130,94    | 134,09  | 133,03   | 136,97   | 130,31  |



Lampiran 8 Perhitungan Koefisien Bobot pada Indeks Mutu Komoditas Peternakan

Bobot Parameter Kuantitatif Mutu Non Keamanan Pangan pada Setiap SNI

| No.                                                        | Komoditas | SNI | Parameter                      | Sifat       | Koefisien Bobot (Parameter Kuantitatif/ Total Parameter) |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>A Karkas dan Daging Sapi/ Kerbau SNI 9226:2023 0,83</b> |           |     |                                |             |                                                          |
| 1                                                          |           |     | Warna Daging                   | Kuantitatif |                                                          |
| 2                                                          |           |     | Warna Lemak                    | Kuantitatif |                                                          |
| 3                                                          |           |     | Marbling                       | Kuantitatif |                                                          |
| 4                                                          |           |     | Ketebalan Lemak                | Kuantitatif |                                                          |
| 5                                                          |           |     | Total Plate Count              | Kuantitatif |                                                          |
| 6                                                          |           |     | Perubahan Warna                | Kualitatif  |                                                          |
| <b>B Telur Ayam Konsumsi SNI 3926:2023 0,29</b>            |           |     |                                |             |                                                          |
| 1                                                          |           |     | Shape Index Kerabang           | Kuantitatif |                                                          |
| 2                                                          |           |     | Kedalaman Kantong Udara        | Kuantitatif |                                                          |
| 3                                                          |           |     | Indeks Putih Telur             | Kuantitatif |                                                          |
| 4                                                          |           |     | Indeks Kuning Telur            | Kuantitatif |                                                          |
| 5                                                          |           |     | Total Plate Count              | Kuantitatif |                                                          |
| 6                                                          |           |     | Kebebasan Bergerak             | Kuantitatif |                                                          |
| 7                                                          |           |     | Kehalusan Kerabang             | Kualitatif  |                                                          |
| 8                                                          |           |     | Ketebalan Kerabang             | Kualitatif  |                                                          |
| 9                                                          |           |     | Keutuhan Kerabang              | Kualitatif  |                                                          |
| 10                                                         |           |     | Kebersihan Kerabang            | Kualitatif  |                                                          |
| 11                                                         |           |     | Kebersihan Putih Telur         | Kualitatif  |                                                          |
| 12                                                         |           |     | Kekentalan Putih Telur         | Kualitatif  |                                                          |
| 13                                                         |           |     | Bentuk Kuning Telur            | Kualitatif  |                                                          |
| 14                                                         |           |     | Posisi Kuning Telur            | Kualitatif  |                                                          |
| 15                                                         |           |     | Penampakan Batas Kuning Telur  | Kualitatif  |                                                          |
| 16                                                         |           |     | Kebersihan Kuning Telur        | Kualitatif  |                                                          |
| 17                                                         |           |     | Bau                            | Kualitatif  |                                                          |
| <b>C Karkas dan Daging Ayam Ras SNI 3924:2023 0,11</b>     |           |     |                                |             |                                                          |
| 1                                                          |           |     | Total Plate Count              | Kuantitatif |                                                          |
| 2                                                          |           |     | Tulang Patah atau Hilang       | Kualitatif  |                                                          |
| 3                                                          |           |     | Persendian Lepas               | Kualitatif  |                                                          |
| 4                                                          |           |     | Kulit Sobek                    | Kualitatif  |                                                          |
| 5                                                          |           |     | Daging Sobek maupun Hilang     | Kualitatif  |                                                          |
| 6                                                          |           |     | Perubahan Warna (selain memar) | Kualitatif  |                                                          |
| 7                                                          |           |     | Bulu Tunas                     | Kualitatif  |                                                          |
| 8                                                          |           |     | Bulu Halus                     | Kualitatif  |                                                          |
| 9                                                          |           |     | Kotoran dan Darah              | Kualitatif  |                                                          |
| <b>D Susu Mentah - Sapi SNI 3141:2024 0,58</b>             |           |     |                                |             |                                                          |
| 1                                                          |           |     | Berat Jenis pada Suhu 27,5 'C  | Kuantitatif |                                                          |



| No.                                              | Komoditas | SNI | Parameter                              | Sifat       | Koefisien Bobot (Parameter Kuantitatif/ Total Parameter) |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 2                                                |           |     | Kadar Lemak Minimum                    | Kuantitatif |                                                          |
| 3                                                |           |     | Kadar Protein Minimum                  | Kuantitatif |                                                          |
| 4                                                |           |     | Kadar Bahan Kering Minimum             | Kuantitatif |                                                          |
| 5                                                |           |     | Kadar Bahan Kering Tanpa Lemak Minimum | Kuantitatif |                                                          |
| 6                                                |           |     | pH                                     | Kuantitatif |                                                          |
| 7                                                |           |     | <i>Total Plate Count</i>               | Kuantitatif |                                                          |
| 8                                                |           |     | Warna                                  | Kualitatif  |                                                          |
| 9                                                |           |     | Bau                                    | Kualitatif  |                                                          |
| 10                                               |           |     | Rasa                                   | Kualitatif  |                                                          |
| 11                                               |           |     | Konsistensi                            | Kualitatif  |                                                          |
| 12                                               |           |     | Uji Alkohol 70% (v/v)                  | Kualitatif  |                                                          |
| Koefisien Bobot Indeks Mutu Komoditas Peternakan |           |     |                                        |             | 0,46                                                     |



Lampiran 9 Data Volume dan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024-2025\* (Angka Tetap s.d. November 2025)

| No        | Pengelompokan Komoditas                      | 2024                  |                         | 2025*)                |                       |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                              | Volume (Kg)           | Nilai (US\$)            | Volume (Kg)           | Nilai (US\$)          |
| <b>A.</b> | <b>Ternak</b>                                | <b>249.803,42</b>     | <b>5.415.689,27</b>     | <b>394.050,68</b>     | <b>7.975.873,09</b>   |
| 1         | Kuda                                         | -                     | -                       | 2.559,00              | 12.142,00             |
| 2         | Keledai                                      | -                     | -                       | 31,62                 | 981,71                |
| 3         | Sapi                                         | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 4         | Kerbau                                       | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 5         | Babi                                         | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 6         | Biri-biri                                    | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 7         | Kambing                                      | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 8         | Unggas                                       | 50.142,52             | 732.826,03              | 83.879,01             | 701.909,07            |
| 9         | Lebah hidup                                  | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 10        | Binatang hidup lainnya                       | 199.660,90            | 4.682.863,24            | 307.581,05            | 7.260.840,31          |
| <b>B.</b> | <b>Hasil Ternak</b>                          | <b>280.231.591,82</b> | <b>1.076.136.212,11</b> | <b>309.142.235,99</b> | <b>983.698.078,48</b> |
| 1         | Daging                                       | 64.208.820,36         | 242.277.618,03          | 66.193.198,32         | 239.046.820,11        |
| a         | Sapi                                         | 7.839,05              | 48.044,73               | 20.781,58             | 140.597,11            |
| b         | Babi                                         | 493,00                | 1.837,62                | 2.757,06              | 13.525,77             |
| c         | Kambing/domba                                | -                     | -                       | 24.365,48             | 349.005,93            |
| d         | Kuda                                         | 1.095,00              | 3.564,80                | -                     | -                     |
| e         | Unggas                                       | 63.968.544,84         | 239.027.406,35          | 65.948.509,56         | 235.241.326,81        |
| f         | Jeroan sapi                                  | -                     | -                       | 1,00                  | 18,30                 |
| g         | Jeroan Non sapi                              | -                     | -                       | 1.000,00              | 1.381,00              |
| h         | Daging lainnya                               | 230.848,47            | 3.196.764,53            | 195.783,64            | 3.300.965,19          |
| 2         | Susu                                         | 112.046.088,32        | 170.387.930,10          | 118.572.404,32        | 172.891.185,83        |
| a         | Susu dan kepala susu                         | 86.472.518,18         | 130.832.609,07          | 85.605.934,96         | 127.390.809,18        |
| b         | Yoghurt                                      | 6.707.163,66          | 9.325.914,09            | 6.088.002,53          | 9.447.689,53          |
| c         | Mentega                                      | 15.670.216,67         | 18.039.801,79           | 23.623.078,08         | 23.183.898,90         |
| d         | Keju                                         | 3.196.189,81          | 12.189.605,15           | 3.255.388,75          | 12.868.788,22         |
| 3         | Telur                                        | 3.198.565,01          | 6.078.533,47            | 4.850.731,00          | 8.778.865,43          |
| 4         | Madu                                         | 743.489,63            | 1.043.653,59            | 837.597,78            | 1.178.046,83          |
| 5         | Lemak                                        | 98.708.283,54         | 104.524.061,30          | 117.443.705,13        | 130.348.647,25        |
| 6         | Makanan-olahan                               | 96.155,92             | 210.006,34              | 177.744,52            | 554.308,61            |
| 7         | Sarang burung walet                          | 1.218.507,76          | 551.555.899,35          | 1.063.222,30          | 430.786.826,31        |
| 8         | Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan | 3.747,75              | 34.792,39               | 1.577,64              | 105.725,80            |
| 9         | Gelatin                                      | 7.933,53              | 23.717,54               | 2.054,98              | 7.652,31              |
|           |                                              |                       |                         |                       |                       |



| No | Pengelompokan Komoditas                                                               | 2024           |                  | 2025*)         |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|    |                                                                                       | Volume (Kg)    | Nilai (US\$)     | Volume (Kg)    | Nilai (US\$)     |
| C. | Produk Hewani Non Pangan                                                              | 162.896.919,67 | 205.198.873,70   | 75.244.353,22  | 131.076.542,90   |
| 1  | Bulu                                                                                  | 3.307.413,14   | 10.734.376,60    | 3.293.089,21   | 10.335.112,99    |
| 2  | Tulang dan Tanduk                                                                     | 750.600,44     | 1.512.990,66     | 859.428,41     | 767.526,20       |
| 3  | Kulit                                                                                 | 3.405.353,96   | 66.536.858,88    | 3.128.536,52   | 52.299.674,79    |
| 4  | Wol                                                                                   | 12.543,76      | 58.270,52        | 73,51          | 97,15            |
| 5  | Pakan Hewan                                                                           | 139.224.678,26 | 121.283.316,13   | 58.406.801,17  | 64.251.213,55    |
| 6  | Ulat sutera                                                                           | 4.037,17       | 16.933,59        | 6.709,40       | 26.405,87        |
| 7  | Pupuk hewani atau nabati                                                              | 16.192.292,94  | 5.056.127,32     | 9.549.715,00   | 3.396.512,35     |
| D. | Obat Hewan                                                                            | 46.215.879,71  | 65.672.838,12    | 213.270.616,60 | 236.066.210,85   |
| 1  | Vaksin untuk obat hewan                                                               | 686.787,11     | 21.815.806,28    | 653.887,90     | 25.674.458,15    |
| 2  | Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner | 1,00           | 322,00           | -              | -                |
| 3  | Lain-lain                                                                             | 45.529.091,60  | 43.856.709,84    | 212.616.728,70 | 210.391.752,70   |
| E. | Benih/Bibit                                                                           | 1.045.444,67   | 3.030.045,67     | 1.240.212,03   | 4.136.378,12     |
| 1  | Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari unggas                                     | 1.040.996,72   | 2.768.224,42     | 1.237.781,03   | 3.947.552,71     |
| 2  | Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari bebek                                      | -              | -                | -              | -                |
| 3  | Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari selain unggas dan bebek                    | -              | -                | -              | -                |
| 4  | Mani dan Produk hewani lainnya tidak dirinci                                          | 4.447,95       | 261.821,25       | 2.431,00       | 188.825,41       |
| F. | Jumlah/Total                                                                          | 490.639.639,29 | 1.355.453.658,87 | 599.291.468,52 | 1.362.953.083,44 |

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2025

| Kementerian Pertanian<br>Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian<br>Ekspor Komoditi Pertanian Berdasarkan per HS<br>Subsektor : Peternakan<br>Tahun 2025<br>Sumber data: Badan Pusat Statistik |                                               |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Download Excel                                                                                                                                                                                   |                                               |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |
| Kuda Hidup                                                                                                                                                                                       |                                               |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |
| Kode HS                                                                                                                                                                                          | Deskripsi                                     | Januari     |              | Februari    |              | Maret       |              | April       |              | Mei         |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                               | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) |
| 1012100                                                                                                                                                                                          | Kuda hidup, bibit                             | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 1012900                                                                                                                                                                                          | Kuda hidup, selain bibit                      | 0           | 0            | 4,00        | 12,00        | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
|                                                                                                                                                                                                  | Total                                         | 0,00        | 0,00         | 4,00        | 12,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Sapi Hidup                                                                                                                                                                                       |                                               |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |
| Kode HS                                                                                                                                                                                          | Deskripsi                                     | Januari     |              | Februari    |              | Maret       |              | April       |              | Mei         |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                               | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) |
| 1022100                                                                                                                                                                                          | Sapi hidup bibit                              | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 1022911                                                                                                                                                                                          | Sapi hidup jantan termasuk lembu selain bibit | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 1022919                                                                                                                                                                                          | Sapi jantan hidup (bukan lembu) selain bibit  | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 1022990                                                                                                                                                                                          | Sapi hidup bukan jantan, selain bibit         | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
|                                                                                                                                                                                                  | Total                                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Ruminansia Lain Hidup                                                                                                                                                                            |                                               |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |
| Kode HS                                                                                                                                                                                          | Deskripsi                                     | Januari     |              | Februari    |              | Maret       |              | April       |              | Mei         |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                               | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) | Volume (Kg) | Nilai (US\$) |

Tautan Sumber Data Volume Ekspor Komoditas Peternakan:

<https://app3.pertanian.go.id/eksim/hasilEksporHs.php>





## Lampiran 10 Data Dukung Indikator “Indeks Hilirisasi Komoditas Peternakan Unggulan Tahun 2025”

Tabel Ketersediaan Susu

| No               | Nama Unit Pengolahan/Koperasi                        | Produksi dan Nilai Tambah Susu Pasteurisasi |                                               |                                         |              |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                  |                                                      | Produksi susu pasteurisasi (liter/bulan)    | Harga pembelian susu dari peternak (Rp/liter) | Harga Jual Susu Pasteurisasi (Rp/liter) | Nilai Tambah |
| 1                | Koperasi Susu Sarana Makmur                          | 800                                         | Rp6.780                                       | Rp25.000                                | Rp18.220     |
| 2                | Koperasi Samesta                                     | 267                                         | Rp7.500                                       | Rp17.000                                | Rp9.500      |
| 3                | KPS Cianjur Utara                                    | 30                                          | Rp6.250                                       | Rp21.000                                | Rp14.750     |
| 4                | Koperasi Gemah Ripah Sukabumi                        | 1.000                                       | Rp6.000                                       | Rp15.000                                | Rp9.000      |
| 5                | Koperasi Pondok Pesantren Darul Fallah               | 800                                         | Rp6.000                                       | Rp15.000                                | Rp15.000     |
| 6                | Koperasi Produsen Karya Nugraha Jaya Kuningan        | 1.500                                       | Rp7.450                                       | Rp20.000                                | Rp12.550     |
| 7                | KPSBU Lembang                                        | 3.660                                       | Rp7.650                                       | Rp25.000                                | Rp19.000     |
| 8                | KAN Jabung                                           | 16.000                                      | Rp7.700                                       | Rp27.000                                | Rp19.300     |
| 9                | Koperasi Usaha Tani Ternak Suka Makmur               | 75.000                                      | Rp7.800                                       | Rp24.000                                | Rp16.200     |
| 10               | KUD Anjasmoro                                        | 150                                         | Rp7.250                                       | Rp22.500                                | Rp15.250     |
| 11               | Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (K PUB) "Sapi Jaya" | 250                                         | Rp7.450                                       | Rp25.000                                | Rp17.550     |
| 12               | Koperasi Sae Pujon                                   | 15.000                                      | Rp7.300                                       | Rp22.000                                | Rp14.700     |
| 13               | KPSP Setia Kawan Nongkojajar                         | 400                                         | Rp7.200                                       | Rp24.000                                | Rp16.800     |
| 14               | Koperasi Produsen Karyawan Abdi Alam                 | 141.469                                     | Rp15.000                                      | Rp20.870                                | Rp7.870      |
| 15               | KPSP Mersi                                           | 500                                         | Rp10.000                                      | Rp15.000                                | Rp5.000      |
| 16               | Koperasi Produsen Mitrayasa Dairy Natural            | 140.000                                     | Rp7.200                                       | Rp18.000                                | Rp10.800     |
| Bulanan          |                                                      | 396.826                                     | Rp7.783                                       | Rp21.023                                | Rp13.843     |
| Total Tahun 2025 |                                                      | 4.761.912                                   | Rp7.783                                       | Rp21.023                                | Rp13.843     |

Total nilai tambah Rp65.919.743.055

Tabel Produk Olahan Susu

| No | Nama Unit Pengolahan/Koperasi                 | Diversifikasi Jenis Produk Olahan |                                     |                               | Ketersediaan Produk Olahan |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|    |                                               | Produksi Yoghurt (liter/bulan)    | Produksi Keju/Mentega (liter/bulan) | Produksi Eskrim (liter/bulan) |                            |
| 1  | Koperasi Susu Sarana Makmur                   | 200                               |                                     |                               | 1.000                      |
| 2  | Koperasi Samesta                              |                                   |                                     |                               | 267                        |
| 3  | KPS Cianjur Utara                             | 120                               |                                     |                               | 150                        |
| 4  | Koperasi Gemah Ripah Sukabumi                 | 500                               |                                     | 100                           | 1.600                      |
| 5  | Koperasi Pondok Pesantren Darul Fallah        | 1200                              |                                     |                               | 2.000                      |
| 6  | Koperasi Produsen Karya Nugraha Jaya Kuningan | 500                               |                                     | 100                           | 2.100                      |
| 7  | KPSBU Lembang                                 | 12000                             |                                     |                               | 15.660                     |
| 8  | KAN Jabung                                    | 800                               |                                     |                               | 16.800                     |
| 9  | Koperasi Usaha Tani Ternak Suka Makmur        | 1000                              |                                     |                               | 76.000                     |



| No                      | Nama Unit Pengolahan/Koperasi                        | Diversifikasi Jenis Produk Olahan |                                     |                               | Ketersediaan Produk Olahan |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                         |                                                      | Produksi Yoghurt (liter/bulan)    | Produksi Keju/Mentega (liter/bulan) | Produksi Eskrim (liter/bulan) |                            |
| 10                      | KUD Anjasmoro                                        | 25                                |                                     | 25                            | 200                        |
| 11                      | Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (K PUB) "Sapi Jaya" | 60                                |                                     |                               | 310                        |
| 12                      | Koperasi Sae Pujon                                   | 1000                              | 25                                  |                               | 16.025                     |
| 13                      | KPSP Setia Kawan Nongkojajar                         | 100                               | 2                                   |                               | 502                        |
| 14                      | Koperasi Produsen Karyawan Abdi Alam                 |                                   |                                     |                               | 141.469                    |
| 15                      | KPSP Mersi                                           | 200                               |                                     |                               | 700                        |
| 16                      | Koperasi Produsen Mitrayasa Dairy Natural            | 800                               |                                     |                               | 140.800                    |
| <b>Bulanan</b>          |                                                      | <b>18.505</b>                     | <b>27</b>                           | <b>225</b>                    | <b>415.583</b>             |
| <b>Total Tahun 2025</b> |                                                      | <b>222.060</b>                    | <b>324</b>                          | <b>2.700</b>                  | <b>4.986.996</b>           |

Tabel Data Ekspor Produk Susu Olahan Tahun 2025

| Volume Ekspor 2025 (Ribu Ton) | Nilai Ekspor 2025 (US Dolar) |
|-------------------------------|------------------------------|
| 76,9                          | 114,446,529.06               |

Sumber: BPS yang diolah Pusdatin 2025

Tabel Produk Susu Olahan Dalam Negeri Tahun 2025

| No           | Produk                        | Jumlah Produksi 2025 (000 MT) |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1            | Susu Formula                  | 217,30                        |
| 2            | Mentega dan Selai             | 101,30                        |
| 3            | Keju                          | 222,70                        |
| 4            | Produk Minuman Susu Kemasan   | 1.527,30                      |
| 5            | Yoghurt                       | 262,90                        |
| 6            | Susu Evaporasi dan Kondensasi | 642,00                        |
| 7            | Krim                          | 299,70                        |
| <b>Total</b> |                               | <b>3.273,20</b>               |

Sumber: Euromonitor, laporan Dairy and Products Annual, Indonesia (USDA, 2025)



| Produksi Susu Olahan Dalam Negeri Tahun 2025 (ribu ton)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ekspor Produk Olahan Susu Tahun 2025 (ribu ton ) |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 3.273,20                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,9                                             |  |
| Rasio susu olahan yang diekspor terhadap total susu pasteurisasi nasional | Total ekspor produk susu olahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |  |
|                                                                           | = <u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </u> |                                                  |  |



## Lampiran 11 Data Dukung Indikator “Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen PKH Tahun 2025”

## a) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH

| No  | Jenis Pengawasan | No.LHP                                     | Judul LHP                                                                                                                                                                                                                       | Rekomendasi |     |       |                | Tindak Lanjut |      |       |               |
|-----|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------------|---------------|------|-------|---------------|
|     |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | Adm         | KN  | Total | Nilai KN       | Adm           | KN   | Total | Nilai KN      |
| (1) | (2)              | (3)                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                             | (5)         | (6) | (7)   | (8)            | (9)           | (10) | (11)  | (12)          |
| 1   | Audit Kinerja    | R-087/PW.130/G.5/04/2024<br>'17 April 2024 | Laporan Hasil Audit Kinerja pada Satker Balai Besar Veteriner Denpasar Provinsi Bali TA 2023                                                                                                                                    | 21          | 0   | 21    | 0,00           | 21            | 0    | 21    | 0,00          |
| 2   | Audit Kinerja    | R-107/PW.130/G.5/0512024 '13 Mei 2024      | Laporan Hasil Audit Kinerja Program Kebersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Program Dukungan Manajemen Pada Satker Balai Besar Veteriner Fama Pusvetma TA2023                                                | 18          | 1   | 19    | 8.820.000,00   | 18            | 1    | 19    | 8.820.000,00  |
| 3   | Audit Kinerja    | R-104/PW.130/G.5/0512024 '13 Mei 2024      | Laporan Hasil Audit Kinerja Program Pada Satker Balai Besar Veteriner Maros TA2023                                                                                                                                              | 20          | 2   | 22    | 16.258.000,00  | 20            | 2    | 22    | 16.258.000,00 |
| 4   | Audit Kinerja    | R-119/PW.130/G.5/05/2024 '22 Mei 2024      | Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas Dan Program Dukungan Manajemen pada Satker Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden T A 2023 | 19          | 2   | 21    | 110.670.602,00 | 19            | 1    | 20    | 32.646.900,00 |
| 5   | Audit Kinerja    | R-113/PW.130/G.5/05/2024 '17 Mei 2024      | Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen pada Satker Balai Veteriner Subang TA 2023                                                        | 17          | 4   | 21    | 13.090.000,00  | 17            | 4    | 21    | 13.090.000,00 |
| 6   | Audit Kinerja    | R-121/PW.130/G.5/05/2024 '22 MEI 2024      | Laporan Hasil Audit Kinerja Program pada Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar TA2023                                                                                                         | 10          | 2   | 12    | 6.170.500,00   | 10            | 2    | 12    | 6.170.500,00  |
| 7   | Audit Kinerja    | R.109/PW.130/G.5/05/2024 '15 Mei 2024      | Laporan Hasil Audit Kinerja Program pada Satker Balai Veteriner Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA2023                                                                                                                      | 25          | 1   | 26    | 6.963.105,48   | 25            | 1    | 26    | 6.963.105,48  |
| 8   | Audit Kinerja    | R-178/PW.130/G.5/07/2024 '18 JULI 2024     | Laporan Hasil Audit Kinerja Program pada Satker Balai Veteriner Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA2023                                                                                                                      | 34          | 5   | 39    | 165.172.292,00 | 34            | 4    | 38    | 99.172.292,00 |
| 9   | Audit Kinerja    | R-168/PW.130/G.5/07/2024 '9 Juli 2024      | Laporan Hasil Audit Kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Program Dukungan Manajemen pada Satker Balai Embrio Ternak Cipelang TA 2023                                                      | 36          | 5   | 41    | 34.737.897,00  | 36            | 5    | 41    | 34.737.897,00 |
| 10  | Audit Kinerja    | R.293/PW.130/G.5/11/2024 '7 November 2024  | Laporan Hasil Audit Kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari TA. 2023                                                                            | 21          | 2   | 23    | 17.664.408,00  | 21            | 2    | 23    | 17.664.408,00 |



## Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

| No  | Jenis Pengawasan  | No.LHP                                        | Judul LHP                                                                                                                                                                                                                                                | Rekomendasi |     |       |                | Tindak Lanjut |      |       |                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------------|---------------|------|-------|----------------|
|     |                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Adm         | KN  | Total | Nilai KN       | Adm           | KN   | Total | Nilai KN       |
| (1) | (2)               | (3)                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                      | (5)         | (6) | (7)   | (8)            | (9)           | (10) | (11)  | (12)           |
| 11  | Audit Kinerja     | R-287/PW.130/G.5/11/2024 '6 Nopember 2024     | Laporan Hasil Audit Kinerja Program Dukungan Manajemen Pada Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari TA 2024                                                                                                                                       | 12          | 1   | 13    | 780.000,00     | 12            | 1    | 13    | 780.000,00     |
| 12  | Audit Kinerja     | R-284/PW.130/G.5/11/2024 '5 NOVEMBER 2024     | Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program Dukungan Manajemen pada Satker Balai Besar Veteriner Wates D.I Yogyakarta TA2023                                                                                                                                | 12          | 2   | 14    | 41.704.850,00  | 12            | 2    | 14    | 41.704.850,00  |
| 13  | Audit Kinerja     | R-299/PW.130/G.5/11/2024 tanggal 08 Juli 2024 | Laporan Hasil Audit Kinerja Program pada Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2023                                                                                                               | 35          | 3   | 38    | 104.850.217,00 | 35            | 3    | 38    | 104.850.217,00 |
| 14  | Audit Kinerja     | R-279/PW.130/G.5/11/2024 '4 NOVEMBER 2024     | Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pada Satker Balai Besar Veteriner Wates ' Yogyakarta Tahun Anggarn 2023                                                                                     | 32          | 4   | 36    | 54.732.857,00  | 32            | 4    | 36    | 54.732.857,00  |
| 15  | Audit Kinerja     | R-324/PW.130/G.5/11/2024 ' 25 November 2024   | Laporan Hasil Audit Kinerja Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Satker Balai Inseminasi Buatan Lembang TA 2023                                                            | 18          | 10  | 28    | 125.640.262,30 | 12            | 7    | 19    | 69.998.631,30  |
| 16  | Audit Kinerja     | R-325/PW.130/G.5/11/2024 '25 November 2024    | Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Dukungan Manajemen TA 2023 pada Satker Balai Inseminasi Buatan Lembang                                                                                                                                          | 8           | 1   | 9     | 31.413.000,00  | 8             |      | 8     |                |
| 17  | Audit Kinerja     | R-361/PW.130/G.5/12/2024 '10 Desembet 2024    | Laporan Hasil Audit Kinerja program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program NilaiTambah dan Oaya Saing Industri dan program Dukungan Manajemen pada Satker Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun Angg aran 2023 | 86          | 17  | 103   | 178.025.669,72 | 68            | 2    | 70    | 97.274.207,00  |
| 18  | Audit Ketaatan    | R-49/PW.130/G.5/0312024 '13 Maret 2024        | Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Satker Balai Veteriner Medan TA 2023                                                                                                                                                                                   | 16          | 10  | 26    | 67.861.137,26  | 16            | 10   | 26    | 67.861.137,26  |
| 19  | Audit Ketaatan    | R-391/PW.130/G.5/12/2024 '23 Desembet 2024    | Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Belanja Non 526 pada Satker Ditjen PKH rA.2024                                                                                                                                                                         | 23          | 3   | 26    | 43.009.649,00  | 23            |      | 23    | 16.398.572,00  |
| 20  | Audit Ketaatan    | R-454/PW.130/G.5/12/2024 , ' 31 Desember 2024 | Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Belanja Non 526 pada Satker Ditjen PKH T4 2022                                                                                                                                                                         | 32          | 12  | 44    | 269.691.440,21 | 10            | 2    | 12    | 18.375.000,00  |
| 21  | Pengawasan (SPIP) | R-85/PW.180/G.5/04/2024 '17 April 2024        | Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pencapaian Target Perjanjian Kinerja pada Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Prociuk Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2024                                                     | 7           | 0   | 7     |                | 7             | 0    | 7     |                |
| 22  | Pengawasan (SPIP) | R-81 /PW.180/G.5/04/2024 '4 April 2024        | Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kegiatan Satker Balai Besar                                                                                                                                                                 | 4           | 0   | 4     |                | 4             | 0    | 4     |                |



| No  | Jenis Pengawasan            | No.LHP                                       | Judul LHP                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi |     |       |          | Tindak Lanjut |      |       |          |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------|---------------|------|-------|----------|
|     |                             |                                              |                                                                                                                                                                                           | Adm         | KN  | Total | Nilai KN | Adm           | KN   | Total | Nilai KN |
| (1) | (2)                         | (3)                                          | (4)                                                                                                                                                                                       | (5)         | (6) | (7)   | (8)      | (9)           | (10) | (11)  | (12)     |
|     |                             |                                              | Veteriner Farma Pusvetma, Surabaya Tahun 2024                                                                                                                                             |             |     |       |          |               |      |       |          |
| 23  | Audit Ketaatan              | R-172/PW.180/G.5/07/2024<br>10 JULI 2024     | Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko (MR) terhadap Aplikasi Sistem Informasi Rekomendasi Perizinan (SIMREK) PKH pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024                | 4           | 0   | 4     |          | 4             | 0    | 4     |          |
| 24  | Pengawasan Manajemen Risiko | R-177/PW.170/G.5/07/2024<br>18 Juli 2024     | Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko (MR) terhadap Aplikasi Sistem Informasi Pasar Online Nasional Ternak (Simponi-Ternak) pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024     | 2           | 0   | 2     |          | 2             | 0    | 2     |          |
| 25  | Pengawasan (SPIP)           | R-077/PW.180/G.5/03/2024<br>'28 Maret 2024   | Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Pada Satker Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur TA 2024 | 6           | 0   | 6     |          | 6             | 0    | 6     |          |
| 26  | Pengawasan (SPIP)           | R.166/PW.180/G.5/06/2024 '28 Juni 2024       | Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Atas Kegiatan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) Satker Balai Veteriner Lampung Provinsi Lampung Tahun 2024           | 7           | 0   | 7     |          | 7             | 0    | 7     |          |
| 27  | Pengawasan (SPIP)           | R-084/PW.180/G.5/04/2024<br>'16 April 2024   | Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Tahun 2024 pada Satker Balai Inseminasi Buatan Lembang - Jawa Barat                                                                                     | 7           | 0   | 7     |          | 7             | 0    | 7     |          |
| 28  | Pengawasan Manajemen Risiko | R-151 /PW.180/G.5/06/2024 '25 Juni 2024      | Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko (MR) Terhadap Aplikasi Sistem Layanan Customer Online BET Cipelang pada Balai Embrio Ternak Tahun 2024                                          | 4           | 0   | 4     |          | 4             | 0    | 4     |          |
| 29  | Pengawasan (SPIP)           | R-48/PW.180/ G.5/03/2024<br>'13 Maret 2024   | Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Sistem Pengendalian Intern atas Kegiatan Surat Berharga Syariah Nasional pada Satker Balai Veteriner Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024        | 7           | 0   | 7     |          | 7             | 0    | 7     |          |
| 30  | Pengawasan (SPIP)           | R-278/PW.420/G.5/11/2024<br>'4 November 2024 | Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Kegiatan Satker Balai Embrio Ternak Tahun 2024                                                                                 | 3           | 0   | 3     |          | 3             | 0    | 3     |          |
| 31  | Pengawasan (SPIP)           | R-64/PW.180/G.5/03/2024 '26 Maret 2024       | Laporan Hasil Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Balai Besar Veteriner Wates Provinsi D.I Yogyakarta                        | 4           | 0   | 4     |          | 4             | 0    | 4     |          |





| No  | Jenis Pengawasan  | No.LHP                                     | Judul LHP                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rekomendasi |     |       |          | Tindak Lanjut |      |       |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------|---------------|------|-------|----------|
|     |                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adm         | KN  | Total | Nilai KN | Adm           | KN   | Total | Nilai KN |
| (1) | (2)               | (3)                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                               | (5)         | (6) | (7)   | (8)      | (9)           | (10) | (11)  | (12)     |
| 32  | Pengawasan (SPIP) | R-323/PW.420/G.5/11/2024 '25 November 2024 | Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Kegiatan Konstruksi Melalui Sumber Dana SBSN TA 2025 pada Satker Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Provinsi Jawa Timur                                                                                                             | 4           | 0   | 4     |          | 4             | 0    | 4     |          |
| 33  | Reviu Buka Blokir | R-111/PW.110/G.5/05/2024 '17 Mei 2024      | Laporan Hasil Reviu Buka Blokir dan Pergeseran KRO/RO/Satker Tahun Anggaran 2024 pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                                                                                                          | 18          | 0   | 18    |          | 18            | 0    | 18    |          |
| 34  | Reviu RKA-KL      | R-221/PW.110/G.5/09/2024 '4 September 2024 | Laporan Hasil Reviu RKA-I(L Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA2025                                                                                                                                                                               | 1           | 0   | 1     |          | 1             | 0    | 1     |          |
| 35  | Reviu RKA-KL      | R-210 /PW.110/G.5/08/2024 '19 Agustus 2024 | Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Komponen 002 Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024                                                                                                                                  | 6           | 0   | 6     |          | 6             | 0    | 6     |          |
| 36  | Reviu RKA-KL      | R-312/PW.110/G.5/11/2024 '18 November 2024 | Laporan Hasil Reviu atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Utama Pusat Pengembangan Teknologi IB, Stasiun IB Dan Laboratorium Modern Pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun Anggaran 2025 | 7           | 0   | 7     |          | 7             | 0    | 7     |          |
| 37  | Reviu RKA-KL      | R-176/PW.110/G.5/07/2024 '18 JULI 2024     | Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2025                                                                                                                                                                             | 11          | 0   | 11    |          | 11            | 0    | 11    |          |
| 38  | Reviu RKA-KL      | R-365/PW.140/G.5/12/2024 '12 Desember 2024 | Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Triwulan III Per 30 September 2024 UAPPAIB Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian                                                                                                            | 19          | 0   | 19    |          | 19            | 0    | 19    |          |
| 39  | Reviu RKA-KL      | R-380/PW.110/G.5/12/2024 '16 Desember 2024 | Laporan Hasil Reviu atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Laboratorium Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia Pada Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2025                               | 9           | 0   | 9     |          | 9             | 0    | 9     |          |
| 40  | Reviu RKA-KL      | R.442/PW.110/G.5/12/2024 '31 Desember 2024 | LAPORAN HASIL REVIU ATAS REVISI PERUBAHAN RKA K/L LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TA 2025                                                                                                                                                              | 2           | 0   | 2     |          | 2             | 0    | 2     |          |



| No  | Jenis Pengawasan  | No.LHP                                      | Judul LHP                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi |     |       |          | Tindak Lanjut |      |       |          |
|-----|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------|---------------|------|-------|----------|
|     |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                | Adm         | KN  | Total | Nilai KN | Adm           | KN   | Total | Nilai KN |
| (1) | (2)               | (3)                                         | (4)                                                                                                                                                                                            | (5)         | (6) | (7)   | (8)      | (9)           | (10) | (11)  | (12)     |
| 41  | Reviu RKA-KL      | R. 443/PW.110/G.5/12/2024 '31/12/2024       | Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian | 38          | 0   | 38    |          | 38            | 0    | 38    |          |
| 42  | Reviu RKA-KL      | R. 357/PW.110/G.5/12/2024 '03/12/2024       | LAPORAN HASIL REVIU ATAS REVISI ANGGARAN RKA K/L LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024                                          | 10          | 0   | 10    |          | 10            | 0    | 10    |          |
| 43  | Reviu LK          | R- 38/PW.140/G.5/03/2024 1 Maret 2024       | Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan UAPPA/B-E1 Periode Semester II yang Berakhir pada 31 Desember 2023 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                | 8           | 0   | 8     |          | 8             | 0    | 8     |          |
| 44  | Reviu LK          | R- 219/PW.140/G.5/09/2024 '2 September 2024 | Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 UAPPA/B Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian                                      | 7           | 0   | 7     |          | 7             | 0    | 7     |          |
| 45  | Evaluasi SAKIP    | R-140/PW.17 0/G.5/06/2024 '7 Juni 2024      | Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                                  | 14          | 0   | 14    |          | 14            | 0    | 14    |          |
| 46  | Reviu PIPK        | R-09 /PW.140/G.5/01/2024 '2 Januari 2024    | Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2023               | 5           | 0   | 5     |          | 5             | 0    | 5     |          |
| 47  | Reviu Tunda Bayar | R-145/RC.200/G.510612024 '19 Juni 2024      | Hasil Reviu Dokumen Tunda Bayar Biaya Operasional /(BOP) Penandaan dan Pendataan Ternak Tahun 2023 pada Satker Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur                                   | 1           | 0   | 1     |          | 1             | 0    | 1     |          |
| 48  | Reviu Tunda Bayar | R-167/RC .200/G.5/06/2024 '28 Juni 2024     | Laporan Hasil Reviu Dokumen Tunda Bayar Biaya Operasional (BOP) Penandaan Dan Pendataan Ternak Tahun 2023 Pada Satker Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi          | 7           | 0   | 7     |          | 7             | 0    | 7     |          |
| 49  | Reviu Tunda Bayar | R-250/RC.200/G.5/10/2024 '10 Oktober 2024   | Laooran Hasil Reviu Dokumen Tunda Bayar Biaya Operasional (BOP) Penandaan Dan penAatain Ternak Tahun 2023 Pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan           | 1           | 0   | 1     |          | 1             | 0    | 1     |          |



| No  | Jenis Pengawasan  | No.LHP                                         | Judul LHP                                                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi                                  |           |            |                         | Tindak Lanjut |           |            |                       |
|-----|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|
|     |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                           | Adm                                          | KN        | Total      | Nilai KN                | Adm           | KN        | Total      | Nilai KN              |
| (1) | (2)               | (3)                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                       | (5)                                          | (6)       | (7)        | (8)                     | (9)           | (10)      | (11)       | (12)                  |
| 50  | Reviu Tunda Bayar | R-310/PW.110IG.5/11/2024<br>18/11/2024         | Laporan Hasil Reviu Revisi Anggaran Belanja Operasional (BOP) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2024                                                                                          | 2                                            | 0         | 2          |                         | 2             | 0         | 2          |                       |
| 51  | Reviu Tunda Bayar | R-182/RC.200/G.5/07/2024<br>'30 Juli 2024      | Laporan Hasil Reviu Tunda Bayar Bop Penandaan Ternak Ta 2023 Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah                                                                                                | 5                                            | 0         | 5          |                         | 5             | 0         | 5          |                       |
| 52  | Reviu Tunda Bayar | R-088/PW.110/G.5/04/2024<br>'17 April 2024     | Hasil Reviu Pembayaran Biaya Operasional (BOP) Penandaan Ternak TA 2023 Pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah                                                                             | 3                                            | 0         | 3          |                         | 3             | 0         | 3          |                       |
| 53  | Reviu Dokumen PBJ | R-04/PW.220/G.5/01/2024<br>22 Januari 2024     | Laporan Hasil Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaaan Agung Terkait Pengadaan Sapi Potong, Kambing/Domba Dan Ayam pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2023 | 0                                            | 1         | 1          | 24.600.000,00           | 0             | 1         | 1          | 24.600.000,00         |
| 54  | Reviu BMN         | R-245/RC.200/G.5/10/2024<br>tgl 4 Oktober 2024 | Laporan Pemantauan Pemanfaatan Aset pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                                                                                | 4                                            | 0         | 4          |                         | 4             | 0         | 4          |                       |
| 55  | Reviu BMN         | R-572/PW.130/G.511/2024<br>'13 November 2024   | Reviu atas Pembayaran Fisik Konstruksi Pembangunan Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia pada Satker Balai Veteriner Lampung TA 2024                                                        | 3                                            | 0         | 3          |                         | 3             | 0         | 3          |                       |
| 56  | Evaluasi Kinerja  | R-421/PW.170/G.5/12/2024<br>'30 Desember 2024  | Laporan Hasil Evaluasi Produktivitas Ternak Di BBPTU/BPTU-HPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020 -2024                                                                   | 88                                           | 0         | 88         |                         | 85            | 0         | 85         |                       |
|     |                   |                                                | <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>823</b>                                   | <b>88</b> | <b>911</b> | <b>1.321.855.886,97</b> | <b>774</b>    | <b>54</b> | <b>828</b> | <b>732.098.574,04</b> |
|     |                   |                                                | <b>Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH</b>                                                                                                       | $= \frac{828}{911} \times 100\%$ $= 90,89\%$ |           |            |                         |               |           |            |                       |



| No | Jenis Pengawasan | Jumlah Rekomendasi | Status Tindakanjut Rekomendasi |    |    |     | Persentase (%) |
|----|------------------|--------------------|--------------------------------|----|----|-----|----------------|
|    |                  |                    | S                              | BS | BD | TDD |                |
|    | Inspektorat IV   |                    |                                |    |    |     |                |
| 1  | PMK 526          | 23                 | 22                             |    | 1  |     | 95,65          |
| 2  | Daftar Hitam     | 8                  | 8                              |    |    |     | 100            |
| 3  | Audit Kinerja    | 935                | 883                            |    | 52 |     | 94,44          |
|    | Investigasi      |                    |                                |    |    |     |                |
| 4  |                  | 9                  | 5                              |    | 4  |     | 55,55          |
|    | Jumlah           | 975                | 918                            |    | 57 |     | 94,15          |

Keterangan:

S : Sesuai dengan rekomendasi

BS : Belum sesuai dengan rekomendasi

BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti

TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

b) Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH.

| Jenis LHP                | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uraian Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Rekomendasi |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>LHP LK Tahun 2025</b> | BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan:<br>c. Masing-masing KPA untuk menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp3.424.889.724,73 dengan rincian kelebihan pembayaran pada:<br>1) BPPSDMP sebesar Rp1.013.077.952,60;<br>2) BSIP/BRMP sebesar Rp38.548.255,00;<br>3) Ditjen PSP sebesar Rp323.947.346,00;<br>4) Ditjen TP sebesar Rp387.270.368,00;<br>5) Ditjen Hortikultura sebesar Rp52.017.472,00;<br>6) Setjen sebesar Rp1.578.536.126,13;<br>7) Ditjen Bun sebesar Rp7.780.827,00; dan<br>8) Ditjen PKH sebesar Rp23.711.378,00. | Ditjen PKH (07 Januari 2026): Surat Memorandum Dirjen PKH nomor 31339/TU.020/F/10/2025 kepada Sekretaris Ditjen PKH dan Direktur lingkup Ditjen PKH tanggal 31 Oktober 2025 dan Surat Memorandum Dirjen PKH nomor 31340/TU.020/F/10/2025 kepada PPSPM, PPK lingkup Ditjen PKH, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 31 Oktober 2025; telah disetor sebesar Rp9.862.878,00 dengan NTPN 13E427QLV2DBT2M7 tanggal 15 Mei 2025 dan NTPN CF45461QVDTLT78K senilai Rp13.848.500,00 tanggal 24 Desember 2025 | 1                  |



| Jenis LHP | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uraian Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Rekomendasi |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan:</p> <p>a. Sekjen, Kepala BPPSDMP, Dirjen PSP, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), Dirjen Bun, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kepala BSIP/BRMP selaku KPA agar:</p> <p>1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi Belanja Barang Selain MAK 526 yang belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku;</p> <p>2) Dalam melaksanakan rapat pertemuan di luar kantor, berpedoman pada Standar Biaya Masukan (melibatkan Kementerian/Lembaga lain); dan</p> <p>3) Menginstruksikan PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penanda tangan SPM terkait selaku pengelola keuangan satker terkait dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban, menilai kesesuaian, dan kewajaran pertanggungjawaban dan perhitungan rampung belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak menerapkan metode pembayaran belanja yang mendukung terwujudnya akuntabilitas yang transparan;</p> | <p>Ditjen PKH (7 Januari 2026) : Surat Perintah Menteri Nomor 353/PW.220/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025; Surat Dirjen PKH nomor 31341/PW.220/F/10/2025 kepada Kepala BBPMSOH tanggal 31 Oktober 2025 hal instruksi; dan Surat Memorandum Dirjen PKH nomor 31339/TU.020/F/10/2025 kepada Sekretaris Ditjen PKH dan Direktur lingkup Ditjen PKH tanggal 31 Oktober 2025 dan Surat Memorandum Dirjen PKH nomor 31340/TU.020/F/10/2025 kepada PPSPM, PPK lingkup Ditjen PKH, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 31 Oktober 2025.</p> | 1                  |
|           | <p>BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan:</p> <p>b. Dirjen PKH untuk:</p> <p>1) Mengusulkan kepada Sekjen supaya memutakhirkan Kebijakan Akuntansi Persediaan dan menyusun Pedoman Pengelolaan Persediaan yang mengatur terkait cut off kepemilikan persediaan, pengukuran nilai persediaan, tata cara pelaksanaan stock opname, dan mekanisme pelaporan barang persediaan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota;</p> <p>2) Lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan dan pengadaan persediaan serta pengamanan persediaan; dan</p> <p>3) Mengarahkan Penanggung jawab kegiatan, serta Pengelola Persediaan terkait untuk lebih cermat dalam melakukan pengamanan dan pemanfaatan persediaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Ditjen PKH (7 Januari 2026): Surat Perintah Menteri nomor 353/PW.220/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025; Surat Memorandum Dirjen PKH nomor 31347/PW.220/F/10/2025 kepada Sekretaris Ditjen PKH; Direktur Keswan; Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak hal instruksi tanggal 31 Oktober 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  |
|           | <p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan:</p> <p>a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menginstruksikan Kepala BPTUSP Padang Mangatas, BPMSP Bekasi, dan BVet Medan supaya memerintahkan PPK Kegiatan yang bersangkutan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada empat pelaksana dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp2.158.960.753,51;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Ditjen PKH (7 Januari 2026): BBIB Singosari telah menyetor senilai Rp 111.168.218,00. (Bukti setor terlampir).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Ditjen PKH (7 Januari 2026) : Surat Dirjen PKH nomor 31345/TU.020/F/10/2025 kepada Kepala BPTU HPT Padang Mengatas hal tindak lanjut; Surat Dirjen PKH nomor 31344/TU.020/F/10/2025 kepada Kepala BPMSP Bekasi hal tindak lanjut; Surat Dirjen PKH nomor 31346/TU.020/F/10/2025 kepada Kepala BVet Medan hal tindak lanjut;</p>                                                                                                                                                                                                                                 |                    |



| Jenis LHP | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uraian Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Rekomendasi |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bukti setor BVet Banjar Baru senilai Rp240.700.961,00 dengan NTPN C04226U8F7NQ74AR; Bukti setor BVet Medan senilai Rp312.648.794 NTPN 177FF55DFIPHKLRM; Bukti setor BPMSP Bekasi senilai Rp50.000.000,- NTPN B77A67QLV2D458H5; Bukti setor BPTU HPT Padang Mengatas NTPN 1D43D0NA0DNJ012T tanggal 28 April 2025 sebesar Rp 9.630.960,-                                                |                    |
|           | BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan:<br>b. Dirjen PKH untuk menginstruksikan Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pelaporan Ditjen PKH serta Satker Terkait supaya menyusun kertas kerja identifikasi seluruh transaksi pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi. | Ditjen PKH (7 Januari 2026): Surat Perintah Menteri nomor 353/PW.220/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025; Surat Memorandum Dirjen PKH nomor 31342/TU.020/F/10/2025 kepada Sekretaris Ditjen PKH dan Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi Kelompok Keuangan dan BMN tanggal 31 Oktober 2025; Surat Dirjen PKH nomor 31343/TU.020/F/10/2025 kepada Kepala BET Cipelang tanggal 31 Oktober 2025 | 1                  |

Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH =  $\frac{5}{5} \times 100\%$   
= 100%

c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode ES1 | Nama ES1                              | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|----------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|
|    |          |                                       |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |                                          |
| 1  | 01806    | DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | Nilai       | 99.66                         | 82.90                    | 85.51                         | 90.53               | 99.86                | 97.18                  | 97.30                               | 92.58       | 100%           | 0.75                       | 91.83                                    |
|    |          |                                       | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 10                  | 10                   | 10                     | 25                                  |             |                |                            |                                          |
|    |          |                                       | Nilai Akhir | 9.97                          | 12.44                    | 17.10                         | 9.05                | 9.99                 | 9.72                   | 24.32                               |             |                |                            |                                          |
|    |          |                                       | Nilai Aspek | 91.28                         |                          | 93.27                         |                     |                      |                        | 97.30                               |             |                |                            |                                          |





## d) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Ditjen PKH

| NO                | NAMA OPP                        | NILAI IKM    | SKALA LIKERT | MUTU     |
|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1                 | Layanan Perizinan Setditjen PKH | 87,48        | 3,50         | B        |
| 2                 | BBVF Pusvetma Surabaya          | 92,85        | 3,71         | A        |
| 3                 | BBPMSOH Bogor                   | 94,01        | 3,76         | A        |
| 4                 | BBV Wates                       | 95,97        | 3,84         | A        |
| 5                 | BBV Maros                       | 95,03        | 3,80         | A        |
| 6                 | BBV Denpasar                    | 93,80        | 3,75         | A        |
| 7                 | BBIB Singosari                  | 92,91        | 3,72         | A        |
| 8                 | BBPTU-HPT Baturraden            | 91,66        | 3,67         | A        |
| 9                 | BIB Lembang                     | 93,96        | 3,76         | A        |
| 10                | BET Cipelang                    | 94,30        | 3,77         | A        |
| 11                | BPMSPH Bogor                    | 92,60        | 3,70         | A        |
| 12                | BPMSB Bekasi                    | 94,68        | 3,79         | A        |
| 13                | BV Medan                        | 95,00        | 3,80         | A        |
| 14                | BV Bukittinggi                  | 94,06        | 3,76         | A        |
| 15                | BV Lampung                      | 91,01        | 3,64         | A        |
| 16                | BV Banjarbaru                   | 92,25        | 3,69         | A        |
| 17                | BV Subang                       | 93,97        | 3,76         | A        |
| 18                | BV Jayapura                     | 92,93        | 3,72         | A        |
| 19                | BPTU-HPT Indrapuri              | 93,64        | 3,75         | A        |
| 20                | BPTU-HPT Padang Mengatas        | 93,01        | 3,72         | A        |
| 21                | BPTU-HPT Siborongborong         | 93,43        | 3,74         | A        |
| 22                | BPTU-HPT Sembawa                | 93,12        | 3,72         | A        |
| 23                | BPTU-HPT Pelaihari              | 92,75        | 3,71         | A        |
| 24                | BPTU-HPT Denpasar               | 91,24        | 3,65         | A        |
| <b>DITJEN PKH</b> |                                 | <b>93,20</b> | <b>3,73</b>  | <b>A</b> |

## e) Tingkat Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen PKH

| Indeks Dimensi                 | Skala 1-4                                                                                          | Keterangan         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ID Tangibles                   | 3,23                                                                                               | Puas               |
| ID Reliability                 | 3,30                                                                                               | Sangat Puas        |
| ID Responsive                  | 3,28                                                                                               | Sangat Puas        |
| ID Emphaty                     | 3,30                                                                                               | Sangat Puas        |
| ID Assurance                   | 3,29                                                                                               | Sangat Puas        |
| <b>Indeks Akhir Unit Kerja</b> | <b><math display="block">= \frac{3,23 + 3,30 + 3,28 + 3,30 + 3,29}{5}</math><br/><b>= 3,28</b></b> | <b>Sangat Puas</b> |



Tabel Hasil Survei Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Peternakan Terhadap Layanan Sekretariat Ditjen PKH Pada Masing-Masing Kelompok dan Tim Kerja Lingkup Sekretariat Ditjen PKH

| No | Unit Kerja                                                       | Skala Likert |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | <b>Bagian Umum</b>                                               | <b>3.32</b>  |
|    | Tim Kerja Sumber Daya Manusia                                    | 3.31         |
|    | Tim Kerja Organisasi                                             | 3.32         |
|    | Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga                            | 3.33         |
| 2. | <b>Kelompok Perencanaan</b>                                      | <b>3.30</b>  |
|    | Tim Kerja Anggaran                                               | 3.29         |
|    | Tim Kerja Program                                                | 3.30         |
|    | Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama                                  | 3.32         |
| 3. | <b>Kelompok Keungan dan BMN</b>                                  | <b>3.25</b>  |
|    | Tim Kerja Perbendaharaan                                         | 3.26         |
|    | Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi                               | 3.26         |
|    | Tim Kerja Barang Milik Negara                                    | 3.23         |
| 4. | <b>Kelompok Data, Evaluasi, TLHP dan Pengendalian Intern</b>     | <b>3.30</b>  |
|    | Tim Kerja Data dan Informasi                                     | 3.30         |
|    | Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan                                 | 3.30         |
|    | Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian Intern | 3.29         |
| 5. | <b>Kelompok Hukum dan Layanan Perizinan</b>                      | <b>3.34</b>  |
|    | Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan                           | 3.34         |
|    | Tim Kerja Perjanjian dan Bantuan Hukum                           | 3.34         |
|    | Tim Kerja Layanan Perizinan                                      | 3.34         |
| 6. | <b>Kelompok Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat</b>              | <b>3.32</b>  |



| No | Unit Kerja                                         | Skala Likert |
|----|----------------------------------------------------|--------------|
|    | Tim Kerja Pemberitaan                              | 3.32         |
|    | Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik | 3.33         |



## Lampiran 12 Perhitungan Analisis Efisiensi Sumber Daya Ditjen PKH T.A. 2025

a. *Penggunaan SBK*

| No. | Satker                                                                      | RO                                                                                                         | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                             | Indeks<br>SBK | Realisasi     | RVRO     | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                          | 4            | 5                                                                                      | 6             | 7             | 8        | 9=7/8                           | 10                              |
| 1   | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (kegiatan)       | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                              | 240.000.000   | 2.276.144.577 | 4        | 569.036.144                     | Tidak                           |
| 2   | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 5891.AFA.001 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (NSPK) | SBKK         | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | 100.000.000   | 299.835.726   | 3        | 99.945.242                      | Ya                              |
| 3   | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)   | SBKK         | Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor      | 305.000.000   | 1.892.310.137 | 275      | 6.881.127                       | Ya                              |
| 4   | 239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT    | 5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)   | SBKK         | Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor      | 305.000.000   | 10.150.000    | 1        | 10.150.000                      | Ya                              |
| 5   | 249161 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR                           | 5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)   | SBKK         | Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor      | 305.000.000   | 10.200.000    | 1        | 10.200.000                      | Ya                              |
| 6   | 319091 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO                                   | 5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)   | SBKK         | Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor      | 305.000.000   | 10.240.000    | 1        | 10.240.000                      | Ya                              |
| 7   | 220064 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI                             | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                                                  | SBKK         | Bibit Ternak Unggul                                                                    | 5.340.407     | 1.647.721.529 | 350      | 4.707.775                       | Ya                              |
| 8   | 237856 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                                             | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                                               | 606.482       | 730.774.138   | 2.495,00 | 292.895                         | Ya                              |
| 9   | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (kegiatan)                                           | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                              | 240.000.000   | 1.118.297.439 | 5        | 223.659.487                     | Ya                              |
| 10  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1783.AFA.001 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pakan (NSPK)                                            | SBKK         | Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan                                             | 100.000.000   | 175.341.433   | 4        | 43.835.358                      | Ya                              |



| No. | Satker                                                                          | RO                                                                                        | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                          | Indeks<br>SBK | Realisasi      | RVRO         | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                               | 3                                                                                         | 4            | 5                                                                   | 6             | 7              | 8            | 9=7/8                           | 10                              |
| 11  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                       | 1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan (kegiatan)                | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                           | 240.000.000   | 4.476.252.462  | 6            | 746.042.077                     | Tidak                           |
| 12  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                       | 1784.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan (NSPK)                | SBKK         | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan              | 100.000.000   | 265.998.045    | 3            | 88.666.015                      | Ya                              |
| 13  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                       | 1785.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak (kegiatan) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                           | 240.000.000   | 1.849.143.693  | 6            | 308.190.615                     | Tidak                           |
| 14  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                       | 1785.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak (NSPK) | SBKK         | Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak | 100.000.000   | 334.457.717    | 5            | 66.891.543                      | Ya                              |
| 15  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                       | 1786.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner (NSPK) | SBKK         | Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner | 100.000.000   | 469.044.878    | 5            | 93.808.975                      | Ya                              |
| 16  | 238823 BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                                 | SBKK         | Bibit Ternak Unggul                                                 | 5.340.407     | 9.530.024.432  | 1.980,00     | 4.813.143                       | Ya                              |
| 17  | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                                             | 1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul (produk)                                                 | SBKK         | Benih Ternak Unggul                                                 | 7.178.929     | 5.735.653.904  | 805          | 7.125.035                       | Ya                              |
| 18  | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                                             | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                                 | SBKK         | Bibit Ternak Unggul                                                 | 5.340.407     | 272.229.329    | 82           | 3.319.869                       | Ya                              |
| 19  | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBAUNG                                         | 1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul (produk)                                                 | SBKK         | Benih Ternak Unggul                                                 | 7.178.929     | 10.671.844.152 | 2.762.695,00 | 3.862                           | Ya                              |
| 20  | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN                            | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                            | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                            | 606.482       | 837.743.310    | 2.475,00     | 338.482                         | Ya                              |
| 21  | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                           | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                            | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                            | 606.482       | 1.056.047.231  | 4.120,00     | 256.322                         | Ya                              |
| 22  | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                       | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                                 | SBKK         | Bibit Ternak Unggul                                                 | 5.340.407     | 1.353.705.078  | 369          | 3.668.577                       | Ya                              |
| 23  | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong   | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                                 | SBKK         | Bibit Ternak Unggul                                                 | 5.340.407     | 1.016.843.717  | 352          | 2.888.760                       | Ya                              |
| 24  | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS               | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                                 | SBKK         | Bibit Ternak Unggul                                                 | 5.340.407     | 2.375.091.126  | 490          | 4.847.124                       | Ya                              |



| No. | Satker                                                                   | RO                                                                                 | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                            | Indeks<br>SBK | Realisasi      | RVRO         | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                                  | 4            | 5                                                                     | 6             | 7              | 8            | 9=7/8                           | 10                              |
| 25  | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA   | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                          | SBKK         | Bibit Ternak Unggul                                                   | 5.340.407     | 7.332.441.577  | 465.278,00   | 15.759                          | Ya                              |
| 26  | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                          | SBKK         | Bibit Ternak Unggul                                                   | 5.340.407     | 4.941.335.775  | 633.471,00   | 7.800                           | Ya                              |
| 27  | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                     | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                              | 606.482       | 695.898.395    | 2.505,00     | 277.803                         | Ya                              |
| 28  | 239520 BALAI VETERINER SUBANG                                            | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                     | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                              | 606.482       | 751.650.754    | 1.850,00     | 406.297                         | Ya                              |
| 29  | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI  | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                     | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                              | 606.482       | 848.316.681    | 3.340,00     | 253.987                         | Ya                              |
| 30  | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                            | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                     | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                              | 606.482       | 1.323.889.062  | 7.140,00     | 185.418                         | Ya                              |
| 31  | 239551 BALAI VETERINER BANJARBARU                                        | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                     | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                              | 606.482       | 779.646.299    | 1.740,00     | 448.072                         | Ya                              |
| 32  | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                           | 1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul (produk)                                          | SBKK         | Benih Ternak Unggul                                                   | 7.178.929     | 23.856.351.797 | 3.500.000,00 | 6.816                           | Ya                              |
| 33  | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN             | 1784.QJA.001 Hasil Uji Mutu Obat Hewan (Produk)                                    | SBKK         | Hasil Uji Mutu Obat Hewan                                             | 3.354.310     | 7.618.423.510  | 3.185,00     | 2.391.969                       | Ya                              |
| 34  | 567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR           | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                     | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                              | 606.482       | 6.147.216.493  | 11.750,00    | 523.167                         | Ya                              |
| 35  | 567282 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN                        | 1783.QJA.001 Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan (Produk)                            | SBKK         | Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan                                     | 1.569.718     | 5.387.075.480  | 3.887,00     | 1.385.921                       | Ya                              |
| 36  | 618061 LOKA VETERINER JAYAPURA                                           | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                     | SBKK         | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan                              | 606.482       | 280.819.256    | 500          | 561.638                         | Ya                              |
| 37  | 019057 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA                 | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                                                 | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 0              | 3            | 0                               | Tidak                           |
| 38  | 019057 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA                 | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 39.240.000     | 3            | 13.080.000                      | Ya                              |
| 39  | 029162 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT         | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                                                 | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 2.905.000      | 3            | 968.333                         | Ya                              |





| No. | Satker                                                              | RO                                                | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                            | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                                                 | 4            | 5                                                                     | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 40  | 029162 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT    | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 59.258.000 | 12   | 4.938.166                       | Ya                              |
| 41  | 039154 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH    | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 3.030.500  | 4    | 757.625                         | Ya                              |
| 42  | 039154 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH    | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 62.056.213 | 12   | 5.171.351                       | Ya                              |
| 43  | 049090 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY                     | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 5.704.000  | 4    | 1.426.000                       | Ya                              |
| 44  | 049090 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY                     | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 67.319.032 | 12   | 5.609.919                       | Ya                              |
| 45  | 059181 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR                         | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 530.000    | 4    | 132.500                         | Ya                              |
| 46  | 059181 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR                         | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 84.938.500 | 12   | 7.078.208                       | Ya                              |
| 47  | 069135 DINAS PETERNAKAN ACEH                                        | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 9.075.000  | 4    | 2.268.750                       | Ya                              |
| 48  | 069135 DINAS PETERNAKAN ACEH                                        | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 61.444.000 | 12   | 5.120.333                       | Ya                              |
| 49  | 079127 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara      | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 6.312.000  | 4    | 1.578.000                       | Ya                              |
| 50  | 079127 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara      | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 48.261.000 | 12   | 4.021.750                       | Ya                              |
| 51  | 089133 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 12.736.000 | 4    | 3.184.000                       | Ya                              |
| 52  | 089133 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 64.827.500 | 12   | 5.402.291                       | Ya                              |
| 53  | 099317 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU           | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                           | 480.000.000   | 2.566.000  | 4    | 641.500                         | Ya                              |
| 54  | 099317 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN                               | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen                    | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker                               | 508.000.000   | 52.017.000 | 12   | 4.334.750                       | Ya                              |



| No. | Satker                                                                                                      | RO                                                            | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                               | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                           | 3                                                             | 4            | 5                                                                                        | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
|     | HEWAN<br>PROVINSI RIAU                                                                                      | Kuangan<br>(Dokumen)                                          |              | Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                                     |               |            |      |                                 |                                 |
| 55  | 109121 DINAS<br>TANAMAN<br>PANGAN,<br>HORTIKULTURA<br>DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI JAMBI                   | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 5.622.000  | 4    | 1.405.500                       | Ya                              |
| 56  | 109121 DINAS<br>TANAMAN<br>PANGAN,<br>HORTIKULTURA<br>DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI JAMBI                   | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 43.152.800 | 12   | 3.596.066                       | Ya                              |
| 57  | 119133 DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>SELATAN                    | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 5.007.000  | 4    | 1.251.750                       | Ya                              |
| 58  | 119133 DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>SELATAN                    | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 45.332.000 | 12   | 3.777.666                       | Ya                              |
| 59  | 129115 DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN<br>PROVINSI<br>LAMPUNG                                 | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 5.773.900  | 4    | 1.443.475                       | Ya                              |
| 60  | 129115 DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN<br>PROVINSI<br>LAMPUNG                                 | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 62.736.000 | 12   | 5.228.000                       | Ya                              |
| 61  | 139128 DINAS<br>PERKEBUNAN<br>DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>BARAT                          | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 5.213.000  | 4    | 1.303.250                       | Ya                              |
| 62  | 139128 DINAS<br>PERKEBUNAN<br>DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>BARAT                          | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 68.479.000 | 12   | 5.706.583                       | Ya                              |
| 63  | 149117 DINAS<br>TANAMAN<br>PANGAN,<br>HORTIKULTURA<br>DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>TENGAH | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 922.000    | 4    | 230.500                         | Ya                              |
| 64  | 149117 DINAS<br>TANAMAN<br>PANGAN,<br>HORTIKULTURA<br>DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>TENGAH | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 59.578.000 | 12   | 4.964.833                       | Ya                              |
| 65  | 159110 DINAS<br>PERKEBUNAN<br>DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>SELATAN                        | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 1.858.800  | 4    | 464.700                         | Ya                              |
| 66  | 159110 DINAS<br>PERKEBUNAN<br>DAN<br>PETERNAKAN<br>PROVINSI                                                 | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat              | 508.000.000   | 17.394.000 | 12   | 1.449.500                       | Ya                              |



| No. | Satker                                                                | RO                                                | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                             | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                                                 | 4            | 5                                                                      | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
|     | KALIMANTAN SELATAN                                                    |                                                   |              | Setingkat [Dokumen]                                                    |               |            |      |                                 |                                 |
| 67  | 169115 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALTIM              | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 866.000    | 4    | 216.500                         | Ya                              |
| 68  | 169115 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALTIM              | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 72.407.500 | 12   | 6.033.958                       | Ya                              |
| 69  | 179106 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA         | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 6.894.000  | 4    | 1.723.500                       | Ya                              |
| 70  | 179106 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA         | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 55.688.200 | 12   | 4.640.683                       | Ya                              |
| 71  | 189134 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH       | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 8.038.000  | 4    | 2.009.500                       | Ya                              |
| 72  | 189134 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 59.213.000 | 12   | 4.934.416                       | Ya                              |
| 73  | 199128 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 2.320.000  | 4    | 580.000                         | Ya                              |
| 74  | 199128 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 54.350.000 | 12   | 4.529.166                       | Ya                              |
| 75  | 209110 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 2.230.000  | 4    | 557.500                         | Ya                              |
| 76  | 209110 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 67.377.850 | 12   | 5.614.820                       | Ya                              |
| 77  | 219093 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU                                | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 950.000    | 4    | 237.500                         | Ya                              |
| 78  | 219093 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU                                | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 72.529.000 | 12   | 6.044.083                       | Ya                              |
| 79  | 220064 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI                       | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 4.016.000  | 4    | 1.004.000                       | Ya                              |



| No. | Satker                                                                                        | RO                                                                 | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                                           | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                             | 3                                                                  | 4            | 5                                                                                                                                    | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 80  | 220064 BALAI<br>PEMBIBITAN<br>TERNAK UNGGUL<br>SAPI BALI                                      | 1787.EBC.954<br>Layanan<br>Manajemen<br>SDM (Layanan)              | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>SDM untuk<br>K/L dengan<br>satker<br>vertikal/Unit<br>Pelaksana<br>Teknis (UPT)<br>Kategori<br>Besar [Orang] | 5.700.000     | 7.540.000  | 52   | 145.000                         | Ya                              |
| 81  | 220064 BALAI<br>PEMBIBITAN<br>TERNAK UNGGUL<br>SAPI BALI                                      | 1787.EBD.953<br>Layanan<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen] | SBKU         | Dokumen<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen]                                                                                   | 240.000.000   | 6.080.500  | 1    | 6.080.500                       | Ya                              |
| 82  | 220064 BALAI<br>PEMBIBITAN<br>TERNAK UNGGUL<br>SAPI BALI                                      | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)      | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                             | 508.000.000   | 10.746.717 | 12   | 895.559                         | Ya                              |
| 83  | 229102 DINAS<br>PERTANIAN DAN<br>KETAHANAN<br>PANGAN<br>PROVINSI BALI                         | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                           | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                                                                 | 480.000.000   | 1.849.205  | 4    | 462.301                         | Ya                              |
| 84  | 229102 DINAS<br>PERTANIAN DAN<br>KETAHANAN<br>PANGAN<br>PROVINSI BALI                         | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)      | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                             | 508.000.000   | 64.712.672 | 12   | 5.392.722                       | Ya                              |
| 85  | 237551 Pusat<br>Veteriner Farma<br>Surabaya                                                   | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                           | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                                                                 | 480.000.000   | 5.064.900  | 4    | 1.266.225                       | Ya                              |
| 86  | 237551 Pusat<br>Veteriner Farma<br>Surabaya                                                   | 1787.EBC.954<br>Layanan<br>Manajemen<br>SDM (Layanan)              | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>SDM untuk<br>K/L dengan<br>satker<br>vertikal/Unit<br>Pelaksana<br>Teknis (UPT)<br>Kategori<br>Besar [Orang] | 5.700.000     | 8.525.300  | 92   | 92.666                          | Ya                              |
| 87  | 237551 Pusat<br>Veteriner Farma<br>Surabaya                                                   | 1787.EBD.953<br>Layanan<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen] | SBKU         | Dokumen<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen]                                                                                   | 240.000.000   | 500.000    | 1    | 500.000                         | Ya                              |
| 88  | 237551 Pusat<br>Veteriner Farma<br>Surabaya                                                   | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)      | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon II/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                             | 508.000.000   | 10.555.666 | 12   | 879.638                         | Ya                              |
| 89  | 237856 BALAI<br>PENYIDIKAN DAN<br>PENGUJIAN<br>VETERINER<br>REGIONAL III<br>BANDAR<br>LAMPUNG | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                           | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                                                                 | 480.000.000   | 4.495.981  | 4    | 1.123.995                       | Ya                              |
| 90  | 237856 BALAI<br>PENYIDIKAN DAN<br>PENGUJIAN<br>VETERINER<br>REGIONAL III<br>BANDAR<br>LAMPUNG | 1787.EBC.954<br>Layanan<br>Manajemen<br>SDM (Layanan)              | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>SDM untuk<br>K/L dengan<br>satker<br>vertikal/Unit<br>Pelaksana<br>Teknis (UPT)<br>Kategori<br>Besar [Orang] | 5.700.000     | 5.626.120  | 57   | 98.703                          | Ya                              |
| 91  | 237856 BALAI<br>PENYIDIKAN DAN<br>PENGUJIAN<br>VETERINER<br>REGIONAL III<br>BANDAR<br>LAMPUNG | 1787.EBD.953<br>Layanan<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>(Dokumen) | SBKU         | Dokumen<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen]                                                                                   | 240.000.000   | 3.121.600  | 1    | 3.121.600                       | Ya                              |



| No. | Satker                                                                                            | RO                                                                              | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                                           | Indeks<br>SBK | Realisasi     | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                 | 3                                                                               | 4            | 5                                                                                                                                    | 6             | 7             | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 92  | 237856 BALAI<br>PENYIDIKAN DAN<br>PENGUJIAN<br>VETERINER<br>REGIONAL III<br>BANDAR<br>LAMPUNG     | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)                   | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                              | 508.000.000   | 9.049.251     | 12   | 754.104                         | Ya                              |
| 93  | 238776<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN                          | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                                        | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                                                                 | 480.000.000   | 5.145.900     | 1    | 5.145.900                       | Ya                              |
| 94  | 238776<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN                          | 1787.EBA.958<br>Layanan<br>Hubungan<br>Masyarakat dan<br>Informasi<br>(Layanan) | SBKU         | Layanan<br>Hubungan<br>Masyarakat<br>dan Informasi<br>[Layanan]                                                                      | 458.000.000   | 87.505.753    | 1    | 87.505.753                      | Ya                              |
| 95  | 238776<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN                          | 1787.EBA.969<br>Layanan<br>Bantuan<br>Hukum<br>(Layanan)                        | SBKU         | Layanan<br>Bantuan<br>Hukum                                                                                                          | 27.500.000    | 148.517.181   | 6    | 24.752.863                      | Ya                              |
| 96  | 238776<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN                          | 1787.EBC.954<br>Layanan<br>Manajemen<br>SDM (Layanan)                           | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>SDM untuk<br>K/L dengan<br>satker<br>vertikal/Unit<br>Pelaksana<br>Teknis (UPT)<br>Kategori<br>Besar [Orang] | 5.700.000     | 795.862.776   | 379  | 2.099.901                       | Ya                              |
| 97  | 238776<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN                          | 1787.EBD.952<br>Layanan<br>Perencanaan<br>dan<br>Penganggaran<br>(Dokumen)      | SBKU         | Layanan<br>Perencanaan<br>dan<br>Penganggaran<br>untuk Unit<br>Eselon I<br>dengan jumlah<br>satker diatas<br>40 Satker<br>[Dokumen]  | 810.400.000   | 3.201.670.846 | 13   | 246.282.372                     | Ya                              |
| 98  | 238776<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN                          | 1787.EBD.953<br>Layanan<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>(Dokumen)              | SBKU         | Dokumen<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen]                                                                                   | 240.000.000   | 796.506.622   | 7    | 113.786.660                     | Ya                              |
| 99  | 238776<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN                          | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)                   | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                              | 508.000.000   | 707.537.133   | 6    | 117.922.855                     | Ya                              |
| 100 | 238823 BALAI<br>BESAR<br>PEMBIBITAN<br>TERNAK UNGGUL<br>DAN HIJAUAN<br>PAKAN TERNAK<br>BATURRADEN | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                                        | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                                                                 | 480.000.000   | 5.086.100     | 4    | 1.271.525                       | Ya                              |
| 101 | 238823 BALAI<br>BESAR<br>PEMBIBITAN<br>TERNAK UNGGUL<br>DAN HIJAUAN<br>PAKAN TERNAK<br>BATURRADEN | 1787.EBC.954<br>Layanan<br>Manajemen<br>SDM (Layanan)                           | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>SDM untuk<br>K/L dengan<br>satker<br>vertikal/Unit<br>Pelaksana<br>Teknis (UPT)<br>Kategori<br>Besar [Orang] | 5.700.000     | 8.030.000     | 107  | 75.046                          | Ya                              |
| 102 | 238823 BALAI<br>BESAR<br>PEMBIBITAN<br>TERNAK UNGGUL<br>DAN HIJAUAN<br>PAKAN TERNAK<br>BATURRADEN | 1787.EBD.953<br>Layanan<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>(Dokumen)              | SBKU         | Dokumen<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen]                                                                                   | 240.000.000   | 5.614.000     | 1    | 5.614.000                       | Ya                              |
| 103 | 238823 BALAI<br>BESAR<br>PEMBIBITAN<br>TERNAK UNGGUL<br>DAN HIJAUAN<br>PAKAN TERNAK<br>BATURRADEN | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)                   | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                              | 508.000.000   | 7.982.100     | 12   | 665.175                         | Ya                              |



| No. | Satker                                               | RO                                                     | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                    | 3                                                      | 4            | 5                                                                                                         | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 104 | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                  | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 3.387.500  | 4    | 846.875                         | Ya                              |
| 105 | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                  | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 6.098.000  | 56   | 108.892                         | Ya                              |
| 106 | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                  | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 3.639.000  | 1    | 3.639.000                       | Ya                              |
| 107 | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                  | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen]                                    | 508.000.000   | 6.180.500  | 12   | 515.041                         | Ya                              |
| 108 | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG               | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 2.956.500  | 4    | 739.125                         | Ya                              |
| 109 | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG               | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 4.242.000  | 67   | 63.313                          | Ya                              |
| 110 | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG               | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 4.817.000  | 1    | 4.817.000                       | Ya                              |
| 111 | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG               | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen]                                    | 508.000.000   | 5.247.476  | 12   | 437.289                         | Ya                              |
| 112 | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 4.104.708  | 4    | 1.026.177                       | Ya                              |
| 113 | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 9.410.062  | 75   | 125.467                         | Ya                              |
| 114 | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 500.000    | 1    | 500.000                         | Ya                              |
| 115 | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen]                                    | 508.000.000   | 10.757.000 | 12   | 896.416                         | Ya                              |
| 116 | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 891.400    | 4    | 222.850                         | Ya                              |



| No. | Satker                                                                        | RO                                                     | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                             | 3                                                      | 4            | 5                                                                                                         | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 117 | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                         | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 10.813.100 | 51   | 212.021                         | Ya                              |
| 118 | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                         | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 10.666.500 | 1    | 10.666.500                      | Ya                              |
| 119 | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                         | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 15.616.576 | 12   | 1.301.381                       | Ya                              |
| 120 | 239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT      | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II/ Setingkat                                                             | 480.000.000   | 1.945.000  | 4    | 486.250                         | Ya                              |
| 121 | 239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT      | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 66.295.800 | 12   | 5.524.650                       | Ya                              |
| 122 | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                     | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II/ Setingkat                                                             | 480.000.000   | 9.003.800  | 4    | 2.250.950                       | Ya                              |
| 123 | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                     | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 9.235.600  | 53   | 174.256                         | Ya                              |
| 124 | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                     | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 7.284.701  | 1    | 7.284.701                       | Ya                              |
| 125 | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                     | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 10.639.308 | 12   | 886.609                         | Ya                              |
| 126 | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II/ Setingkat                                                             | 480.000.000   | 8.391.298  | 4    | 2.097.824                       | Ya                              |
| 127 | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 9.778.350  | 68   | 143.799                         | Ya                              |
| 128 | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 7.085.000  | 1    | 7.085.000                       | Ya                              |





| No. | Satker                                                                        | RO                                                     | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                             | 3                                                      | 4            | 5                                                                                                         | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 129 | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]                                     | 508.000.000   | 11.508.700 | 12   | 959.058                         | Ya                              |
| 130 | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS             | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/ Setingkat                                                              | 480.000.000   | 4.830.000  | 4    | 1.207.500                       | Ya                              |
| 131 | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS             | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 8.980.933  | 70   | 128.299                         | Ya                              |
| 132 | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS             | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 5.409.005  | 1    | 5.409.005                       | Ya                              |
| 133 | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS             | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]                                     | 508.000.000   | 10.648.213 | 12   | 887.351                         | Ya                              |
| 134 | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA        | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/ Setingkat                                                              | 480.000.000   | 5.260.000  | 4    | 1.315.000                       | Ya                              |
| 135 | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA        | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 10.177.540 | 78   | 130.481                         | Ya                              |
| 136 | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA        | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 3.751.000  | 1    | 3.751.000                       | Ya                              |
| 137 | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA        | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]                                     | 508.000.000   | 7.670.000  | 12   | 639.166                         | Ya                              |
| 138 | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI      | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/ Setingkat                                                              | 480.000.000   | 1.880.000  | 4    | 470.000                         | Ya                              |
| 139 | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI      | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 8.915.475  | 55   | 162.099                         | Ya                              |
| 140 | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI      | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 4.701.000  | 1    | 4.701.000                       | Ya                              |



| No. | Satker                                                                   | RO                                                     | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                        | 3                                                      | 4            | 5                                                                                                         | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 141 | 239455 BALAI PEMBIKITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 11.270.000 | 12   | 939.166                         | Ya                              |
| 142 | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II / Setingkat                                                            | 480.000.000   | 3.427.000  | 4    | 856.750                         | Ya                              |
| 143 | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 10.841.650 | 50   | 216.833                         | Ya                              |
| 144 | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 7.124.000  | 1    | 7.124.000                       | Ya                              |
| 145 | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 12.679.326 | 12   | 1.056.610                       | Ya                              |
| 146 | 239520 BALAI VETERINER SUBANG                                            | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II / Setingkat                                                            | 480.000.000   | 0          | 4    | 0                               | Tidak                           |
| 147 | 239520 BALAI VETERINER SUBANG                                            | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 7.892.000  | 57   | 138.456                         | Ya                              |
| 148 | 239520 BALAI VETERINER SUBANG                                            | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 0          | 1    | 0                               | Tidak                           |
| 149 | 239520 BALAI VETERINER SUBANG                                            | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 0          | 12   | 0                               | Tidak                           |
| 150 | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI  | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II / Setingkat                                                            | 480.000.000   | 1.740.000  | 4    | 435.000                         | Ya                              |
| 151 | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI  | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 11.676.001 | 58   | 201.310                         | Ya                              |
| 152 | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI  | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 5.781.700  | 1    | 5.781.700                       | Ya                              |
| 153 | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI  | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 8.744.654  | 12   | 728.721                         | Ya                              |



| No. | Satker                                                        | RO                                                     | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                             | 3                                                      | 4            | 5                                                                                                         | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 154 | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                 | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 1.945.000  | 4    | 486.250                         | Ya                              |
| 155 | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                 | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 975.000    | 90   | 10.833                          | Ya                              |
| 156 | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                 | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 400.400    | 1    | 400.400                         | Ya                              |
| 157 | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                 | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]                                     | 508.000.000   | 19.561.194 | 12   | 1.630.099                       | Ya                              |
| 158 | 239551 BALAI VETERINER BANJARBARU                             | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 0          | 4    | 0                               | Tidak                           |
| 159 | 239551 BALAI VETERINER BANJARBARU                             | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 0          | 50   | 0                               | Tidak                           |
| 160 | 239551 BALAI VETERINER BANJARBARU                             | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 5.476.000  | 1    | 5.476.000                       | Ya                              |
| 161 | 239551 BALAI VETERINER BANJARBARU                             | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]                                     | 508.000.000   | 9.019.000  | 12   | 751.583                         | Ya                              |
| 162 | 249161 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR             | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 998.000    | 4    | 249.500                         | Ya                              |
| 163 | 249161 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR             | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]                                     | 508.000.000   | 66.053.000 | 12   | 5.504.416                       | Ya                              |
| 164 | 259100 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA         | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 3.500.000  | 4    | 875.000                         | Ya                              |
| 165 | 259100 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA         | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]                                     | 508.000.000   | 82.431.000 | 12   | 6.869.250                       | Ya                              |
| 166 | 269112 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                                                               | 480.000.000   | 5.681.400  | 4    | 1.420.350                       | Ya                              |
| 167 | 269112 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/                                                         | 508.000.000   | 29.668.000 | 12   | 2.472.333                       | Ya                              |



| No. | Satker                                                                                                    | RO                                                            | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                               | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                         | 3                                                             | 4            | 5                                                                                        | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
|     | PROVINSI<br>BENGKULU                                                                                      |                                                               |              | Setingkat<br>[Dokumen]                                                                   |               |            |      |                                 |                                 |
| 168 | 289106 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>MALUKU UTARA                                                     | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 950.000    | 4    | 237.500                         | Ya                              |
| 169 | 289106 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>MALUKU UTARA                                                     | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I /<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 75.437.000 | 12   | 6.286.416                       | Ya                              |
| 170 | 299383 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>BANTEN                                                           | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 3.830.000  | 4    | 957.500                         | Ya                              |
| 171 | 299383 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>BANTEN                                                           | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I /<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 46.009.000 | 12   | 3.834.083                       | Ya                              |
| 172 | 309166 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>KEPULAUAN<br>BANGKA<br>BELITUNG                                  | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 5.000.000  | 4    | 1.250.000                       | Ya                              |
| 173 | 309166 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>KEPULAUAN<br>BANGKA<br>BELITUNG                                  | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I /<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 46.282.000 | 12   | 3.856.833                       | Ya                              |
| 174 | 319091 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>GORONTALO                                                        | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 950.000    | 4    | 237.500                         | Ya                              |
| 175 | 319091 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>GORONTALO                                                        | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I /<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 52.332.000 | 12   | 4.361.000                       | Ya                              |
| 176 | 329080 DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN<br>PROVINSI<br>KEPULAUAN RIAU | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 866.000    | 4    | 216.500                         | Ya                              |
| 177 | 329080 DINAS<br>KETAHANAN<br>PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN<br>PROVINSI<br>KEPULAUAN RIAU | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I /<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 51.534.580 | 12   | 4.294.548                       | Ya                              |
| 178 | 339088 DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN<br>PROVINSI PAPUA<br>BARAT                           | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 1.300.000  | 0    | 0                               | Tidak                           |
| 179 | 339088 DINAS<br>PETERNAKAN<br>DAN KESEHATAN<br>HEWAN<br>PROVINSI PAPUA<br>BARAT                           | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen) | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I /<br>Setingkat<br>[Dokumen] | 508.000.000   | 92.892.000 | 0    | 0                               | Tidak                           |
| 180 | 340143 DINAS<br>PERTANIAN<br>PROVINSI<br>SULAWESI<br>BARAT                                                | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                      | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                     | 480.000.000   | 3.210.000  | 4    | 802.500                         | Ya                              |



| No. | Satker                                                                | RO                                                     | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                                                      | 4            | 5                                                                                                         | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 181 | 340143 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT                        | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 52.928.805 | 12   | 4.410.733                       | Ya                              |
| 182 | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                        | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II/Setingkat                                                              | 480.000.000   | 998.700    | 4    | 249.675                         | Ya                              |
| 183 | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                        | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 11.679.892 | 80   | 145.998                         | Ya                              |
| 184 | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                        | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 410.400    | 1    | 410.400                         | Ya                              |
| 185 | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                        | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 15.218.607 | 12   | 1.268.217                       | Ya                              |
| 186 | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN          | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II/Setingkat                                                              | 480.000.000   | 1.498.500  | 4    | 374.625                         | Ya                              |
| 187 | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN          | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang] | 5.700.000     | 3.764.350  | 63   | 59.751                          | Ya                              |
| 188 | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN          | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                                                                 | 240.000.000   | 3.725.000  | 1    | 3.725.000                       | Ya                              |
| 189 | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN          | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 4.714.960  | 12   | 392.913                         | Ya                              |
| 190 | 417659 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II/Setingkat                                                              | 480.000.000   | 7.811.423  | 4    | 1.952.855                       | Ya                              |
| 191 | 417659 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II / Setingkat [Dokumen]                                   | 508.000.000   | 36.502.000 | 12   | 3.041.833                       | Ya                              |
| 192 | 567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR        | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon II/Setingkat                                                              | 480.000.000   | 581.000    | 4    | 145.250                         | Ya                              |
| 193 | 567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR        | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU         | Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit                                               | 5.700.000     | 500.000    | 62   | 8.064                           | Ya                              |



| No. | Satker                                                                                           | RO                                                                 | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                                                                                           | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                | 3                                                                  | 4            | 5                                                                                                                                    | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
|     |                                                                                                  |                                                                    |              | Pelaksana<br>Teknis (UPT)<br>Kategori<br>Besar [Orang]                                                                               |               |            |      |                                 |                                 |
| 194 | 567275 BALAI<br>PENGUJIAN<br>MUTU DAN<br>SERTIFIKASI<br>PRODUK HEWAN<br>BOGOR                    | 1787.EBD.953<br>Layanan<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>(Dokumen) | SBKU         | Dokumen<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen]                                                                                   | 240.000.000   | 0          | 1    | 0                               | Tidak                           |
| 195 | 567275 BALAI<br>PENGUJIAN<br>MUTU DAN<br>SERTIFIKASI<br>PRODUK HEWAN<br>BOGOR                    | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)      | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                              | 508.000.000   | 1.361.000  | 12   | 113.416                         | Ya                              |
| 196 | 567282 BALAI<br>PENGUJIAN<br>MUTU DAN<br>SERTIFIKASI<br>PAKAN                                    | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                           | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                                                                 | 480.000.000   | 2.818.403  | 3    | 939.467                         | Ya                              |
| 197 | 567282 BALAI<br>PENGUJIAN<br>MUTU DAN<br>SERTIFIKASI<br>PAKAN                                    | 1787.EBC.954<br>Layanan<br>Manajemen<br>SDM (Layanan)              | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>SDM untuk<br>K/L dengan<br>satker<br>vertikal/Unit<br>Pelaksana<br>Teknis (UPT)<br>Kategori<br>Besar [Orang] | 5.700.000     | 4.957.125  | 43   | 115.281                         | Ya                              |
| 198 | 567282 BALAI<br>PENGUJIAN<br>MUTU DAN<br>SERTIFIKASI<br>PAKAN                                    | 1787.EBD.953<br>Layanan<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>(Dokumen) | SBKU         | Dokumen<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen]                                                                                   | 240.000.000   | 779.025    | 1    | 779.025                         | Ya                              |
| 199 | 567282 BALAI<br>PENGUJIAN<br>MUTU DAN<br>SERTIFIKASI<br>PAKAN                                    | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)      | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                              | 508.000.000   | 4.857.760  | 12   | 404.813                         | Ya                              |
| 200 | 618061 LOKA<br>VETERINER<br>JAYAPURA                                                             | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                           | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                                                                 | 480.000.000   | 948.390    | 1    | 948.390                         | Ya                              |
| 201 | 618061 LOKA<br>VETERINER<br>JAYAPURA                                                             | 1787.EBC.954<br>Layanan<br>Manajemen<br>SDM (Layanan)              | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>SDM untuk<br>K/L dengan<br>satker<br>vertikal/Unit<br>Pelaksana<br>Teknis (UPT)<br>Kategori<br>Besar [Orang] | 5.700.000     | 16.473.000 | 10   | 1.647.300                       | Ya                              |
| 202 | 618061 LOKA<br>VETERINER<br>JAYAPURA                                                             | 1787.EBD.953<br>Layanan<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>(Dokumen) | SBKU         | Dokumen<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>[Dokumen]                                                                                   | 240.000.000   | 12.029.000 | 1    | 12.029.000                      | Ya                              |
| 203 | 618061 LOKA<br>VETERINER<br>JAYAPURA                                                             | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)      | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                              | 508.000.000   | 30.844.060 | 12   | 2.570.338                       | Ya                              |
| 204 | 690840 DINAS<br>PERTANIAN,<br>PANGAN,<br>KELAUTAN, DAN<br>PERIKANAN<br>PROVINSI PAPUA<br>SELATAN | 1787.EBA.956<br>Layanan BMN<br>(Layanan)                           | SBKU         | Layanan BMN<br>untuk Satker<br>Eselon<br>I/Setingkat                                                                                 | 480.000.000   | 155.000    | 4    | 38.750                          | Ya                              |
| 205 | 690840 DINAS<br>PERTANIAN,<br>PANGAN,<br>KELAUTAN, DAN<br>PERIKANAN<br>PROVINSI PAPUA<br>SELATAN | 1787.EBD.955<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(Dokumen)      | SBKU         | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>untuk Satker<br>Eselon I/<br>Setingkat<br>[Dokumen]                                              | 508.000.000   | 74.213.000 | 12   | 6.184.416                       | Ya                              |



| No. | Satker                                                                            | RO                                                     | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                                             | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                 | 3                                                      | 4            | 5                                                                      | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 206 | 690841 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH     | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 500.000    | 4    | 125.000                         | Ya                              |
| 207 | 690841 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH     | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 71.642.000 | 12   | 5.970.166                       | Ya                              |
| 208 | 690842 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN            | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 0          | 0    | 0                               | Tidak                           |
| 209 | 690842 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN            | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 0          | 0    | 0                               | Tidak                           |
| 210 | 690843 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU         | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat                            | 480.000.000   | 0          | 4    | 0                               | Tidak                           |
| 211 | 690843 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU         | Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I / Setingkat [Dokumen] | 508.000.000   | 48.670.000 | 12   | 4.055.833                       | Ya                              |
| 212 | 129115 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG                      | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                              | 240.000.000   | 4.950.900  | 1    | 4.950.900                       | Ya                              |
| 213 | 099317 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU                         | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                              | 240.000.000   | 12.617.234 | 1    | 12.617.234                      | Ya                              |
| 214 | 039154 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH                  | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                              | 240.000.000   | 10.078.000 | 1    | 10.078.000                      | Ya                              |
| 215 | 059181 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR                                       | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                              | 240.000.000   | 6.546.980  | 1    | 6.546.980                       | Ya                              |
| 216 | 069135 DINAS PETERNAKAN ACEH                                                      | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                              | 240.000.000   | 15.297.000 | 1    | 15.297.000                      | Ya                              |
| 217 | 089133 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT               | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                              | 240.000.000   | 900.000    | 0    | 0                               | Tidak                           |
| 218 | 417659 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA             | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                              | 240.000.000   | 22.790.000 | 1    | 22.790.000                      | Ya                              |
| 219 | 029162 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT                  | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]                              | 240.000.000   | 6.877.000  | 1    | 6.877.000                       | Ya                              |





| No. | Satker                                                                               | RO                                                     | Jenis<br>SBK | Uraian SBK                                | Indeks<br>SBK | Realisasi  | RVRO | Indeks<br>Realisasi<br>Anggaran | Keterangan<br>Penggunaan<br>SBK |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                                                      | 4            | 5                                         | 6             | 7          | 8    | 9=7/8                           | 10                              |
| 220 | 329080 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 11.786.000 | 1    | 11.786.000                      | Ya                              |
| 221 | 340143 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT                                       | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 18.234.618 | 1    | 18.234.618                      | Ya                              |
| 222 | 239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT             | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 7.180.400  | 1    | 7.180.400                       | Ya                              |
| 223 | 309166 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                            | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 10.500.000 | 1    | 10.500.000                      | Ya                              |
| 224 | 199128 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN                | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 19.623.650 | 1    | 19.623.650                      | Ya                              |
| 225 | 119133 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN               | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 9.847.500  | 1    | 9.847.500                       | Ya                              |
| 226 | 299383 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN                                               | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 6.983.000  | 1    | 6.983.000                       | Ya                              |
| 227 | 319091 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO                                            | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 3.000.000  | 1    | 3.000.000                       | Ya                              |
| 228 | 269112 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU                        | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 11.752.050 | 1    | 11.752.050                      | Ya                              |
| 229 | 109121 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI              | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 19.836.000 | 1    | 19.836.000                      | Ya                              |
| 230 | 079127 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara                       | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU         | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen] | 240.000.000   | 12.802.580 | 1    | 12.802.580                      | Ya                              |



## b. Efisiensi SBK

| No. | Satker                                                                      | RO                                                                                                          | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO     | RVRO     | Realisasi     | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                           | 4         | 5           | 6        | 7        | 8             | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 1   | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 5891.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (NSPK) | SBKK      | 100.000.000 | 3        | 3        | 299.835.726   | 99.945.242                | 54.758      | 0                            | 0                          | 17,29             |
| 2   | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 5891.QDB.001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)   | SBKK      | 305.000.000 | 275      | 275      | 1.892.310.137 | 6.881.127                 | 298.118.873 | 98                           | 0                          |                   |
| 3   | 239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT    | 5891.QDB.001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)   | SBKK      | 305.000.000 | 1        | 1        | 10.150.000    | 10.150.000                | 294.850.000 | 97                           | 0                          |                   |
| 4   | 249161 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR                           | 5891.QDB.001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)   | SBKK      | 305.000.000 | 1        | 1        | 10.200.000    | 10.200.000                | 294.800.000 | 97                           | 0                          |                   |
| 5   | 319091 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO                                   | 5891.QDB.001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)   | SBKK      | 305.000.000 | 1        | 1        | 10.240.000    | 10.240.000                | 294.760.000 | 97                           | 0                          |                   |
| 6   | 220064 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI                             | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                                                                   | SBKK      | 5.340.407   | 350      | 350      | 1.647.721.529 | 4.707.775                 | 632.632     | 12                           | 12                         |                   |
| 7   | 237856 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)                                              | SBKK      | 606.482     | 2.495,00 | 2.495,00 | 730.774.138   | 292.895                   | 313.587     | 52                           | 0                          |                   |
| 8   | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (kegiatan)                                            | SBKU      | 240.000.000 | 5        | 5        | 1.118.297.439 | 223.659.487               | 16.340.513  | 7                            | 7                          |                   |
| 9   | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1783.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan (NSPK)                                            | SBKK      | 100.000.000 | 4        | 4        | 175.341.433   | 43.835.358                | 56.164.642  | 56                           | 0                          |                   |
| 10  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1784.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan (NSPK)                                  | SBKK      | 100.000.000 | 3        | 3        | 265.998.045   | 88.666.015                | 11.333.985  | 11                           | 11                         |                   |
| 11  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1785.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak (NSPK)                   | SBKK      | 100.000.000 | 5        | 5        | 334.457.717   | 66.891.543                | 33.108.457  | 33                           | 20                         |                   |
| 12  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1786.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat                                    | SBKK      | 100.000.000 | 5        | 5        | 469.044.878   | 93.808.975                | 6.191.025   | 6                            | 6                          |                   |



| No. | Satker                                                                          | RO                                                             | Jenis SBK | Indeks SBK | TVRO         | RVRO         | Realisasi      | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih   | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                               | 3                                                              | 4         | 5          | 6            | 7            | 8              | 9=8/7                     | 10=5-9    | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
|     |                                                                                 | Veteriner (NSPK)                                               |           |            |              |              |                |                           |           |                              |                            |                   |
| 13  | 238823 BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 5.340.407  | 1.980,00     | 1.980,00     | 9.530.024.432  | 4.813.143                 | 527.264   | 10                           | 10                         |                   |
| 14  | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                                             | 1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 7.178.929  | 800          | 805          | 5.735.653.904  | 7.125.035                 | 53.894    | 1                            | 1                          |                   |
| 15  | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                                             | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 5.340.407  | 80           | 82           | 272.229.329    | 3.319.869                 | 2.020.538 | 38                           | 0                          |                   |
| 16  | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG                                          | 1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 7.178.929  | 2.900.000,00 | 2.762.695,00 | 10.671.844.152 | 3.862                     | 7.175.067 | 100                          | 0                          |                   |
| 17  | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN                            | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482    | 2.475,00     | 2.475,00     | 837.743.310    | 338.482                   | 268.000   | 44                           | 0                          |                   |
| 18  | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                           | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482    | 4.120,00     | 4.120,00     | 1.056.047.231  | 256.322                   | 350.160   | 58                           | 0                          |                   |
| 19  | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                       | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 5.340.407  | 369          | 369          | 1.353.705.078  | 3.668.577                 | 1.671.830 | 31                           | 0                          |                   |
| 20  | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong   | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 5.340.407  | 352          | 352          | 1.016.843.717  | 2.888.760                 | 2.451.647 | 46                           | 0                          |                   |
| 21  | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS               | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 5.340.407  | 490          | 490          | 2.375.091.126  | 4.847.124                 | 493.283   | 9                            | 9                          |                   |
| 22  | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA          | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 5.340.407  | 785.162,00   | 465.278,00   | 7.332.441.577  | 15.759                    | 5.324.648 | 100                          | 0                          |                   |
| 23  | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI        | 1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 5.340.407  | 1.001.401,00 | 633.471,00   | 4.941.335.775  | 7.800                     | 5.332.607 | 100                          | 0                          |                   |
| 24  | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                                    | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482    | 2.505,00     | 2.505,00     | 695.898.395    | 277.803                   | 328.679   | 54                           | 0                          |                   |
| 25  | 239520 BALAI VETERINER SUBANG                                                   | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482    | 1.850,00     | 1.850,00     | 751.650.754    | 406.297                   | 200.185   | 33                           | 0                          |                   |
| 26  | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI         | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482    | 3.340,00     | 3.340,00     | 848.316.681    | 253.987                   | 352.495   | 58                           | 0                          |                   |
| 27  | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                                   | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482    | 7.140,00     | 7.140,00     | 1.323.889.062  | 185.418                   | 421.064   | 69                           | 0                          |                   |
| 28  | 239551 BALAI VETERINER BANJARBARU                                               | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482    | 1.740,00     | 1.740,00     | 779.646.299    | 448.072                   | 158.410   | 26                           | 0                          |                   |



| No. | Satker                                                              | RO                                                             | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO         | RVRO         | Realisasi      | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                                                              | 4         | 5           | 6            | 7            | 8              | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 29  | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                      | 1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul (produk)                      | SBKK      | 7.178.929   | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 23.856.351.797 | 6.816                     | 7.172.113   | 100                          | 0                          |                   |
| 30  | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN        | 1784.QJA.001 Hasil Uji Mutu Obat Hewan (Produk)                | SBKK      | 3.354.310   | 2.314,00     | 3.185,00     | 7.618.423.510  | 2.391.969                 | 962.341     | 29                           | 0                          |                   |
| 31  | 567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR      | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482     | 11.750,00    | 11.750,00    | 6.147.216.493  | 523.167                   | 83.315      | 14                           | 14                         |                   |
| 32  | 567282 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN                   | 1783.QJA.001 Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan (Produk)        | SBKK      | 1.569.718   | 3.887,00     | 3.887,00     | 5.387.075.480  | 1.385.921                 | 183.797     | 12                           | 12                         |                   |
| 33  | 618061 LOKA VETERINER JAYAPURA                                      | 1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk) | SBKK      | 606.482     | 500          | 500          | 280.819.256    | 561.638                   | 44.844      | 7                            | 7                          |                   |
| 34  | 019057 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA            | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)              | SBKU      | 508.000.000 | 12           | 3            | 39.240.000     | 13.080.000                | 494.920.000 | 97                           | 0                          |                   |
| 35  | 029162 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT    | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                             | SBKU      | 480.000.000 | 3            | 3            | 2.905.000      | 968.333                   | 479.031.667 | 100                          | 20                         |                   |
| 36  | 029162 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT    | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)              | SBKU      | 508.000.000 | 12           | 12           | 59.258.000     | 4.938.166                 | 503.061.834 | 99                           | 20                         |                   |
| 37  | 039154 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH    | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                             | SBKU      | 480.000.000 | 4            | 4            | 3.030.500      | 757.625                   | 479.242.375 | 100                          | 20                         |                   |
| 38  | 039154 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH    | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)              | SBKU      | 508.000.000 | 12           | 12           | 62.056.213     | 5.171.351                 | 502.828.649 | 99                           | 20                         |                   |
| 39  | 049090 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY                     | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                             | SBKU      | 480.000.000 | 4            | 4            | 5.704.000      | 1.426.000                 | 478.574.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 40  | 049090 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY                     | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)              | SBKU      | 508.000.000 | 12           | 12           | 67.319.032     | 5.609.919                 | 502.390.081 | 99                           | 20                         |                   |
| 41  | 059181 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR                         | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                             | SBKU      | 480.000.000 | 4            | 4            | 530.000        | 132.500                   | 479.867.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 42  | 059181 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR                         | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)              | SBKU      | 508.000.000 | 12           | 12           | 84.938.500     | 7.078.208                 | 500.921.792 | 99                           | 20                         |                   |
| 43  | 069135 DINAS PETERNAKAN ACEH                                        | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                             | SBKU      | 480.000.000 | 4            | 4            | 9.075.000      | 2.268.750                 | 477.731.250 | 100                          | 20                         |                   |
| 44  | 069135 DINAS PETERNAKAN ACEH                                        | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)              | SBKU      | 508.000.000 | 12           | 12           | 61.444.000     | 5.120.333                 | 502.879.667 | 99                           | 20                         |                   |
| 45  | 079127 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara      | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                             | SBKU      | 480.000.000 | 4            | 4            | 6.312.000      | 1.578.000                 | 478.422.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 46  | 079127 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara      | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)              | SBKU      | 508.000.000 | 12           | 12           | 48.261.000     | 4.021.750                 | 503.978.250 | 99                           | 20                         |                   |
| 47  | 089133 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                             | SBKU      | 480.000.000 | 4            | 4            | 12.736.000     | 3.184.000                 | 476.816.000 | 99                           | 20                         |                   |



| No. | Satker                                                                              | RO                                                | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                   | 3                                                 | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 48  | 089133 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT                 | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 64.827.500 | 5.402.291                 | 502.597.709 | 99                           | 20                         |                   |
| 49  | 099317 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU                           | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 2.566.000  | 641.500                   | 479.358.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 50  | 099317 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU                           | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 52.017.000 | 4.334.750                 | 503.665.250 | 99                           | 20                         |                   |
| 51  | 109121 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI             | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.622.000  | 1.405.500                 | 478.594.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 52  | 109121 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI             | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 43.152.800 | 3.596.066                 | 504.403.934 | 99                           | 20                         |                   |
| 53  | 119133 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN              | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.007.000  | 1.251.750                 | 478.748.250 | 100                          | 20                         |                   |
| 54  | 119133 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN              | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 45.332.000 | 3.777.666                 | 504.222.334 | 99                           | 20                         |                   |
| 55  | 129115 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG                        | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.773.900  | 1.443.475                 | 478.556.525 | 100                          | 20                         |                   |
| 56  | 129115 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG                        | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 62.736.000 | 5.228.000                 | 502.772.000 | 99                           | 20                         |                   |
| 57  | 139128 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT                    | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.213.000  | 1.303.250                 | 478.696.750 | 100                          | 20                         |                   |
| 58  | 139128 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT                    | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 68.479.000 | 5.706.583                 | 502.293.417 | 99                           | 20                         |                   |
| 59  | 149117 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 922.000    | 230.500                   | 479.769.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 60  | 149117 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 59.578.000 | 4.964.833                 | 503.035.167 | 99                           | 20                         |                   |
| 61  | 159110 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN                  | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 1.858.800  | 464.700                   | 479.535.300 | 100                          | 20                         |                   |
| 62  | 159110 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI                                     | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 17.394.000 | 1.449.500                 | 506.550.500 | 100                          | 20                         |                   |



| No. | Satker                                                                | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
|     | KALIMANTAN SELATAN                                                    |                                                        |           |             |      |      |            |                           |             |                              |                            |                   |
| 63  | 169115 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALTIM              | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 866.000    | 216.500                   | 479.783.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 64  | 169115 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALTIM              | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 72.407.500 | 6.033.958                 | 501.966.042 | 99                           | 20                         |                   |
| 65  | 179106 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA         | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 6.894.000  | 1.723.500                 | 478.276.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 66  | 179106 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA         | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 55.688.200 | 4.640.683                 | 503.359.317 | 99                           | 20                         |                   |
| 67  | 189134 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH       | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 8.038.000  | 2.009.500                 | 477.990.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 68  | 189134 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 59.213.000 | 4.934.416                 | 503.065.584 | 99                           | 20                         |                   |
| 69  | 199128 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 2.320.000  | 580.000                   | 479.420.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 70  | 199128 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 54.350.000 | 4.529.166                 | 503.470.834 | 99                           | 20                         |                   |
| 71  | 209110 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 2.230.000  | 557.500                   | 479.442.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 72  | 209110 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 67.377.850 | 5.614.820                 | 502.385.180 | 99                           | 20                         |                   |
| 73  | 219093 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU                                | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 950.000    | 237.500                   | 479.762.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 74  | 219093 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU                                | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 72.529.000 | 6.044.083                 | 501.955.917 | 99                           | 20                         |                   |
| 75  | 220064 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI                       | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 4.016.000  | 1.004.000                 | 478.996.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 76  | 220064 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI                       | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 52   | 52   | 7.540.000  | 145.000                   | 5.555.000   | 97                           | 20                         |                   |
| 77  | 220064 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI                       | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 6.080.500  | 6.080.500                 | 233.919.500 | 97                           | 20                         |                   |
| 78  | 220064 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI                       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 10.746.717 | 895.559                   | 507.104.441 | 100                          | 20                         |                   |



| No. | Satker                                                                      | RO                                                               | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi     | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|---------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                | 4         | 5           | 6    | 7    | 8             | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 79  | 229102 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI                   | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                               | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 1.849.205     | 462.301                   | 479.537.699 | 100                          | 20                         |                   |
| 80  | 229102 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI                   | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)                | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 64.712.672    | 5.392.722                 | 502.607.278 | 99                           | 20                         |                   |
| 81  | 237551 Pusat Veteriner Farma Surabaya                                       | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                               | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.064.900     | 1.266.225                 | 478.733.775 | 100                          | 20                         |                   |
| 82  | 237551 Pusat Veteriner Farma Surabaya                                       | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)                     | SBKU      | 5.700.000   | 92   | 92   | 8.525.300     | 92.666                    | 5.607.334   | 98                           | 20                         |                   |
| 83  | 237551 Pusat Veteriner Farma Surabaya                                       | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)           | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 500.000       | 500.000                   | 239.500.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 84  | 237551 Pusat Veteriner Farma Surabaya                                       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)                | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 10.555.666    | 879.638                   | 507.120.362 | 100                          | 20                         |                   |
| 85  | 237856 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                               | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 4.495.981     | 1.123.995                 | 478.876.005 | 100                          | 20                         |                   |
| 86  | 237856 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)                     | SBKU      | 5.700.000   | 57   | 57   | 5.626.120     | 98.703                    | 5.601.297   | 98                           | 20                         |                   |
| 87  | 237856 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)           | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 3.121.600     | 3.121.600                 | 236.878.400 | 99                           | 20                         |                   |
| 88  | 237856 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)                | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 9.049.251     | 754.104                   | 507.245.896 | 100                          | 20                         |                   |
| 89  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                               | SBKU      | 480.000.000 | 1    | 1    | 5.145.900     | 5.145.900                 | 474.854.100 | 99                           | 20                         |                   |
| 90  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1787.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan) | SBKU      | 458.000.000 | 1    | 1    | 87.505.753    | 87.505.753                | 370.494.247 | 81                           | 20                         |                   |
| 91  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1787.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum (Layanan)                     | SBKU      | 27.500.000  | 6    | 6    | 148.517.181   | 24.752.863                | 2.747.137   | 10                           | 10                         |                   |
| 92  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)                     | SBKU      | 5.700.000   | 379  | 379  | 795.862.776   | 2.099.901                 | 3.600.099   | 63                           | 20                         |                   |
| 93  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1787.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)      | SBKU      | 810.400.000 | 13   | 13   | 3.201.670.846 | 246.282.372               | 564.117.628 | 70                           | 20                         |                   |
| 94  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)           | SBKU      | 240.000.000 | 7    | 7    | 796.506.622   | 113.786.660               | 126.213.340 | 53                           | 20                         |                   |





| No. | Satker                                                                          | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi   | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                               | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8           | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 95  | 238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 6    | 6    | 707.537.133 | 117.922.855               | 390.077.145 | 77                           | 20                         |                   |
| 96  | 238823 BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.086.100   | 1.271.525                 | 478.728.475 | 100                          | 20                         |                   |
| 97  | 238823 BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 107  | 107  | 8.030.000   | 75.046                    | 5.624.954   | 99                           | 20                         |                   |
| 98  | 238823 BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 5.614.000   | 5.614.000                 | 234.386.000 | 98                           | 20                         |                   |
| 99  | 238823 BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 7.982.100   | 665.175                   | 507.334.825 | 100                          | 20                         |                   |
| 100 | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                                             | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 3.387.500   | 846.875                   | 479.153.125 | 100                          | 20                         |                   |
| 101 | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                                             | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 56   | 56   | 6.098.000   | 108.892                   | 5.591.108   | 98                           | 20                         |                   |
| 102 | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                                             | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 3.639.000   | 3.639.000                 | 236.361.000 | 98                           | 20                         |                   |
| 103 | 238996 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG                                             | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 6.180.500   | 515.041                   | 507.484.959 | 100                          | 20                         |                   |
| 104 | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG                                          | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 2.956.500   | 739.125                   | 479.260.875 | 100                          | 20                         |                   |
| 105 | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG                                          | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 67   | 67   | 4.242.000   | 63.313                    | 5.636.687   | 99                           | 20                         |                   |
| 106 | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG                                          | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 4.817.000   | 4.817.000                 | 235.183.000 | 98                           | 20                         |                   |
| 107 | 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG                                          | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 5.247.476   | 437.289                   | 507.562.711 | 100                          | 20                         |                   |
| 108 | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN                            | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 4.104.708   | 1.026.177                 | 478.973.823 | 100                          | 20                         |                   |
| 109 | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN                            | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 75   | 75   | 9.410.062   | 125.467                   | 5.574.533   | 98                           | 20                         |                   |
| 110 | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN                            | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 500.000     | 500.000                   | 239.500.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 111 | 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN                            | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 10.757.000  | 896.416                   | 507.103.584 | 100                          | 20                         |                   |



| No. | Satker                                                                        | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                             | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 112 | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                         | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 891.400    | 222.850                   | 479.777.150 | 100                          | 20                         |                   |
| 113 | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                         | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 51   | 51   | 10.813.100 | 212.021                   | 5.487.979   | 96                           | 20                         |                   |
| 114 | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                         | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 10.666.500 | 10.666.500                | 229.333.500 | 96                           | 20                         |                   |
| 115 | 239022 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR                                         | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 15.616.576 | 1.301.381                 | 506.698.619 | 100                          | 20                         |                   |
| 116 | 239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT      | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 1.945.000  | 486.250                   | 479.513.750 | 100                          | 20                         |                   |
| 117 | 239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT      | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 66.295.800 | 5.524.650                 | 502.475.350 | 99                           | 20                         |                   |
| 118 | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                     | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 9.003.800  | 2.250.950                 | 477.749.050 | 100                          | 20                         |                   |
| 119 | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                     | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 53   | 53   | 9.235.600  | 174.256                   | 5.525.744   | 97                           | 20                         |                   |
| 120 | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                     | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 7.284.701  | 7.284.701                 | 232.715.299 | 97                           | 20                         |                   |
| 121 | 239413 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI                     | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 10.639.308 | 886.609                   | 507.113.391 | 100                          | 20                         |                   |
| 122 | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 8.391.298  | 2.097.824                 | 477.902.176 | 100                          | 20                         |                   |
| 123 | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 68   | 68   | 9.778.350  | 143.799                   | 5.556.201   | 97                           | 20                         |                   |
| 124 | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 7.085.000  | 7.085.000                 | 232.915.000 | 97                           | 20                         |                   |
| 125 | 239420 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 11.508.700 | 959.058                   | 507.040.942 | 100                          | 20                         |                   |
| 126 | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS             | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 4.830.000  | 1.207.500                 | 478.792.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 127 | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS             | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 70   | 70   | 8.980.933  | 128.299                   | 5.571.701   | 98                           | 20                         |                   |



| No. | Satker                                                                   | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                        | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 128 | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS        | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 5.409.005  | 5.409.005                 | 234.590.995 | 98                           | 20                         |                   |
| 129 | 239434 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS        | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 10.648.213 | 887.351                   | 507.112.649 | 100                          | 20                         |                   |
| 130 | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA   | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.260.000  | 1.315.000                 | 478.685.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 131 | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA   | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 78   | 78   | 10.177.540 | 130.481                   | 5.569.519   | 98                           | 20                         |                   |
| 132 | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA   | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 3.751.000  | 3.751.000                 | 236.249.000 | 98                           | 20                         |                   |
| 133 | 239441 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA   | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 7.670.000  | 639.166                   | 507.360.834 | 100                          | 20                         |                   |
| 134 | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 1.880.000  | 470.000                   | 479.530.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 135 | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 55   | 55   | 8.915.475  | 162.099                   | 5.537.901   | 97                           | 20                         |                   |
| 136 | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 4.701.000  | 4.701.000                 | 235.299.000 | 98                           | 20                         |                   |
| 137 | 239455 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 11.270.000 | 939.166                   | 507.060.834 | 100                          | 20                         |                   |
| 138 | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 3.427.000  | 856.750                   | 479.143.250 | 100                          | 20                         |                   |
| 139 | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 50   | 50   | 10.841.650 | 216.833                   | 5.483.167   | 96                           | 20                         |                   |
| 140 | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 7.124.000  | 7.124.000                 | 232.876.000 | 97                           | 20                         |                   |
| 141 | 239519 BALAI VETERINER MEDAN                                             | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 12.679.326 | 1.056.610                 | 506.943.390 | 100                          | 20                         |                   |
| 142 | 239520 BALAI VETERINER SUBANG                                            | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 57   | 57   | 7.892.000  | 138.456                   | 5.561.544   | 98                           | 20                         |                   |
| 143 | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI  | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 1.740.000  | 435.000                   | 479.565.000 | 100                          | 20                         |                   |



## Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

| No. | Satker                                                                  | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                       | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 144 | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 58   | 58   | 11.676.001 | 201.310                   | 5.498.690   | 96                           | 20                         |                   |
| 145 | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 5.781.700  | 5.781.700                 | 234.218.300 | 98                           | 20                         |                   |
| 146 | 239523 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 8.744.654  | 728.721                   | 507.271.279 | 100                          | 20                         |                   |
| 147 | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                           | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 1.945.000  | 486.250                   | 479.513.750 | 100                          | 20                         |                   |
| 148 | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                           | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 90   | 90   | 975.000    | 10.833                    | 5.689.167   | 100                          | 20                         |                   |
| 149 | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                           | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 400.400    | 400.400                   | 239.599.600 | 100                          | 20                         |                   |
| 150 | 239544 BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA                           | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 19.561.194 | 1.630.099                 | 506.369.901 | 100                          | 20                         |                   |
| 151 | 239551 BALAI VETERINER BANJARBARU                                       | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 5.476.000  | 5.476.000                 | 234.524.000 | 98                           | 20                         |                   |
| 152 | 239551 BALAI VETERINER BANJARBARU                                       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 9.019.000  | 751.583                   | 507.248.417 | 100                          | 20                         |                   |
| 153 | 249161 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR                       | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 998.000    | 249.500                   | 479.750.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 154 | 249161 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR                       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 66.053.000 | 5.504.416                 | 502.495.584 | 99                           | 20                         |                   |
| 155 | 259100 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA                   | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 3.500.000  | 875.000                   | 479.125.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 156 | 259100 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA                   | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 82.431.000 | 6.869.250                 | 501.130.750 | 99                           | 20                         |                   |
| 157 | 269112 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU           | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.681.400  | 1.420.350                 | 478.579.650 | 100                          | 20                         |                   |
| 158 | 269112 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU           | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 29.668.000 | 2.472.333                 | 505.527.667 | 100                          | 20                         |                   |
| 159 | 289106 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA                            | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 950.000    | 237.500                   | 479.762.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 160 | 289106 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA                            | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 75.437.000 | 6.286.416                 | 501.713.584 | 99                           | 20                         |                   |
| 161 | 299383 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN                                  | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 3.830.000  | 957.500                   | 479.042.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 162 | 299383 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN                                  | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 46.009.000 | 3.834.083                 | 504.165.917 | 99                           | 20                         |                   |



| No. | Satker                                                                               | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 163 | 309166 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                            | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 5.000.000  | 1.250.000                 | 478.750.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 164 | 309166 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                            | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 46.282.000 | 3.856.833                 | 504.143.167 | 99                           | 20                         |                   |
| 165 | 319091 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO                                            | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 950.000    | 237.500                   | 479.762.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 166 | 319091 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO                                            | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 52.332.000 | 4.361.000                 | 503.639.000 | 99                           | 20                         |                   |
| 167 | 329080 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 866.000    | 216.500                   | 479.783.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 168 | 329080 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 51.534.580 | 4.294.548                 | 503.705.452 | 99                           | 20                         |                   |
| 169 | 340143 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT                                       | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 3.210.000  | 802.500                   | 479.197.500 | 100                          | 20                         |                   |
| 170 | 340143 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT                                       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 52.928.805 | 4.410.733                 | 503.589.267 | 99                           | 20                         |                   |
| 171 | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                                       | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 998.700    | 249.675                   | 479.750.325 | 100                          | 20                         |                   |
| 172 | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                                       | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 80   | 80   | 11.679.892 | 145.998                   | 5.554.002   | 97                           | 20                         |                   |
| 173 | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                                       | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 410.400    | 410.400                   | 239.589.600 | 100                          | 20                         |                   |
| 174 | 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI                                       | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 15.218.607 | 1.268.217                 | 506.731.783 | 100                          | 20                         |                   |
| 175 | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN                         | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 1.498.500  | 374.625                   | 479.625.375 | 100                          | 20                         |                   |
| 176 | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN                         | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 63   | 63   | 3.764.350  | 59.751                    | 5.640.249   | 99                           | 20                         |                   |
| 177 | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN                         | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 3.725.000  | 3.725.000                 | 236.275.000 | 98                           | 20                         |                   |
| 178 | 411962 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN                         | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 4.714.960  | 392.913                   | 507.607.087 | 100                          | 20                         |                   |
| 179 | 417659 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA                | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 7.811.423  | 1.952.855                 | 478.047.145 | 100                          | 20                         |                   |



| No. | Satker                                                                            | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                 | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 180 | 417659 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA             | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 36.502.000 | 3.041.833                 | 504.958.167 | 99                           | 20                         |                   |
| 181 | 567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR                    | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 581.000    | 145.250                   | 479.854.750 | 100                          | 20                         |                   |
| 182 | 567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR                    | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 62   | 62   | 500.000    | 8.064                     | 5.691.936   | 100                          | 20                         |                   |
| 183 | 567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR                    | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 1.361.000  | 113.416                   | 507.886.584 | 100                          | 20                         |                   |
| 184 | 567282 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN                                 | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 3    | 3    | 2.818.403  | 939.467                   | 479.060.533 | 100                          | 20                         |                   |
| 185 | 567282 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN                                 | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 43   | 43   | 4.957.125  | 115.281                   | 5.584.719   | 98                           | 20                         |                   |
| 186 | 567282 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN                                 | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 779.025    | 779.025                   | 239.220.975 | 100                          | 20                         |                   |
| 187 | 567282 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN                                 | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 4.857.760  | 404.813                   | 507.595.187 | 100                          | 20                         |                   |
| 188 | 618061 LOKA VETERINER JAYAPURA                                                    | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 1    | 1    | 948.390    | 948.390                   | 479.051.610 | 100                          | 20                         |                   |
| 189 | 618061 LOKA VETERINER JAYAPURA                                                    | 1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)           | SBKU      | 5.700.000   | 10   | 10   | 16.473.000 | 1.647.300                 | 4.052.700   | 71                           | 20                         |                   |
| 190 | 618061 LOKA VETERINER JAYAPURA                                                    | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 12.029.000 | 12.029.000                | 227.971.000 | 95                           | 20                         |                   |
| 191 | 618061 LOKA VETERINER JAYAPURA                                                    | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 30.844.060 | 2.570.338                 | 505.429.662 | 99                           | 20                         |                   |
| 192 | 690840 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN    | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 155.000    | 38.750                    | 479.961.250 | 100                          | 20                         |                   |
| 193 | 690840 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN    | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 74.213.000 | 6.184.416                 | 501.815.584 | 99                           | 20                         |                   |
| 194 | 690841 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH     | 1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)                     | SBKU      | 480.000.000 | 4    | 4    | 500.000    | 125.000                   | 479.875.000 | 100                          | 20                         |                   |
| 195 | 690841 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH     | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 71.642.000 | 5.970.166                 | 502.029.834 | 99                           | 20                         |                   |
| 196 | 690843 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | 1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)      | SBKU      | 508.000.000 | 12   | 12   | 48.670.000 | 4.055.833                 | 503.944.167 | 99                           | 20                         |                   |



| No. | Satker                                                                               | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 197 | 129115 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG                         | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 4.950.900  | 4.950.900                 | 235.049.100 | 98                           | 20                         |                   |
| 198 | 099317 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU                            | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 12.617.234 | 12.617.234                | 227.382.766 | 95                           | 20                         |                   |
| 199 | 039154 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH                     | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 10.078.000 | 10.078.000                | 229.922.000 | 96                           | 20                         |                   |
| 200 | 059181 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR                                          | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 6.546.980  | 6.546.980                 | 233.453.020 | 97                           | 20                         |                   |
| 201 | 069135 DINAS PETERNAKAN ACEH                                                         | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 15.297.000 | 15.297.000                | 224.703.000 | 94                           | 20                         |                   |
| 202 | 417659 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA                | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 22.790.000 | 22.790.000                | 217.210.000 | 91                           | 20                         |                   |
| 203 | 029162 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT                     | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 6.877.000  | 6.877.000                 | 233.123.000 | 97                           | 20                         |                   |
| 204 | 329080 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 11.786.000 | 11.786.000                | 228.214.000 | 95                           | 20                         |                   |
| 205 | 340143 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT                                       | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 18.234.618 | 18.234.618                | 221.765.382 | 92                           | 20                         |                   |
| 206 | 239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT             | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 7.180.400  | 7.180.400                 | 232.819.600 | 97                           | 20                         |                   |
| 207 | 309166 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                            | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 10.500.000 | 10.500.000                | 229.500.000 | 96                           | 20                         |                   |
| 208 | 199128 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN                | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 19.623.650 | 19.623.650                | 220.376.350 | 92                           | 20                         |                   |
| 209 | 119133 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN               | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 9.847.500  | 9.847.500                 | 230.152.500 | 96                           | 20                         |                   |
| 210 | 299383 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN                                               | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 6.983.000  | 6.983.000                 | 233.017.000 | 97                           | 20                         |                   |
| 211 | 319091 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO                                            | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 3.000.000  | 3.000.000                 | 237.000.000 | 99                           | 20                         |                   |
| 212 | 269112 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU                        | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 11.752.050 | 11.752.050                | 228.247.950 | 95                           | 20                         |                   |





| No. | Satker                                                                  | RO                                                     | Jenis SBK | Indeks SBK  | TVRO | RVRO | Realisasi  | Indeks Realisasi Anggaran | Selisih     | Tingkat Efisiensi Per RO (%) | Nilai Efisiensi Per RO (%) | Efisiensi SBK (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                       | 3                                                      | 4         | 5           | 6    | 7    | 8          | 9=8/7                     | 10=5-9      | 11=9/5                       | 12                         | 13                |
| 213 | 109121 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 19.836.000 | 19.836.000                | 220.164.000 | 92                           | 20                         |                   |
| 214 | 079127 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara          | 1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | SBKU      | 240.000.000 | 1    | 1    | 12.802.580 | 12.802.580                | 227.197.420 | 95                           | 20                         |                   |



## Lampiran 13 Rincian Norma Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Ditjen PKH Tahun 2025

### A. NSPK Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, berupa:
  - a) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Ayam Murung Panggang dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Domba Rote dari Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
  - c) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Kambing Pote Bangkalan dari Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
  - d) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Itik Pengging Sololan dari Jawa Tengah;
  - e) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Lingnan Maron dari Provinsi Jawa Tengah;
  - f) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Kapas Sembawa dari BPTU-HPT Sembawa;
  - g) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Golden Sembawa dari BPTU-HPT Sembawa;
  - h) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Alope Unhas 1 dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin;
  - i) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Rumpun sapi Gama dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada;
  - j) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Kambing British Alpine;
  - k) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Kambing Toggenburg;
  - l) Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Kambing Anglo Nubian;
  - m) Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Dari Sumber Daya Genetik Hewan.
2. Bidang Pengawasan, Penerapan Mutu dan Tata Kelola Perbibitan dan Produksi Ternak, berupa:
  - a) RSNI FS Petelur;
  - b) RSNI Pelayanan IB pada Sapi;
  - c) RSNI Sapi Pasundan.
3. Bidang Ruminansia Perah, berupa: Draft Permentan GBP/GFP Sapi Perah
4. Bidang Ruminansia Potong, berupa: Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Perkawinan Ternak
5. Bidang Unggas dan Aneka Ternak, berupa:
  - a) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan



Kesehatan Hewan Nomor 1385/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025;

- b) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025.

#### **B. NSPK Direktorat Pakan**

1. Penyusunan *Regulatory Impact Assesment* (RIA) usulan impor komoditas gandum menjadi Komoditas Larangan Terbatas (Lartas).
2. Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak dan Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak).
3. Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Cara Pemberian Pakan yang Baik pada Sapi Potong Sistem Pemeliharaan Intensif.
4. Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Cara Pembuatan Pakan yang Baik dan Pendaftaran Pakan).

#### **C. NSPK Direktorat Kesehatan Hewan**

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
2. Keputusan Direktur Jenderal tentang Pelarangan dan Pembatasan Penggunaan Antimikroba.
3. Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).

#### **D. NSPK Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner**

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9996/KPTS/HK.160/F/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Audit dan Surveilans Nomor Kontrol Veteriner.
3. Standar Operasi Prosedur Penanganan Bahan Baku Pangan Asal Hewan Makan Bergizi Gratis.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan.
5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis dan Kriteria Hewan Potong serta Persyaratan Cara yang Baik dan Pengawasan di Rumah Potong Hewan.



#### **E. NSPK Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan**

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
  - a. Persyaratan perizinan ditetapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko usaha, dan besaran skala usaha yang mencakup: 1) Rencana usaha (lokasi, jenis komoditas, dan galur); 2) Kesanggupan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) Jika galur yang akan dikembangkan baru perlu mendapatkan rekomendasi dari komisi bibit.
  - b. Adapun alur perizinan berusaha disederhanakan melalui mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terintegrasi secara elektronik, dimulai dari pendaftaran dan pengisian data usaha oleh pelaku usaha, penetapan tingkat risiko usaha secara otomatis oleh sistem, pemenuhan persyaratan dan komitmen sesuai klasifikasi risiko, proses verifikasi dan pengawasan oleh instansi berwenang, hingga penerbitan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengaturan tersebut, Permentan Nomor 34 Tahun 2025 diharapkan mampu meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, sekaligus menjamin efektivitas pengawasan dan keberlanjutan usaha peternakan
2. Petunjuk Teknis Pendampingan Penerapan dan Pengawasan Mutu telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 12358/KPTS/PK.030/F/11/2025.
3. Petunjuk Teknis tentang Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10985/KPTS/PP.040/F/10/2025.



## Lampiran 14 Manual IKU Ditjen PKH Tahun 2025-2029



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011  
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : [ditjen.pkh@pertanian.go.id](mailto:ditjen.pkh@pertanian.go.id) Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 13733/Kpts/HK.160/F/12/2025  
TENTANG  
MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13718/KPTS/HK.160/F/12/2025 telah ditetapkan Rencana Strategi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, perlu menyusun Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 sebagai petunjuk teknis dalam pengukuran kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Manual Pengukuran Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



## Lampiran 15 Surat Keputusan Dirjen PKH tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 5369/KPTS/HK.160/F/05/2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN NOMOR 741/KPTS/OT.050/F/01/2025 TENTANG  
TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN  
PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 741/KPTS/OT.050/F/01/2025 telah ditetapkan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan nomenklatur dan alih fungsi tugas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksud; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 741/KPTS/OT.050/F/01/2025 tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
Jl. Harsono RM No.3 Gedung C 6-9 , Ragunan, Jakarta, 12550  
<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>